PEMERINTAH
KABUPATEN SERANG

RPJMD

Kabupaten Serang

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SERANG

TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Bersyukur pada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan pada kita semua untuk dapat bersama sama memberikan kontribusi terbaik, sehingga RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dapat tersusun dengan baik. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam Pasal 47 disebutkan bahwa RPJMD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat; (a) pendahuluan; (b) gambaran umum kondisi Daerah; (c) gambaran keuangan Daerah; (d) permasalahan dan isu srategis Daerah; (e) visi, misi, tujuan dan sasaran; (f) strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah; (g) kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; (h) kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan (i) penutup.

Kemudian RPJMD Kabupaten Serang yang telah disusun meliputi dari 9 bab. Dengan penjelasan singkat sebagai berikut :

1. Bab 1 Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan.
2. Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah menguraikan mengenai aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
3. Bab 3 Gambaran Keuangan Daerah menguraikan mengenai kinerja keuangan masa lalu (2016-2020), analisis keuangan daerah (2016-2020), dan proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Kemudian,
4. Bab 4 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah menguraikan mengenai permasalahan pembangunan daerah dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan.
5. Bab 5 VISI, Misi, Tujuan dan Sasaran berisi tentang Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih beserta penjabarannya ke dalam tujuan dan sasaran RPJMD.

6. Bab 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah menampilkan matriks strategi dan arah kebijakan pembangunan, serta program prioritas pembangunan daerah.
7. Bab 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah merupakan kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2021-2026 dan indikasi program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan Kabupaten Serang.
8. Bab 8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah penjabaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Terakhir,
9. Bab 9 Penutup.

Kami mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak, terutama kepada Ibu Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE, M.Ak. selaku Bupati terpilih periode 2021-2026 dan Bapak Drs. H. Pandji Tirtayasa, M.Si. selaku Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026, yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026. Semoga kepercayaan yang diberikan dan kerja sama yang sangat baik selama proses penyusunan RPJMD ini dapat tercermin dari semakin lengkapnya dokumen RPJMD ini.

Demikian dokumen RPJMD Kabupaten Serang ini disusun dengan harapan akan menjadi acuan penyusun RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Serang dalam menyusun rencana kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2021-2026 yang nantinya akan diselaraskan sesuai dengan kebijakan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

BUPATI SERANG,

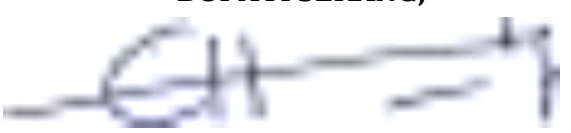

Hj. RATU TATU CHASANAH, SE, M.Ak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR xvii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-6
1.3.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 ..... I-8
1.3.2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 ..... I-8
1.3.3 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 ..... I-10
1.3.4 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Serang 2013-2033 ..... I-11
1.3.5 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Serang 2021-2026 ..... I-12
1.3.6 Ketertarikan Visi & Misi RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan Skala Prioritas Provinsi Banten dan RPJMN 2020-2024 ..... I-15
1.3.7 Keterkaitan Visi & Misi RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten I-18
1.4 Maksud dan Tujuan I-22
1.4.1 Maksud I-22
1.4.2 Tujuan I-22
1.5 Sistematika Penulisan I-22
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah II-1

2.1.1.1 Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah Administrasi II-1
2.1.1.2 Kondisi Topografi II-3
2.1.1.3 Kondisi Hidrologi II-4
2.1.1.4 Kondisi Klimatologi II-6
2.1.1.5 Kondisi Penggunaan Lahan II-9
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah II-10
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana II-12
2.1.4 Posisi Strategis Kabupaten Serang di Wilayah Provinsi Banten II-18
2.1.4.1 Posisi Strategis Kabupaten Serang II-18
2.1.4.2 Arah Pengembangan Kabupaten Serang II-21
2.1.5 Aspek Demografi II-23
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-30
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-30
2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi II-30
2.2.1.2 Struktur Ekonomi II-36
2.2.1.3 Inflasi II-39
2.2.1.4 PDRB Per Kapita II-42
2.2.1.5 Indeks Gini II-44
2.2.1.6 Persentase Penduduk Miskin II-45
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial II-49
2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia II-49
2.2.2.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah II-52
2.2.2.3 Angka Harapan Lama Sekolah II-54
2.2.2.4 Angka Usia Harapan Hidup II-56
2.2.2.5 Persentase Balita Gizi Buruk II-58
2.2.2.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja II-59
2.2.2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka II-64
2.2.2.8 Rasio Penduduk yang Bekerja II-67
2.2.2.9 Indeks Kepuasan Masyarakat dan Opini BPK II-68
2.2.2.10 Persentase PAD terhadap Pendapatan II-69
2.2.2.11 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) II-72
2.2.2.12 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif II-73
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga II-76

2.3 Aspek Pelayanan Umum II-78
2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar II-78
2.3.1.1 Pendidikan II-78
2.3.1.2 Kesehatan II-88
2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-98
2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman II-101
2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat II-104
2.3.1.6 Sosial II-106
2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar II-107
2.3.2.1 Tenaga Kerja II-107
2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Pellindungan Anak II-108
2.3.2.3 Pangan II-109
2.3.2.4 Lingkungan Hidup II-111
2.3.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-113
2.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-113
2.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-114
2.3.2.8 Perhubungan II-116
2.3.2.9 Komunikasi dan Informatika II-117
2.3.2.10 Statistik II-118
2.3.2.11 Penanaman Modal II-118
2.3.2.12 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah II-122
2.3.2.13 Transmigrasi II-122
2.3.2.14 Kepemudaan dan Olahraga II-123
2.3.2.15 Persandian II-124
2.3.2.16 Kebudayaan II-125
2.3.2.17 Perpustakaan II-126
2.3.2.18 Kearsipan II-127
2.3.3 Urusan Pelayanan Pilihan II-128
2.3.3.1 Perikanan II-128
2.3.3.2 Pariwisata II-132
2.3.3.3 Pertanian II-134
2.3.3.4 Kehutanan II-139
2.3.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral II-140

2.3.3.6 Perdagangan II-143
2.3.3.7 Perindustrian II-148
2.3.4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang II-150
2.3.4.1 Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan II-150
2.3.4.2 Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan II-152
2.3.4.3 Fungsi Penunjang Penelitian dan Pembangunan II-156
2.3.4.4 Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan II-157
2.3.4.5 Fungsi Penunjang Keuangan II-159
2.3.4.6 Fungsi Penunjang Pengawasan II-160
2.4 Aspek Daya Saing Daerah II-161
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-161
2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita II-161
2.4.1.2 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan II-165
2.4.1.3 Nilai Tukar Petani II-166
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur II-168
2.4.2.1 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan II-168
2.4.2.2 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum II-173
2.4.2.3 Luas Wilayah Bencana dan Kebanjiran II-173
2.4.2.4 Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran II-174
2.4.2.5 Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel II-175
2.4.2.6 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih II-175
2.4.2.7 Rasio Ketersediaan Daya Listrik II-177
2.4.2.8 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik II-178
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi II-178
2.4.3.1 Angka Kriminalitas II-179
2.4.3.2 Lama Proses Perizinan II-182
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia II-182
2.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja II-183
2.4.4.2 Rasio Ketergantungan II-183
2.4.5 Penguatan Sistem Inovasi Daerah II-184
2.5 Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2020 ..... II-190
2.5.1 Hasil Evaluasi RPJMD Tahun 2021 ..... II-190

2.5.2 Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020 ..... II-199
2.5.2.1 SPM Bidang Urusan Pendidikan II-200
2.5.2.2 SPM Bidang Urusan Kesehatan II-200
2.5.2.3 SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum II-202
2.5.2.4 SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat II-203
2.5.2.5 SPM Bidang Urusan Trantibum Linmas II-203
2.5.2.6 SPM Bidang Urusan Sosial II-204
2.5.3 Hasil Evaluasi Sustainable Development Goals (SDG's) Tahun 2020 ..... II-208
BAB III KONDISI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN III-1
3.1 Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2016-2020 ..... III-2
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016-2020 ..... III-2
3.1.1.1 Pendapatan Daerah III-4
3.1.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah III-7
3.1.1.3 Belanja Daerah III-8
3.1.1.4 Target dan Realisasi Belanja III-11
3.1.1.5 Pembiayaan Daerah III-13
3.1.2 Neraca Daerah III-15
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-23
3.2.1 Proporsi Penggunaan Dana III-23
3.2.2 Analisis Pembiayaan III-24
3.2.2.1 Ruang Fiskal Daerah III-26
3.2.2.2 Kapasitas Fiskal Daerah III-29
3.2.2.3 Kemampuan Mendanai Belanja Daerah III-30
3.3 Kerangka Pendanaan III-32
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah III-32
3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan Daerah Tahun 2021-2026 ..... III-36
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah IV-1
4.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah IV-23
4.3 Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah IV-65
4.3.1 Isu Strategis Global/Internasional IV-65
4.3.2 Isu Strategis Nasional IV-80
4.3.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ..... IV-80

4.3.2.2 Penanganan Pandemi COVID-19 ..... IV-83
4.3.3 Isu Strategis Provinsi Banten IV-86
4.3.4 Penelaahan RPJPD Kabupaten Serang 2005-2025 ..... IV-90
4.3.5 Penelaahan KLHS RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026 ..... IV-90
4.3.6 Penentuan Isu Strategis IV-94
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN V-1
5.1 VISI V-1
5.2 MISI V-2
5.3 Tujuan dan Sasaran V-4
5.3.1 Misi 1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat V-5
5.3.2 Misi 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang professional V-7
5.3.3 Misi 3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas V-9
5.3.4 Misi 4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan V-12
5.3.5 Misi 5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional V-16
5.3.6 Misi 6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara V-19
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-1
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VIII-1
BAB IX PENUTUP IX-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Euforia pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di tengah pandemi telah selesai dan menghasilkan keputusan tetap tentang kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di 270 wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah Kabupaten Serang, yang secara resmi telah menetapkan pasangan 'Tatu-Pandji' sebagai pemenang Pilkada dengan perolehan suara sah sebanyak 429.054 suara[1].

"Terwujudnya Kabupaten Serang yang semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis", demikian visi yang diusung oleh pasangan Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE., M.Ak. dan Drs. H. Pandji Tirtayasa, M.Si. Visi ini kemudian dijabarkan dalam enam turunan misi yang menjadi janji politik saat masa kampanye pilkada.

Dalam praktik pemerintahan, program-program yang diusung kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan dituangkan ke berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Dokumen inilah yang akan menjadi pedoman pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dijanjikan kepada masyarakat yang akan dijalankan oleh sistem birokrasi selama dipimpin oleh pasangan terpilih.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan rencana pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

[1] Berita Acara dan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Terpilih oleh KPU Kabupaten Serang dapat diakses melalui https://kab-serang.kpu.go.id/komisi-pemilihan-umum-kabupaten-serang-menetapkan-pasangan-calon-bupati-dan-wakil-bupati-serang-terpilih-pada-pilkada-tahun-2020/

Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing *stakeholders* daerah untuk mengubah keadaan daerah menjadi lebih baik. Proses pembangunan daerah memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita tersebut, diperlukan suatu instrumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi upaya sistematis yang dilengkapi dengan langkah-langkah strategis, taktis dan praktis. Instrumen perencanaan pembangunan daerah ini akan melalui tahapan-tahapan serta prioritas yang bertolak dari konteks, karakter sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam jangka panjang, menengah dan tahunan. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Keberadaan RPJMD akan memandu segenap *stakeholders* daerah dalam menuju suatu cita-cita yang diinginkan selama jangka waktu lima tahun di bawah satu kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang *legitimate* serta dipilih oleh masyarakat secara demokratis.

Pada Pasal 260 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Berikutnya, pada Pasal 263 Undang-Undang tersebut secara jelas mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen rencana pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun terhitung sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMN, dan KLHS.

Ranperda RPJMD, Pelaksanaan Evaluasi Ranperda RPJMD dan Penetapan RPJMD. Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Serang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang merupakan produk hukum daerah, sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakan isi RPJMD tersebut. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah maka visi dan misi dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa arah kebijakan dan program pembangunan, serta kerangka pendanaan pembangunan dan kaidah pelaksanaannya.

1.2 Dasar Hukum

RPJMD Kabupaten Serang periode 2021-2026 disusun berdasarkan berbagai aturan, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011 – 2031
27. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya

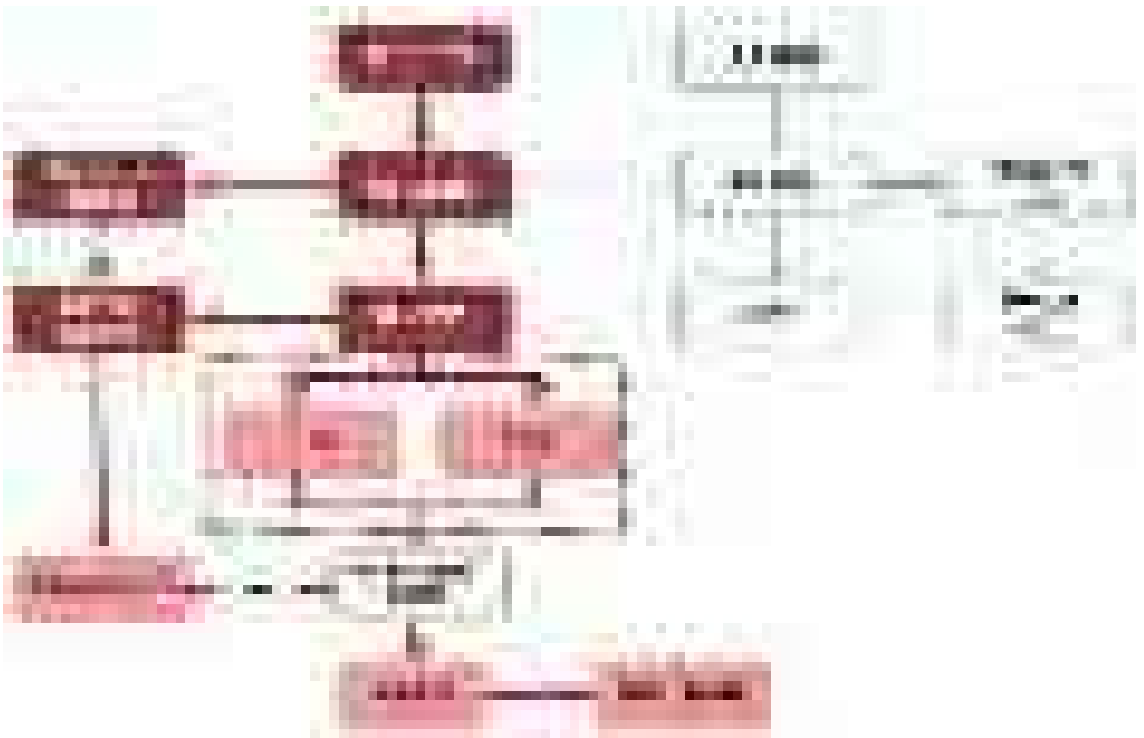

Selain dalam keterkaitannya dengan dokumen perencanaan yang lain, dokumen RPJMD juga terkait dengan dokumen anggaran. Hubungan antar dokumen perencanaan dan kesinambungannya dengan fungsi penganggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sistem perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang, menengah, dan tahunan, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan;
b. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dengan sistem perencanaan pembangunan nasional; dan
c. Sistem perencanaan pembangunan daerah juga merupakan instrumen yang terpadu dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarannya.

1.3.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2006-2026

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu dua puluh tahun dengan memperhatikan RPJMN, memuat gambaran kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program OPD dan lintas OPD serta program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kabupaten Serang.

RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD periode ke-4 dari RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2006-2026. dalam RPJPD tersebut, ditetapkan visi "mewujudkan Serang yang Islami, Maju, Adil, Sejahtera dan Harmonis" yang akan dicapai dalam periode dua puluh tahun (2006-2026). Sedangkan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Serang pada periode akhir RPJPD ini meliputi:

1. Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
2. Meningkatkan prasarana dan sarana publik untuk mendukung pengembangan sektor unggulan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Menyelenggarakan pembangunan berwawasan lingkungan.
6. Menghayati dan mengembangkan nilai-nilai religius Islam.
7. Meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui pendayagunaan sumber daya ekonomi lokal.
8. Meningkatkan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

1.3.2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Pemerintah pusat telah merumuskan tujuh agenda pembangunan 2020-2024 yang menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan lintas instansi, diantaranya:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja.
5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Jawa-Bali di dalam RPJMN diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional sesuai dengan tujuh (7) agenda pembangunan yakni ketahanan ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, kualitas SDM, revolusi mental, memperkuat infrastruktur serta pelayanan dasar, lingkungan hidup, dan terakhir memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. RPJMN 2020-2024 menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4-6,0 persen per tahun, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,5-7 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara 4,0-4,6 persen, dan *Gini ratio* mencapai 0,370-0,374. Selanjutnya Provinsi Banten ditargetkan mengalami laju pertumbuhan

ekonomi 5,40–5,80 persen per tahun, tingkat kemiskinan menurun menjadi 4,80–3,48 persen, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara 8-7 persen.

Selama periode 2020-2024, pembangunan wilayah Jawa-Bali akan mencakup beberapa kegiatan prioritas: (1) pengembangan sektor unggulan; (2) pengembangan kawasan strategis; (3) pengembangan kawasan perkotaan; (4) pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) penataan kelembagaan dan keuangan daerah. Sesuai RPJMN, pada tahun 2020-2024 pengembangan sektor unggulan proyek prioritas yang akan dilaksanakan di Provinsi Banten antara lain kopi, lada, pala, dan perikanan budidaya. Selanjutnya, sebagaimana diuraikan di dalam Bab 3 RPJMN 2020-2024, maka ditetapkan lokasi prioritas pembangunan berdasar koridor pertumbuhan dan pemerataan. Dalam konteks tersebut, Kabupaten Serang masuk dalam koridor pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali. Selain itu, Kabupaten Serang juga diprioritaskan untuk program perluasan kepemilikan akta kelahiran bersama dua kabupaten lainnya di Provinsi Banten (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak).

1.3.3 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Penyusunan RPJMD harus memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi, hal itu dikarenakan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Sesuai dengan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022**,** skala prioritas pembangunan Provinsi Banten selama kurun waktu lima tahun (2017-2022) adalah:

1. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial;
2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia;
3. Peningkatan daya saing perekonomian;
4. Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah;
5. Pengelolaan tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
6. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih; dan
7. Pengembangan dan pembangunan serta optimalisasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.

1.3.4 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Serang 2013-2033

Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang bertujuan untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dilakukan penyelarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serang Tahun 2011-2031. Ketaatan pelaksanaan pembangunan sesuai RTRW diharapkan akan menciptakan pemerataan pembangunan di Kabupaten Serang.

Sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan, struktur ruang wilayah Kabupaten Serang terdiri dari:

a. Rencana sistem perkotaan meliputi pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, pusat pelayanan kawasan, dan pusat pelayanan lingkungan dan pusat kegiatan lokal promosi.
b. Rencana sistem perdesaan meliputi pengembangan kawasan permukiman perdesaan, pengembangan sistem transportasi pedesaan, pengembangan sarana dan prasarana permukiman perdesaan.
c. Rencana sistem jaringan prasarana meliputi rencana pengembangan sistem transportasi, rencana jaringan energi, rencana jaringan telekomunikasi, rencana pengembangan sumberdaya air, rencana pengelolaan air limbah, dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Sedangkan pola ruang wilayah Kabupaten Serang terdiri dari:

a. Rencana Kawasan Lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung geologi.
b. Rencana Kawasan Budi Daya meliputi kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan

perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya.

1.3.5 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Serang 2021-2026

Sesuai dengan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Serang yang telah disusun, beberapa hal yang menjadi simpulan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sebanyak 222 indikator, maka kondisi pelaksanaan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:
   a. Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional sebesar sebanyak 43 indikator;
   b. Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebesar sebanyak 32 indikator;
   c. Indikator yang belum tersedia data sebesar sebanyak 147 Indikator.
2. Kabupaten Serang memiliki beberapa catatan terkait Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT), Kualitas Lingkungan Hidup, dan Kerentanan Daerah yaitu:
   a. DDLB Kabupaten Serang secara keseluruhan sebesar 5,59 yang termasuk dalam daya dukung lahan permukiman baik. Hal ini menunjukan bahwa di Kabupaten Serang memiliki daya tampung bangunan yang relatif cukup untuk pengembangan wilayah. Namun dalam pengembangannya, perlu diperhatikan dan dipertimbangan terlebih pada karakteristik wilayahnya seperti pada Kawasan Rawan Bencana maupun Kawasan Konservasi.
   b. Perlu usaha lebih kuat agar indeks daya dukung lahan untuk pangan DDL (Daya Dukung Lahan) untuk pangan semakin meningkat.
   c. Berdasarkan perhitungan nilai daya dukung air, Kabupaten Serang berada pada kisaran nilai baik. Namun perhitungan tersebut hanya didasarkan pada kebutuhan air terhadap jumlah penduduk, lahan basah dan lahan kering. Tidak menutup kemungkinan bahwa banyak kebutuhan yang belum masuk ke dalam perhitungan.

d. Hasil perhitungan koefisien Daya Dukung Lindung (DDL) Kabupaten Serang termasuk dalam kategori sedang sebesar 0,44.
e. Jasa ekosistem pemurnian air di Kabupaten Serang Sebagian besar berada pada kelas sedang dan rendah.
f. Jasa ekosistem pemeliharaan kualitas udara di Kabupaten Serang Sebagian besar berada pada kelas sedang dan tinggi.

3. Terdapat 126 isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Serang yang menjadi sorotan dalam dokumen KLHS. Isu-isu tersebut kemudian disaring dalam pengelompokan isu yang terdiri atas empat pilar utama yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, dan pilar hukum dan kelembagaan. Berikut ini 27 isu strategis hasil pengelompokan isu pembangunan berkelanjutan Kabupaten Serang:
   a. Pilar sosial
      1) Keterbatasan anggaran pembangunan kesehatan, terutama dalam hal penanganan penduduk miskin, promosi kesehatan, penanggulangan gizi buruk, pelayanan kesehatan daerah terpencil dan perbatasan serta pendayagunaan tenaga kesehatan,
      2) Masih tingginya PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang berisiko terhadap kerentanan sosial dalam menjalani kelangsungan hidup,
      3) Semakin bertambahnya Volume kendaraan bermotor di jalan yang berdampak pada bertambahnya titik kepadatan dan kemacetan lalu lintas,
      4) Rehabilitasi, operasi pemeliharaan berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan belum optimal.
      5) Akses Masyarakat terhadap Perumahan yang Layak dan Terjangkau
      6) Masih banyak sekolah yang belum mempunyai ruang penunjang lainnya (laboratorium, perpustakaan, dll).
      7) Sarana dan Prasarana Kesenian belum memadai
      8) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan

d. Pilar Kelembagaan

1) Mengoptimalkan penggunaan teknologi sistem informasi dalam mendukung pengembangan Kabupaten Serang yang unggul, nyaman dan sejahtera
2) Belum berfungsinya sistem informasi manajemen pengujian sehingga belum optimalnya pelayanan administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan terintegrasi
3) Peningkatan implementasi *e-government* Pemerintah Daerah

1.3.6 Keterkaitan Visi & misi RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan Skala Prioritas Provinsi Banten dan RPJMN 2020-2024

Disamping beberapa keterkaitan diatas, perlu juga melihat keterkaitan Visi & Misi RPJMD Kabupaten Serang tahun 2021-2026 dengan Skala Prioritas Provinsi Banten dan RPJMN 2020-2024 sebagai bukti bahwa hubungan antar Visi dan Misi lebih terstruktur dengan Provinsi dan Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Matrik Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

NO	RPJMD Tahap IV (RPJPD Kab. Serang 2006-2026)	Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2021- 2026	Skala Prioritas RPJMD Prov Banten	Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024
VISI	*Mewujudkan Serang yang Islami, Maju, Adil, Sejahtera dan Harmonis*	*Terwujudnya Kabupaten Serang yang semakin maju, sejahtera, berkeadilan dan agamis*	***Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah***	*Terwujudnya Indonesia yang maju berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong*
1	Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan secara menyeluruh dan berkesinambungan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional	Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja
2	Meningkatkan prasarana dan sarana publik untuk mendukung pengembangan sektor unggulan	Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas	Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah Pengembangan dan pembangunan serta optimalisasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis	Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
3	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional	Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja
4	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat	Peningkatan daya saing sumber daya manusia Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta,

NO	RPJMD Tahap IV (RPJPD Kab. Serang 2006-2026)	Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2021- 2026	Skala Prioritas RPJMD Prov Banten	Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024
		Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional		memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk
5	Menyelenggarakan pembangunan berwawasan lingkungan	Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas	Pengelolaan tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
6	Menghayati dan mengembangkan nilai-nilai religius Islam	Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik
7	Meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui pendayagunaan sumber daya ekonomi lokal	Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan daya saing perekonomian Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah
8	Meningkatkan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik

1.3.7 Keterkaitan Visi & misi RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten

Dokumen RPJMD Kabupaten Serang telah menyesuaikan dengan RPJMD Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se Provinsi banten, untuk mewujudkan keselarasan antar daerah berikut dapat dilihat keterkaitan Visi dan Misi antar Kabupaten Serang dengan Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se Provinsi Banten sebagai berikut :

Tabel 1.2
Keselarasan Visi Misi RPJMD se Provinsi Banten

Provinsi Banten	Kabupaten Serang	Kota Serang	Kabupaten Tangerang	Kabupaten Lebak
BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH		**TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA**	**Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera**	**Kabupaten Lebak sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal**
1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional	MISI 4. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	Misi 4 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;	Misi 3: Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas	MISI 2. MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Misi 5 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah	3.Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah;
				4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan

Provinsi Banten	Kabupaten Serang	Kota Serang	Kabupaten Tangerang	Kabupaten Lebak
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;	Misi 1: Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat	MISI 1. MENGUATKAN PERADABAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN	Misi 2 : Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.	1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
	Misi 6 :Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara		MIsi 1 : Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius	
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas;	Misi 2: Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional	MISI 1. MENGUATKAN PERADABAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN	Misi 2 : Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.	1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lain-lain) untuk membuat kebijakan pembangunan selama lima tahun yang dapat diimplementasikan secara terarah, efektif, efisien dan terpadu untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati Serang terpilih.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 adalah untuk:

1. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan dan program prioritas yang merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam waktu lima tahun ke depan.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan atau dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), dan perencanaan penganggarannya.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan.
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun.
5. Memberikan tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap OPD.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Serang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten, yang berada di ujung barat Pulau Jawa. Lokasi Kabupaten Serang cukup strategis karena dilalui jalan tol Jakarta - Merak yang merupakan akses utama menuju pulau Sumatera melalui pelabuhan penyeberangan Merak. Selain sebagai transit pelabuhan perhubungan darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, Pelabuhan Merak juga merupakan daerah penyangga Ibu Kota Negara. Secara geografis Kabupaten Serang terletak pada koordinat 5^0 50' - 6^0 21' Lintang Selatan dan 105^0 0' - 106^0 22' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Serang yaitu seluas 1,467,35 km^2.

Gambar 2.1 Wilayah Administasi Kabupaten Serang
Sumber: LPPD Kabupaten Serang, 2011-2031

Kabupaten Serang membawahi 29 Kecamatan yang terdiri dari 326 Desa. Kecamatan Cinangka merupakan kecamatan terluas yaitu mencapai 111,47 km^2 atau sebesar 7,60 persen dari total wilayah Kabupaten Serang. Sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Bandung dengan luas 25,18 km^3 atau sebesar 1,72 persen dari total wilayah Kabupaten Serang. Jika dilihat dari jumlah desanya, Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yaitu Kecamatan Cikeusal yang membawahi 17 desa, sedangkan Kecamatan dengan jumlah desa terkecil adalah Kecatam Binuang dan Kecamatan Gunungsari yaitu masing-masing membawahi 7 desa. Selain itu, di Kabupaten Serang juga terdapat beberapa pulau yang terletak di wilayah perairan, yakni tercatat sebanyak 17 pulau,

2.1.1.2 Kondisi Topografi

Wilayah Kabupaten Serang secara topografi meliputi dataran rendah dan pegunungan dengan ketinggian antara 0 sampai 1.778 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sebagian besar dataran rendah memiliki ketinggian kurang dari 500 mdpl, sementara dataran tinggi berupa rangkaian pegunungan yang terdapat di perbatasan dengan Kabupaten Pandeglang. Secara umum lebih dari 97,5 persen wilayah Kabupaten Serang berada pada ketinggian rata-rata 25,66 mdpl. Ketinggian 0 mdpl membentang dari Kecamatan Tirtayasa sampai Kecamatan Cinangka di pantai barat Selat Sunda, sedangkan ketinggian 1778 mdpl terdapat di kaki Gunung Karang yang terletak di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang. Berikut tabel luas wilayah berdasarkan pembagian ketinggian tempat yang terbagi menjadi 6 (enam) kelompok:

Tabel 2.2 Luas Wilayah berdasarkan Pembagian Ketinggian Tempat

Ketinggian Tempat (mdpl)	Luas	
	Ha	%
0 - 3	14.437	9,56
3 - 25	51.692	34,22
25 - 100	51.101	33,83
100 - 500	31.191	20,65
500 - 1000	2.060	1,36
>1000	590	0,39

Sumber: RKPD Kabupaten Serang, 2019

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Serang tahun 2019, satuan dataran rendah di Kabupaten Serang tersebar di seluruh wilayah dengan penyebaran paling besar di pantai utara dan sebaran terbatas di pantai barat serta sepanjang aliran sungai besar seperti Sungai Ciujung dan Cidurian. Secara administrasi penyebaran dataran rendah ini meliputi wilayah kecamatan Tirtayasa, Pontang, Carenang, Ciruas, dan Kramatwatu. Sedangkan Kecamatan Cikeusal, Pamarayan, Kragilan, Anyar, Cinangka, hanya sebagian wilayahnya yang termasuk dalam satuan dataran rendah.

2.1.1.3 Kondisi Hidrologi

Kondisi Hidrologi di Kabupaten Serang dapat digambarkan dari Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dimiliki. Pengelolaan sungai mengatur adanya Satuan Wilayah Sungai (SWS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Secara umum, baik SWS maupun DAS yang berada di Kabupaten Serang relatif sempit yaitu lebar sungai kurang dari 50 m dan panjangnya kurang dari 100 Km. Selain DAS dan SWS, terdapat DPS (Daerah Pengelolaan Sungai) yang merupakan pengelolaan satu atau beberapa DAS secara bersama yang dilakukan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan karena faktor efisiensi dana dan pelaksanaan.

Berdasarkan RKPD Kabupaten Serang tahun 2019, SWS yang terdapat di Kabupaten Serang yaitu Ciujung-Ciliman, terdiri atas DAS Cidurian, Ciujung, Cibanten, dan Cidanau. DAS tersebut terdiri dari subsub DAS. Sungai yang besar adalah Cidurian dan Ciujung. Sungai Cidurian berhulu di Kabupaten Tangerang. Sebagian besar sungai mengalir ke arah utara menuju Laut Jawa. DAS Cidanau mengalir ke barat Selat Sunda. Sebelah selatan terdapat DAS Ciliman dimana terdapat dua arah pengaliran, yang pada umumnya mengalir ke utara menuju Laut Jawa atau Teluk Banten, dan sebagian ke barat menuju Selat Sunda.

Jika ditinjau dari fisiografi dan morfologi permukaan tanahnya, sebagian besar (sekitar 35 perssen) bagian utara Kabupaten Serang merupakan hilir tata air permukaan yang mengarah ke Laut Jawa bagian barat daya, khususnya ke Teluk Banten. Sekitar 25 persen dari 35 persen hilir tata air permukaan tersebut, merupakan daerah perbukitan

keperluan irigasi yang dialirkan melalui bendungan. Sedangkan Sungai Cidurian terletak di bagian timur yang sekaligus membatasi Kabupaten Serang dengan Kabupaten Tangerang. Sungai Cidanau mengalir dari lereng Gunung Karang melalui beberapa anak sungai yang masuk ke Rawa Danau dan membentuk pola aliran rectanguler. Sungai ini mengalir ke arah barat dan bermuara di Selat Sunda. Air Sungai Cidanau telah dimanfaatkan oleh PT. Krakatau Steel sebagai sumber air baku yang dialirkan dan ditampung di Waduk Krenceng dengan mendapat tambahan air dari Sungai Krenceng dan Sungai Cadas Gantung. Sungai Cibanten yang mengalir melalui Kota Serang sumber airnya berasal dari Gunung Karang, Gunung Payung, dan Gunung Kupak. Sebagian besar berasal dari mata air yang cukup dan membentuk *spring belt* pada kaki Gunung Karang. Sungai ini mengalir ke arah utara dan bermuara di Teluk Banten. Sungai ini berpola dendritik dan tidak pernah kering. Selain itu, Kabupaten Serang juga memilki rawa, situ, dan waduk. Waduk terluas dengan volume air terbesar adalah Waduk Ciujung Lama yaitu dengan luas 60 Ha, dengan volume air 1,3 juta m^3. Sedangkan luas waduk, rawa dan situ lainnya kurang dari 30 Ha.

2.1.1.4 Kondisi Klimatologi

Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan wilayah Indonesia, Kabupaten Serang termasuk daerah yang beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai September dan musim hujan pada bulan November sampai bulan Maret, diantara kedua musim itu diselingi oleh musim pancaroba.

Tabel 2.4 Klasifikasi Iklim Kabupaten Serang Menurut Pembagian Kecamatan Dengan Menggunakan Cara Mohr (1933)

Tipe Iklim	Daerah Penyebaran (Kecamatan)
B1	Padarincang
C2	Cinangka, Kopo
C3	Cikeusal
D1	Ciomas
D2	Pabuaran, Pamarayan
D3	Kragilan, Petir, Anyer

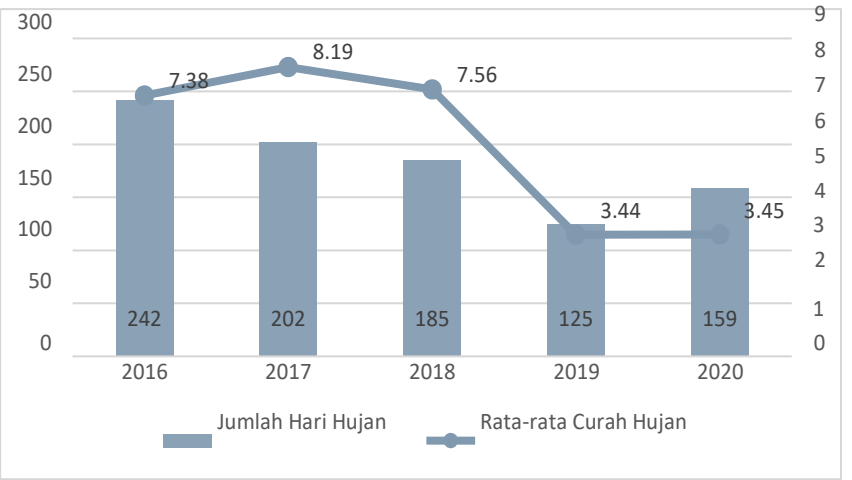

Gambar 2.2 Jumlah Hari dan Rata-rata Curah Hujan Kabupaten Serang Periode 2016-2020
Sumber: BMKG dalam BPS Kabupaten Serang, Hasil Olahan 2021

2.1.1.5 Kondisi Penggunaan Lahan

Secara umum penggunaan lahan Kabupaten Serang pada tahun 2017 didominasi oleh penggunaan lahan untuk sektor pertanian, hortikultura, perkebunan, dan perikanan dimana penggunaan lahannya hampir mencapai tiga perempat dari luas wiayah keseluruhan Kabupaten Serang. Berdasarkan data Kabupaten Serang Dalam Angka Tahun 2019. persentase penggunaan lahan terbesar didominasi oleh areal persawahan yaitu mencapai 40,28 persen. Jika dibandingkan dengan data tahun 2015 persentase luas lahan menurun sebesar 0,86 persen dari semula mencapai 41,14 persen. Penggunaan lahan terbesar selanjutnya yaitu lahan kebun campuran yaitu *mixed use* antara hutan dan kebun yang mencapai 22, 64 persen. Berbeda dengan lahan persawahan yang luas lahannya menurun, areal lahan kebun campuran mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2015 yaitu naik sebesar 0,14 persen dari sebelumnya mencapai 22,50 persen. Penggunaan lahan terbesar ketiga yaitu lahan yang digunakan untuk perkampungan. Luas lahan yang digunakan sebesar 8,49 persen atau sebesar 12.441,06 ha. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 lahan perkampungan sedikit mengalami penurunan yakni sebesar 0,04 persen. Sedangkan penggunaan lahan lainnya dibawah tujuh persen.

Tabel 2.6 Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kabupaten Serang, 2017

Penggunaan	Luas Lahan (Ha)	Persentase (%)
Bandar Udara	38,10	0,03
Emplasemen	0	0
Hutan Belukar	9.190,43	6,27
Hutan Rawa	375,49	0,26
Industri	2.277,33	1,55
Kebun Campuran	33.154,26	22,64
Ladang/Tegalan	7.599,74	5,19
Padang Rumput	2.796,93	1,91
Perkampungan	12.441,06	8,49
Perkebunan Besar	397,92	0,27
Perumahan	569,46	0,39
Rawa	1.477,52	1,01
Sawah	59.001,02	40,28
Semak Belukar	6.615,07	4,52
Sungai/Danau/Telaga	1.254,13	0,86
Tambak	7.331,71	5,01
Tanah Kosong	1.937,76	1,32
Jumlah	**146.457,94**	**100,00**

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, 2019

Selain lahan kebun campuran, terdapat beberapa penggunaan lahan yang mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2017. Peningkatan penggunaan lahan yakni pada lahan industri sebesar 395,94 ha, padang rumput sebesar 825,69 ha, semak belukar 219,55 ha, sungai/danau/telaga sebesar 93,53 ha, dan tanah kosong seluas 1.226,29 ha. Walaupun penggunaan lahan industri meningkat namun peningkatan semak belukar, padang rumput, dan tanah kosong yang lebih tinggi mengindikasikan semakin tingginya lahan yang tidak produktif di Kabupaten Serang.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Serang Nomor 10 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031, rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana. Sistem perkotaan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu PKL dan pusat- pusat lainnya. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabuoaten Serang meliputi:

a. Kawasan perkotaan Anyar berada di Kecamatan Anyar;

b. Kawasan perkotaan Baros berada di Kecamatan Baros;
c. Kawasan perkotaan Ciruas berada di Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Kragilan; dan
d. Kawasan perkotaan Pontang berada di Kecamatan Pontang.

Sedangkan pusat-pusat lain terdiri dari Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang tersebar diseluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Serang.

Selain itu Kabupaten Serang juga melakukan perencanaan mengenai sistem jaringan transportasi kereta api yang meliputi: (a) pengembangan jaringan jalur kereta api untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang; dan (b) pengembangan stasiun kereta api berupa stasiun yang melayani angkutan penumpang dan/atau barang. Rencana pengembangan stasiun penumpang terdiri dari:

a. Stasiun Catang di Kecamatan Tunjungteja;
b. Stasiun Jambu Baru di Kecamatan Tunjungteja;
c. Stasiun Anyar Kidul di Kecamatan Anyar; dan
d. Stasiun Tonjong Baru di Kecamatan Kramatwatu.

Secara umum pentaan ruang wilayah Kabupaten Serang sebagai berikut:

a. Pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas lokal yang berkelanjutan dan berdaya saing global;
b. Pengembangan pertanian pendukung yang berkelanjutan sebagai pengembangan perekonomian kabupaten;
c. Pengembangan pariwisata berkelanjutan bertumpu pada sumber daya alam dan budaya lokal;
d. Pengembangan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;
e. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi kabupaten terkoneksi dengan prasarana dan sarana transportasi nasional, regional dan lokal dalam mendukung potensi wilayah;

f. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan lingkungan;
g. Pengembangan sistem penanggulangan bencana pada kawasan rawan bencana;
h. Pemantapan kawasan peruntukan lindung untuk mendukung perkembangan kabupaten berkelanjutan;
i. Pengembangan kawasan peruntukan budi daya pendukung perkembangan dan pertumbuhan kabupaten sesuai daya dukung lingkungan;
j. Penetapan dan pengembangan kawasan strategis pendukung perkembangan daerah yang merata dan berkelanjutan; dan
k. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan, oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2015-2019 yang disusun oleh BNPB, Kabupaten Serang masuk dalam wilayah dengan risiko bencana tinggi. Ditinjau dari konteks regional Provinsi Banten, Kabupaten Serang berada pada peringkat 3 (tiga) dari 8 (delapan) kabupaten/kota dengan adanya potensi bencana yang ada. Walaupun demikian, seluruh kab/kota di Provinsi Banten masuk dalam wilayah dengan risiko bencana tinggi. Jenis bencana alam yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Serang meliputi:

a. Bencana banjir dengan tingkat risiko tinggi;
b. Bencana gempa bumi dengan tingkat risiko tinggi;
c. Bencana Tsunami dengan tingkat risiko tinggi,
d. Bencana kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat risiko tinggi,
e. Benana tanah longsor dengan tingkat risiko sedang,
f. Bencana gelombang ekstrem dan abrasi dengan tingkat risiko tinggi, dan

f. Kawasan industri sebesar 3.287 hektar;
g. Kawasan permukiman perkotaan sebesar 32.128 hektar dan permukiman perdesaan sebesar 3.957 hektar.

2.1.4.2 Arah Pengembangan Kabupaten Serang

Pengembangan Kabupaten Serang salah satunya adalah mengenai konektivitas dan juga peningkatan fungsi-fungsi pertumbuhan agar saling medukung. Keterhubungan antara wilayah perlu penegasan dalam pembagian fungsi kawasan dalam sistem perkotaan kabupaten. Dalam pengembangan wilayah, perencanaan sistem perkotaan di kabupaten sebagai pusat dari wilayah pengembangan didiukung oleh wilayah penyangga. Klasifikasi sistem perkotaan yang ada dikatogorikan sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL di wilayah Kabupaten Serang adalah wilayah perkotaan Anyar, perkotaan Baros, perkotaan Ciruas yang ada di Kecamatan Ciruas dan Kragilan, serta perkotaan Pontang.
2. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK Kabupaten Serang adalah wilayah-wilayah yang strategis, berbatasan dengan Kota atau Kabupaten Lain dan cenderung cepat berkembang meliputi 24 PPK.
3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PPL Kabupaten Serang merupakan kawasan yang berkembang dan berpotensi berkembang terdiri dari 21 desa.

Pengembangan sistem perkotaan yang ada di Kabupaten Serang dapat dikategorikan sebagai PKL, PPK, dan PPL, tertuang dalam penjelasan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 pada tabel 2.9 sebagai berikut.

Tabel 2.9 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031

No	Arah Pengembangan Kawasan	Kecamatan	Fungsi
1	Pusat Kegiatan Lokal	Perkotaan Anyar, Perkotan Baros, Perkotaan Ciruas, dan Perkotaan Pontang	- Peningkatan jaringan telekomunikasi, listrik, air - Perdagangan dan jasa - Industri, industri pertanian dan perikanan - Pendidikan tinggi
2.	Pusat Pelayanan Kawasan	Kecamatan Petir, Pabuaran, Pamarayan, Kramatwatu, Mancak, Cinangka, Kibin, Pulo ampel, Tirtayasa, Padarincang, Ciomas, Tunjungteja, Cikeusal, Waringinkurung, Tanara, Carenang, Binuang, Kopo, Jawilan, Bandung, Gunungsari, Lebak Wangi, Bojonegara, Cikande	- Pertanian dan perkebunan - Permukiman - Perdagangan dan jasa - Industri pengolahan - Kawasan wisata - Peningkatan jaringan telekomunikasi, listrik, air - pendidikan
3.	Pusat Pelayanan Lingkungan	Desa Banjarsari, Rancasanggal, Sangiang, Kaduagung, Sindangmandi, Batukuwung, Sukarena, Tanjungsari, Padasuka, Kemuning, Blokang, Teras Bendung, Gandayasa, Bantarpanjang, Kampungbaru, Sukamampir, Domas, Sukanegara, Sujung, Lontar, Siremen, Ragasmasigit, Pangarengan, Sasahan dan Binangun	- Pertanian, peternakan dan perkebunan - Permukiman perdesaan - Kawasan wisata - Kawasan lindung - Kawasan hutan

Sumber: RTRW Kabupaten Serang, 2021 (diolah)

2.1.5 Aspek Demografi

Penduduk sebagai aktor utama pembangunan merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor terpenting kemajuan dan pembangunan suatu wilayah. Baik dan buruknya SDM yang dimiliki wilayah tersebut menentukan pula maju dan mundurnya pembangunan wilayah tersebut, tidak terkecuali Kabupaten Serang. Penduduk dibagi atas kelompok–kelompok tertentu, atau dapat dikatakan atas komposisi penduduk tertentu. Susunan penduduk tersebut menggambarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik yang sama seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian.

Semakin banyak penduduk, berarti semakin banyak jumlah tenaga kerja yang dapat menggerakkan pembangunan wilayah. Namun demikian, pertambahan penduduk yang berlebihan bisa juga menjadi permasalahan dalam pembangunan. Ketika pertambahan penduduk tidak terkendali, akan timbul berbagai masalah diantaranya: (1) tekanan penduduk dan lingkungan, akibat yang ditimbulkan dari permasalahan ini yaitu berkurangnya lahan pertanian dan rusaknya lingkungan akibat pemukiman yang sangat padat dan perilaku manusia yang tidak peduli lingkungan, (2) kemiskinan, akibat yang ditimbulkan dari permasalahan ini penduduk tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya, (3) pengangguran, yang terjadi karena lapangan kerja tidak sebanyak pencari kerja akibat semakin meningkatnya jumlah penduduk, (4) rawan pangan, akibat yang ditimbulkan dari permasalahan ini yaitu kebutuhan pangan sangat meningkat dengan adanya penduduk, sedang luas pertanian akan berkurang sehingga produksi tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan seluruh penduduk.

ketika inflasi terlalu tinggi, maka daya beli masyarakat akan turun dan mengakibatkan roda perekonomian tidak berjalan (BPS Provinsi Banten, 2019). Oleh sebab itu inflasi menjadi salah satu indikator makro yang diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa atau turunnya daya jual mata uang suatu negara secara terus menerus. Menurut Bank Indonesia (2016), timbulnya inflasi disebabkan adanya tekanan dari sisi penawaran (*cost push inflation*), permintaan (*demand pull inflation*), dan ekspektasi inflasi. Terjadinya *demand pull inflation* disebabkan oleh tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya, atau dengan kata lain permintaan total lebih besar daripada kapasitas perekonomian. Sementara ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya, yang mana ekspektasi inflasi dapat cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*.

Tingkat keparahan inflasi dapat dibagi menjadi 4 tingkatan yaitu inflasi ringan dengan laju inflasi kurang dari 10 persen per tahun, inflasi sedang saat laju inflasi antara 10-30 persen per tahun, inflasi berat yakni pada kisaran 30-100 persen per tahun, dan inflasi sangat berat/hiperinflasi saat laju inflasi lebih dari 100 persen per tahun. Perhitungan inflasi hanya dilakukan di 66 kota di Indonesia, dan salah satunnya Kota Serang. Oleh karena itu, dalam analisis ini Kota Serang dijadikan rujukan untuk analisis inflasi Kabupaten Serang.

Gambar 2.15, menunjukkan inflasi di Kota Serang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 laju inflasi Kota Serang mencapai 3,26 persen. Namun demikian, pada tahun 2017 terjadi peningkatan laju inflasi yang cukup pesat menjadi 5,17 persen, dan merupakan laju inflasi tertinggi selama periode 2015-2019. Setelah itu, pada tahun 2018 hingga tahun 2020 terus mengalami penurunan laju inflasi menjadi 1,91 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan inflasi di Provinsi Banten, selama periode 2016-2020 inflasi di Kota Serang selalu lebih tinggi dibandingkan inflasi di Provinsi Banten, kecuali pada tahun 2019 inflasi Kota Serang di bawah Provinsi Banten sebesar 0,24 persen. Walaupun demikian, selama periode 2016-2020 inflasi Kota Serang selalu lebih tinggi dari Inflasi secara nasional. Berdasarkan data tersebut, inflasi di Kota Serang berada pada kisaran

satu digit sehingga masih dapat dikendalikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kenaikan harga barang dan jasa di Kota Serang secara umum belum terlalu mengganggu aktivitas perekonomian dan belum menunjukkan adanya gejala penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.

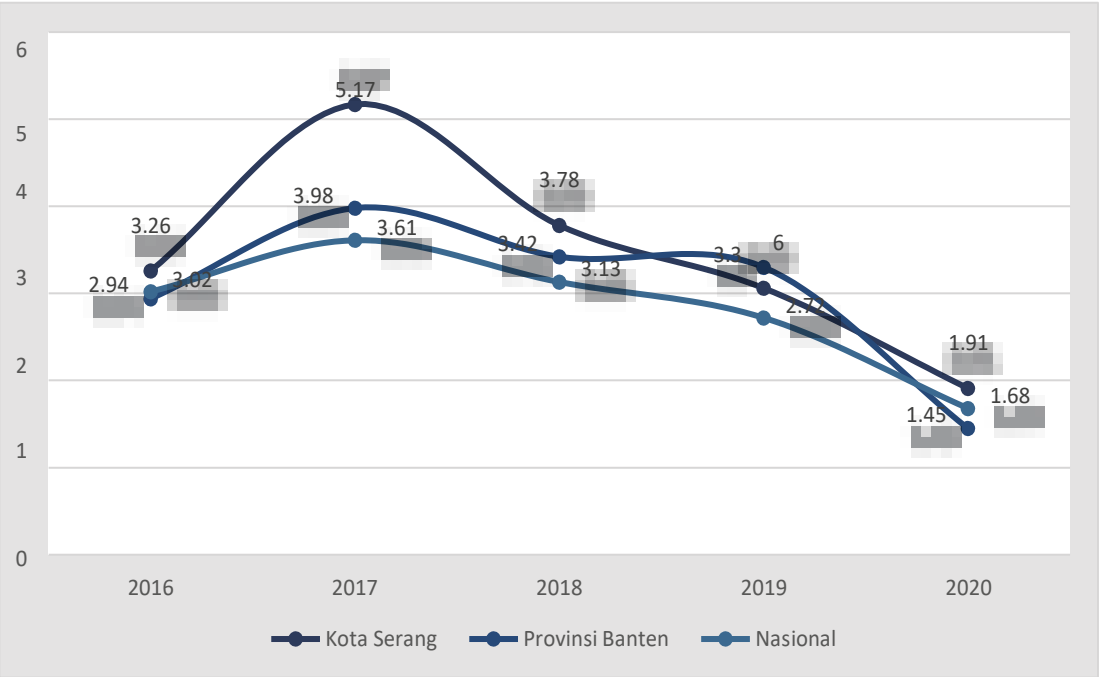

Gambar 2.15 Laju Inflasi Kota Serang, Provinsi Banten, dan Nasional (%), 2015-2019

Sumber: Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Banten, 2015-2019, Provinsi Banten Dalam Angka 2021, dan Kota Serang Dalam Angka 2021 (diolah)

Sama seperti laju inflasi tahunan, jika dilihat dari gambar 2.15 menunjukkan bahwa laju inflasi bulanan Kota Serang pada tahun 2016-2020 juga cenderung berfluktuatif. Inflasi tertinggi selama periode tersebut terjadi di tahun 2018 yaitu pada Bulan Januari yang mencapai 0,91 persen, Bulan Januari 2016 sebesar 0,90 persen, dan Bulan Mei 2016 sebesar 0,88 persen. Sedangkan tingkat Inflasi yang cenderung lebih tinggi di beberapa bulan lainnya mungkin disebabkan oleh *seasonal effect* akibat Hari Raya Idul Fitri, Natal, maupun tahun baru yang mengarah pada peningkatan rata-rata harga barang dan jasa. Namun demikian, fluktuasi inflasi bulanan tahun 2020 cenderung lebih rendah dari

tahun-tahun sebelumnya, inflasi tertinggi pada tahun tersebut terjadi di Bulan Desember yaitu sebesar 0,26 persen. Hal ini searah dengan laju inflasi tahun yang juga mengalami penurunan.

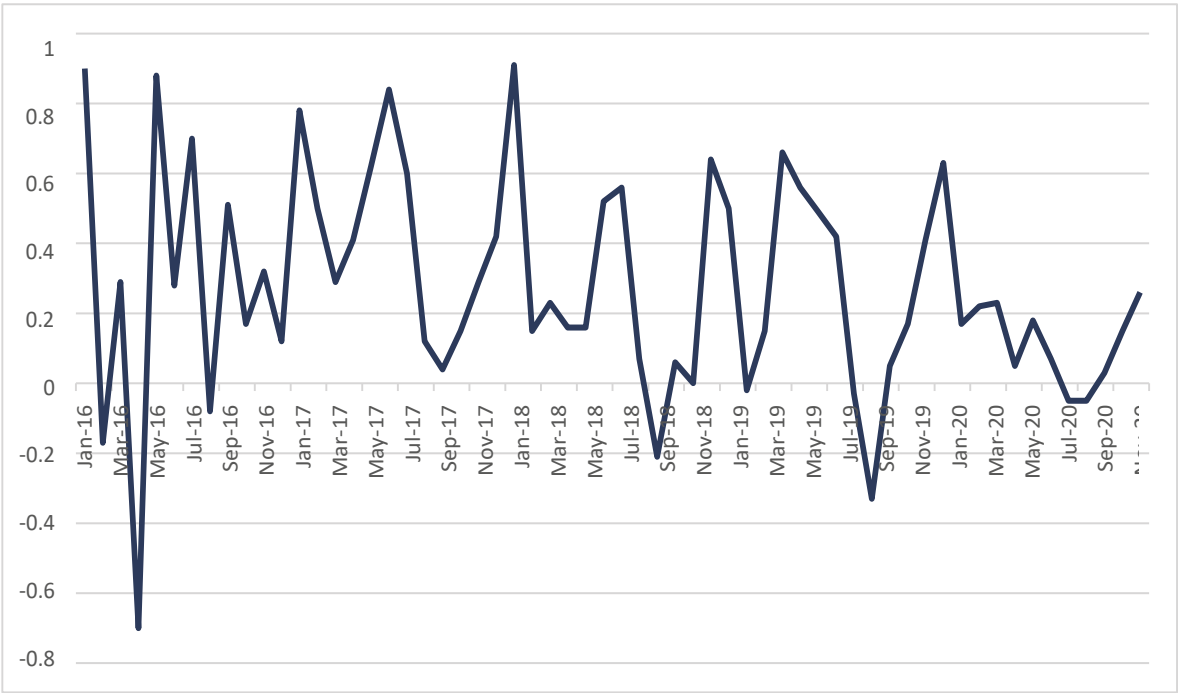

Gambar 2.16 Laju Inflasi Bulanan Kota Serang (%), 2016-2020

Sumber: Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Banten, 2015-2019 dan Kota Serang Dalam Angka 2021 (diolah)

2.2.1.4 PDRB Per Kapita

Kesejahteraan masyarakat secara ekonomi juga dapat digambarkan dengan pendapatan per kapita. Ketika pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah semakin tinggi, maka tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut dapat dikatakan semakin baik. Perhitungan pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merupakan besaran kasar yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di wilayah tersebut.

Berdasarkan gambar 2.17, terlihat bahwa PDRB per kapita Kabupaten Serang mengalami peningkatan di setiap tahunnya baik itu dengan perhitungan nilai PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita ADHB mencapai 41.003,77 rupiah, dan terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2020 menjadi sebesar 50.595,31 rupiah. Demikian pula dengan PDRB ADHK yang mencapai 31.468,59 rupiah pada tahun 2016, terus mengalami peningkatan mencapai 36.031,49 rupiah pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 mencapai 35.196,15 rupiah. Seperti penjelasan sebelumnya, peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Serang menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik dari tahun ke tahun. Namun demikian, indikator PDRB per kapita tidak mampu memberikan gambaran riil pendapatan asli masyarakat karena belum memperhitungkan pendapatan yang keluar (transfer out) dari luar daerah, sehingga masih banyak mengandung kelemahan dalam menganalisis tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah.

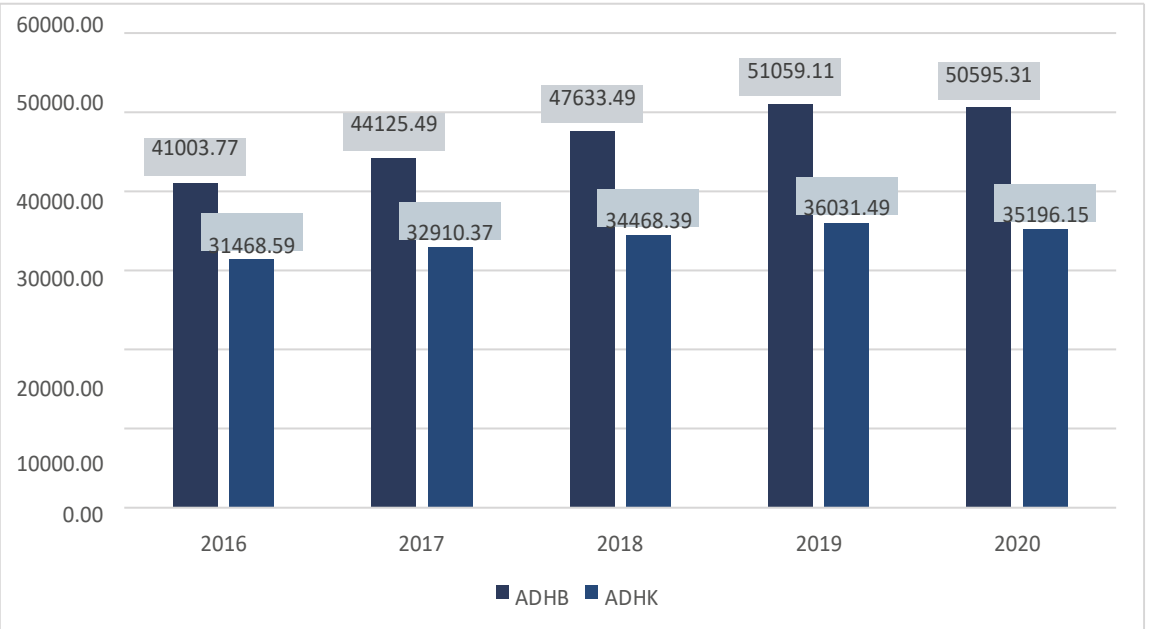

Gambar 2.17 PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Serang (Ribu Rupiah), 2016-2020

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021 (diolah)

2.2.1.5 Indeks Gini

Selain pendapatan per kapita, indeks gini juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Indeks Gini merupakan indeks yang mengukur tingkat pemerataan melalui pendekatan koefisien gini dimana koefisien tersebut dianalisis mengunakan Kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pendapatan dengan distribusi kumulatif penduduk. Nilai rasio indeks gini berkisar antara 0 dan 1, saat nilai rasio Gini mendekati 0, maka kesenjangan distribusi pendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, saat rasio Gini mendekati angka 1, maka kesenjangan distribusi pendapatan makin tinggi. Kategori indeks gini terbagi menjadi tiga yaitu rasio gini lebih dari 0,5 menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan tinggi, rasio gini antara 0,3–0,5 mengartikan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan sedang, dan rasio kurang dari 0,3 menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmeratan rendah.

Dikarenakan data indeks gini Kabupaten Serang tidak tersedia, maka sebagai proksi digunakan indeks gini Provinsi Banten untuk analisis indeks gini Kabupaten Serang. Secara umum indeks gini Provinsi Banten selama 2016-2020 cenderung menurun, dan masih masuk dalam kategori ketimpangan sedang yaitu berkisar antara 0,3 – 0,5. Pada tahun 2016 indeks gini mencapai 0,394, namun pada tahun 2017 turun menjadi 0,382. Akan tetapi, pada tahun 2018 mengalami sedikit kenaikan indeks gini menjadi sebesar 0,385. Penurunan terbesar terjadi di tahun 2019 yang turun sebesar 0,020 menjadi 0,365, kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 0,362. Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi di Provinsi Banten mengarah pada ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin mengecil.

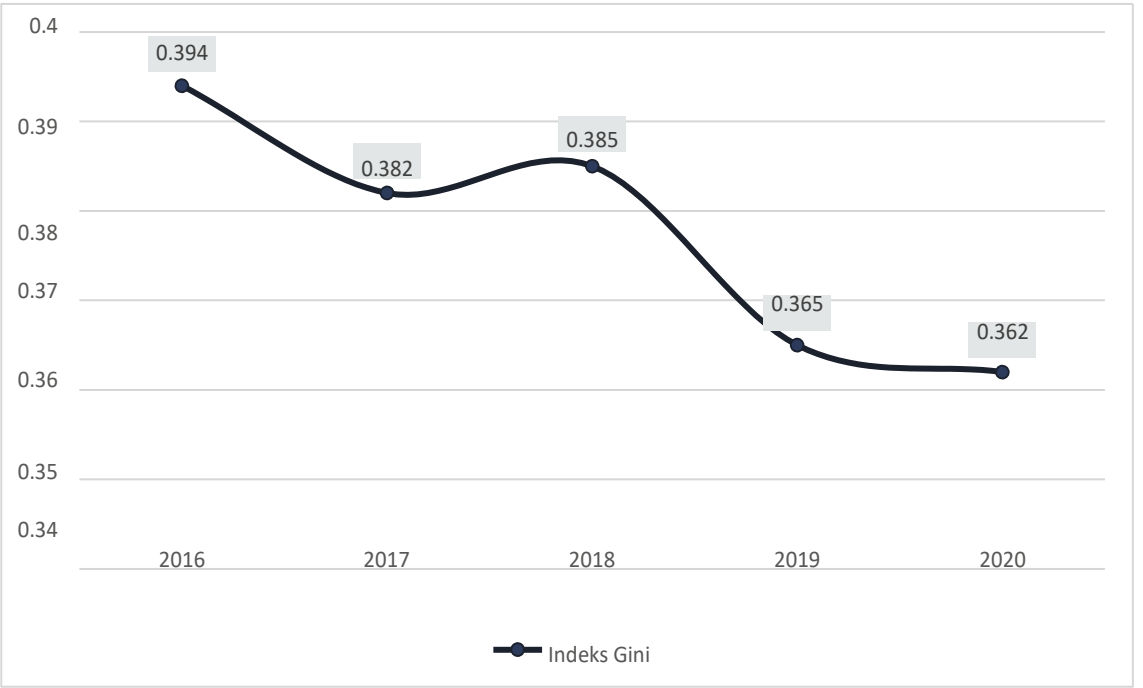

Gambar 2.18 Indeks Gini Provinsi Banten, 2016-2020
Sumber: Provinsi Banten Dalam Angka, 2021 (diolah)

2.2.1.6 Persentase Penduduk Miskin

Salah satu indikator sosial ekonomi yang juga penting digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan penduduk miskin. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di daerah tergantung dua faktor. Pertama, tingkat pendapatan daerah rata-rata. Kedua, lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang diperoleh dari perbandingan angka persentase penduduk dan pendapatan riil tahunan.

BPS mengukur tingkat kemiskinan menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dilihat sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaranm sehingga penduduk miskin dapat definisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum terkait perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (bps.go.id).

Penduduk dikategorikan ke dalam penduduk miskin jika pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan yang telah ditentukan di daerah tersebut. Berdasarkan tabel 2.16 selama periode 2015-2020, garis kemiskinan di Kabupaten Serang mengalami kenaikan setiap tahun, dengan rata-rata kenaikan sebesar Rp 21,644 per tahun. Pada tahun 2015 garis kemiskinan Kabupaten Serang mencapai Rp 232.856 per kapita per bulan, dan terus meningkat hingga menjadi sebesar Rp 341.074 per kapita per bulan pada tahun 2020. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Serang pada periode tersebut pun terus menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin mencapai 74,85 ribu jiwa atau sebesar 5,09 persen, terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 mencapai 61,54 ribu jiwa atau sebesar 4,08 persen. Akan tetapi, mengalami peningkatan menjadi 74,80 ribu jiwa atau sebesar 4,94 persen.

Tabel 2.16 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Serang, 2015-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Bulan)	Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2015	232.856	74,85	5,09
2016	256.660	67,92	4,58
2017	269.652	69,10	4,63
2018	294.829	64,46	4,30
2019	309.036	61,54	4,08
2020	341.074	74,80	4,94

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021

Berdasarkan gambar 2.19 jika dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Banten terlihat bahwa selama periode 2015-2019 garis kemiskinan Kabupaten Serang berada di bawah garis kemiskinan Provinsi Banten. Terlihat pula jika trend garis kemiskinan di Kabupaten Serang terus meningkat, walaupun lebih landai jika dibanding dengan peningkatan garis kemiskinan Provinsi Banten. Pada tahun 2015, garis kemiskinan Kabupaten Serang mencapai 232.856 rupiah sedangkan garis kemiskinan Provinsi Banten telah mencapai 336.483 rupiah. Demikian pula pada tahun 2019, garis kemiskinan Kabupaten Serang masih berada di bawah garis kemiskinan Provinsi Banten bahkan dengan selisih yang semakin besar yaitu sebesar 153.690 rupiah dari sebelumnya 103,627 rupiah.

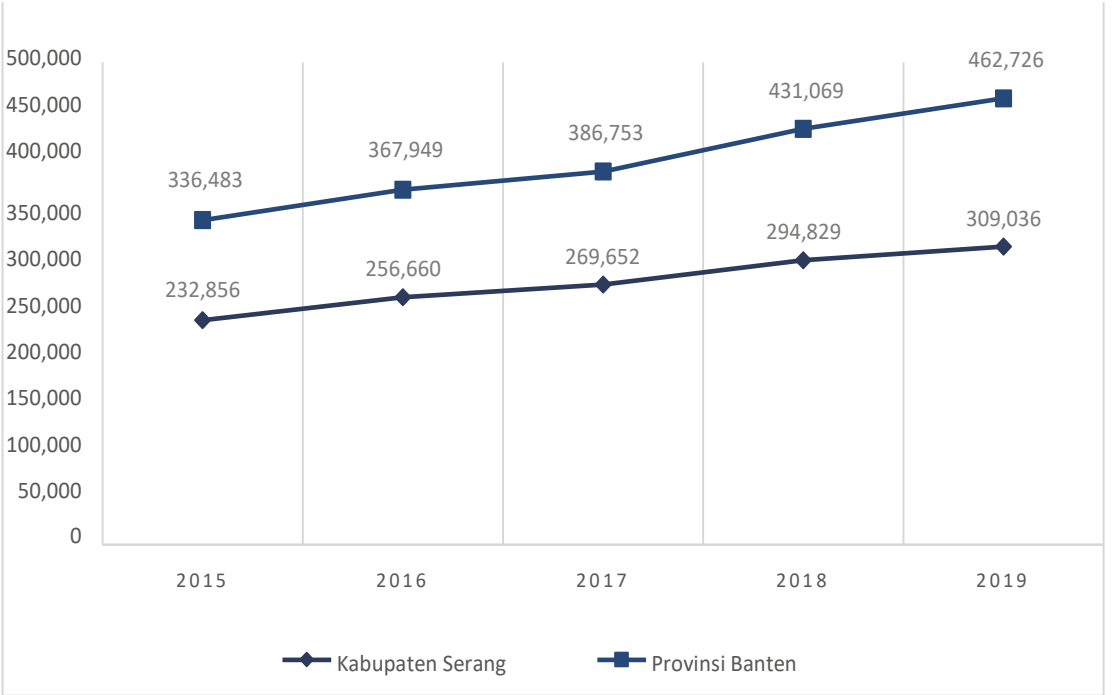

Gambar 2.19 Perbandingan Garis Miskin Kabupaten Serang dengan Garis Kemiskinan Provinsi Banten (Rp), 2015-2019

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2020

Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin di Kabupaten Serang lebih kecil jika dibandingkan dengan Provinsi Banten yang mencapai 5,92 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota di Provinsi Banten, Kabupaten Serang berada diposisi kelima dari delapan kabupaten/kota. Wilayah yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Banten adalah Kabupaten Tangerang yaitu sebanyak 242,02 ribu jiwa, disusul Kabupaten Lebak sebanyak 120,83 ribu jiwa, dan Kabupaten Pandeglang sebanyak 120,44 ribu jiwa. Sementara wilayah dengan jumlah penduduk miskin terkecil adalah Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon masing-masing sebanyak 42,24 ribu jiwa, 40,99 ribu jiwa, dan 16,31 ribu jiwa. Sementara itu jika dilihat dari sisi persentase penduduk miskin, posisi tertinggi ditempati Kabupaten Lebak yaitu sebesar 9,94 persen, disusul Kabupaten Pandeglang sebesar 9,92 persen, dan Kabupaten Tangerang sebesar 6,23 persen. Sedangkan posisi

Kabupaten Serang termasuk tiga wilayah dengan persentase penduduk miskin terkecil sebesar 4,94 bersama Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan, dengan persentase penduduk miskin masing-masing sebesar 3,69 persen dan 2,29 persen.

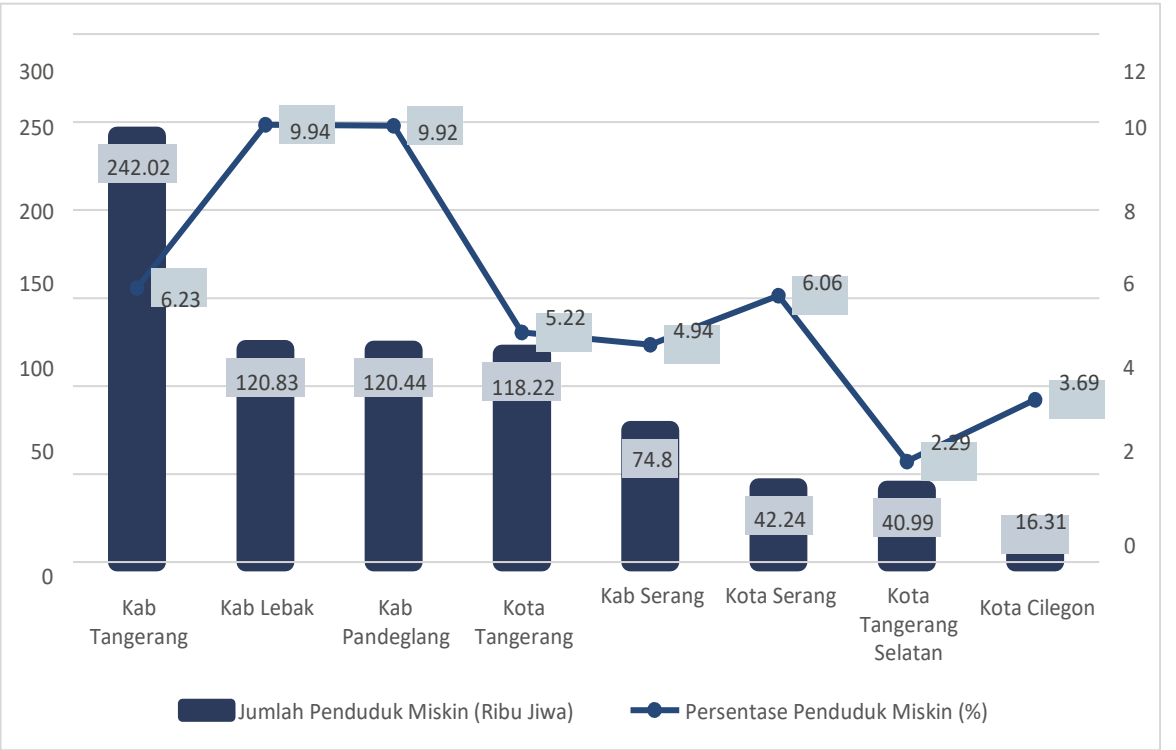

Gambar 2.20 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Serang dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2020

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Akan tetapi, juga perlu memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Serang selama periode 2016-2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Serang sebesar 0,43, kemudian meningkat pada tahun 2017 dan tahun 2018 dengan masing-masing menjadi 0,79 dan 0,80. Nilai indeks pada tahun 2018 yang meningkat menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran

penduduk miskin cenderung makin menjauh dari garis kemiskinan. Namun pada tahun 2019 dan 2020, indeks kedalaman kemiskinan mengalami penurunan menjadi sebesar 0,65 dan 0,4.

Tabel 2.17 Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan di Kabupaten Serang, 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,43	0,79	0,80	0,65	0,4
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,05	0,19	0,22	0,16	0,05

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, 2021

Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) digunakan untuk melihat masalah ketimpangan di antara penduduk miskin. Indeks ini menyatakan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin parah tingkat kemiskinan karena semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Serang periode tahun 2016-2020 juga cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016, nilai indeks mencapai 0,05. Namun demikian, pada tahun 2017 nilai indeks meningkat cukup signifikan menjadi sebesar 0,19, dan kembali meningkat sebesar 0.03 menjadi 0,22 pada tahun 2018. Terakhir pada tahun 2019 nilai indeks menurun menjadi sebesar 0,16 hingga menjadi sebesar 0,05 pada tahun 2020. Penurun indeks keparahan kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa keparahan kemiskinan di Kabupaten Serang semakin menurun.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia dalam jati diri pembangunan (*people-centered development*). Dalam hal ini, manusia atau penduduk ditempatkan sebagai sasaran akhir (*the ultimated end*), sedang upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia dapat dihitung dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks tersebut juga dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan di suatu daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. IPM merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pembangunan yang dapat dirasakan oleh penduduk dengan peningkatan kualitas hidup. Selain itu, IPM juga merupakan inti dan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum. Menurut UNDP, perhitungan IPM terdiri dari tiga aspek dasar pembangunan manusia, yaitu aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Aspek kesehatan direpresentasikan oleh angka harapan hidup, aspek pendidikan dihitung dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan aspek ekonomi ditunjukkan dengan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan.

Menurut UNDP, IPM suatu daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Kategori sangat tinggi didapatkan apabila IPM ≥80, kategori tinggi apabila IPM berada diantara ≤70 – <80, termasuk dalam kategori sedang apabila IPM antara ≤60 – <70, dan masuk kategori rendah jika IPM <60. Selama periode 2015-2019, perkembangan IPM Kabupaten Serang menunjukkan tren yang positif terlihat dari peningkatan setiap tahun, walaupun masih berada di kategori sedang. Sehingga, masih dimungkinkan adanya peningkatan IPM ke depannya. Pada tahun 2015 IPM Kabupaten Serang sebesar 64,61 dan terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya, hingga pada tahun 2020 mencapai 66,70, dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,42 per tahun.

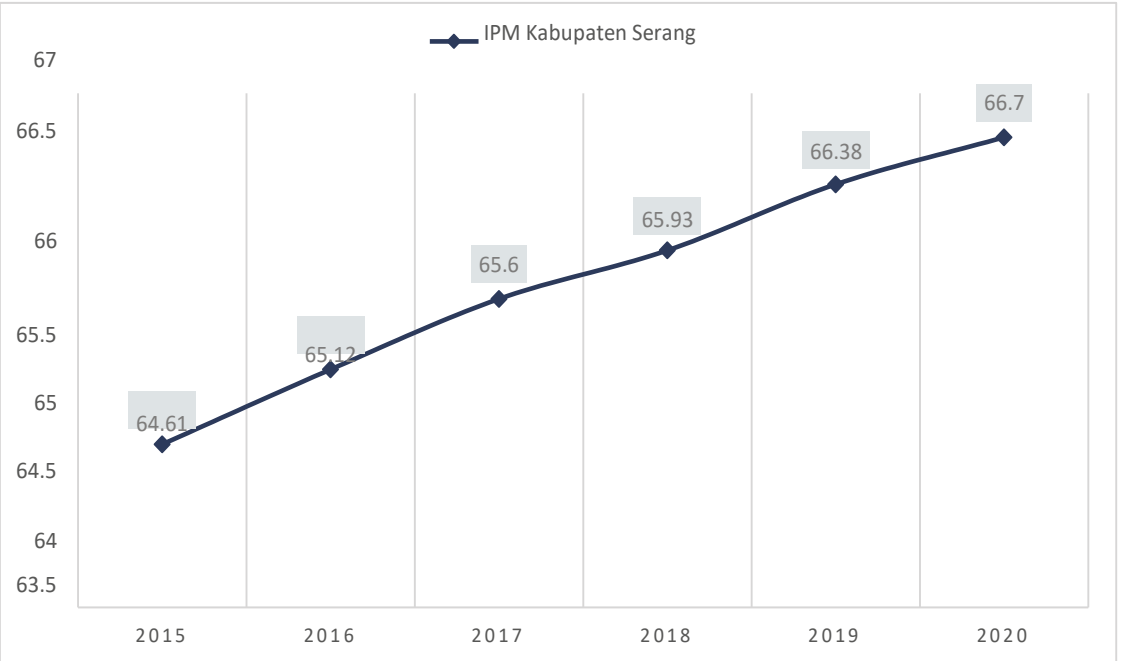

Gambar 2.21 Perkembangan IPM Kabupaten Serang, 2015-2020

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021

Jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Banten, pada tahun 2020 IPM Kabupaten Serang sebesar 66.70 lebih kecil dari IPM Provinsi Banten yang mencapai 72,45. Berdasarkan komponen penyusunnya angka harapan hidup di Kabupaten Serang sebesar 64,64 tahun, harapan lama sekolah sebesar 12,57 tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 7,50 tahun dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan sebesar 10,66 juta rupiah. Dari seluruh komponen tersebut nilai Kabupaten Serang lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai dari masing-masing komponen penyusun IPM Provinsi Banten. Namun demikian, jika dibandingkan tahun sebelumnya IPM Kabupaten Serang mengalami peningkatan sedangkan IPM Provinsi Banten justru menurun.

Tabel 2.18 Komponen IPM Kabupaten Serang dan Provinsi Banten, 2020

Komponen IPM	Kabupaten Serang	Provinsi Banten
Usia harapan hidup (tahun)	64,64	69,96
Harapan lama sekolah (tahun)	12,57	12,89
Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,50	8,89
Pengeluaran per kapita (ribu rupiah)	10665	11.986
IPM	**66,70**	**72,45**

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021

Sedangkan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten. Posisi IPM tertinggi pertama ditempati oleh Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 81,36 dengan kategori sangat tinggi, selanjutnya Kota Tangerang sebesar 78,25, dan Kota Cilegon sebesar 73,05 dengan kategori tinggi. Sementara itu lima wilayah lainnya memiliki IPM dibawah IPM Provinsi Banten, dengan IPM terendah diduduki oleh Kabupaten Lebak dengan nilai IPM sebesar 63,91 dan termasuk dalam kategori IPM sedang. Sama seperti tahun sebelumnya IPM Kabupaten Serang tahun 2020 berada di posisi keenam dari delapan kabupaten/kota yang ada. Walaupun demikian peningkatan IPM Kabupaten Serang dari tahun 2019 ke tahun 2020 merupakan yang tertinggi dibanding kab/kota lainnya di Provinsi Banten. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Serang mampu bertahan bahkan tumbuh di tengah kondisi pandemi.

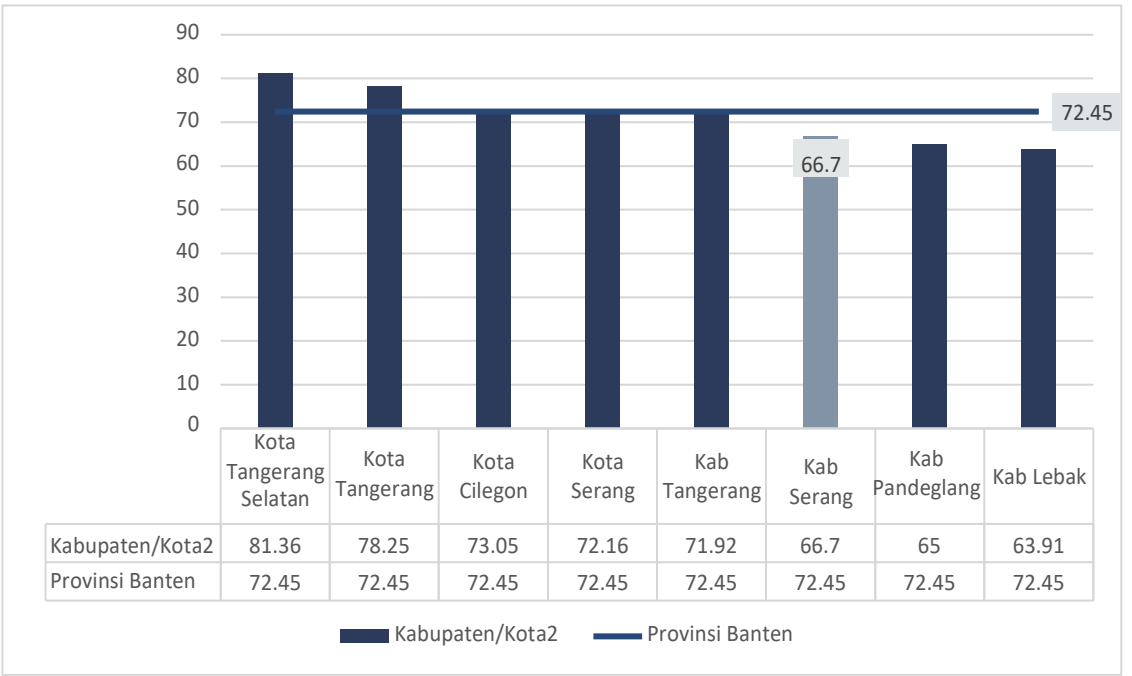

	Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang	Kota Cilegon	Kota Serang	Kab Tangerang	Kab Serang	Kab Pandeglang	Kab Lebak
Kabupaten/Kota2	81.36	78.25	73.05	72.16	71.92	66.7	65	63.91
Provinsi Banten	72.45	72.45	72.45	72.45	72.45	72.45	72.45	72.45

Gambar 2.22 Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2020

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021 (diolah)

2.2.2.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Salah satu indikator aspek pendidikan yang digunakan untuk merepresentasikan pembangunan manusia adalah rata-rata lama sekolah (RLS). Menurut BPS, RLS adalah rata-rata jumlah yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25 tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. RLS dihitung untuk

usia 25 tahun ke atas dengan asumsi bahwa pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selama periode 2015-2020, RLS Kabupaten Serang mengalami tren positif yaitu dengan adanya peningkatan setiap tahun walaupun relatif rendah. RLS Kabupaten Serang pada tahun 2015 adalah sebesar 6,9 tahun, dan meningkat setiap tahunnya hingga menjadi sebesar 7,50 tahun tahun pada tahun 2020. Peningkatan terbesar terjadi di tahun 2017, yaitu naik sebesar 0,19 tahun dari 6,98 tahun pada tahun 2016 menjadi 7,17 tahun. RLS Kabupaten Serang sebesar 7,50 tahun pada tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk di Kabupaten Serang baru mampu mencapai kelas 1 SMP atau putus sekolah pada kelas 2 SMP. Jika dibandingkan angka RLS Kabupaten Serang pada tahun 2020 lebih rendah daripada Provinsi Banten yang mencapai 8,89 tahun. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Serang berkewajiban untuk terus menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakatnya agar wajib belajar 9 tahun yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Tingkat II dapat tercapai.

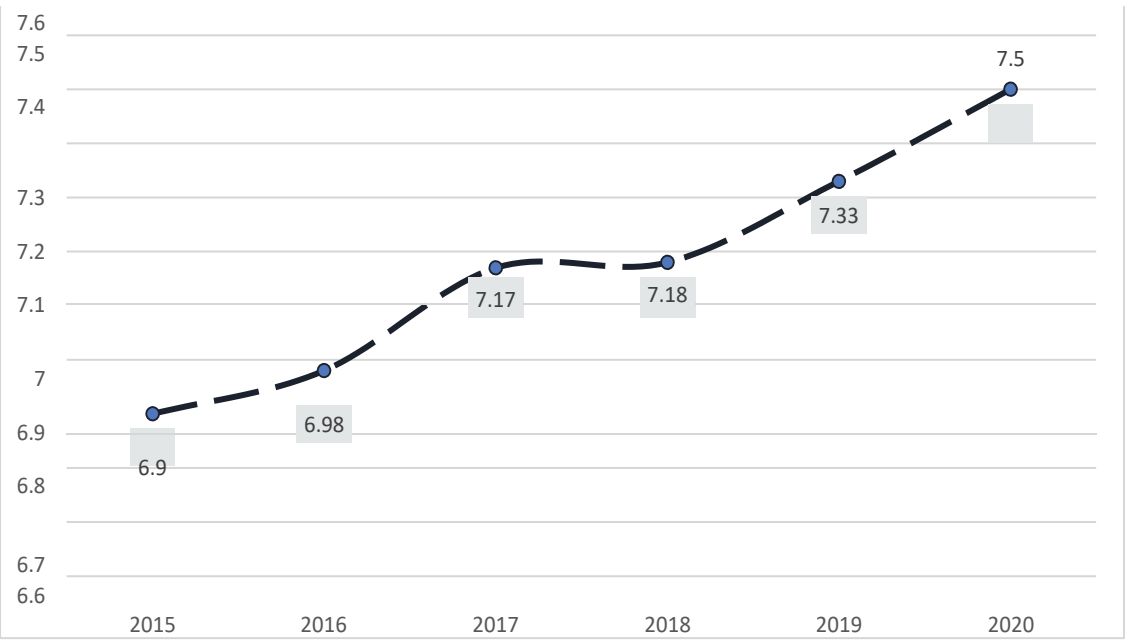

Gambar 2.23 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Serang, 2015-2020

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021

Pada tahun 2020, Kabupaten Serang berada pada posisi tiga terbawah dengan RLS terendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Posisi RLS tertinggi diduduki oleh Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 11,81 tahun, selanjutnya Kota

Tangerang sebesar 10,69 tahun, dan Kota Cilegon sebesar 9,87 tahun. Ketiga kota tersebut mampu mencapai RLS di atas ketentuan wajib belajar 9 tahun, sedangkan lima wilayah lainnya masih di bawah RLS Provinsi Banten yang mencapai 8,89 tahun. Posisi terendah diduduki oleh Kabupaten Lebak dengan angka RLS sebesar 6,40 tahun.

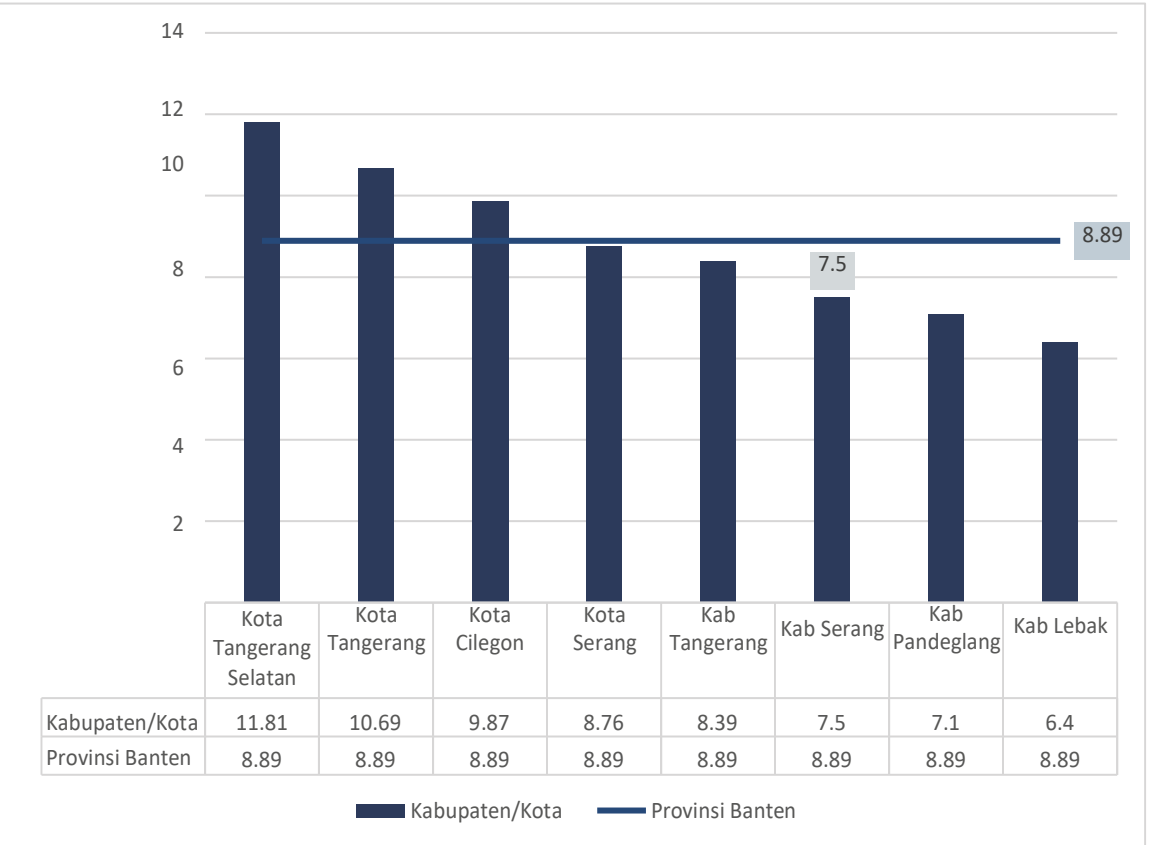

	Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang	Kota Cilegon	Kota Serang	Kab Tangerang	Kab Serang	Kab Pandeglang	Kab Lebak
Kabupaten/Kota	11.81	10.69	9.87	8.76	8.39	7.5	7.1	6.4
Provinsi Banten	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89

Gambar 2.24 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2020

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021 (diolah)

2.2.2.3 Angka Harapan Lama Sekolah

Selain angka rata-rata lama sekolah, indikator yang juga merupakan representasi pembangunan manusia dalam aspek pendidikan adalah angka harapan lama sekolah (HLS). HLS dapat diartikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Penghitungan HLS bertujuan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya Pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

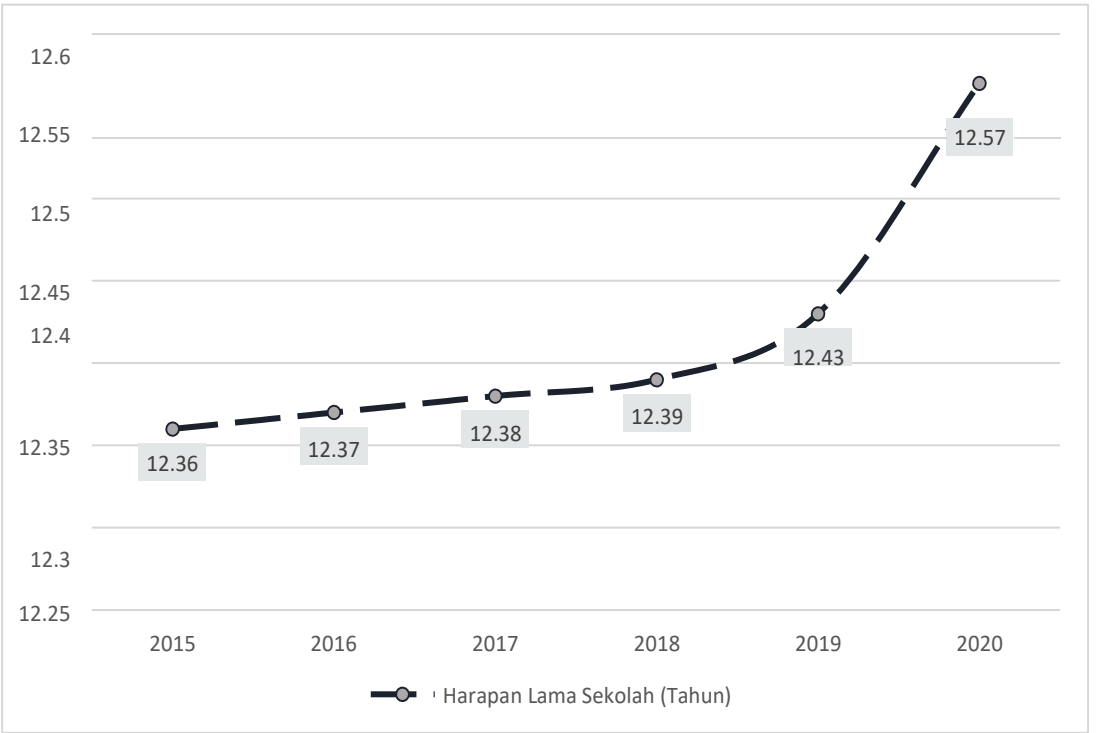

Gambar 2.25 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Serang, 2015-2020

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021

Sama seperti angka RLS, angka HLS Kabupaten Serang selama periode 2015-2020 juga selalu mengalami peningkatan setiap tahun, dengan peningkata terbesar terjadi di tahun 2020. Pada tahun 2015, angka HLS Kabupaten Serang hanya sebesar 12,36 tahun, kemudian meningkat setiap tahun hingga pada tahun 2020 menjadi 12,57 tahun. Angka HLS Kabupaten Serang pada tahun 2020 tersebut menunjukkan bahwa lamanya sekolah yang akan dicapai oleh anak umur tertentu di masa yang akan datang adalah selama 12,57 tahun atau telah lulus pendidikan SMA. Namun demikian, HLS di Kabupaten Serang cenderung masih jauh di bawah HLS ideal yaitu sebesar 18 tahun sehingga pemerintah Kabupaten Serang harus memberikan prioritas dan pemantauan secara terus menerus terhadap program pembangunan pendidikan serta perbaikan sistem pendidikan di Kabupaten Serang.

Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Banten, HLS Kabupaten Serang berada pada posisi kedua terbawah dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi

Banten yaitu sebesar 12,57 tahun. Posisi HLS tertinggi pertama diduduki oleh Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 14,47 tahun, selanjutnya Kota Tangerang sebesar 13,85 tahun, dan Kota Pandeglang sebesar 13,47 tahun. Terdapat empat wilayah dengan HLS di atas HLS Provinsi Banten, dan terdapat 4 wilayah pula yang memiliki angka HLS di bawah HLS Provinsi Banten. Posisi terendah diduduki oleh Kabupaten Lebak dengan angka HLS sebesar 11,97 tahun.

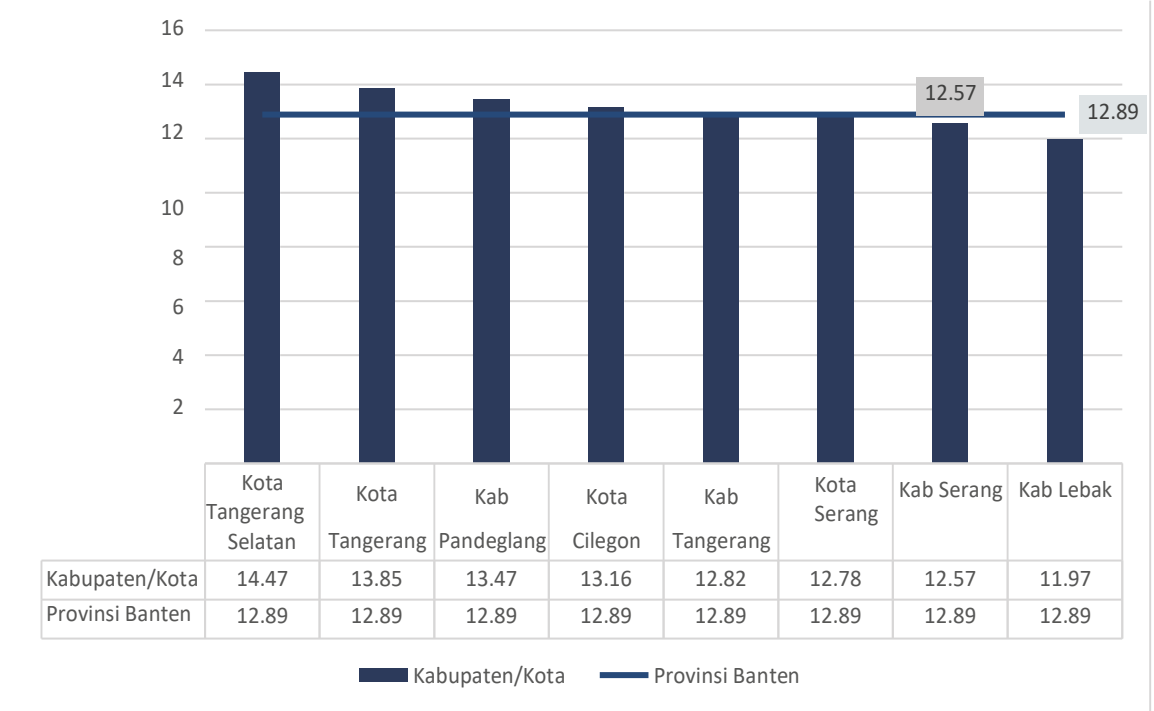

	Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang	Kab Pandeglang	Kota Cilegon	Kab Tangerang	Kota Serang	Kab Serang	Kab Lebak
Kabupaten/Kota	14.47	13.85	13.47	13.16	12.82	12.78	12.57	11.97
Provinsi Banten	12.89	12.89	12.89	12.89	12.89	12.89	12.89	12.89

Gambar 2.26 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2020

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021 (diolah)

2.2.2.4 Angka Usia Harapan Hidup

Aspek kesehatan juga termasuk dalam salah satu indikator perhitungan IPM yang dicerminkan oleh angka usia harapan hidup. Angka usia harapan hidup didefinisikan sebagai perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Perhitungan indikator ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Semakin tinggi AHH, mengindikasikan bahwa semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah.

Sama seperti indikator aspek pendidikan, angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Serang selama periode 2015-2020 juga mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun

2015, AHH di Kabupaten Serang adalah sebesar 63,59 tahun, kemudian terus mengalami peningkatan setiap tahun hingga mencapai 64,64 tahun pada tahun 2020, dengan rata-rata peningkatan AHH per tahun sebesar 0,21 tahun. AHH sebesar 64,64 tahun menggambarkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Serang dapat menjalani hidup selama 64 tahun. Perkembangan AHH setiap tahun di Kabupaten Serang tercatat tidak melebihi satu dalam satu periode jangka waktu satu tahun.

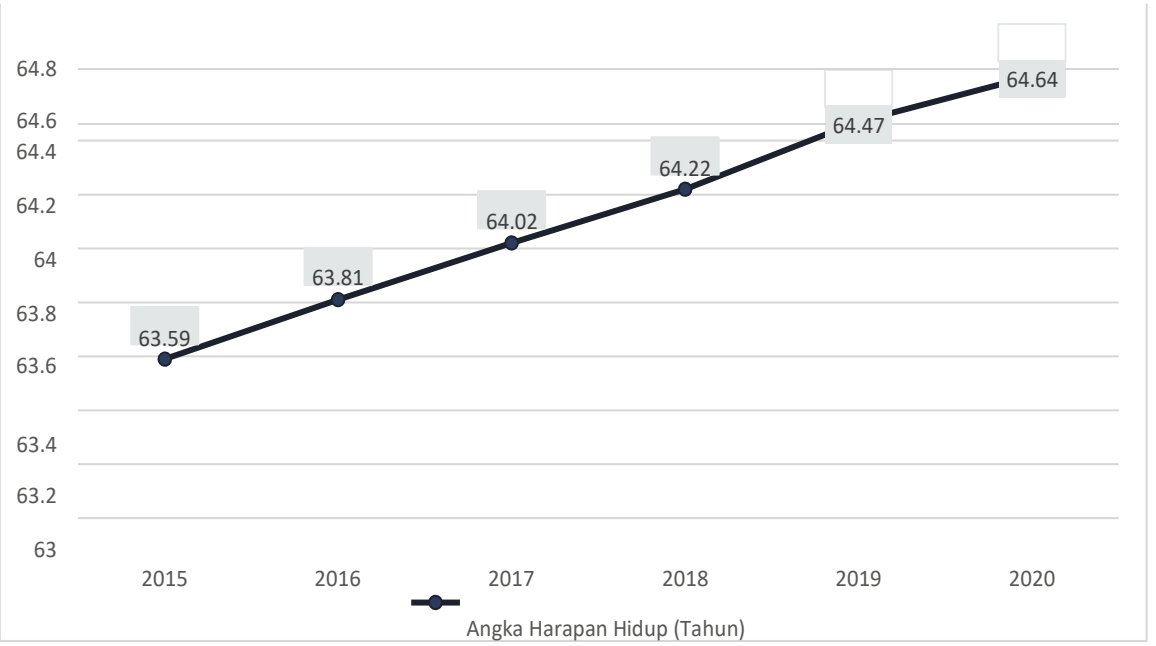

Gambar 2.27 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Serang, 2015-2020

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021

Pada tahun 2020, AHH Kabupaten Serang menempati posisi terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Sedangkan HLS tertinggi diduduki oleh Kota Tangerang Selatan yaitu mencapai 72,47 tahun, disusul Kota Tangerang dengan AHH sebesar 71,60 tahun, dan Kota Tangerang sebesar 69,89 tahun. Walaupun demikian, enam dari delapan kabupaten/kota memiliki AHH di bawah AHH Provinsi Banten yang mencapai 69,96 tahun. Posisi terendah kedua setelah Kabupaten Serang adalah Kabupaten Pandeglang dengan AHH sebesar 64,66 tahun.

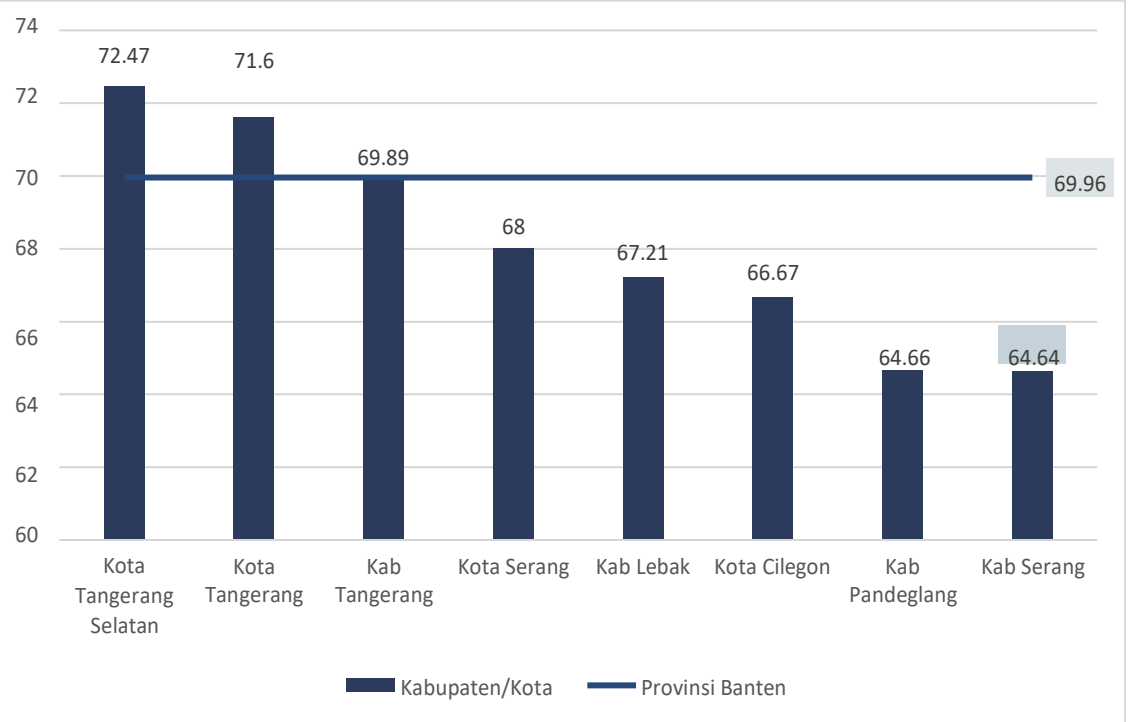

Gambar 2.28 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2020

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021 (diolah)

2.2.2.5 Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk merupakan salah satu klasifikasi status gizi dimana kondisi kurang gizi diketahui berdasarkan antropometri seperti pertambahan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, dan lain-lain. Balita dikatakan terkena gizi buruk dilihat dari perbandingan antara berat badan menurut umur maupun panjang badannya dengan standar yang telah ditetapkan. Menurut WHO, sebanyak 54% penyebab kematian bayi dan balita disebabkan karena keadaan gizi buruk pada anak. Anak yang mengalami gizi buruk memiliki risiko meninggal 13 kali lebih besar dibandingkan anak yang normal.

Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Banten, pendataan gizi buruk di Provinsi Banten didasarkan pada 2 kategori yaitu dengan indikator membandingkan berat badan dengan umur (BB/U) dan membandingkan berat badan dengan tinggi badan (BB/TB). Skrining pertama dilakukan di posyandu dengan membandingkan berat badan dengan umur melalui kegiatan penimbangan, jika ditemukan balita yang berada di bawah garis merah (BGM) atau dua kali tidak naik (2T), maka dilakukan konfirmasi status gizi dengan menggunakan indikator berat badan menurut tinggi badan. Jika ternyata balita tersebut

merupakan kasus gizi buruk, maka segera dilakukan perawatan gizi buruk sesuai pedoman di posyandu dan puskesmas. Jika ternyata terdapat penyakit penyerta yang berat dan tidak dapat ditangani di Puskesmas maka segera dirujuk ke rumah sakit. Berdasarkan data Profil Kesehatan Kabupaten Serang Provinsi Banten tahun 2019 ditemukan 223 kasus gizi buruk di Kabupaten Serang. Kemudian sedikit menurun pada tahun 2020 menjadi 207 kasus.

Gizi buruk berdampak pada tumbuh kembang anak yang tidak sempurna, tubuh anak akan terhambat pertumbuhannya bahkan bisa menyebabkan terhentinya pertumbuhan sebelum waktunya. Tubuh anak bisa menjadi pendeh (Stunting) dan kurus (Wasting). Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Tabel 2.19 Prevalensi Stunting Kabupaten Serang Tahun 2018 sampai 2020

Tahun	Jumlah Sasaran Balita 0-59 bulan yg diukur (tb/u)	Balita dengan status “Pendek” dan "Sangat Pendek"	%
2018	57456	13840	24,09
2019	11437	2331	20,38
2020	107837	13652	12,66

2.2.2.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat digambarkan dengan laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti tingkat partisipasi angkatan kerja maupun distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Selain itu, dapat pula dilihat apakah pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan, dan pada akhirnya peningkatan pendapatan penduduk akan mengarah kepada pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya beli).

BPS mendefinisikan angkatan kerja sebagai penduduk usia kerja yang bekerja, atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, maupun yang mencari pekerjaan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Serang (2021), jumlah angkatan kerja di Kabupaten Serang pada tahun 2020 berjumlah 699.858 orang, terdiri dari 455.162 orang laki-laki dan 244.696 orang perempuan. Menurut tingkat pendidikannya, pada tahun yang sama persentase angkatan kerja tertinggi di Kabupaten Serang adalah tidak tamat atau lulusan SD yaitu sebesar 39,70 persen. Kemudian angkatan kerja lulusan SMA/SMK/MA sebesar 30,75 persen, disusul pendidikan SMP/MTs sebesar 24,41 persen, dan persentase terendah pendidikan diploma/sarjana sebesar 5,13 persen. Angkatan kerja dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada tahun 2020, jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Serang berjumlah 614.320 orang terdiri atas 392.626 laki-laki dan 221.694 perempuan. Sedangkan pengangguran terbuka di Kabupaten Serang mencapi 85.538 orang, terdiri atas 62.536 laki-laki dan 23.002 perempuan.

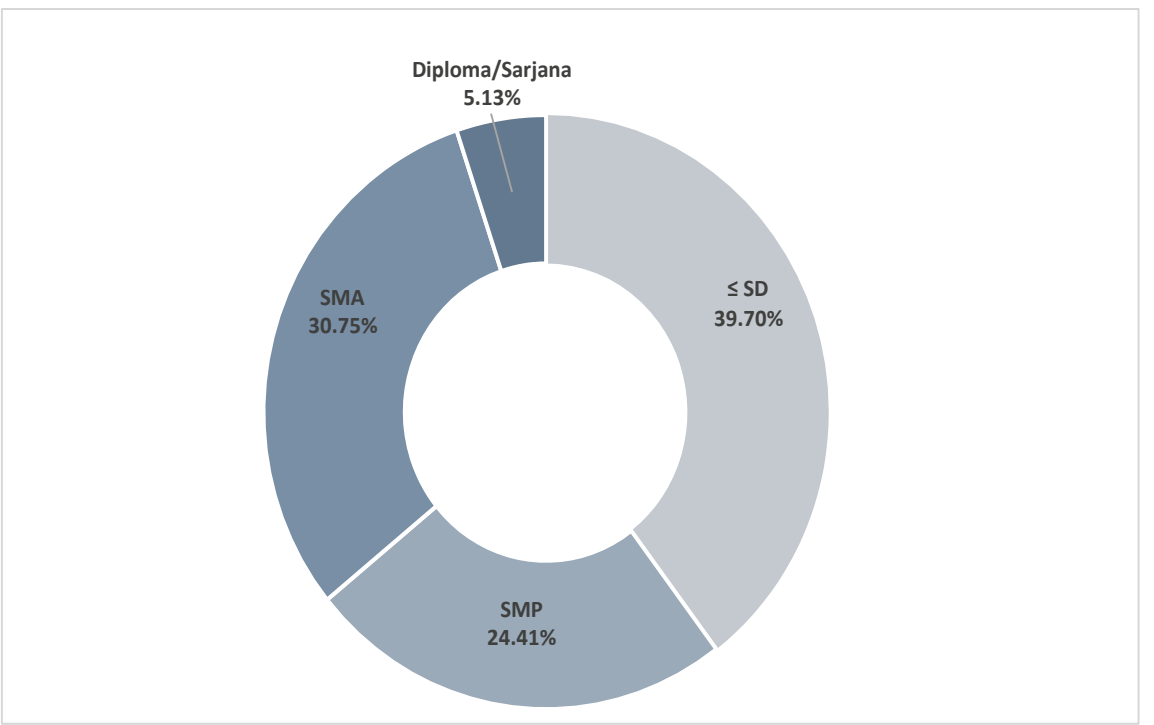

Gambar 2.29 Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2020

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, 2021 (diolah)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase angkatan kerja terhadap total angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Sepanjang tahun 2017-2020, TPAK Kabupaten Serang cenderung menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017, TPAK Kabupaten Serang mencapai 59,95 persen. Mengalami peningkatan TPAK pada tahun 2018 dan 2019 menjadi 62,42 persen dan 64,06 persen. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar 0,61 menjadi 63,45. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Serang pada tahun 2020 menunjukkan nilai sebesar 63,45 persen dapat diinterpretasikan bahwa setiap 100 orang penduduk terdapat sekitar 63 orang yang merupakan angkatan kerja. Persentase TPAK yang cukup tinggi akan mendukung dari sisi produktivitas tenaga kerja, sehingga tenaga kerja tersebut akan mengarah pada produktivitas yang tinggi. Namun, produktivitas juga harus dikaitkan dengan tingkat pendidikan tenaga kerja di Kabupaten Serang. Karena meskipun jumlah tenaga kerja besar kalau tidak diimbangi dengan skill atau keterampilan yang memadai tidak akan menghasilkan produktivitas yang diinginkan.

Tabel 2.20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Serang, 2017-2020

Tahun	Angkatan Kerja (orang)	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas (orang)	TPAK (%)
2017	628.101	1.047.648	59,95
2018	659.042	1.055.834	62,42
2019	681.450	1.063.849	64,06
2020	699.858	1.102.850	63,45

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, 2018-2020 (diolah)

Lebih dari itu, jika dilihat menurut gender terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara TPAK laki-laki dan perempuan dimana TPAK laki-laki pada tahun 2020 mencapai 41,27 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 22,18 persen. Selisih yang cukup jauh antara TPAK laki-laki dan perempuan memperlihatkan bahwa secara umum kesempatan penduduk laki-laki dalam kegiatan ekonomi lebih besar dibanding penduduk perempuan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pencari nafkah dalam keluarga di Kabupaten Serang adalah kaum laki-laki. Alasan utama rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan laki-laki di Kabupaten Serang dikarenakan perempuan lebih banyak mengurus rumah tangga yakni sebesar 229.454 orang dari total penduduk berumur 15 tahun keatas berjenis kelamin perempuan sebesar 546.416 orang.

Tabel 2.21 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2020

Uraian	TPAK (%)
Laki-laki	41,27
Perempuan	22,18
TPAK (%)	63,45

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, 2020 (diolah)

Sementara itu jika dibandingkan dengan Provinsi Banten, TPAK Kabupaten Serang masih berada dibawah TPAK Provinsi Banten yang mencapai 64,52 persen, dan berada pada posisi keempat dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Banten. TPAK tertinggi di Provinsi Banten ditempati oleh Kabupaten Tangerang dengan TPAK sebesar 66,69 persen. Posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Kota Tangerang dan Kabupaten Lebak dengan TPAK masing-masing sebesar 65,7 dan 64,81 persen. Sedangkan lima daerah lainnya masih dibawah TPAK Provinsi Banten. Sedangkan TPAK terendah yakni Kota Tangerang Selatan dengan persentase sebesar 61,37 persen.

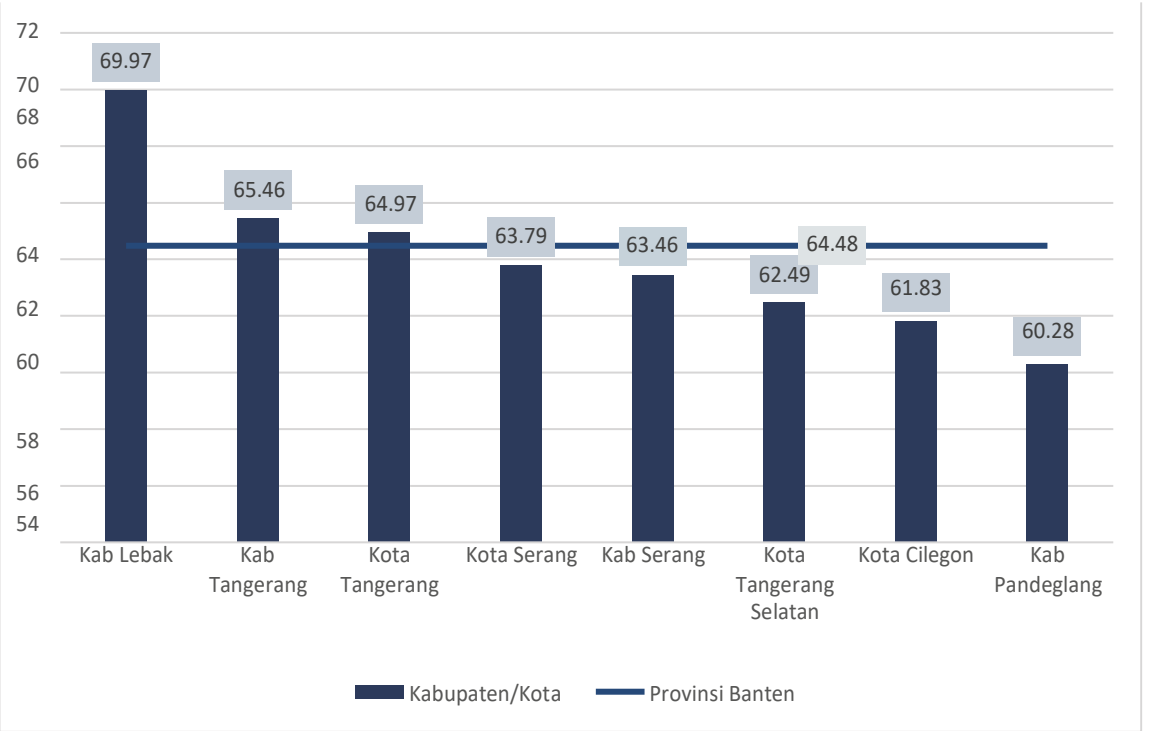

Gambar 2.30 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (%), 2020

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021 (diolah)

Jika dibandingkan dengan TPAK di Provinsi Banten dan Nasional, selama periode 2016-2020 TPAK Kabupaten Serang masih berada di bawah TPAK Provinsi maupun Nasional. Walaupun demikian selisih TPAK dari tahun ke tahun semakin mengecil. Pada tahun 2016 selisih TPAK Kabupaten Serang dengan Provinsi Banten mencapai 3,27 persen, sedangkan selisih dengan TPAK Nasional mencapai 5,37 persen. Sementara pada tahun 2020 selisih TPAK Kabupaten Serang dengan Provinsi Banten hanya sebesar 1,03 persen, sedangkan selisih dengan TPAK Nasional mencapai 4,32 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia produktif yang terjun untuk bejerha dan mencari pekerjaan, sehingga perlu pula menyediakan lesempatan kerja yang memadai.

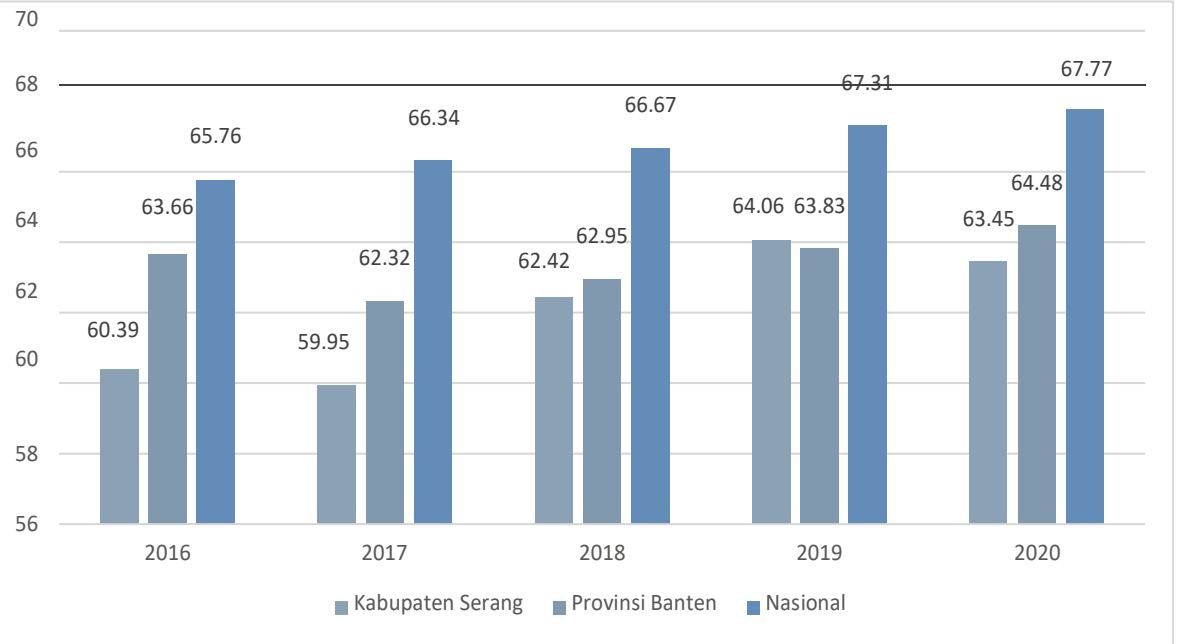

Gambar 2.31 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dan Nasional (%), 2016-2020

Sumber: BPS dan Provinsi Banten Dalam Angka, 2021 (diolah)

2.2.2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka (*open unemployment*) adalah penduduk usia kerja yang tidak punya pekerjaan dan sementara tidak bekerja, terdiri dari: (a) mereka yang mencari pekerjaan, (b) mereka yang mempersiapkan usaha, (c) mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (d) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja (bps.go.id). Pengertian pengangguran tidak dapat disamakan dengan pencari kerja, karena sering kali terjadi di antara pencari kerja terdapat mereka yang tergolong bekerja namun karena berbagai alasan mencari pekerjaan lain, untuk kasus tersebut, kelompok tersebut akan tergolong sebagai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Nilai TPT berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Semakin rendah angka TPT menunjukkan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin baik. Selama periode 2016-2020, TPT Kabupaten Serang cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Pada tahun 2017, angka TPT di Kabupaten Serang mencapai angka 13,00 persen. TPT di Kabupaten Serang terus mengalami penurunan dua tahun berturut-turut yakni menjadi 12,78 persen di tahun 2018 dan 10,65 persen pada tahun 2019. Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,57 menjadi 12,22 persen.

Tabel 2.22 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Serang, 2016-2020

Tahun	TPT (%)
2016	n.a
2017	13,00
2018	12,78
2019	10,65
2020	12,22

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, 2021

Sementara jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, perbandingan antara TPT laki-laki dan perempuan adalah sebesar 8,94 persen dan 3,29 persen Besaran tingkat pengangguran terbuka tentunya berbanding terbalik dengan tingkat kesempatan kerja di suatu wilayah.

Tabel 2.23 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin, 2020

Uraian	TPT (%)
Laki-laki	8,94
Perempuan	3,29
TPT (%)	**12,22**

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, 2021 (diolah)

Jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Banten, TPT Kabupaten Serang masih berada diatas TPT Provinsi Banten sebesar 10,64 persen, dan merupakan 3 daerah dengan TPT tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Banten. Selain Kabupaten Serang, Kabupaten/Kota yang juga mencapai persentase TPT di atas TPT Provinsi Banten adalah Kota Cilegon dan Kabupaten Tangerang dengan masing-masing TPT sebesar 12,69 dan 13,06. Sedangkan daerah yang memiliki TPT terendah yakni Kota Tangerang Selatan dengan persentase sebesar 8,48 persen.

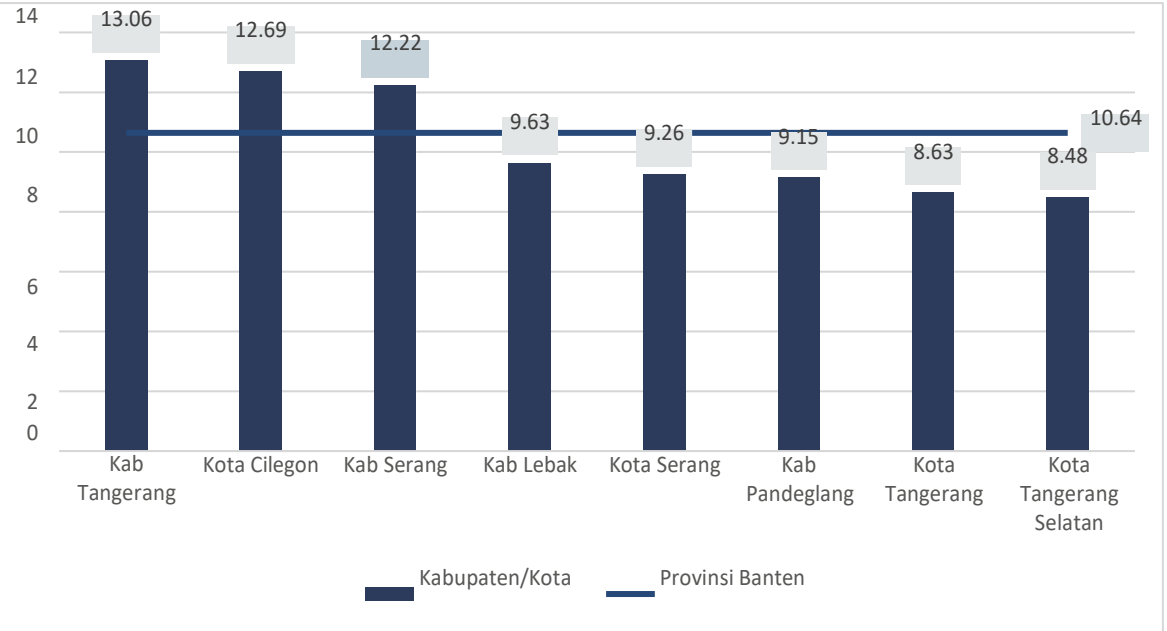

Gambar 2.32 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (%), 2020

Sumber: Provinsi Banten Dalam Angka, 2021 (diolah)

Selama tahun 2017-2020, TPT di Kabupaten Serang berada di atas TPT di Provinsi Banten dan Nasional. Rata-rata TPT Kabupaten Serang setiap tahunnya mencapai 12,11 persen, sedangkan TPT Provinsi Banten mencapai rata-rata 9,08 persen, sementara TPT Nasional hanya mencapai 5,72 persen setiap tahunnya. Walaupun demikian selisih TPT dari tahun ke tahun semakin mengecil. Pada tahun 2017 selisih TPT Kabupaten Serang dengan Provinsi Banten mencapai 3,72 persen, sedangkan selisih dengan TPT Nasional mencapai 7,5 persen. Sementara pada tahun 2020 selisih TPT Kabupaten Serang dengan Provinsi Banten hanya sebesar 1,58 persen. sedangkan selisih dengan TPT Nasional sebesar 5,15 persen. Namun demikian, perlu diwaspadai bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan bertambahnya pengangguran di Kabupaten Serang sehingga diperlukan upaya dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Tabel 2.24 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Serang, 2017-2020

Tahun	TPT (%)		
	Kabupaten Serang	Provinsi Banten	Nasional
2017	13,00	9,28	5,50
2018	12,63	8,47	5,30

Tahun	TPT (%)		
	Kabupaten Serang	Provinsi Banten	Nasional
2019	10,58	8,11	5,23
2020	12,22	10,64	7.07

Sumber: BPS dan Provinsi Banten Dalam Angka, 2021

2.2.2.8 Rasio Penduduk yang Bekerja

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tingkat pengangguran terbuka adalah persentase dari jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Sementara rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Tabel 2,24 menunjukkan bahwa selama periode 2016-2020 rasio penduduk bekerja di Kabupaten serang semakin meningkat, diperkuat dengan nilai rasio yang terus naik tiap tahun. Walaupun jumlah angkatan kerja meningkat, namun angkatan kerja yang bekerja pun juga mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2016, rasio penduduk bekerja mencapai 87,00 persen, dan terus meningkat hingga pada tahun 2019 menjadi sebesar 89,35 persen. Kemudian mengalami penurunan menjadi 87,78 pada tahun 2020.

Tabel 2.25 Rasio Penduduk Bekerja di Kabupaten Serang, 2017-2020

Tahun	Angkatan Kerja Bekerja (orang)	Jumlah Angkatan Kerja (orang)	Rasio Penduduk Bekerja (%)
2017	546.473	628.101	87,00
2018	574.879	659.042	87,23
2019	608.866	681.450	89,35
2020	614.320	699.858	87,78

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, 2018-2021 (diolah)

Demikian pula jika dilihat menurut jenis kelaminnya, pada tahun 2020 perbandingan rasio penduduk bekerja laki-laki dan perempuan hampir sama, masing-masing mencapai 86,26 persen dan 90,6 persen, Hal ini mencerminkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan kerja yang sama. Namun demikian, pada kenyataannya pertambahan persediaan lapangan pekerjaan tidak secepat pertambahan jumlah angkatan kerja, sehingga jumlah lapangan pekerjaan yang ada tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang jumlahnya terus meningkat. Lapangan pekerjaan semakin menjadi rebutan sekian banyak para pencari kerja yang yang terdapat di pasar

kerja. Mereka yang kalah bersaing harus tersingkir dari lapangan pekerjaan dan menjadi pengangguran. Semakin lebar jarak antara jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah para pencari kerja, maka semakin lama jumlah pengangguran juga akan terakumulasi sehingga beban pasar kerja untuk menyediakan lapangan pekerjaan akan semakin berat.

Tabel 2.26 Rasio Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin, 2020

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Bekerja (orang)	392.626	221.694	614.320
Pengangguran Terbuka (orang)	62.536	23.002	85.538
Angkatan Kerja (orang)	455.162	244.696	699.858
Rasio penduduk yang bekerja (%)	86,26	90.60	87,78

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, 2021 (diolah)

2.2.2.9 Indeks Kepuasan Masyarakat dan Opini BPK

Salah satu cara perwujudan tata kelola pemerintah yang baik yaitu dengan mengupayakan tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan. Pencapaian keberhasilan tata kelola pemerintahan dapat dinilai dari beberapa indikator seperti Indeks Kepuasan Masyarakat dan opini BPK. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pendapat masyarakat terhadap perolehan pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 nilai IKM Kabupaten Serang selalu memperoleh nilai B.

Tabel 2.27 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Serang, 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	IKM	B	B	B	B	B

Sumber: LKPJ Kabupaten Serang, 2016-2020

Sedangkan opini BPK adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pembuatan laporan

keuangan ini didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undang, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Hasil Opini BPK selama tahun 2015-2018 selalu memperoleh penilaian WTP. Pada tahun 2018 hasil opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sebesar 80,27% dengan predikat Baik.

Tabel 2.28 Opini BPK Kabupaten Serang, 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: LKPJ Kabupaten Serang, 2015-2019

2.2.2.10 Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari pungutan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (www.djpk.kemenkeu.go.id). PAD terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Selama periode 2016-2020, persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Serang relatif menurun, walaupun sempat mengalami peningkatan di tahun 2017. Pada tahun 2016, kontribusi PAD mencapai 23,94 persen. Kemudian, pada tahun 2017 terjadi peningkatan kontribusi yang cukup signifikan yakni sebesar 5,07 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 kontribusi PAD mengalami penurunan berturut-turut masing-masing menjadi sebesar 23,88 persen dan 23,39 persen.

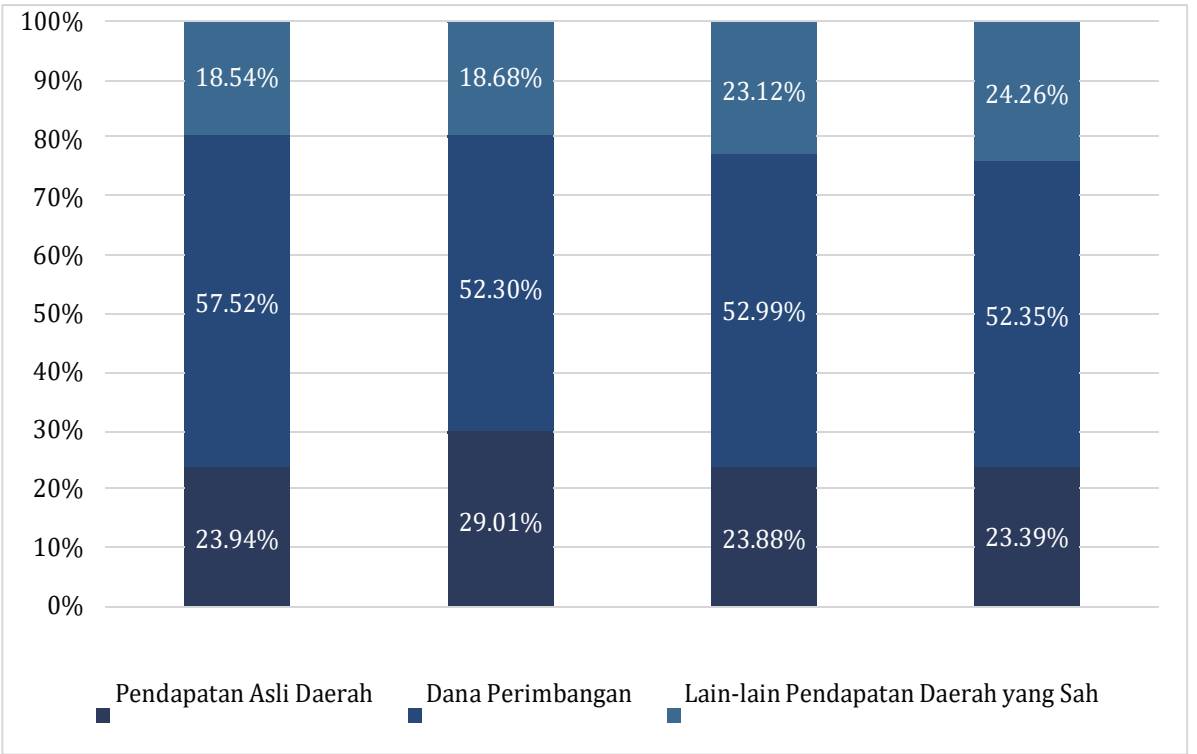

Gambar 2.33 Persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Serang, 2016-2019

Sumber: LRA Kabupaten Serang 2016-2019 (diolah)

Sedangkan jika berdasarkan nominalnya PAD Kabupaten Serang selama periode 2016-2019 sencerung fluktuatif. Pada tahun 2016 PAD mencapai 590.865 juta rupiah. Kemudian naik cukup tajam pada tahun 2017 menjadi 815.399 juta rupiah. Pada tahun 2018 PAD Kabupaten Serang turun menjadi 697.085 juta rupiah, dan kembali meningkat pada tahun 2019 sebesar 10.780 juta rupiah menjadi 707.865 juta rupiah.

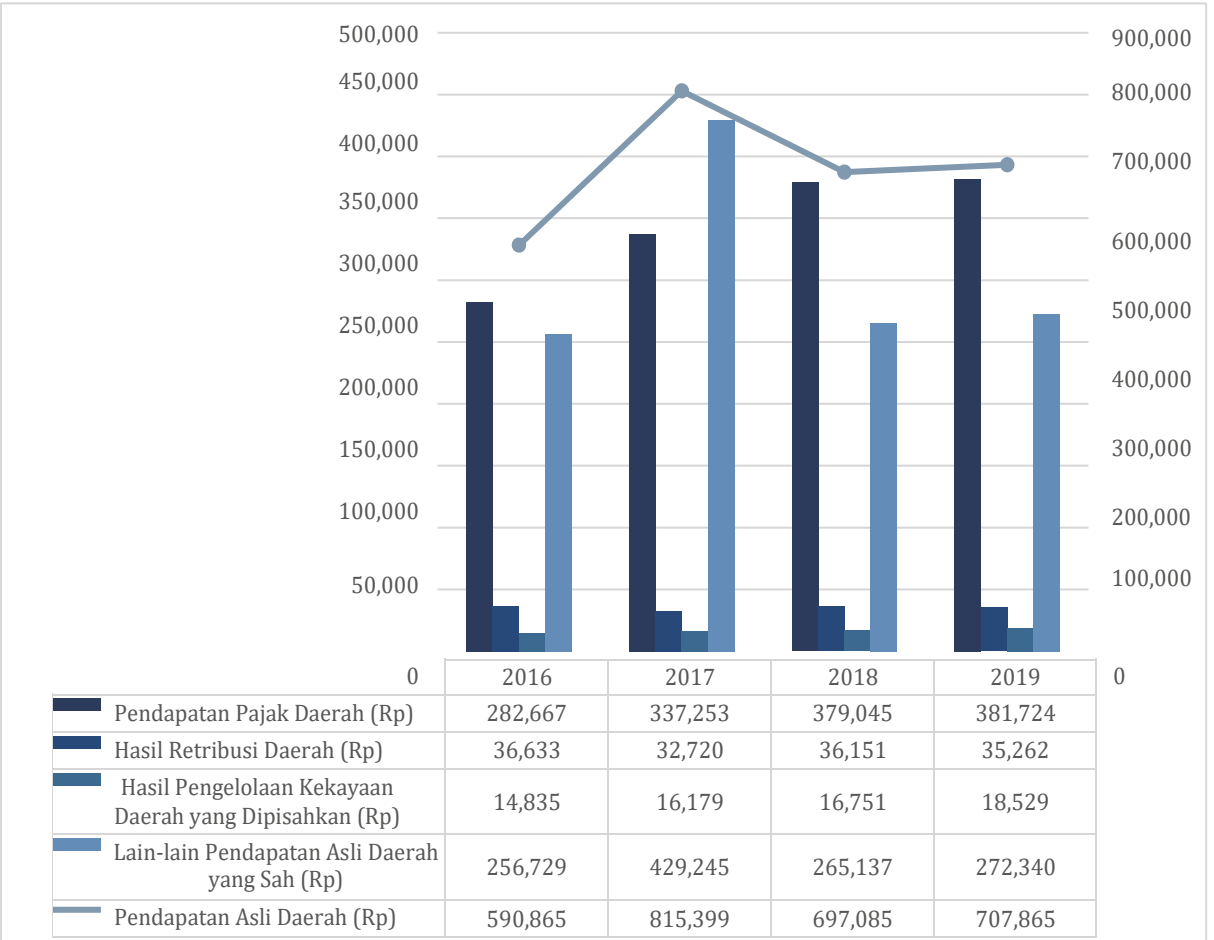

	2016	2017	2018	2019
Pendapatan Pajak Daerah (Rp)	282,667	337,253	379,045	381,724
Hasil Retribusi Daerah (Rp)	36,633	32,720	36,151	35,262
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp)	14,835	16,179	16,751	18,529
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Rp)	256,729	429,245	265,137	272,340
Pendapatan Asli Daerah (Rp)	590,865	815,399	697,085	707,865

Gambar 2.34 Struktur PAD Kabupaten Serang dalam Juta Rupiah, 2016-2019

Sumber: LRA Kabupaten Serang, 2016-2019 (diolah)

Namun jika dilihat berdasarkan komponennya, selama periode 2016-2019 pendapatan pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan cenderung mengalami peningkatan, sedangkan hasil retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah cenderung fluktuatif. Pendapatan pajak daerah pada tahun 2016 sebesar 282.667 juta rupiah, kemudian terus meningkatan hingga pada tahun 2019 mencapai 381.724. Demikian pula hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pada tahun 2016 mencapai 14.835 juta rupiah, kemudian terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 mencapai 18.529 juta rupiah. Namun demikian sama seperti penerimaan PAD secara keseluruhan, hasil retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah sempat mengalami penurunan di tahun 2018, tetapi meningkat pada tahun 2017 dan 2019. Walaupun demikian, dampak Pandemi Covid-19 di tahun 2020 ini dapat berpengaruh pada penerimaan PAD hingga satu atau dua tahun ke depan.

2.2.2.11 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, negara berkewajiban untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh NKRI sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Salah satu perwujudan ketersediaan pangan tersebut, merujuk pada undang-undang, adalah dengan menilai kecukupan gizi, baik kecukupan gizi dalam bentuk energi dan protein maupun keberagaman ketersediaan gizi. Keanekaragaman ketersediaan konsumsi pangan penduduk diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang yang secara kuantitatif diimplementasikan dalam indikator Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. PPH digunakan untuk bahan perencanaan konsumsi, kebutuhan, dan penyediaan suatu pangan wilayah. Perhitungan PPH terbentuk dari beberapa komponen yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi.

Tabel 2.29 Skor Pola Pangan Harapan (PPH), 2015-2020

Perhitungan Skor PPH	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konsumsi kalori	1825,1	2095,2	2101,0	2079,2	2094,5	2570,2
Persentase AKE	84,9	97,5	97,7	96,7	97,4	119,5
Skor Aktual	101,5	99,5	99,8	94,5	101,7	116,5
Skor AKE	86,2	96,9	97,5	91,4	99,1	139,2
Skor PPH	**84,3**	**86,1**	**86,5**	**87,4**	**88,6**	**88,9**

Sumber: Analisis Konsumsi dan Perencanaan Pangan Kabupaten Serang, 2015-2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa konsumsi kalori per kapita selama periode 2015-2020 cenderung meningkat walaupun sempat turun pada tahun 2018. Pada tahun 2015 konsumsi kalori per kapita mencapai 1825,1, kemudian meningkat dua tahun bertururt-turut yakni sebesar 2095,2 tahun 2016, dan 2101,0 pada tahun 2017. Namun demikian, pada tahun 2018 turun hingga mencapai 2079,2, tetapi kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 2094,5. Sedangkan tahun 2020 meningkat signifikan hingga mencapai 2570,2 atau naik sebesar 475,7. Demikian pula dengan persentase AKE, skor aktual, dan skor AKE yang mengalami penurunan pada tahun 2018, anmun kembali

meningkat pada tahun 2019 dan 2020. Sedangkan skor PPH Kabupaten Serang selama periode 2015-2020 terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 mencapai 84,3, dan terus mengalami peningkatan setiap tahun hingga tahun 2020 mencapai 88,9.

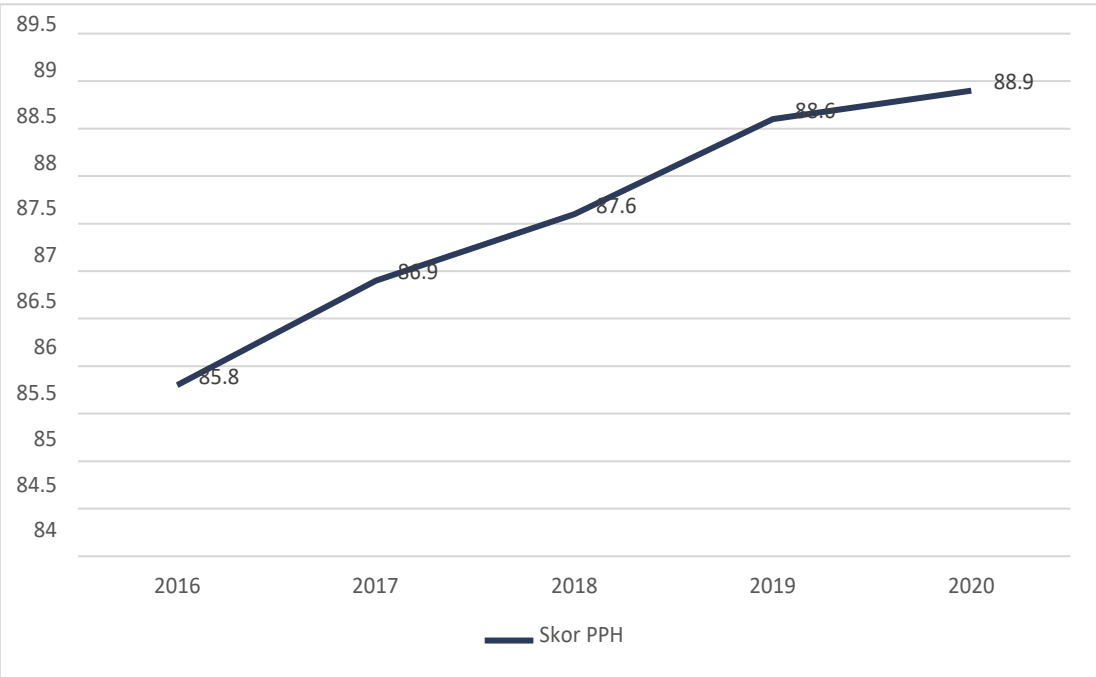

Gambar 2.35 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Serang, 2016-2020
Sumber : LKPJ Kabupaten Serang, 2016-2020

Skor PPH Kabupaten Serang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 Kabupaten Serang memperoleh skor PPH 85,8, kemudian di Tahun 2017 meningkat sebesar 1,1 menjadi 86,9. Skor PPH tertinggi terdapat pada tahun 2020 sebesar 88,9.

2.2.2.12 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Inklusif dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks ini terdiri atas 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif. Pilar I yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pilar II yaitu tentang pemerataan pendapatan dan kemiskinan. Pilar III yaitu tentang perluasan akses dan kesempatan. Nilai indeks berkisar antara 0-10, dengan nilai 1-3 adalah kurang memuaskan, nilai 4-7 adalah memuaskan, dan nilai 8-10 adalah sangat memuaskan.

Analisis mengenai indeks pembangunan ekonomi inklusif bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan. Pembangunan yang inklusif menunjukkan proses pembangunan yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Perkembangan angka indeks pembangunan ekonomi inklusif di Kabupaten Serang ditunjukkan oleh gambar berikut.

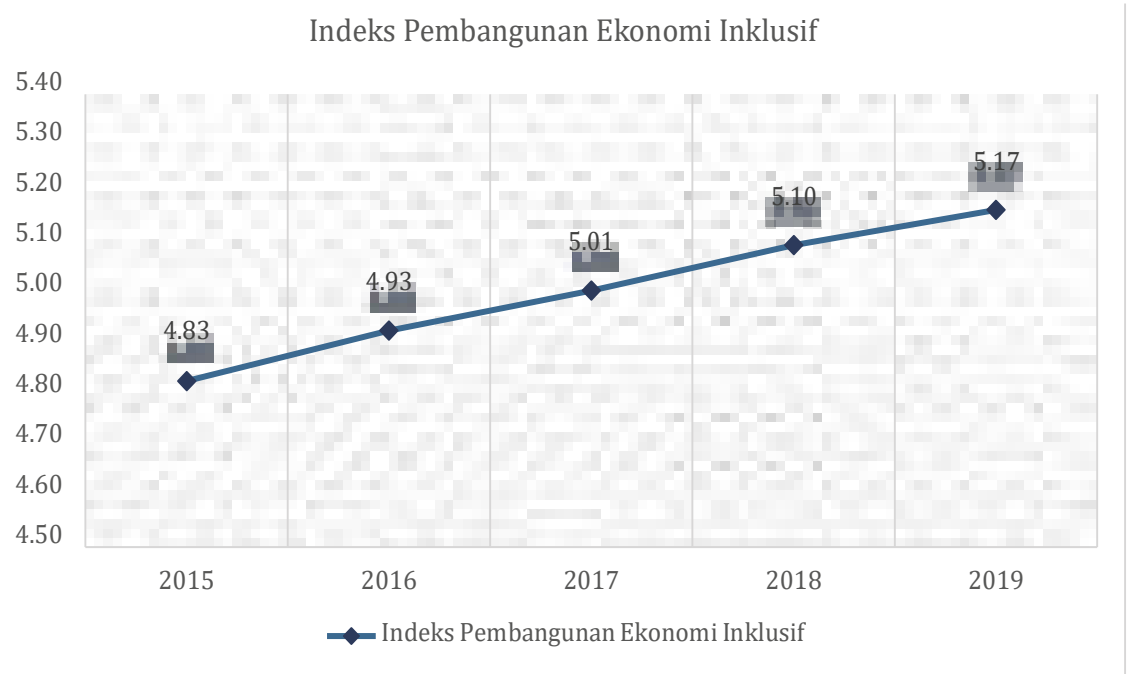

Gambar 2.36 Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Serang, 2015-2019

Sumber: Bappenas, 2020

Selama periode 2015-2019, perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Serang terus mengalami peningkatan setiap tahun, dari bernilai 4,83 pada tahun 2015 menjadi 5,17 pada tahun 2019. Selama lima tahun tersebut nilai rata-rata indeks sebesar 5,01 dan rata-rata pertumbuhan pertahun indeks sebesar 1,72 persen per tahun. Dengan nilai tersebut maka perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Serang masuk ke dalam kategori memuaskan.

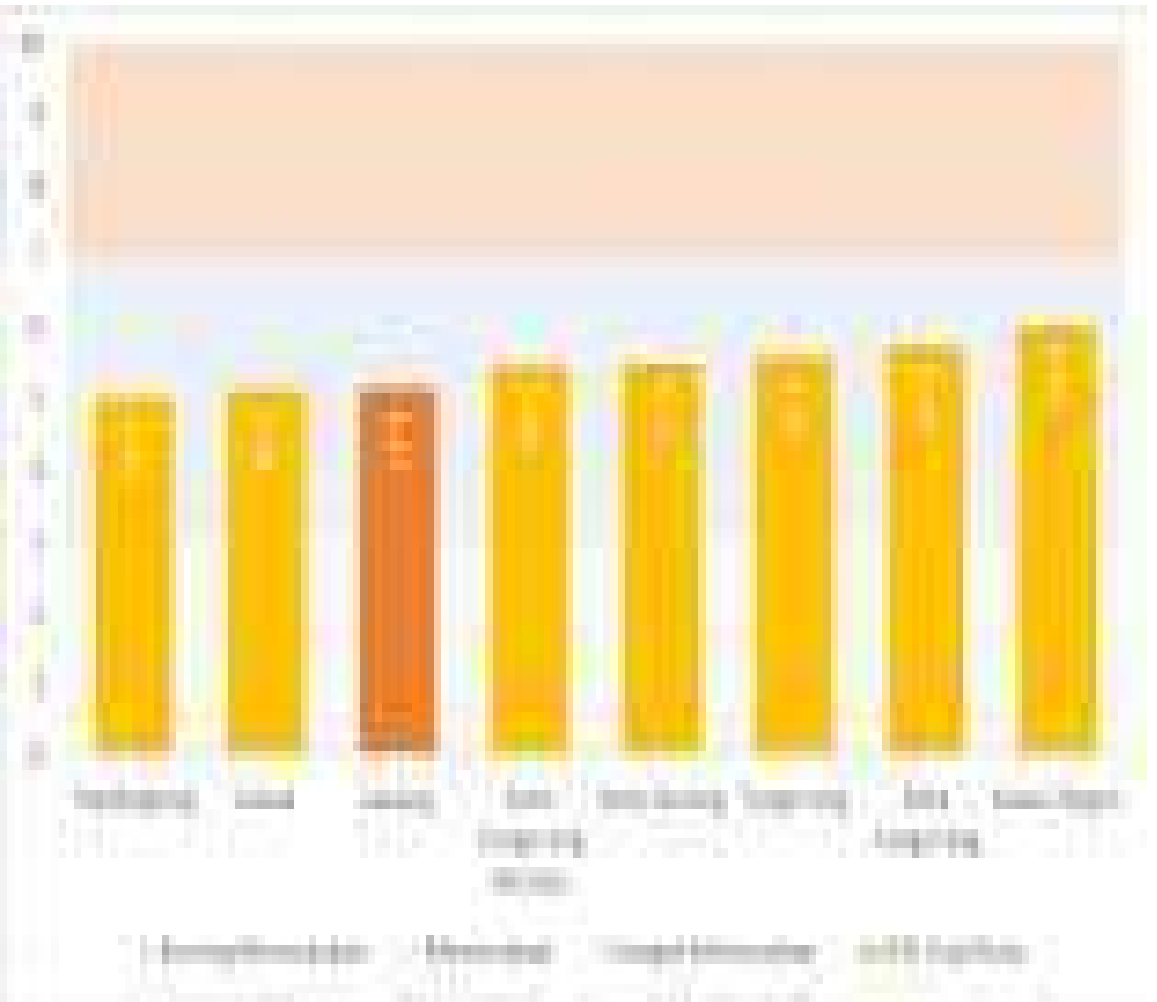

Gambar 2.37 Capaian Regional Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Provinsi Banten, 2019

Sumber: Bappenas, 2020

Jika dibandingkan dengan capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2019, maka nilai indeks Kabupaten Serang berada di peringkat 6 dari 8 kabupaten/kota dengan nilai indeks sebesar 5,17. Pada tahun 2019, capaian indeks seluruh daerah di Provinsi Banten berada pada kategori memuaskan dengan nilai indeks tertinggi dicapai oleh Kota Cilegon dengan nilai sebesar 6,03 dan nilai indeks terendah dicapai oleh Kabupaten Pandeglang dengan nilai sebesar 5,03. Sementara itu, capaian nilai indeks nasional sebesar 5,89 dan capaian Provinsi Banten yakni sebesar 5,87. Dengan demikian, capaian indeks Kabupaten Serang masih berada di bawah capaian nasional dan Provinsi Banten.

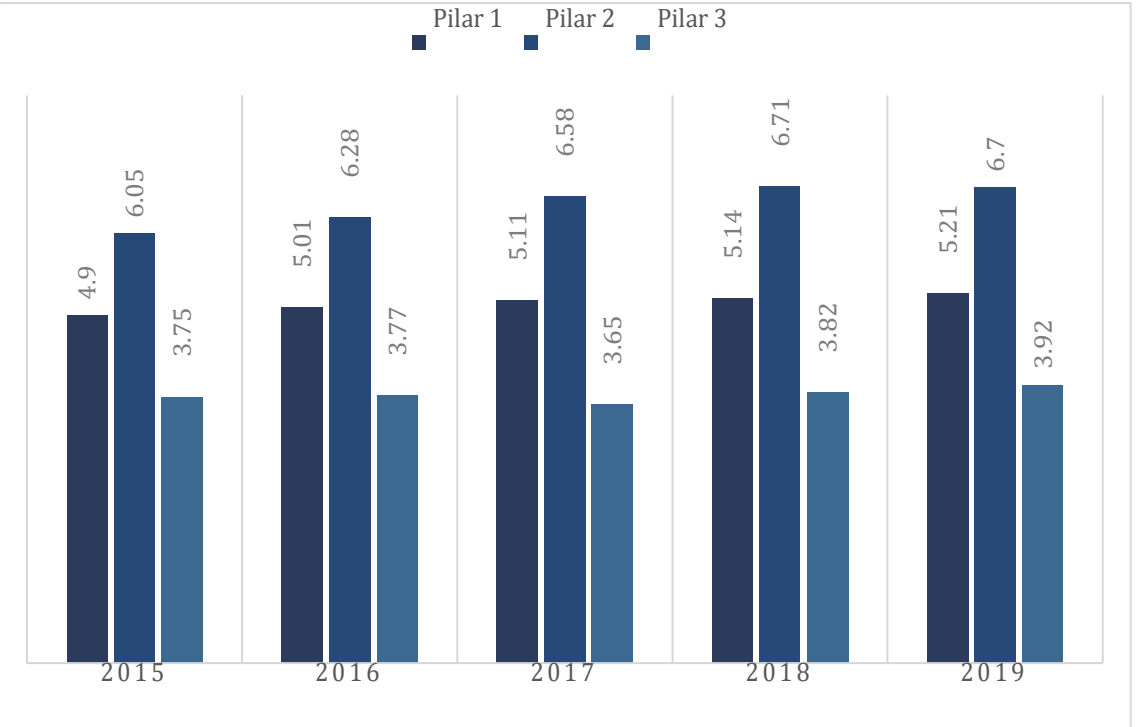

Gambar 2.38 Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Serang Per Pilar, 2015-2019

Sumber: Bappenas, 2020

Selama periode tahun 2015-2019, perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Serang berdasarkan Pilar I, Pilar II, maupun Pilar III cenderung meningkat. Selama periode tersebut capaian Pilar II tentang pemerataan pendapatan dan kemiskinan selalu yang tertinggi dengan rata-rata nilai indeks sebesar 6,46. Capaian tersebut karena selama lima tahun terakhir usaha pengentasan kemiskinan di Kabupaten Serang menunjukkan hasil yang baik dengan terus menurunnya angka kemiskinan dan garis kemiskinan yang terus meningkat. Setelah capaian Pilar II, capaian Pilar yang juga mencapai kategori memuaskan adalah Pilar I tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Sedangkan Pilar III tentang perluasan akses dan kesempatan masih berada dalam kategori kurang memuaskan. Walaupun demikian, indeks Pilar III menunjukkan nilai yang semakin menigkat tiap tahunnya.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pertumbuhan dan perkembangan aspek kesenian dan keolahragaan di masyarakat dapat menjadi salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat suatu

daerah. Pembangunan bidang seni dan budaya sangat erat hubungannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan dua sasaran pencapaian pembangunan sosial budaya dan keagamaan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika berbudaya dan beradab, serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Oleh karena itu untuk mendukung pembangunan seni dan kebudayaan dalam rangka memperkuat, mengembangkan, dan melestarikan potensi budaya lokal Pemerintah Kabupaten Serang perlu menyediakan fasilitas sarana prasana penunjang seperti gedung kesenian. Sedangkan dalam aspek olahraga pemerintah Kabupaten Serang berupaya mendorong dan mengembangkan olahraga di kalangan masyarakat dan pelajar. Hal ini merupakan tindak lanjuti dari kebijakan pemerintah pusat dalam rangka mendorong terciptanya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, serta memiliki keterampilan yang tinggi untuk memenangkan kompetisi di era persaingan bebas sebagai dampak dari globalisasi dewasa ini.

Tabel 2.30 Indikator Capaian Sasaran Seni Budaya dan Olahraga di Kabupaten Serang, 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan pembinaan organisasi kepemudaan (%)	9,09	51,51	51,51	93,33	85,71
2.	Cakupan Atlit berprestasi(%)	41,48	58	46	17,64	0
3.	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat (kecamatan) (%)	0	0	0	4	0
4.	Rata-rata cakupan SDM, organisasi, pelestarian, kajian, fasilitasi, gelar, misi dan tempat kesenian dan budaya (%)	0	100,00	100,00	100,00	86

Sumber: LKPJ Kabupaten Serang, 2016-2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama periode 2016-2020 tiap indikator memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Cakupan pembinaan organisasi kepemudaan cenderung meningkat, pada tahun 2016 hanya mencapai 9,09 persen, kemudian naik pada tahun 2017 menjadi 51,51 persen, di tahun 2018 memperoleh hasil cakupan yang sama, sedangkan tahun 2019 kembali meningkat hingga mencapai 93,33 persen namun

terjadi penurunan sebesar 7,62 persen menjadi 85,71 persen. Berbeda dengan cakupan atlit berprestasi yang sempat mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 58 persen yang pada tahun 2016 sebesar 41,48 persen. Akan tetapi, di tahun 2018, 2019, dan 2020 terus mengalami penurunan dengan masing-masing sebesar 46 persen, 17,64 persen, dan 0 persen. Sedangkan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat (kecamatan) dari tahun 2016 hingga 2018 masih nol persen, namun meningkat di tahun 2019 menjadi 4 persen dan kembali menjadi nol persen di tahun 2020. Indikator rata-rata cakupan SDM, organisasi, pelestarian, kajian, fasilitasi, gelar, misi dan tempat kesenian dan budaya pada tahun 2017-2019 cenderung stabil yakni mencapai capaian 100 persen namun pada tahun 2020 cakupan tersebut menurun menjadi 86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan peran aktif dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Serang dan masyarakat untuk mendukung pengembangan bidang seni budaya dan olahraga.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan ini meliputi enam bidang urusan yang seluruhnya wajib diselenggarakan dengan baik demi memenuhi hak masyarakat yang paling mendasar. Pelayanan dasar tersebut meliputi bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, sosiali, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta ketentaraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

2.3.1.1 Pendidikan

Sesuai dengan amanah Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya maka pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan bidang urusan pendidikan di Kabupaten Serang, pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan tujuan utama yang ingin dicapai.

1. Partisipasi Sekolah

Sesuai dengan amanah Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya maka pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan bidang urusan pendidikan di Kabupaten Serang

Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemerataan pendidikan di suatu wilayah adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK menunjukkan proporsi antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sementara APM menunjukkan Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Nilai APM berkisar antara 0-100, sedangkan nilai APK dapat lebih dari 100, hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya karena adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas.

Gambar 2.39 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Serang, 2016-2020

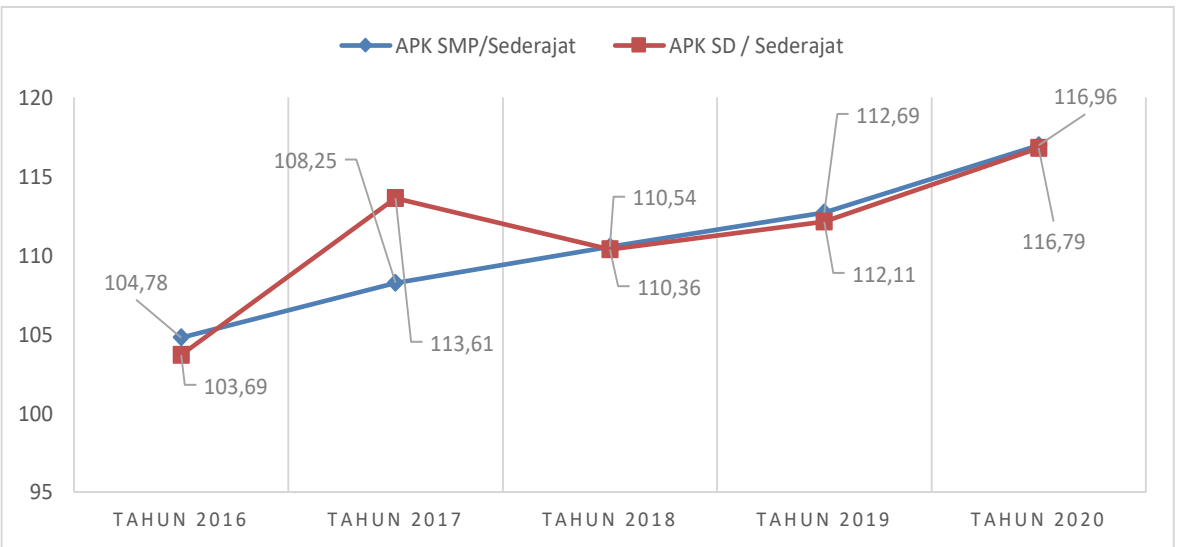

Berdasarkan Gambar 2.39 selama periode 2016-2020, APK Kabupaten Serang pada jenjang SMP mengalami kenaikan, sedangkan APK pada jenjang SD mengalami fluktuasi. APK pada jenjang SD di tahun 2016 sebesar 103,69 persen, lalu mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 113,61 persen yang merupakan capaian tertinggi selama empat tahun terakhir. Pada tahun selanjutnya, APK pada jenjang SD mengalami penurunan menjadi 110.36 persen kemudian meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 112,11. Selanjutnya, di tahun 2020 APK Jenjang SD meningkat menajdi 116,79. APK pada jenjang SMP mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2016 APK jenjang SMP sebesar 104,78 persen meningkat menjadi 116,96 persen pada tahun 2020.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan data APK Provinsi Banten tahun 2020, baik APK pada jenjang SD dan SMP, keduanya memiliki nilai lebih tinggi dari pada capaian Provinsi Banten.

Gambar 2.40 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Serang, 2016-2020

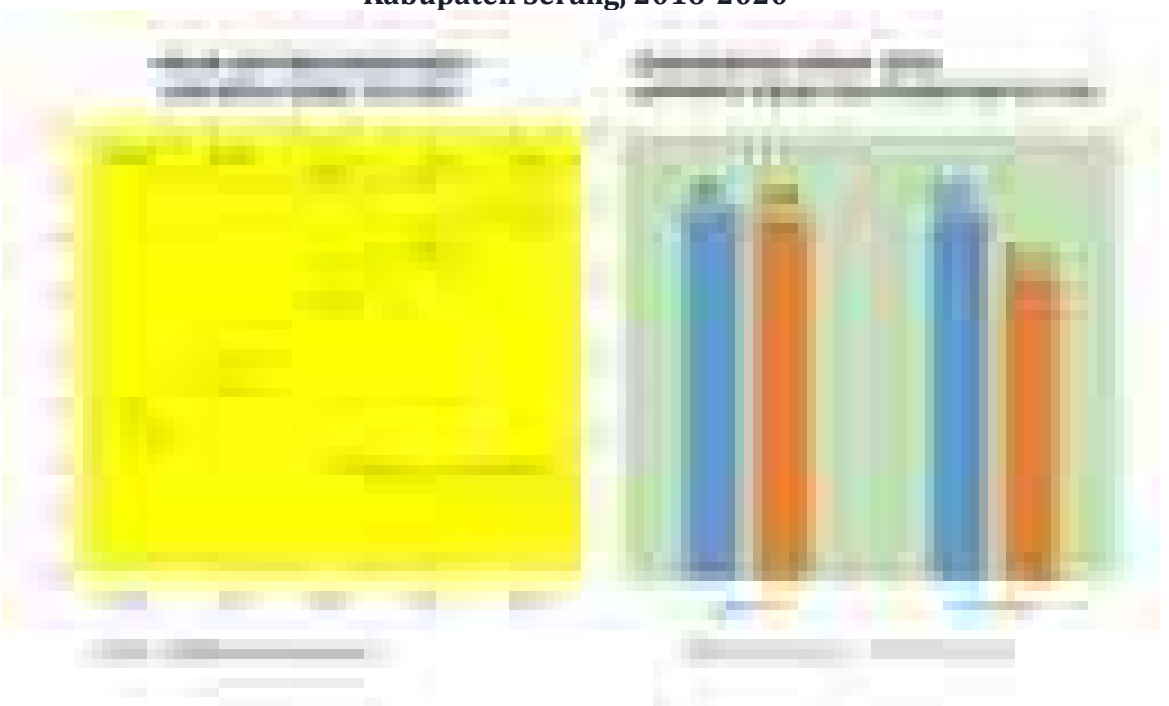

Nilai APM Kabupaten Serang menunjukkan tren peningkatan pada jenjang SD dan SMP selama periode tahun 2016-2020. Pada tahun 2016, APM jenjang SD sebesar 99,98 persen mengalami peningkatan hingga sebesar 100 persen pada tahun 2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 semua penduduk usia SD atau bersesuaian sedang menempuh pendidikan SD. Nilai APM jenjang SMP pada tahun 2016 sebesar 91,78 persen meningkat 99,45 persen pada tahun 2020. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan data

APM Provinsi Banten, APM Kabupaten Serang pada jenjang SD dan SMP, keduanya memiliki nilai lebih tinggi dari pada capaian Provinsi Banten.

2. Fasilitas Pendidikan

Tingkat partisipasi sekolah tergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat serta ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar Ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai penting untuk menjamin kegiatan belajar mengajar yang berkualitas bagi murid serta mendukung upaya pemerataan pendidikan. Selain fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana fisik, ketersediaan tenaga pengajar merupakan elemen penting yang secara langsung berperan dalam meningkatkan kualitas murid. Sekolah, sarana dan prasarana, guru, serat murid merupakan elemen yang saling terkait. Murid akan lebih terbantu dengan dukungan sarana prasarana pembelajaran. Di sisi lain, bagi guru akan terbantu dengan dukungan fasilitas sarana prasarana.

Perkembangan fasilitas pendidikan di Kabupaten Serang pada tahun 2016 - 2020 cukup baik dengan tersedianya unit sekolah untuk hampir semua jenjang pendidikan di tiap kecamatan. Akan tetapi, indikator rasio murid per guru dan rasio murid per sekolah perlu ada peningkatan karena perkembangannya yang cenderung fluktuatif selama lima tahun terakhir. Data mengenai ketersedian sekolah di Kabupaten Serang ditunjukkan oleh Tabel 2.31 berikut.

Tabel 2.31 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Serang, 2016-2020

Jenjang	2016	2017	2018	2019	2020
SD	730	730	729	731	730
SMP	187	188	192	197	203
SMA	75	77	77	80	80
SMK	83	85	84	85	94
MI	121	123	126	131	128
MTs	187	185	189	199	193
MA	78	80	81	94	80

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2021

Secara keseluruhan maupun jenjang, jumlah sekolah di Kabupaten Serang mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Jumlah sekolah yang mengalami peningkatan paling besar adalah jenjang Madrasah Aliyah. Pada tahun 2016 Madrasah Aliyah baik negeri maupun swasta di Kabupaten Serang sebanyak 78 unit sekolah meningkat 2 unit menjadi 80 unit sekolah pada tahun 2020. Sementara itu, pada tahun 2020 secara total terdapat 1.504 unit sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTs, dan MA. Jumlah unit sekolah yang semakin bertambah menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan pendidikan. Selanjutnya, sebaran jumlah sekolah di Kabupaten Serang pada tahun 2019 ditunjukkan oleh Tabel 2.32 berikut.

Tabel 2.32 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Serang, 2019

Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMK*	MI	MTS	MA
Cinangka	36	11	5	3	5	9	3
Padarincang	38	9	1	2	6	8	3
Ciomas	28	4	1	-	2	5	-
Pabuaran	19	4	3	2	4	7	2
Gunungsari	13	4	2	1	-	3	1
Baros	25	6	3	2	4	5	2
Petir	24	7	5	3	10	13	3
Tunjung Teja	23	8	1	4	4	9	6
Cikeusal	44	9	3	3	3	6	4
Pamarayan	25	6	1	4	11	7	4
Bandung	19	6	3	1	1	4	1
Jawilan	17	13	2	4	16	10	5
Kopo	22	7	4	3	10	12	4
Cikande	34	12	5	5	13	12	6
Kibin	23	12	2	4	1	3	4
Kragilan	32	7	4	5	1	4	5
Waringinkurung	24	4	3	1	-	5	2
Mancak	28	6	2	-	4	7	-
Anyar	27	5	4	4	3	6	4
Bojonegara	22	6	2	1	4	4	1
Pulo Ampel	20	3	1	1	-	5	1
Kramatwatu	32	9	2	2	1	7	7
Ciruas	33	7	5	5	2	5	5
Pontang	26	7	4	3	5	7	3
Lebak Wangi	21	2	2	3	1	6	3
Carenang	17	8	3	4	3	5	6

Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMK*	MI	MTS	MA
Binuang	12	5	3	4	4	7	3
Tirtayasa	26	7	2	3	6	7	4
Tanara	21	3	2	1	7	11	1
Jumlah	***731***	***197***	***80***	***84***	***131***	***199***	***94***

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2020

Persebaran jumlah sekolah di Kabupaten Serang bervariasi sesuai dengan kebutuhan di masing-masing wilayah kecamatan. Berdasarkan Tabel 2.30 distribusi sekolah pada jenjang sekolah dasar paling banyak berada di Kecamatan Cikeusal sebanyak 44 unit. Sedangkan pada jenjang SMP paling banyak berada di Kecamatan Jawilan sebanyak 13 unit. Sementara pada jenjang SMA, terdapat SMA di semua kecamatan dengan jumlah cukup merata di beberapa kecamatan. Kecamatan dengan SMA paling banyak berada di Kecamatan Cinangka, Petir, Cikande, dan Ciruas masing-masing sebanyak 5 unit. Pada jenjang SMK, terdapat dua kecamatan yang tidak terdapat SMK yaitu Kecamatan Ciomas dan Waringinkurung, sementara kecamatan dengan SMK terbanyak adalah Kecamatan Cikande, Kragilan, dan Ciruas masing-masing sebanyak 5 unit. Pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah, jumlah MI paling banyak berada di Kecamatan Jawilan sebanyak 16 unit. Pada jenjang Madrasah Tsanawiyah, pada semua kecamatan terdapat MTs dengan jumlah paling banyak terdapat di Kecamatan Petir sebanyak 13 unit. Pada jenjang Madrasah Aliyah terdapat dua kecamatan yang tidak terdapat MA yaitu kecamatan Ciomas dan Mancak, sementara kecamatan dengan jumlah MA terbanyak adalah Kecamatan Kramatwatu dengan jumlah sebanyak 7 unit. Kecamatan dengan unit sekolah terbanyak adalah Kecamatan Cikande dengan total 87 unit sekolah yang terdiri dari jenjang SD sebanyak 34 unit, SMP sebanyak 12 unit, SMA sebanyak 5 unit, SMK sebanyak 5 unit, MI sebanyak 13 unit, MTs sebanyak 12 unit, dan MA sebanyak 6 unit. Kecamatan Cikande merupakan kecamatan dengan populasi penduduk terbanyak di Kabupaten Serang pada tahun 2019 dengan jumlah penduduk sebanyak 100.979 sehingga banyaknya jumlah sekolah di kecamatan tersebut sebanding dengan jumlah populasi penduduk.

Meskipun jumlah unit sekolah di semua jenjang pendidikan bertambah, namun tidak diikuti penambahan jumlah guru pada beberapa jenjang sekolah. Berdasarkan

Tabel 2.33 pada periode 2016-2019, jumlah guru pada jenjang MI, MTs, dan MA mengalami peningkatan sementara pada periode 2015-2019 jumlah guru pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK mengalami tren penurunan.

Tabel 2.33 Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Serang, 2016-2020

Jenjang	2016	2017	2018	2019	2020
SD	7.348	5.590	6.264	6.568	6.382
SMP	3.488	2.575	2.720	2.706	2.658
SMA	1.319	1.274	1.360	1.460	1.549
SMK	1.228	1.187	1.187	1.187	1.462
MI	1.185	1.156	1.222	1.291	*1.298*
MTS	2.387	3.723	2.488	2.690	*2.732*
MA	849	803	935	1.398	*1.149*

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2021

Jumlah guru pada jenjang MI, MTS, dan MA mengalami peningkatan pada periode 2016-2020. Pada tahun 2016 jumlah guru MI sebanyak 1.185 orang meningkat menjadi sebanyak 1.298 orang pada tahun 2020. Selanjutnya, jumlah guru pada jenjang MTs pada tahun 2016 sebanyak 2.387 orang meningkat menjadi sebanyak 2.732 orang pada tahun 2020, sementara jumlah guru MA mengalami peningkatan paling besar dari sebelumnya pada tahun 2016 sebanyak 849 orang menjadi 1.149 orang pada tahun 2020.

Pada tahun 2016 hingga 2020 jumlah guru SD, SMP, SMA, SMK, dan MTS di Kabupaten Serang mengalami fluktuasi dengan tren menurun. Pada tahun 2016 jumlah guru SD sebanyak 7.348 orang terus mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 6.382. Jumlah guru pada jenjang SMP pada tahun 2016 sebanyak 3.488 orang turun menjadi sebanyak 2.658 orang pada tahun 2020. Selanjutnya, jumlah guru SMA pada tahun 2016 sebanyak 1.319 orang mengalami fluktuasi menjadi sebanyak 1.549 orang pada tahun 2020. sementara jumlah guru SMK meningkat dari sebanyak 1.228 orang pada tahun 2016 menjadi 1.462 orang pada tahun 2020.

Tabel 2.34 Jumlah Murid Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Serang, 2016-2020

Jenjang	2016	2017	2018	2019	2020
SD	165.484	161.959	161.598	162.786	163.570
SMP	52.549	51.612	51.660	52.022	52.022
SMA	20.884	23.312	23.312	26.297	27.931
SMK	24.114	25.637	25.637	*25.637*	28.062
MI	21.006	21.587	21.901	22.168	21.427
MTS	32.881	32.570	28.064	31.742	31.987
MA	14.552	14.542	13.891	28.272	21.427

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2021

Tabel 2.34 di atas menunjukkan jumlah murid pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Serang. Selama periode 2016-2020 jumlah murid pada jenjang SMA, SMK, MI, dan MA mengalami tren peningkatan sedangkan jumlah murid pada jenjang SD, SMP, dan MTs mengalami tren penurunan. Jumlah murid pada jenjang SMA mengalami peningkatan dari sebelumnya sebanyak 20.884 siswa di tahun 2016 menjadi sebanyak 27.931 siswa di tahun 2020. Sementara itu, jumlah murid SMK meningkat dari sebanyak 24.114 siswa pada tahun 2016 menjadi sebanyak 28.062 siswa pada tahun 2020. Selanjutnya, jumlah murid pada jenjang MI meningkat dari sebanyak 21.006 siswa pada tahun 2016 menjadi sebanyak 21.427 siswa pada tahun 2020. Pada tahun 2016 jumlah murid MA sebanyak 14.553 siswa, lalu meningkat tajam menjadi sebanyak 28.272 siswa pada tahun 2020.

Jumlah murid pada jenjang MTs mengalami penurunan. Pada tahun 2016 jumlah murid MTs sebanyak 32.881 siswa, kemudian mengalami penurunan menjadi sebanyak 31.987 siswa pada tahun 2020. Sementara itu, jumlah murid SD mengalami penurunan tertinggi secara jumlah. Pada tahun 2016 jumlah murid SD sebanyak 165.484 siswa, kemudian mengalami penurunan menjadi sebanyak 163.570 siswa pada tahun 2020.

Pada tahun 2016 jumlah murid SMP sebanyak 52.549 siswa, kemudian mengalami penurunan menjadi sebanyak 52.022 siswa pada tahun 2020.

Ketersediaan sekolah, guru, dan murid dapat diukur dengan dua rasio, yaitu rasio murid per guru dan rasio murid per sekolah. Rasio murid per guru menunjukkan beban kerja seorang guru. Semakin rendah rasio murid per guru menunjukkan semakin sedikit jumlah murid yang harus diajar oleh seorang guru sehingga mutu pengajaran cenderung tinggi, begitu pula sebaliknya. Rasio murid per sekolah menunjukkan rata-rata daya tampung per sekolah. Semakin rendah rasio murid per sekolah maka semakin banyak sekolah yang tersedia untuk menampung siswa yang belajar, begitu pula sebaliknya.

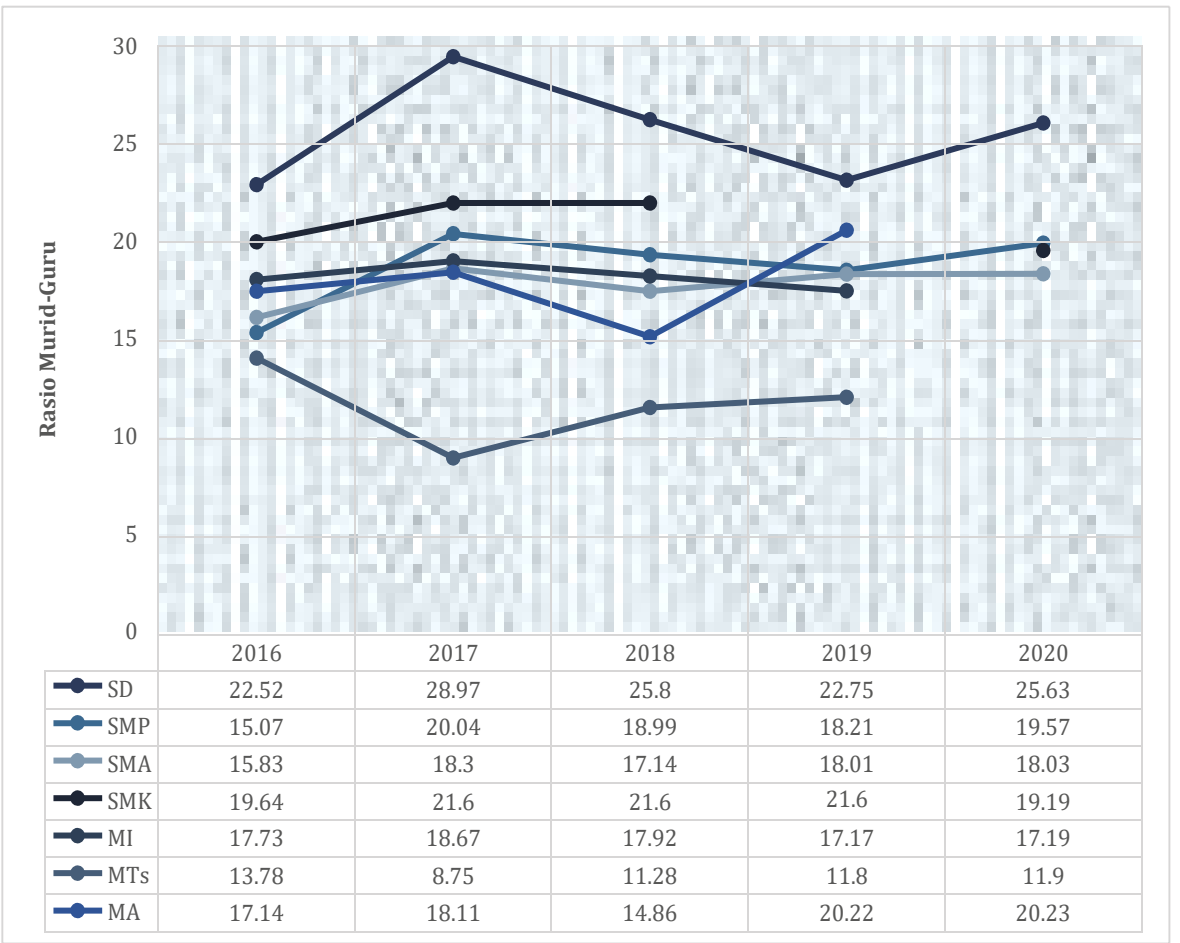

	2016	2017	2018	2019	2020
SD	22.52	28.97	25.8	22.75	25.63
SMP	15.07	20.04	18.99	18.21	19.57
SMA	15.83	18.3	17.14	18.01	18.03
SMK	19.64	21.6	21.6	21.6	19.19
MI	17.73	18.67	17.92	17.17	17.19
MTs	13.78	8.75	11.28	11.8	11.9
MA	17.14	18.11	14.86	20.22	20.23

Gambar 2.41 Rasio Murid per Guru di Kabupaten Serang, 2016-2020

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, BPS Kabupaten Serang

Berdasarkan Gambar 2.41 selama periode 2016-2020, untuk semua jenjang pendidikan, rasio murid per guru mengalami fluktuasi. Jenjang pendidikan dengan rasio murid per guru paling rendah adalah jenjang MTs dengan rasio murid per guru pada tahun 2019 sebesar 11,8 meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sementara itu, jenjang pendidikan dengan rasio murid per guru paling tinggi adalah jenjang SD dengan rasio murid per guru pada tahun 2020 sebesar 25,63. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan rasio murid per guru pada jenjang MTs sudah cukup baik, sedangkan pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK, MI, dan MA masih perlu ditingkatkan.

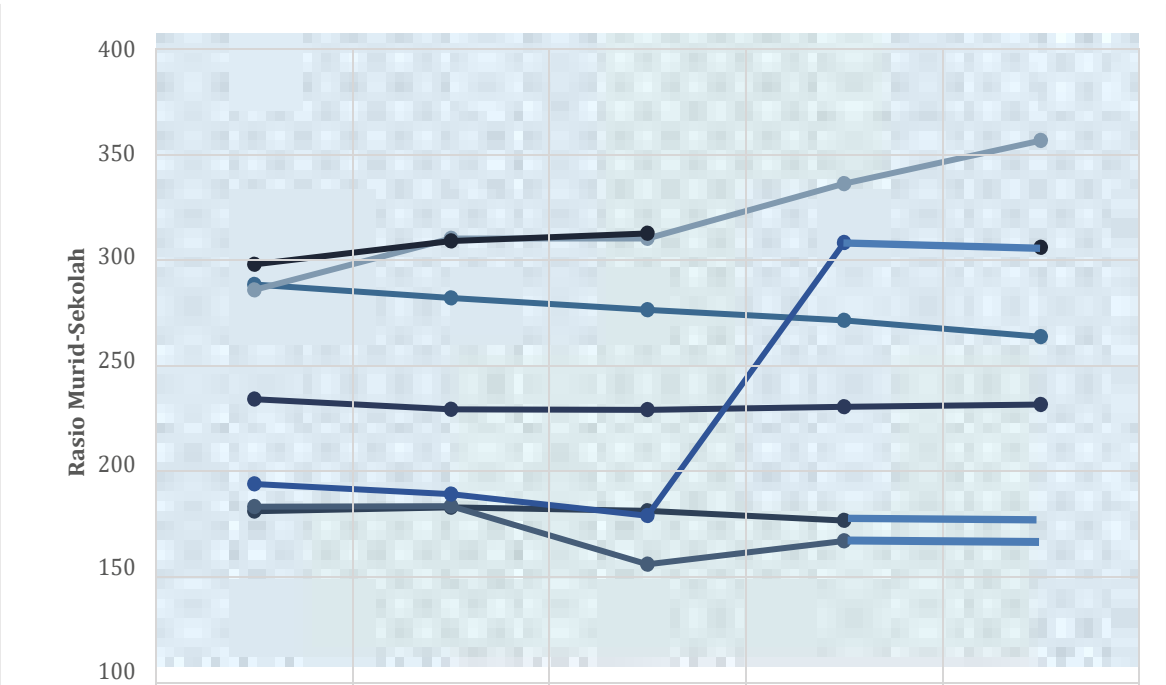

	2016	2017	2018	2019	2020
SD	226.69	221.86	221.67	223.00	224.07
SMP	281.01	274.53	269.06	264.07	256.27
SMA	278.45	302.75	302.75	328.71	349.14
SMK	290.53	301.61	305.20	305.00	298.53
MI	173.60	175.50	173.82	169.22	169.40
MTs	175.83	176.05	148.49	159.51	159.60
MA	186.56	181.78	171.49	300.77	300.80

Gambar 2.42 Rasio Murid per Sekolah di Kabupaten Serang, 2016-2020

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, BPS Kabupaten Serang

Rata-rata rasio murid per sekolah di Kabupaten Serang selama periode 2016-2020 mengalami fluktuasi. Namun pada jenjang SMA, SMK, dan MA selama periode tersebut mengalami tren peningkatan. Khusus pada jenjang MA mengalami peningkatan

rasio murid per sekolah yang paling tinggi pada tahun 2018-2019. Pada tahun 2020, rasio murid per sekolah pada jenjang SMK sebesar 299 siswa per sekolah. Sedangkan pada jenjang SMA dan MA pada tahun yang sama, rasionya berturut-turut sebesar 350 dan 299 siswa per sekolah. Rasio murid per sekolah pada jenjang SD, SMP, MI, dan MTS mengalami tren penurunan selama tahun 2016-2020. Pada tahun 2020, rasio murid per sekolah pada jenjang SD sebesar 225 siswa per sekolah dan jenjang SMP sebesar 257 siswa per sekolah. Sedangkan pada jenjang MI dan MTs pada tahun 2019, rasionya berturut-turut sebesar 169 dan 160 siswa per sekolah. Oleh karena itu, berdasarkan daya tampung sekolah yang ditunjukkan pada Gambar 2.37 maka pada jenjang SD, SMP, MI, dan MTs semakin baik sedangakan untuk jenjang SMA, SMK, dan MA perlu ada peningkatan ketersedian sekolah.

2.3.1.2 Kesehatan

Salah satu komponen penting dalam upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia adalah sektor kesehatan. Semakin baik tingkat kesehatan masyarakat di suatu wilayah, maka kualitas sumberdaya manusia diharapkan juga semakin baik.

1. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (usia 0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi seperti tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Nilai AKB tinggi menunjukkan status kesehatan diwilayah tersebut rendah. Tabel 2.35 berikut menunjukkan AKB di Kabupaten Serang pada tahun 2016-2020.

Tabel 2.35 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Serang, 2016-2020

Tahun	Angka Kematian Bayi
2016	6,64
2017	8,26
2018	8,49
2019	9,17
2020	8,29

Sumber: LKPJ Kabupaten Serang

Berdasarkan Tabel 2.35 capaian AKB Kabupaten Serang selama periode 2016-2020 fluktuatif. Pada tahun 2016 capaian AKB sebesar 6,64 kematian per 1.000 kelahiran hidup kemudian meningkat selama tiga tahun berikutnya hingga sebesar 9,17 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 capaian AKB Kabupaten Serang menurun menjadi sebesar 8,29 kematian per 1000 kelahiran hidup.

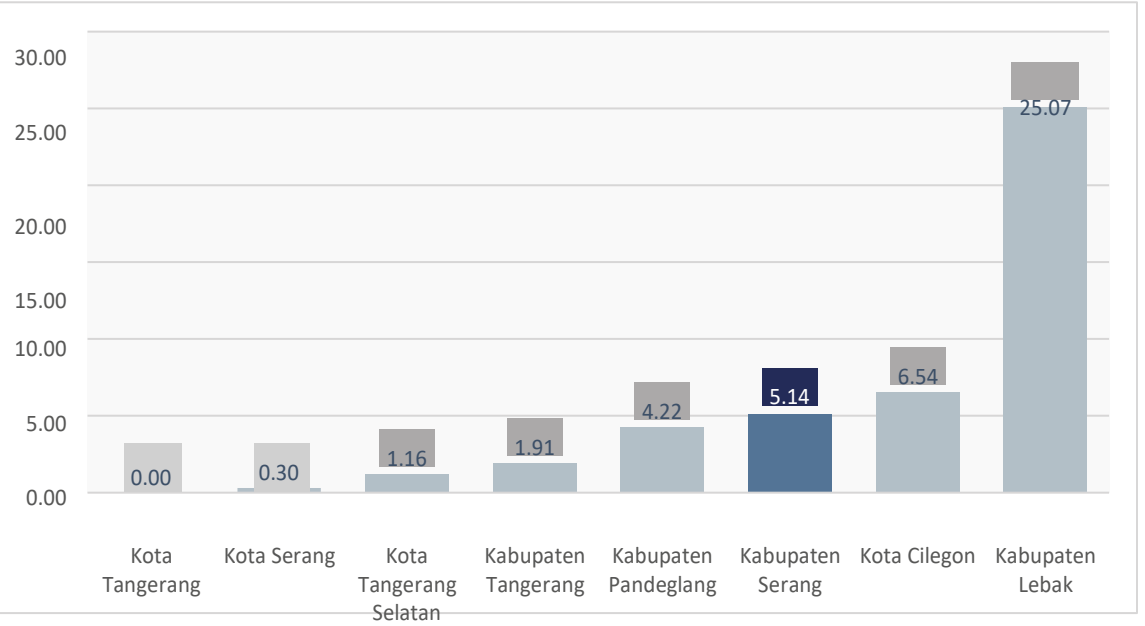

Gambar 2.43 Perbandingan Regional Capaian Angka Kematian Bayi Kabupaten Serang di Tingkat Provinsi Banten, 2019

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Provinsi Banten (diolah)

Jika dibandingkan dengan capaian AKB wilayah lain dalam lingkup Provinsi Banten, maka capaian AKB Kabupaten Serang tergolong tinggi. Pada tahun 2019, AKB Kabupaten Serang sebesar 9,17 kematian per 1.000 kelahiran hidup merupakan tertinggi ketiga dalam wilayah Provinsi Banten. Selanjutnya, nilai tersebut juga lebih tinggi daripada AKB Provinsi Banten pada tahun 2019 yang besaran nilainya 4,47 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Data tahun 2020, telah menunjukkan adanya penurunan pada AKB Kabupaten Serang, namun Pemerintah Kabupaten Serang tetap perlu berupaya lebih keras untuk menurunkan AKB dengan melakukan upaya-upaya preventif di masa mendatang.

2. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan risiko yang dihadapi ibu selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Yang dimaksud dengan Angka Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya per 100.000 kelahiran hidup. Beberapa faktor yang mempengaruhi AKI diantaranya keadaaan sosial ekonomi, kehamilan yang tidak sehat, komplikasi kehamilan, stautus gizi ibu dan janin, serta ketersedian fasilitas pendukung kesehatan ibu dan persalinan. Tingginya angka kematian ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang rendah pula.

Sebagian besar kasus kematian ibu biasa terjadi karena tidak tersedianya akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memadai khususnya saat menghadapi kejadian kegawat daruratan. Kematian ibu biasanya terjadi karena tidak mempunyai akses ke pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, terutama pelayanan kegawat daruratan. Sulitnya mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan membuat ibu terlambat mencapai fasilitas kesehatan, serta terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi adalah usia Ibu melahirkan. Terdapat dua kategori usia yang memiliki risiko tinggi kematian saat melahirkan yaitu terlalu tua pada saat melahirkan (>35 tahun) dan terlalu muda pada saat melahirkan (<20 tahun).

Tabel 2.36 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Serang, 2016-2020

Tahun	Angka Kematian Ibu
2016	206,00
2017	194,70
2018	215,00
2019	221,00
2020	204,00

Sumber: LKPJ Kabupaten Serang

Capaian AKI Kabupaten Serang selama periode 2016-2020 fluktuatif (lihat Tabel 2.36). Pada tahun 2016 capaian AKI sebesar 206 kematian per 100.000 kelahiran hidup kemudian meningkat hingga sebesar 221 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada

tahun 2019. Pada tahun 2020, AKI Kabupaten Serang turun menjadi 204 kematian per 100.000 kelahiran hidup.

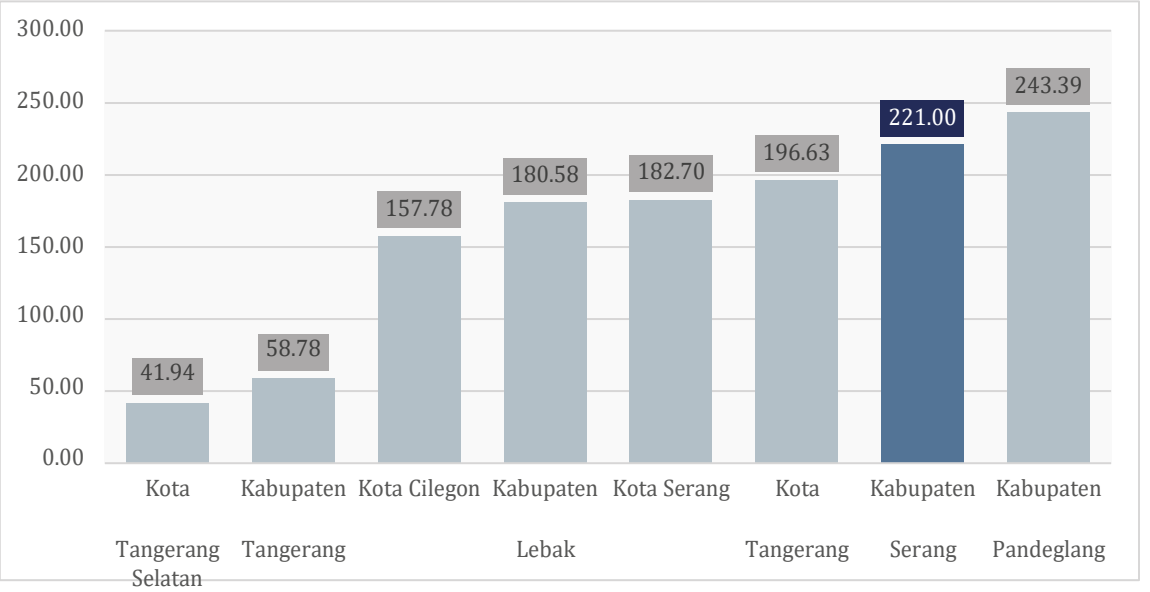

Gambar 2.44 Perbandingan Regional Capaian Angka Kematian Ibu Kabupaten Serang di Tingkat Provinsi Banten, 2019

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Provinsi Banten (diolah)

Gambar 2.44 menunjukkan perbandingan capaian AKI di wilayah Provinsi Banten. Jika dibandingkan dengan capaian AKI wilayah lain dalam lingkup Provinsi Banten, maka capaian AKI Kabupaten Serang tergolong tinggi. Pada tahun 2019, AKI Kabupaten Serang sebesar 221 kematian per 100.000 kelahiran hidup merupakan tertinggi kedua dalam wilayah Provinsi Banten. Selanjutnya, nilai tersebut jauh lebih tinggi daripada AKI Provinsi Banten pada tahun 2019 yang besaran nilainya 135,20 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Data tahun 2020, telah menunjukkan adanya penurunan pada AKI Kabupaten Serang, namun Pemerintah Kabupaten Serang tetap perlu berupaya lebih keras untuk menurunkan AKI.

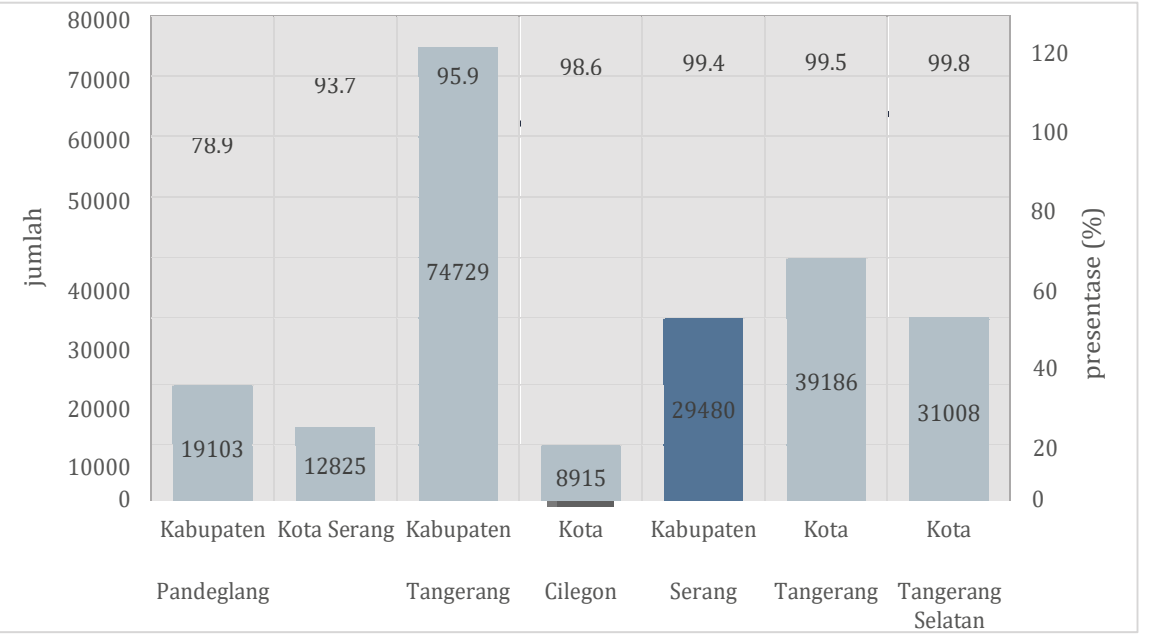

Gambar 2.45 Cakupan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan di Tingkat Provinsi Banten, 2019

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Jika dianalisis berdasarkan cara persalinan, maka di Kabupaten Serang pada tahun 2019 terdapat 29.480 persalinan atau 99,4 persen dari total persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan. Angka ini cukup baik jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Banten. Di sisi lain, turunnya nilai AKI selama lima tahun terakhir cukup menunjukkan implikasi positif dari kebijakan selama ini, namun dengan tingginya AKI maka Pemerintah Kabupaten Serang perlu berupaya lebih keras untuk menurunkan AKI dengan melakukan upaya-upaya preventif.

3. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.37 Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Kabupaten Serang Tahun 2016 sampai 2020

Tahun	Cakupan PHBS
2016	62,50
2017	55,53
2018	40,62
2019	85,5
2020	49,35

Berdasarkan Tabel 2.37 cakupan PHBS Kabupaten Serang selama periode 2016-2020 fluktuatif. Pada tahun 2016 cakupan PHBS sebesar 62,50 % kemudian meningkat di tahun 2017 menjadi 55,53 %, dan menurun kembali di tahun 2018 menjadi 40,62 % sedangkan di tahun 2019 meningkat jauh menjadi 85,5 % dan di tahun 2020 menurun jauh menjadi 49,35 %.

4. Fasilitas dan Layanan Kesehatan

Tabel 2.38 Jumlah Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah tahun 2020

Jenis Fasilitas Kesehatan	2020
Rumah sakit	1
Puskesmas Rawat Inap	15
Puskesmas non Rawat Inap	16
Puskesmas Pembantu	42

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, BPS Kabupaten Serang

Berdasarkan Tabel 2.38 jumlah fasilitas kesehatan milik pemerintah di Kabupaten Serang terbatas, baru tersedia 1 (satu) Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit Dr. Dradjat Prawiranegara yang menjadi rumah sakit rujukan di Provinsi Banten, dan 31 Puskesmas yang tersebar di 29 Kecamatan. Kabupaten Serang juga terdapat 3 RS Swasta yaitu RS Hermina Ciruas, RS. Kurnia Serang dan RS. Permata Serdang.

Untuk menganalisis lebih dalam mengenai kecukupan fasilitas kesehatan di suatu daerah dapat digunakan rasio fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk. Berikut adalah data rasio jumlah rumah sakit dan puskesmas terjadap jumlah penduduk di Kabupaten Serang serta wilayah lain di Provinsi Banten sebagai pembanding.

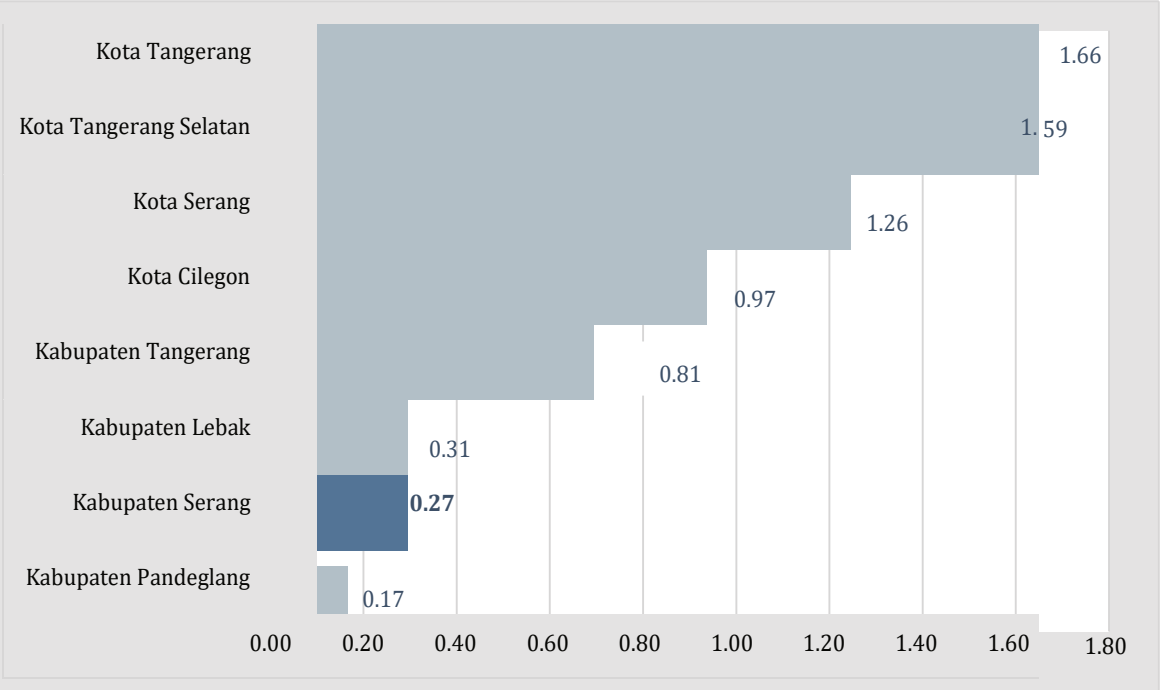

Gambar 2.46 Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk di Provinsi Banten, 2019

Sumber: Informasi SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan 2020 (diolah)

Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk Kabupaten Serang pada tahun 2019 termasuk rendah jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Banten. Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk Kabupaten Serang berada di urutan dua terbawah dengan nilai sebesar 0,31 per 100.000 penduduk yang berarti 1 rumah sakit melayani 323.953 penduduk. Dengan kondisi ideal 1 unit rumah sakit melayani 100.000 penduduk maka Pemerintah Kabupaten Serang perlu meningkatkan ketersedian rumah sakit.

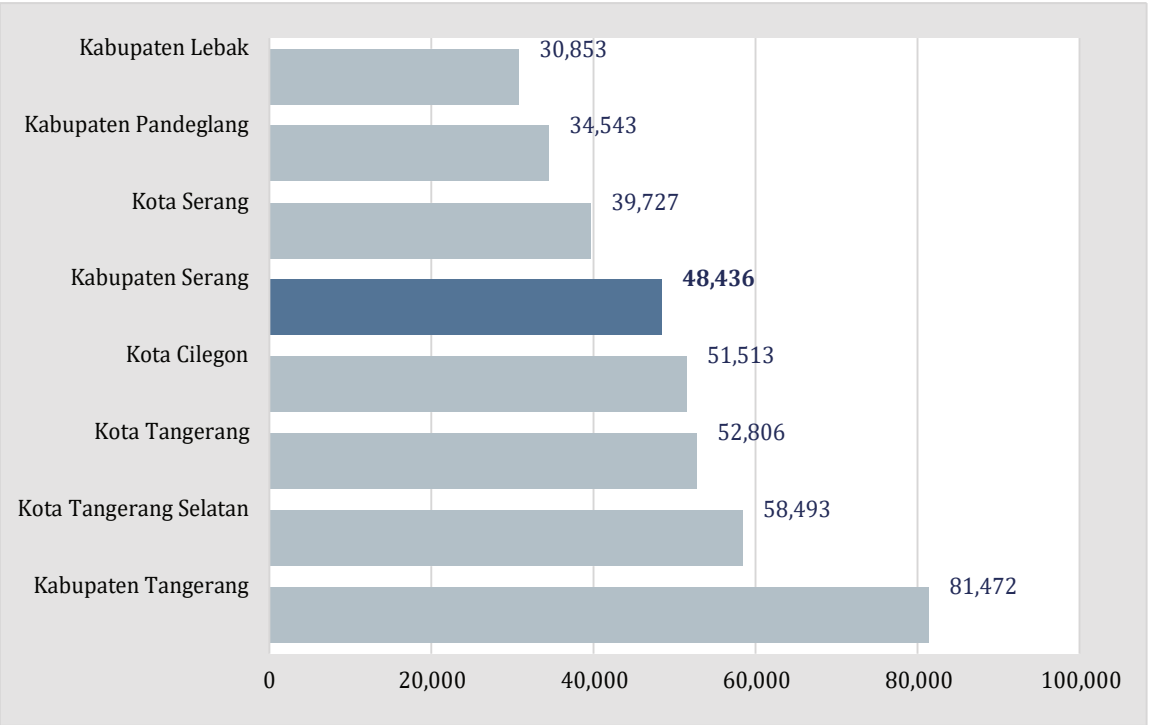

Gambar 2.47 Rasio Puskesmas per Penduduk di Provinsi Banten, 2019

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Provinsi Banten (diolah)

Berdasarkan Gambar 2.47, rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk Kabupaten Serang mencapai 48.436 yang mana merupakan peringkat empat di wilayah Provinsi Banten. Namun, nilai tersebuh masih jauh dari nilai ideal. Nilai ideal rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk adala 1:30.000 atau 1 unit puskesmas melayani 30.000 penduduk. Oleh karena itu, untuk mencapai kondisi ideal Pemerintah Kabupaten Serang perlu menambah jumlah puskesmas. Dengan asumsi jumlah penduduk pada tahun 2019, kondisi ideal jumlah puskesmas di Kabupaten Serang adalah 50 unit puskesmas.

5. Tenaga Kesehatan

Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya serta terdistribusi secara adil dan merata. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2014, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. tenaga kesehatan

meliputi: tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga sanitarian, tenaga ahli teknik laboratorium medik, tenaga keterapian fisik, dan tenaga keteknisian medis.

Tabel 2.39 Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Kabupaten Serang, 2016-2019

Tenaga Kesehatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Dokter Umum	110	142	144	135	127
Dokter Spesialis	112	113	122	129	94
Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis	59	41	42	33	38
Bidan	644	669	754	593	733
Perawat	903	949	1.039	930	883
Tenaga Kefarmasian	93	125	130	113	120
Tenaga Sanitasi	23	38	33	29	42
Tenaga Gizi	26	34	33	24	54
Jumlah	1.970	2.111	2.297	1.986	2.091

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Serang

Tabel 2.39 menunjukkan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Serang yang meliputi dokter umum, dokter ahli, dokter gigi dan dokter gigi spesialis, bidan, perawat, tenaga kefarmasian, tenaga sanitasi dan tenaga gizi. Berdasarkan data dari tabel tersebut, maka perkembangan jumlah tenaga kesehatan secara keseluruhan mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2016 jumlah total tenaga kesehatan di Kabupaten Serang adalah 1.970 orang, dan terus bertambah sampai tahun 2018 sebanyak 2.297. sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 1.986 dan bertambah kembali pada tahun 2020 menjadi 2.091 orang.

Tabel 2.40 Jumlah Dokter dan Paramedik di Seluruh Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Serang, 2020

Kecamatan	Dokter Umum	Dokter Ahli	Dokter Gigi	Perawat
Cinangka	2	-	1	9
Padarincang	2	-	1	10
Ciomas	3	-	1	12
Pabuaran	2	-	1	8
Gunungsari	2	-	-	6
Baros	3	-	1	10
Petir	3	-	1	15
Tunjung Teja	2	-	1	8
Cikeusal	2	-	1	15

Kecamatan	Dokter Umum	Dokter Ahli	Dokter Gigi	Perawat
Pamarayan	3	-	1	16
Bandung	2	-	-	8
Jawilan	2	-	-	13
Kopo	5	-	1	18
Cikande	3	-	1	17
Kibin	2	-	1	7
Kragilan	5	-	2	16
Waringinkurung	3	-	1	9
Mancak	3	-	1	7
Anyar	5	-	1	16
Bojonegara	3	-	2	11
Pulo Ampel	2	-	1	8
Kramatwatu	4	-	1	13
Ciruas	3	-	1	15
Pontang	4	-	-	17
Lebak Wangi	2	-	1	7
Carenang	3	-	1	15
Binuang	2	-	-	9
Tirtayasa	2	-	1	16
Tanara	3	-	1	19
Jumlah	***82***	***-***	***26***	***350***

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, BPS Kabupaten Serang, 2021

Berdasarkan kecamatan, persebaran tenaga kesehatan di Kabupaten Serang pada tahun 2018 sudah cukup merata (lihat Tabel 2.40). Dokter umum tersedia di seluruh puskemas umum. Beberapa kecamatan terdapat lebih dari satu dokter umum sesuai dengan volume dan jumlah puskesmas. Selanjutnya, dokter gigi telah tersedia di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Cinangka, Gunungsari, Bandung, Mancak, Lebak Wangi, dan Binuang.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pekerjaan umum salah satunya dapat dilihat dari indikator kondisi jalan dan infrastruktur lainnya. Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Pelaksanaan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki tujuan untuk mewujudkan pelayanan dasar masyarakat dengan tujuan mengembangkan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup, dan penataan ruang yang berbasis eco-city. Adapun sasaran dari urusan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dan meningkatnya pelayanan drainase, dan pengendalian banjir dan air bersih. Beberapa indikator yang dapat menjelaskan pencapaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain perkembangan persentase jalan kabupaten, jembatan, dan drainase dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten, jembata, dan drainase.

Jalan merupakan sarana yang sangat penting untuk memperlancar dan mendorang roda perekonomian. Jalan meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sarana jalan yang baik dapat meningkatkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Perkembangan persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten di Kabupaten Serang mengalami kenaikan setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan pertahunnya sebesar 6,26 persen. Pada tahun 2016, jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang sebesar 74,13 persen meningkat menjadi sebanyak 92,05 persen pada tahun 2020. Peningkatan tersebut menujukkan capaian positif pemerintah daerah dalam perawatan dan perbaikan jalan kabupaten.

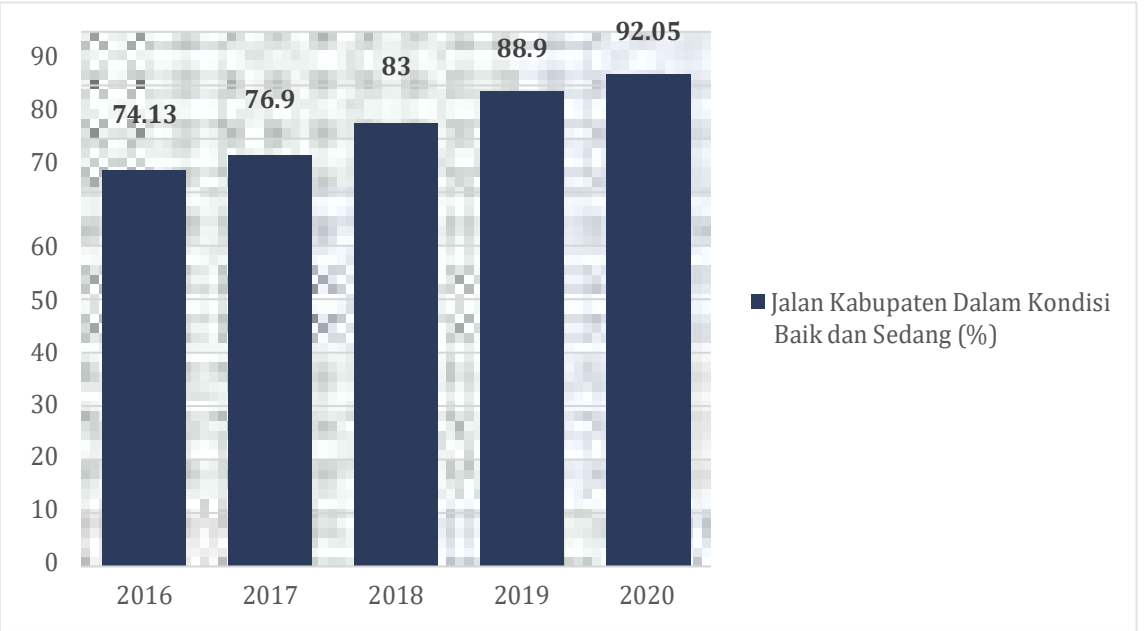

Gambar 2.48 Perkembangan Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik dan Sedang Terhadap Total Panjang Jalan Kabupaten di Kabupaten Serang, 2016- 2020

Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020

Perkembangan persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total jembatan kabupaten di Kabupaten Serang mengalami kenaikan setiap tahunnya dalam empat tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan pertahunnya sebesar 9,68 persen. Pada tahun 2016, jembatan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang sebesar 65,12 persen meningkat menjadi sebanyak 93,30 persen pada tahun 2020. Peningkatan yang signifikan tersebut menujukkan capaian positif pemerintah daerah dalam perawatan dan perbaikan jembatan kabupaten selama empat tahun terakhir.

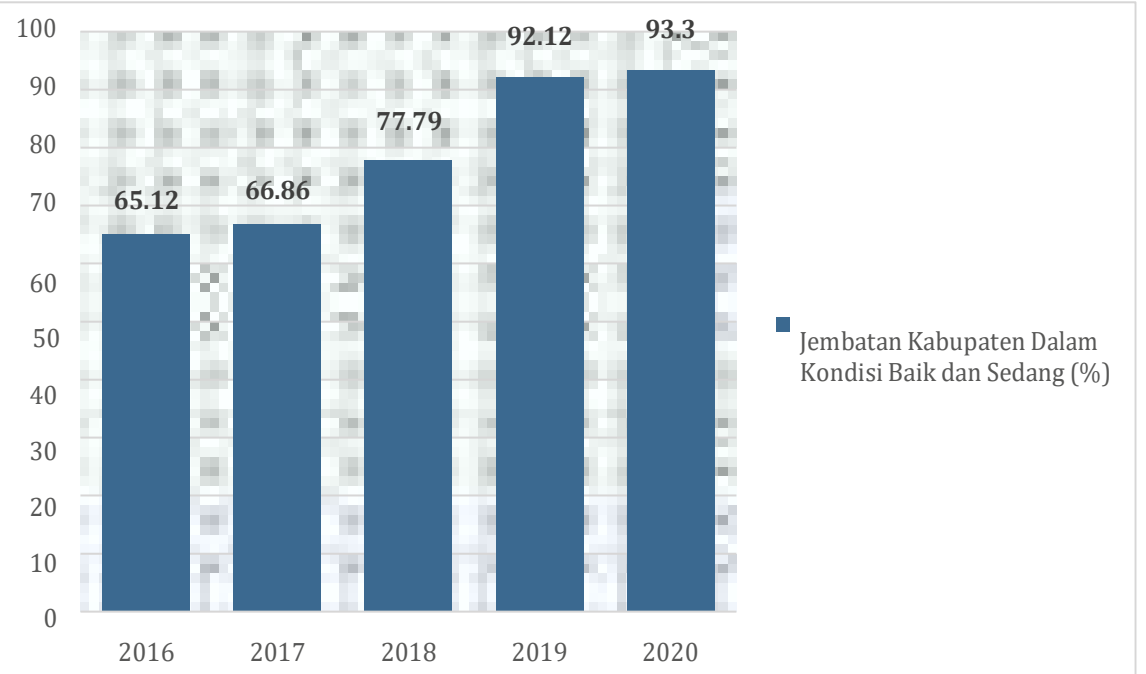

Gambar 2.49 Perkembangan Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik dan Sedang Terhadap Total Jumlah Kabupaten di Kabupaten Serang, 2016-2020

Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020

Perkembangan persentase panjang drainase dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang drainase kabupaten di Kabupaten Serang mengalami kenaikan setiap tahunnya dalam empat tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan pertahunnya sebesar 3,81 persen. Pada tahun 2016, persentase panjang drainase dalam kondisi baik dan sedang sebesar 66,60 persen meningkat menjadi sebanyak 74,50 persen pada tahun 2020. Peningkatan yang signifikan tersebut menujukkan capaian positif pemerintah daerah dalam perawatan dan perbaikan drainase selama periode tahun tersebut.

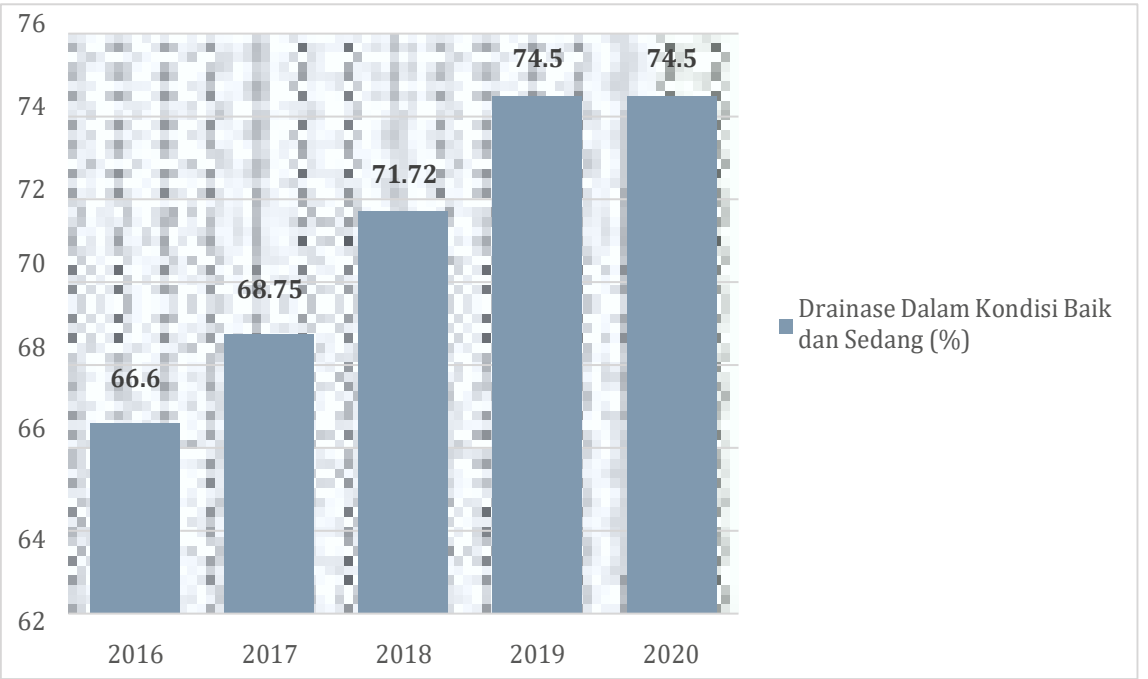

Gambar 2.50 Perkembangan Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik dan Sedang Terhadap Total Panjang Drainase di Kabupaten Serang, 2016-2020

Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Salah satu kriteria rumah layak huni adalah akses air minum layak. Rumah dianggap layak huni apabila memiliki sumber air minum yang layak. Kelayakan sumber air minum tersebut diukur dari jenis sumber air minum utama dan sumber air untuk kegiatan domestik lain seperti untuk memasak dan Mandi Cuci Kakus (MCK).

Akses air minum dianggap layak jika sumber air minum utama rumah tangga termasuk dalam sumberair terlindungi, yaitu diantaranya:

1. ledeng meteran
2. ledeng eceran
3. keran umum
4. hidran umum
5. terminal air
6. penampungan air hujan
7. sumur bor/pompa
8. sumur terlindung, dan

9. mata air terlindung.

Apabila sumber air minum utama rumah berasal dari air kemasan dan/atau air isi ulang, maka kelayakan dapat dilihat dari sumber air yang digunakan untuk kegiatan domestik lainnya seperti memasak dan kegiatan mck. Jika sumber air untuk masak dan kegiatan MCK berasal dari salah satu dari 9 jenis sumber air terlindungi, maka rumah dianggap layak dari segi akses air minum. Berikut merupakan persentase rumah tangga menurut sumber air utama di Kabupaten Serang tahun 2019.

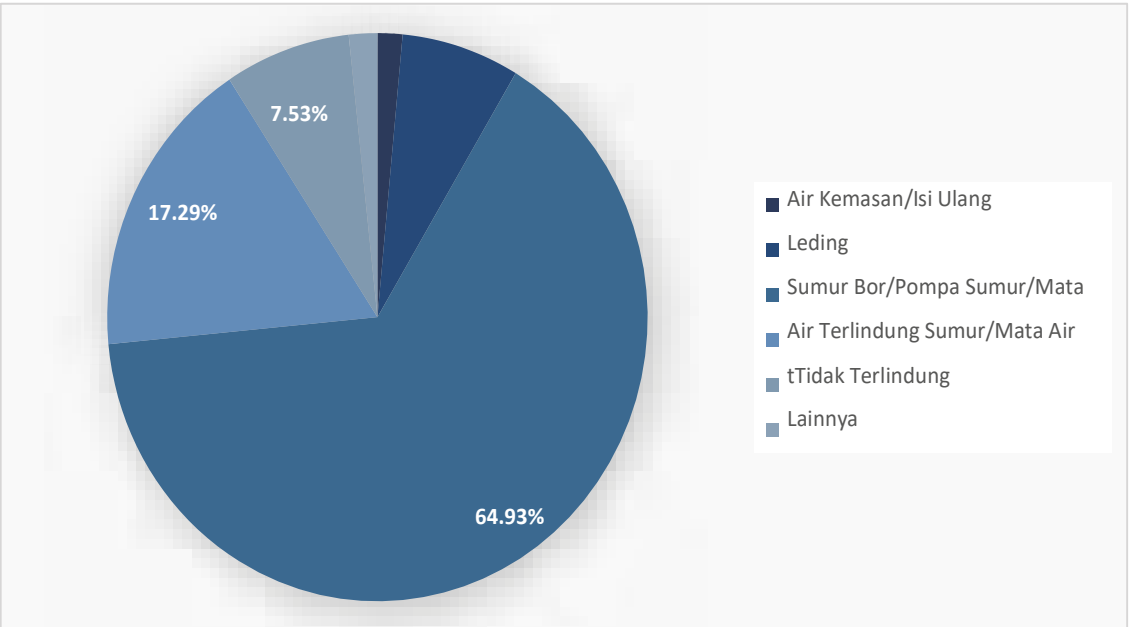

Gambar 2.51 Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama yang Digunakan untuk Mandi/Cuci/dll, 2019

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Serang, 2019

Berdasarkan gambar di atas, pada tahun 2019 rumah tangga dengan sumber air utama sumur bom/pompa mencapai 64,93 persen. Selanjutnya sumber air terbanyak kedua adalah sumur atau mata air terlindung sebanyak 17,29 persen. Sumber air utama terbanyak ketiga adalah sumur atau mata air tidak terlindung sebanyak 7,53 persen.

Tabel 2.41 Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci/dll Berdasarkan Kuartil Pengeluaran, 2019

Karakteristik	Air Kemasan /Isi Ulang	Leding	Sumur Bor/Pompa	Sumur/ Mata Airl Terlindung	Sumur/ Mata Air Tidak Terlindung	Lainnya
40% Terbawah	0,78	2,57	59,53	20,44	12,65	4,03
40% Tengah	1,43	7,66	64,59	19,26	6,29	0,78
20% Teratas	2,56	12,27	72,96	9,27	2,49	0,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Serang, 2019

Sementara itu berdasarkan kuartil pengeluaran, persentase rumah tangga menurut karakteristik dan sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk mandi/cuci/dll, untuk penduduk dalam semua kuartil pendapata terbawah didominasi oleh sumber bor/pompa. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah penduduk dengan pendapatan 40 persen terbawah maih sedikit yang menggunakan leding yaitu sebanyak 2,57 persen. Selanjutnya penduduk pada kuartil pendapatan tersebut sebanyak 20,44 persen menggunakan sumber sumur/mata air terlindung dan sebanyak 12,65 persen menggunakan sumber sumur/mata air tidak terlindung. Di sisi lain, penduduk dengan pendapatan 20 persen teratas sebanyak 12,27 persen sudah menggunakan leding dan 9,27 persen menggunakan sumber sumur/mata air terlindung serta sebanyak 2,49 persen menggunakan sumber sumur/mata air tidak terlindung.

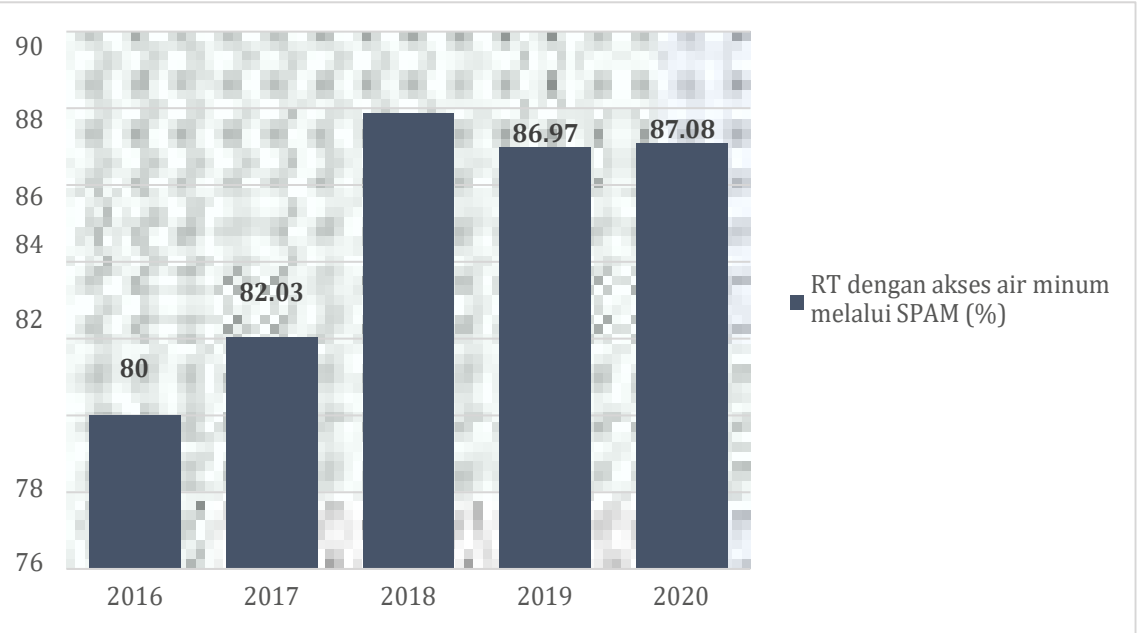

Gambar 2.52 Perkembangan Tersedianya Akses Air Minum yang Aman Melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Perpipaan (% Rumah Tangga), 2016-2020

Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020

Selama elima tahun terakhir perkembangan tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, capaiannya mencapai 80,00 persen rumah tangga lalu meningkat menjadi 87,86 persen pada tahun 2018. Pada tahun 2019, terjadi penurunan menjadi 86,97 persen. Selanjutnya, di tahun 2020 capaiannya mencapai 87,08 persen rumah tangga.

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat merupakan hal yang dapat membantu proses pembangunan suatu wilayah. Untuk itu, perlu adanya pemantauan mengenai tindak pidana kriminalitas yang terjadi pada wilayah tersebut dengan tujuan mendukung proses pencapaian ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Tabel di bawah menunjukkan capaian dalam upaya peningkatan ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan selama empat tahun terakhir di Kabupaten Serang. Pada tahun 2017-2020, rasio jumlah kasus kantrantibmas dan tindak

kriminal yang ditindaklanjuti terhadap total jumlah kasus kantrantibmas dan tindak kriminal yang terjadi serta cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mencapai 100 persen.

Selanjutnya pada tahun 2020, persentase penurunan jumlah pelanggaran terhadap perda sebesar 22,86 persen. Persentase penurunan wilayah rawan trantibum mencapai 33,33 persen dan persentase gangguan terhadap masyarakat yang dapat diselesaikn telah mencapai 100 persen. Capaian tersebut sudah cukup baik namun perlu adanya peningkatan untuk beberapa indikator.

Tabel 2.42 Capaian Upaya Peningkatan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

	Satuan	2017	2018	2019	2020
Rasio jumlah kasus kantrantibmas dan tindak kriminal yang ditindaklanjuti terhadap total jumlah kasus kantrantibmas dan tindak kriminal yang terjadi	%	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00
Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran terhadap Perda	%	60,00	23,73	22,00	22,86
Prosentase Penurunan Wilayah Rawan Trantibum	%	25,00	25,00	25,00	33,33
Prosentase Gangguan Terhadap Masyarakat Yang Dapat Diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2017 s/d 2019

2.3.1.6 Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya meliputi jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung atau menguntungkan.

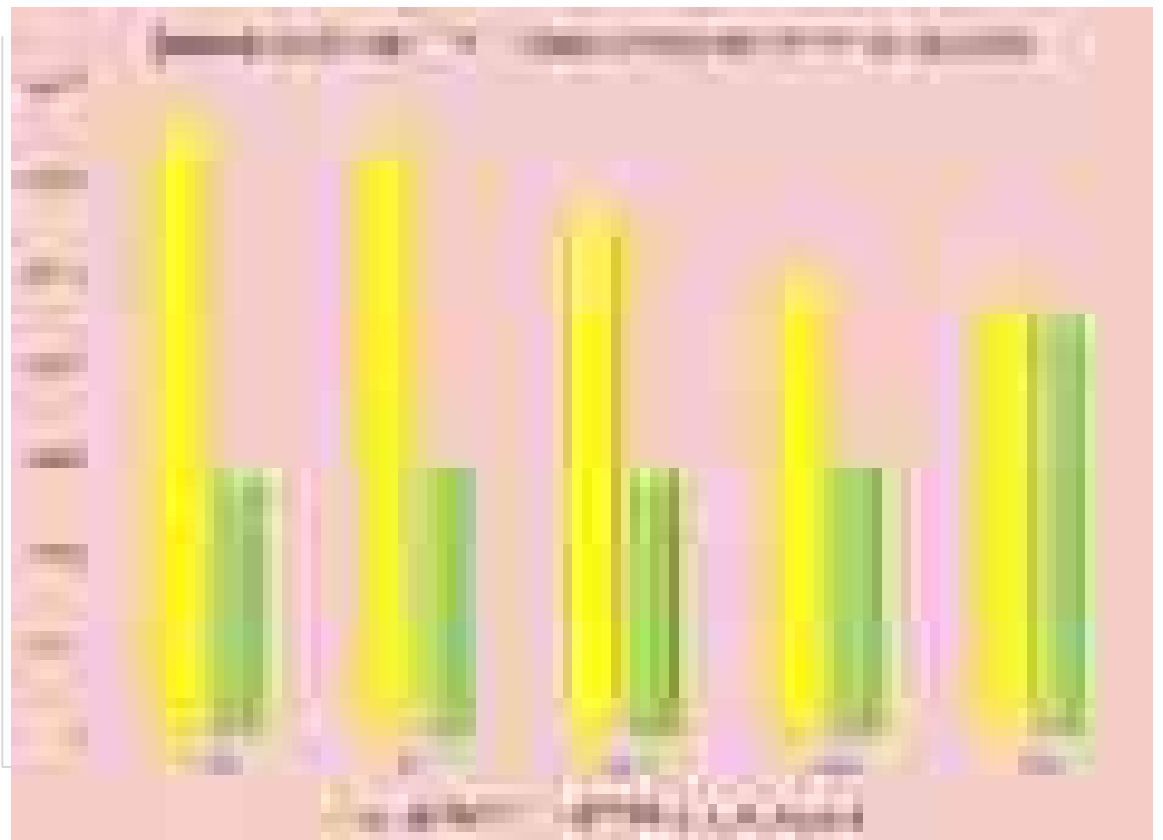

Gambar 2.53 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Rasio Jumlah PMKS yang Tertangani Terhadap Jumlah PMKS yang Ada (%), 2016-2020

Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020

Selama lima tahun terakhir, jumlah PMKS mengalami penurunan setiap tahunnya ini disebabkan karena jumlah PMKS yang tertangani terhadap total jumlah PMKS yang ada cenderung meningkat. Pada tahun 2016 jumlah PMKS sebanyak 130.070 jiwa menurun menjadi sebanyak 93.338 jiwa pada tahun 2020. Sementara itu PMKS yang tertangani pada tahun 2016 sebanyak 58.127 jiwa atau sebesar 44,69 persen, lalu meningkat signifikan lima tahun terakhir sehingga pada Tahun 2020 PMKS yang

tertangani menjadi sebanyak 91.695 Jiwa atau sebesar 98,24 persen. Berdasarkan data tersebut, terdapat tren yang menurunt pada jumlah PMKS, sehingga menunjukkan adanya komitmen dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja dalam penanganan PMKS.

2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Aspek ketenagakerjaan menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk. Beberapa masalah muncul di sektor ketenagakerjaan, seperti jumlah perusahaan yang telah melakukan syarat kerja serta jumlah kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tingkat mediasi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan terkait ketenagakerjaan bagi para penduduk. Menghadapi masalah dan tantangan tersebut memerlukan kebijakan pemerintah sebagai bentuk perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Capaian indikator untuk peningkatan kesempatan dan lapangan kerja serta kualitas dan produktivitas tenaga kerja pada tahun 2020. Realisasi jumlah perusahaan yang telah melakukan syarat kerja sebanyak 614 perusahaan dari 820. Selanjutnya, relaisasi jumlah kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tingkat mediasi sebesar 100,00 persen sementara target RPJMD sebesar 100,00 persen. Capaian yang masih di bawah target ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk meningkatakan kinerja dalam urusan

Tabel 2.43 Peningkatan Kesempatan dan Lapangan Kerja serta Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2020

	Satuan	Target	Realisasi
Jumlah Perusahaan yang telah melakukan syarat kerja	perusahaan	820	614
Jumlah kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Tingkat Mediasi	%	100,00	100,00

Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2020

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan daerah membutuhkan dukungan dari tiga pilar utama, yaitu pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG mendekati 100 mengindikasikan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hal pembangunan manusia sering dibahas mengenai perbedaan gender, dimana berfokus pada bagaimana mencapai kesetaraan gender dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Pembangunan manusia Kabupaten Serang menurut kesetaraan gender menunjukkan tren fluktuasi pada periode 2016-2020. Akan tetapi, capaian IPG kabupaten Serang selama periode tersebut selalu lebih tinggi dari capaian Provinsi Banten.

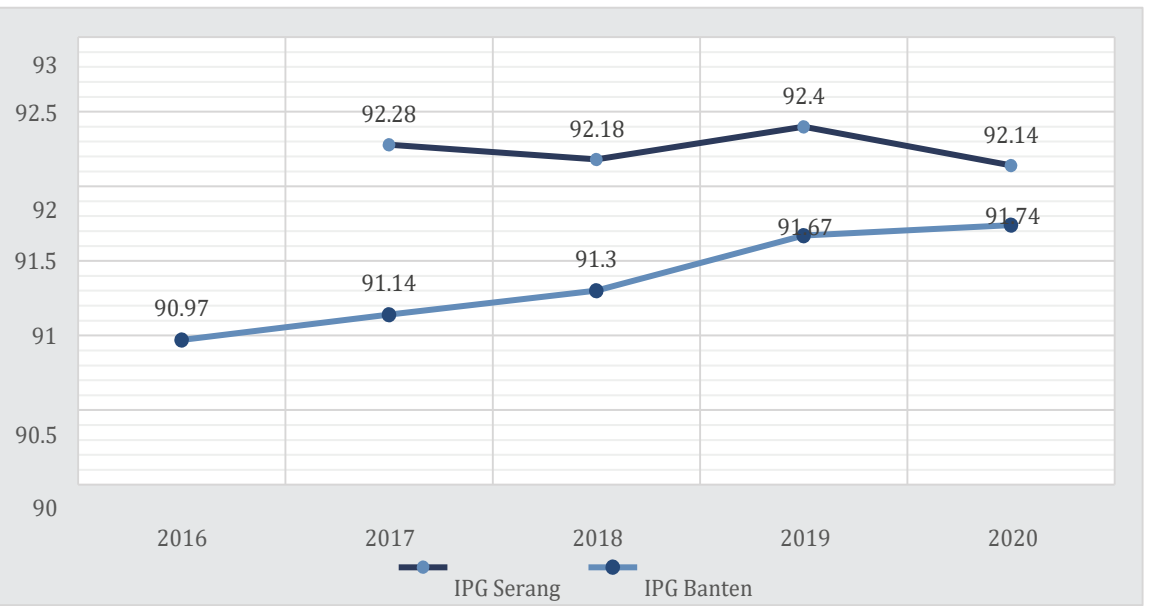

Gambar 2.54 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Serang dan Provinsi Banten, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Serang

Sementara itu, berdasarkan capaian regional IPG di wilayah Provinsi Banten pada tahun 2020, maka Kabupaten Serang berada di peringkat tiga, dengan rata-rata IPG di Provinsi Banten pada tahun 2020 sebesar 89,66. Capaian IPG tertinggi dicapai oleh Kota Tangerang dengan nilai 94,89. Sementara daerah dengan capaian paling rendah adalah Kabupaten Lebak dengan capaian sebesar 79,63.

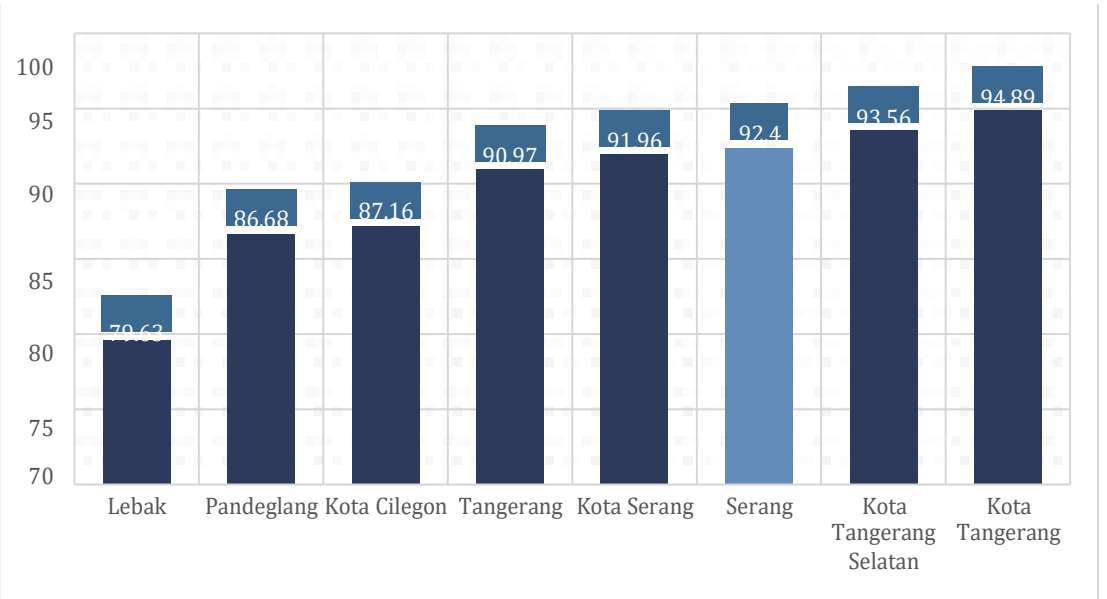

Gambar 2.55 Perbandingan Regional Capaian Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Serang di Tingkat Provinsi Banten, 2018

Sumber: Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Serang Tahun 2019

2.3.2.3 Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemenuhan pangan menjadi kebutuhan hidup yang tidak dapat digantikan. Ketersediaan pangan menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah daerah. Berdasarkan data 42 rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari menurut kelompok komoditas makanan dan kelompok pengeluaran jumlah konsumsi kalori Kabupaten Serang sebesar 1.374 kcal untuk penduduk dengan pengeluaran 40 persen terbawah, 2.202 kcal untuk penduduk dengan pengeluaran 40 persen tengah, serta 2.726 kcal untuk penduduk dengan pengeluaran 20 persen teratas. Sedangkan berdasarkan komoditasnya, untuk semua kelompok pengeluaran didominasi oleh padi-padian. Berdasarkan data pada tabel 2.41 di bawah juga dapat dilihat bahwa ada kesenjangan yang cukup tinggi pada konsumsi komoditas 20 persen teratas.

Tabel 2.44 Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran (Kcal), 2019

Kelompok Komoditas Makanan	Kelompok Pengeluaran		
	40% Terbawah	40% Tengah	20% Teratas
Padi-padian	714,42	871,91	879,59
Umbi-umbian	37,03	29,3	21,59
Ikan/udang/cumi/ kerang	26,52	51,19	76,26
Daging	12,56	49,69	91,72
Telur dan susu	13,03	51,32	90,66
Sayur-sayuran	17,06	38,79	50,6
Kacang-kacangan	30,02	56,68	67,79
Buah-buahan	17,1	39,61	84,05
Minyak dan kelapa	151,5	275	297,28
Bahan minuman	44,39	77,16	94,54
Bumbu-bumbuan	7,4	19,08	22,11
Konsumsi lainnya	16,45	56,11	81,67
Makanan dan minuman jadi	286,61	586,56	868,14
Rokok dan tembakau	0,00	0,00	0,00
Jumlah Konsumsi Kalori Kabupaten Serang	**1.374,08**	**2.202,41**	**2.726,01**

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Serang Tahun 2019

Selanjutnya, rata-rata konsumsi protein per kapita sehari menurut kelompok komoditas makanan dan kelompok pengeluaran menunjukkan data yang hampir sama dengan tabel sebelumnya bahwa terdapat kesenjangan yang cukup tinggi mengenai konsumsi protein diantara kelompok pengeluaran pengeluaran 40 persen terbawah dan 20 persen teratas. Jumlah konsumsi protin per kapita sehari untuk penduduk dengan pengeluaran 40 persen terbawah adalah sebesar 34,59 gram, kemudian sebesar 61,04 gram untuk penduduk dengan pengeluaran 40 persen tengah, serta 84,21 gram untuk penduduk dengan pengeluaran 20 persen tertinggi.

Adanya kesenjangan tersebut, maka perlu adanya perhatian bagi pemerintah khususnya dalam pemberian bantuan pada penduduk miskin.

Tabel 2.45 Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran (gram), 2019

Kelompok Komoditas Makanan	Kelompok Pengeluaran		
	40% Terbawah	40% Tengah	20% Teratas
Padi-padian	16,75	20,49	20.72
Umbi-umbian	0,27	0,24	0.21
Ikan/udang/cumi/ kerang	4,51	8,98	13.32
Daging	0,76	3,1	5.89
Telur dan susu	0,84	2,73	4.55
Sayur-sayuran	0,91	1,96	2.57
Kacang-kacangan	2,78	5,5	6.73
Buah-buahan	0,19	0,45	0.94
Minyak dan kelapa	0,01	0,04	0.10
Bahan minuman	0,51	1,17	1.32
Bumbu-bumbuan	0,35	0,75	0.88
Konsumsi lainnya	0,35	1,2	1.74
Makanan dan minuman jadi	6,37	14,43	25.24
Rokok dan tembakau	0	0	0.00
Jumlah Konsumsi Protein Kabupaten Serang	**34,59**	**61,04**	**84,21**

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Serang, 2019

2.3.2.4 Lingkungan Hidup

Isu mengenai kualitas hidup berkaitan erat dengan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang dilakukan sekarang untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa harus mengurangi manfaatnya bagi generasi yang akan datang. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks komposit yang menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian adalah Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Nilai indeks berkisar antara 0-100, dengan kategori nilai:

1. Sangat Baik : IKLH > 80
2. Baik : 70 < IKLH ≤ 80
3. Cukup Baik : 60 < IKLH ≤ 70
4. Kurang Baik : 50 < IKLH ≤ 60
5. Sangat Kurang Baik : 40 < IKLH ≤ 50

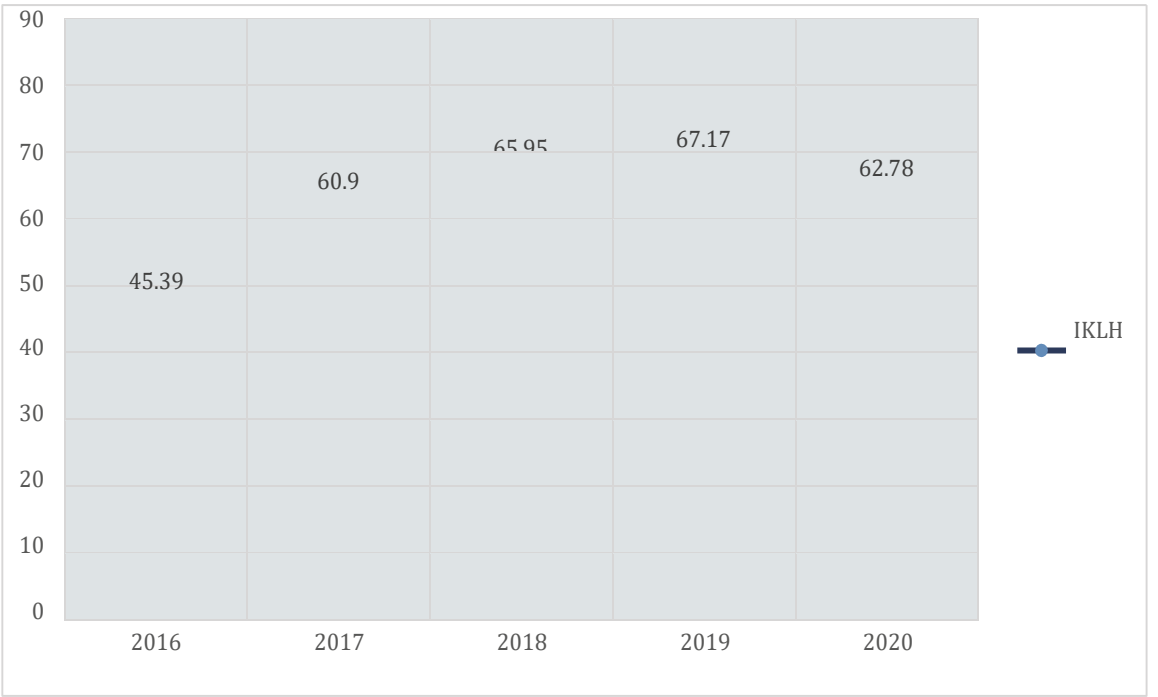

Gambar 2.56 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, 2016-2020

Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020

Selama tahun 2016-2020, IKLH Kabupaten Serang terus mengalami fluktuasi Pada tahun 2016, IKLH mencapai 45,39 meningkat menjadi 67,17 pada tahun 2019. Peningkatan yang signifikan tersebut menunjukkan adanya peningkata nilain IKLH dari kategori sangat kurang baik menjadi cukup baik. Namun, pada tahun 2020, nilai IKLH Kabupaten Serang mengalami penurunan signifikan menjadi 62,78. Hal ini menunjukkan perlu adanya evaluasi upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Selain indikator IKLH, urusan lingkungan hidup yang ditangani Pemerintah Kabupaten Serang di antaranya adalah penanganan dan pengelolaan sampah serta peneglolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sejauh ini, pada periode tahun 2016-2019 penanganan sampah yang dilakukan di Kabupaten Serang sudah relatif cukup baik. Berikut adalah data mengenai capaian pengelolaan sampah dan RTH di Kabupaten Serang.

Tabel 2.46 Cakupan Pelayanan Pengelolaan Sampah dan Tingkat Pengelolaan RTH, 2016-2020

	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan pelayanan pengelolaan sampah 3R	%	11,84	17,15	17,51	22,5	21,25
Tingkat pengelolaan RTH	%	97	100	90	90	90

Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas, cakupan pelayanan pengelolaan sampah 3R selalu mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 cakupannya mencapai 21,25 persen. Sementara itu, tingkat pengelolaan RTH pada periode yang sama mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, tingkat cakupannya mencapai 97 persen, namun pada tahun 2020 cakupannya mencapai 90 persen.

2.3.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi rujukan penting dalam proses pelaksanaan kebijakan-kebijakan seperti politik, sosial, dan ekonomi agar tepat sasaran. Pelayanan dokumen kependudukan yang dimaksud diantaranya meliputi pembuatan KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Akte Kematian. Tabel berikut menunjukkan capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Serang.

Tabel 2.47 Cakupan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil, 2016-2020 (%)

Tahun	Target	Realisasi
2016	100,00	65,27
2017	100,00	100,00
2018	100,00	100,00
2019	100,00	100,00
2020	100,00	100,00

Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020

Realisasi cakupan pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil selama periode 2016-2020 jika dibandingkan dengan target RPJMD mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, realisasinya mencapai 65,27 persen sementara target sebesar 100 persen. Sedangkan pada tahun 2020, realisasi sama dengan target yang akan dicapai dimana cakupannya telah mencapai 100 persen.

2.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Serang dapat tercermin dalam pelayanan pemerintah desa yang mengalami peningkatan. Beberapa indikator pemberdayaan desa diantaranya prosentase desa memiliki bumdes aktif, jumlah TTG yang dimanfaatkan, jumlah desa dengan kategori minimal berkembang, jumlah sarana prasarana desa yang dibangun mandiri, prosentase desa dengan tertib administrasi, serta prosentase desa dengan efektivitas anggaran.

Tabel 2.48 Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Serang Tahun 2020

	Satuan	Target	Realisasi
Prosentase Desa Memiliki BUMDes Aktif	%	2,00	2,00
Jumlah TTG yang dimanfaatkan	Point	1,00	1,00
Jumlah Desa dengan Kategori Minimal Berkembang	Point	4,00	22,00
Jumlah Sarana Prasarana Desa Yang Dibangun Mandiri	Point	1,00	1,00
Prosentase Desa dengan Tertib Administrasi	%	29,00	29,00
Prosentase Desa dengan Efektivitas Anggaran	%	29,00	29,00

Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2020

Secara umum, kinerja program pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Serang pada tahun 2020 relatif baik. Hampir semua realisasi capaian indikator sama dengan target yang direncanakan.

Tabel 2.48a Status Desa di Kabupaten Serang Berdasarkan IDM Tahun 2020 dan 2021

Status Desa	2020	2021
Mandiri	3	3
Maju	46	50
Berkembang	255	254
Teringgal	22	19
Sangat Tertinggal	0	0
Jumlah Desa	326	326

2.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) diukur dengan menurunnya laju pertumbuhan penduduk dan capaian peserta KB aktif.

Tabel 2.49 Jumlah Tempat Pelayanan KB Menurut Kecamatan di Kabupaten Serang, 2020

No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	No Faskes	Nama Klinik	Alamat Klinik	P	S
1	360405	Kramatwatu	3604001	KRAMATWATU	KRAMATWATU	1	
2	360406	Waringinkurung	3604002	WARINGIN KURUNG	WARINGIN KURUNG	1	
3	360407	Bojonegara	3604003	BOJONEGARA	BOJONEGARA	1	
4	360408	Pulo Ampel	3604004	PULOAMPEL	PULO AMPEL	1	
5	360409	Ciruas	3604005	CIRUAS	CIRUAS	1	
6	360411	Kragilan	3604006	KRAGILAN	KRAGILAN	1	
7	360408	Pulo Ampel	3604007	KELUARGA PL AMPEL	PULO AMPEL		1
8	360415	Cikande	3604008	CIKANDE	CIKANDE	1	
9	360416	Kibin	3604009	PKM KIBIN	Kibin Km. 18,5	1	
10	360417	Carenang	3604010	CARENANG	CARENANG	1	
11	360418	Binuang	3604012	BINUANG	BINUANG	1	
12	360412	Pontang	3604013	PONTANG	PONTANG	1	
13	360413	Tirtayasa	3604014	TIRTAYASA	TIRTAYASA	1	
14	360414	Tanara	3604015	TANARA JAYA	Kp. Tersaba Desa. Tanara	1	
15	360424	Pamarayan	3604016	PAMARAYAN	PAMARAYAN	1	
16	360425	Kopo	3604018	KOPO I	KOPO	1	
17	360426	Jawilan	3604019	JAWILAN	JAWILAN	1	
18	360423	Cikeusal	3604021	CIKEUSAL	CIKEUSAL	1	
19	360419	Petir	3604025	PETIR	PETIR	1	
20	360420	Tunjung Teja	3604026	PKM TUNJUNG TEJA	TUNJUNG TEJA	1	
21	360422	Baros	3604029	BAROS	BAROS	1	
22	360430	Anyar	3604030	PKM ANYER	ANYAR	1	
23	360430	Anyar	3604031	AFINA ANYER	ANYER		1
24	360405	Kramatwatu	3604032	BUNDA LESTARI KR WATU	KRAMAT WATU		1
25	360431	Cinangka	3604033	PKM CINANGKA	CINANGKA	1	
26	360432	Mancak	3604035	MANCAK	MANCAK	1	
27	360427	Ciomas	3604036	CIOMAS	CIOMAS	1	
28	360428	Pabuaran	3604037	PKM PABUARAN	PABUARAN	1	
29	360429	Padarincang	3604038	PADARINCANG	JL. PALKA PADARINCANG KM.32	1	
30	360433	Gunung Sari	3604039	GUNUNG SARI	GUNUNG SARI	1	
31	360434	Bandung	3604040	BANDUNG	BANDUNG	1	
32	360425	Kopo	3604045	KOPO II	Nyompok	1	
33	360411	Kragilan	3604048	PEMATANG	Pematang	1	
34	360422	Baros	3604050	PKBRS Kab. Serang	RSUD KAB.SERANG	1	
35	360411	Kragilan	3604051	INDAH KIAT KRAGILAN	KRAGILAN		1
36	360406	Waringinkurung	3604055	KUSUMA MEDIKA WR KRG	WR. KURUNG		1

Sumber: DKBP3A Kabupaten Serang, 2020

Kegiatan Pelayanan KB dilaksanakan disejumlah tempat pelayanan yaitu pada tahun 2020 sebanyak 64 unit yang terdiri atas 32 unit Faskes Pemerintah dan 32 Unit Faskes Swasta pada 29 kecamatan, jumlah tempat pelayanan KB paling banyak berada di Kecamatan Kragilan sebanyak 7 unit, kemudian di Kecamatan Kibin sebanyak 7 unit dan 6 unit di kecamatan kramatwatu.

2.3.2.8 Perhubungan

Dalam hal target penyelenggaraan aspek pelayanan publik bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, maka teradapat beberapa sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang, diantaranya rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat, tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten, tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek, serta tersedianya pelabuhan penyeberangan pada kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.

Tabel 2.50 Capaian Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Perhubungan

	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat	%	14,19	14,32	12,41	12,36	12,73
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	%	46,67	47,09	22,13	22,54	22,54
Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Unit	3	3,00	4	4	4
Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran	%	75	75,00	75	75	75

	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase angkutan umum yang memiliki standar kelayakan (KIR)	%	83,40	85,20	89,83	90,10	90,20
Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	%	3,45	4,00	5,74	5,90	6,00
Persentase terminal angkutan umum yang telah berfungsi/ operasional	%	60,00	70,00	80,00	85,00	85,00
Rasio meningkatnya keselamatan dan kelancaran berlalu lintas	%	75,00	75,00	75,00	76,00	76,00

Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020

Secara umum, seluruh sasaran telah berhasil untuk dilaksanakan selatif sudah cukup baik. Namun demikan, beberapa catatan muncul terutama berkaitan dengan tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten. Cakupan yang dicapai indikator tersebut selama empat tahun terakhir terus menurun. Cakupan jaringan angkutan umum penting untuk mempermudah akses masyrakat dalam mencapai daerah lain guna membantu aktivitas baik ekonomi maupun non-ekonomi.

2.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

Keberadaan hotspot internet di tingkat kecamatan diharapkan dapat meningkatkan penyebarluasan informasi. Selama tahun 2016 dan hingga tahun 2020 peningkatan ketersedian hotspot internet cukup baik dan melebih target yang ditetapkan. Rasio ketersedian hotspot internet tingkat kecamatan di Kabupaten Serang dapat dilihat pada Tabel 2.51 berikut. Pada tahun 2016 rasio internet sebesar 25,00 persen meningkat menjadi 100,00 persen pada tahun 2020.

Tabel 2.51 Rasio Ketersediaan Hotspot Internet di Tingkat Kecamatan (%)

Tahun	Target	Realisasi
2016	0,00	25,00
2017	20,00	95,00
2018	40,00	51,72
2019	60,00	100,00
2020	80,00	100,00

Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020

2.3.2.10 Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam mendukung kegiatan perencanaan sectoral/mikro, perencanaan makro serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Data statistic dapat memberikan gambaran atau informasi terkait hasil-hasil pelaksanaan pembangunan maupun fenomena lainnya yang terjadi selama periode waktu tertentu.

Urusan statistik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang saat ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Sasaran utama dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan urusan statistic adalah penyediaan data statistic yang cepat, akurat dan akuntabel, tersedianya manajemen data statistic sectoral, meningkatkan kapasitas SDM Statisitk seta meningkatknya pengelolaan sarana prasarana data dan informasi elektronik.

Beberapa kendala atau hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan urusan statistic adalah : masih belum adanya keterpaduan data antar lembaga/OPD, belum adanya metadata statistic, masih minimnya jumlah dan kapasitas SDM statistik serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan urusan statistik.

2.3.2.11 Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, sehingga semakin tinggi penanaman modal di suatu daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk semakin meningkat. Oleh karena itu, untuk mengarahkan potensi ekonomi lokal, penyelenggaraan urusan penanaman modal menjadi salah satu urusan yang dapat mendukung peningkatan kontribusi sektor keuangan terhadap PDRB di Kabupaten Serang.

Penanaman modal sendiri dapat dibedakan menjadi Penamanan Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PDMN adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Sedangkan PMA adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, artinya bahwapemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

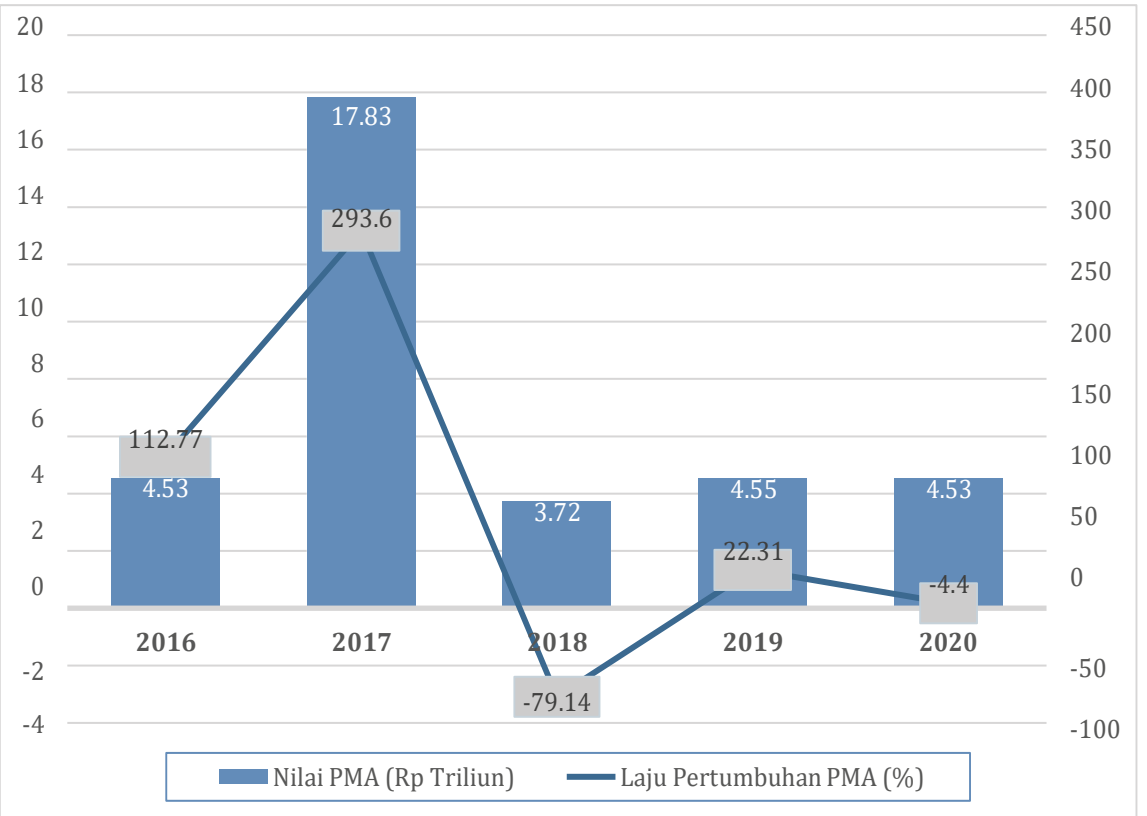

Gambar 2.57 Nilai Investasi PMA dan Laju Pertumbuhan Investasi PMA, 2016-2020

Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020

Nilai investasi PMA selama lima tahun terakhir di Kabupaten Serang berfluktuasi dengan rata-rata pertahunnya sebesar 7,03 triliun rupiah. Pada tahun 2017, nilai PMA tahunan mencapai angka tertinggi selama periode tersebut dengan nilai sebesar 17,83 triliun rupiah. Sementara itu, laju pertumbuhan investasi berfluktuasi. Pada tahun 2016, 2017, dan 2019 investasi PMA mengalami laju pertumbuhan positif sedangkan pada tahun 2018 dan 2020 mengalami pertumbuhan negatif. Selama periode tersebut, rata-rata laju pertumbuhan PMA sebesar 69,03 persen. Laju pertumbuhan PMA tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan laju pertumbuhan sebesar 293,60 persen.

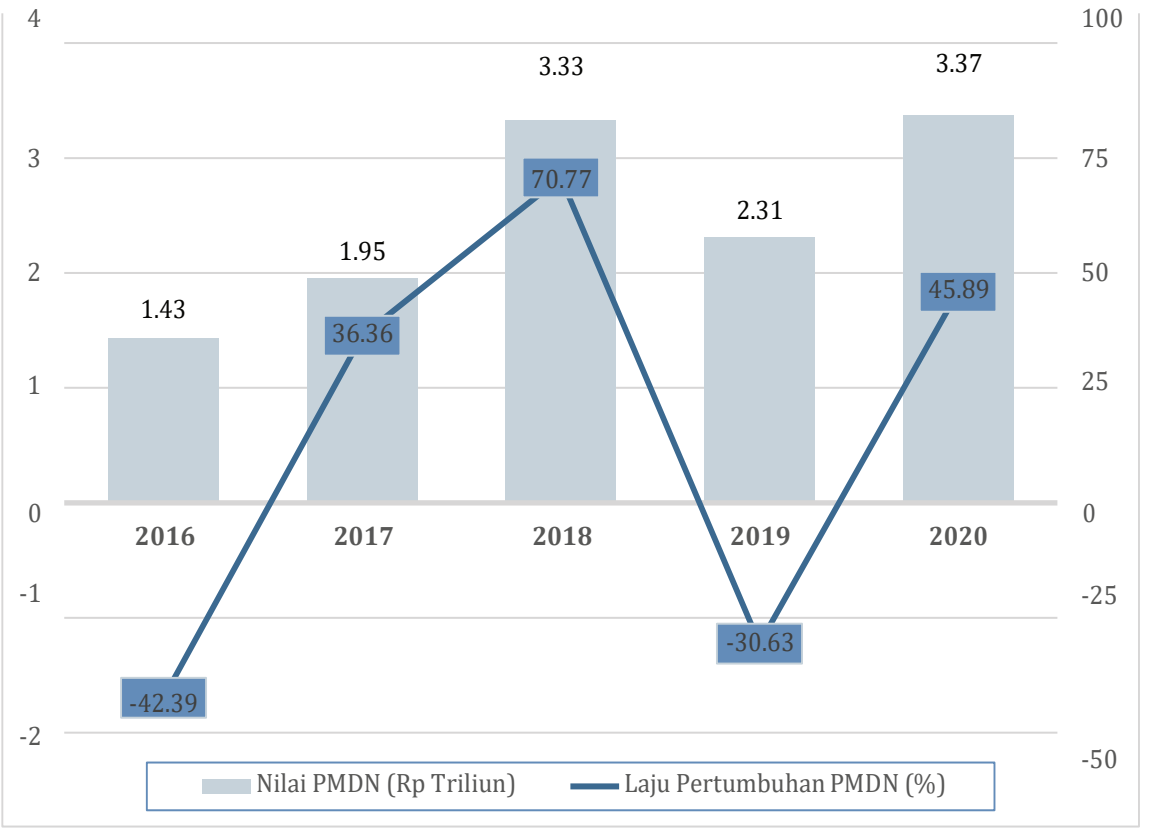

Gambar 2.58 Nilai Investasi PMDN dan Laju Pertumbuhan Investasi PMDN, 2016- 2020

Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020

Nilai investasi PMDN selama empat tahun terakhir di Kabupaten Serang berfluktuasi dengan rata-rata pertahunnya sebesar 2,486 triliun rupiah. Pada tahun 2018, nilai PMDN tahunan mencapai angka tertinggi selama periode tersebut dengan nilai sebesar 3,33 triliun rupiah. Sementara itu, laju pertumbuhan investasi berfluktuasi. Pada tahun 2017 dan 2018 investasi PMDN mengalami laju pertumbuhan positif sedangkan pada tahun 2016 dan 2019 mengalami pertumbuhan negatif. Selama periode tersebut, rata-rata laju pertumbuhan PMDN sebesar 16 persen. Laju pertumbuhan PMDN tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan laju pertumbuhan sebesar 70,77 persen.

Indeks daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang maupun jasa. Dapat dikatakan bahwa indeks daya beli adalah cerminan dari standar hidup layak diukur dengan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (dalam hal ini konsumsi riil per kapita). Oleh karena itu, dalam indeks daya beli, pendapatan riil merupakan indikator yang penting. Gambar 2.59 berikut menunjukkan perkembangan target dan realisasi indeks daya beli di Kabupaten Serang.

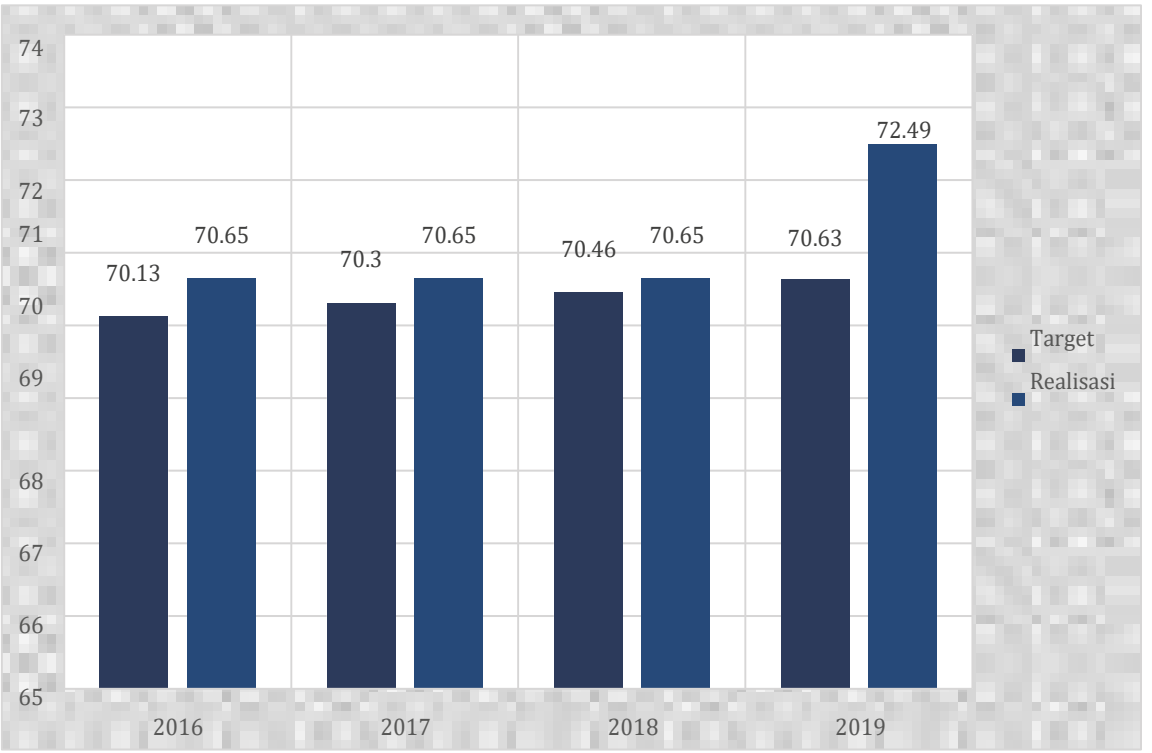

Gambar 2.59 Indeks Daya Beli, 2016-2019

Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2019

Selama empat tahun terakhir, capaian indeks daya beli Kabupaten Serang cukup baik, dengan realisasi indeks selalu lebih tinggi daripada target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 indeks daya beli sebesar 70,65 meningkat menjadi 72,49 pada tahun 2019, dengan rata-rata indeks daya beli selama periode tersebut sebesar 71,11.

2.3.2.12 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rasio proporsi aktif yaitu jumlah koperasi aktif dibandingkan jumlah keseluruhan yang ada di Kabupaten Serang selama tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan, dari 31,78% pada tahun 2016 menjadi 74,72% pada tahun 2020. Begitu juga dengan rasio Usaha Mikro dan Kecil, dimana jumlah usaha mikro dan kecil dibandingkan dengan jumlah seluruh UKM di Kabupaten Serang mengalami peningkatan selama periode tahun 2016 – 2020, yaitu sebesar 98,87% pada tahun 2016 dan meningkat sebesar 99,28% pada tahun 2020. Rasio Koperasi Aktif dan Rasio Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Serang dapat dilihat pada Tabel 2.52 berikut.

Tabel 2.52 Capaian Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Serang Tahun 2016 - 2020

	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Koperasi Aktif	%	31,78	69,24	71,58	73,75	74,72
Rasio Usaha Mikro dan Kecil	%	98,87	98,68	99,94	99,24	99,28

Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020

2.3.2.13 Transmigrasi

Jumlah calon transmigrasi yang siap diberangkatkan di Kabupaten Serang berdasarkan kuota yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Pada Tahun 2016 – 2018 mendapat kuota masing-masing 5 KK per tahun, sedangkan pada tahun 2019 mendapatkan kuota 9 KK dan pada tahun 2020 tidak ada transmigran yang diberangkatan karena adanya pandemi virus corona-19. Jumlah calon transmigrasi yang siap diberangkatkan di Kabupaten Serang dapat dilihat pada tabel 2.53 berikut.

Tabel 2.53 Capaian Jumlah Calon Transmigran yang siap diberangkatkan Kabupaten Serang Tahun 2016 - 2020

	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Calon Transmigran yang siap diberangkatkan	KK	5	5	5	9	0

Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020

2.3.2.14 Kepemudaan dan Olahraga

Pada dasarnya kepemudaan dan olahraga melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepemudaan dan olahraga. Urusan kepemudaan dan olah raga diarahkan pada penyiapan sumber daya manusia untuk menjadi pemimpin masyarakat serta sebagai pelaku utama dalam pembangunan di dalam lingkup kepemudaan dan olahraga. Dalam rangka memenuhi arahan tersebut diperlukan program-program yang berkaitan dengan sektor lain, misalnya pendidikan, kesehatan, kepemimpinan serta profesionalitas.

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kepemudaan dan olahraga dapat diukur melalui indikator jumlah organisasi pemuda, cakupan pembinaan organisasi kepemudaan, cakupan atlit berprestasi, dan tingkat ketersedian sarana dan prasarana olahraga masyarakat. Data tentang cakupan pembinaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Serang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada gambar di bawah ini:

	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi	9.09	51.51	51.51	93.33	85.71
Target	33.33	45.45	61	75.76	87.88

Gambar 2.60 Cakupan Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Serang, 2016-2020

Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020

Selama lima tahun terakhir, realisasi cakupan pembinaan organisasi kepemudaan cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, 2018, dan 2020 realisasi capaian tersebut masih di bawah target. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam upaya peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan.

Tabel 2.54 Capaian Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Olahraga dan Prestasi Olahraga

	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Atlit berprestasi	%	41,48	58	46	17,64	0
Tingkat Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat (kecamatan)	%	0	0	0	4	4

Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa indikator capaian urusan kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Serang tahun 2016-2020 cenderung kurang baik. Cakupan atlit berprestasi mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebesar 17,64 persen dan tahun 2020 menjadi 0 dikarenakan tidak ada event olahraga akibat Pandemi Covid-19. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat (kecamatan) selama tahun 2016-2018 masih sebesar 0, namun meningkat menjadi 4 pada tahun 2019 dan 2020.

2.3.2.15 Persandian

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang perlu diatur oleh Perangkat Daerah adalah bidang persandian. Kewenangan daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam Pemetaan Urusan Persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai Arah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandiaan.

Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya.

Kewenangan kedua yaitu terkait penetapan pola hubungan komunikasi sandi yaitu dengan layanan berupa pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, indikatornya dilihat dari jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan atau rasio dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah total perangkat daerah (Majalah Info Singkat Permendagri Vol. VIII, No. 09/I/P3DI/Mei/2016). Untuk mengaplikasikan indikator tersebut perlu adanya kerjasama antara urusan komunikasi dan informatika dengan Persandian dan Telekomunikasi di Kabupaten Serang.

2.3.2.16 Kebudayaan

Pembangunan bidang urusan kebudayaan sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab, serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk pencapaian masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kebudayaan di Kabupaten Serang dapat diukur dengan indikator cakupan SDM, organisasi, pelestarian, kajian, fasilitasi, gelar, misi dan tempat kesenian dan budaya. Selama empat tahun terakhir,

hanya pada tahun 2016 cakupan indikator tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2017-2019, realisasi capaian indikator tersebut sama dengan target yang ingin dicapai dengan realisasi capaian sebesar 100,00 persen. Selanjutnya, di tahun 2020, realisasi capaian indikator tersebut jauh dengan target yang ingin dicapai dengan realisasi capaian sebesar 26 persen.

Tabel 2.55 Rata-rata Cakupan SDM, Organisasi, Pelestarian, Kajian, Fasilitasi, Gelar, Misi Dan Tempat Kesenian dan Budaya (%)

Tahun	Target	Realisasi
2016	100,00	0,00
2017	100,00	100,00
2018	100,00	100,00
2019	100,00	100,00
2020	100,00	26,00

Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020

2.3.2.17 Perpustakaan

Bidang urusan perpustakaan, merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perpustakaan, dapat diukur melalui indikator: koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Rasio jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah terhadap jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah) serta jumlah pengunjung perpustakaan daerah terhadap target jumlah kunjungan perpustakaan daerah, sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.56 Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Kabupaten Serang, 2016-2020

	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Rasio jumlah koleksi judul	%	22,41	51,00	100	100	100

	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
buku yang tersedia di perpustakaan daerah terhadap jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah)						
Jumlah pengunjung perpustakaan daerah terhadap target jumlah kunjungan perpustakaan daerah	%	48,00	86,11	83	100,00	83

Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020

Secara umum, capaian kedua indikator tersebut cukup baik. Selama lima tahun terakhir, capaian kedua indikator mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 capaian kedua indikator telah mencapai 100 persen. Akan tetapi, di tahun 2020 capaian indikator jumlah pengunjung perpustakaan daerah terhadap target jumlah kunjungan perpustakaan daerah turun menjadi 83 persen dan berada di bawah target RPJMD.

2.3.2.18 Kearsipan

Berbagai macam kegiatan operasional maupun program kerja yang dijalankan oleh pemerintah perlu didukung oleh sistem pengarsipan yang baik agar dapat menyajikan informasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dari tahun ke tahun. Terlebih untuk menciptakan tata kelola administrasi yang baik juga diperlukan pemeliharaan dan pelestarian arsip daerah yang merupakan bahan kerja dalam mencapai tujuan pemerintahan. Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah perlu menyadari pentingnya arsip, sehingga akan mempermudah dalam penyelenggaraan program kearsipan.

Tabel 2.57 Rasio Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku Terhadap Total Jumlah SKPD Yang Ada (%)

Tahun	Target	Realisasi
2016	41,00	100,00
2017	41,00	100,00
2018	5,00	29,00
2019	51,00	100,00
2020	60,00	100,00

Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020

Tabel di atas menunjukkan rasio jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku terhadap total jumlah SKPD yang ada. Berdasrkan data di atas realisasi indikator tersebut cukup baik dengan capaian selalu berada di atas target RPJMD.

2.3.3 Urusan Pelayanan Pilihan

Pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Adapun sasaran pembangunan di bidang perikanan di Kabupaten Serang adalah untuk meningkatkan produksi dan mutu perikanan. Hal tersebut berkaitan dengan seberapa tinggi kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB, tingkat konsumsi ikan, jumlah produksi perikanan, dan nilai produksi perikanan yang menjadi indikator kinerja pemerintah daerah Kabupaten Serang. Hal ini tentu ditujukan untuk mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan.

2.3.3.1 Perikanan

Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Serang, terdapat indikator yang menjadi tolak ukur penilaiannya. Di Kabupaten Serang, empat indikator yang digunakan adalah: kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB, tingkat konsumsi ikan, jumlah produksi perikanan, dan nilai produksi perikanan.

Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Serang mencapai angka 1,19 persen pada tahun 2016. Angka tersebut berhasil naik menjadi 9,50 persen pada tahun 2019. Data tersebut diambil dari LKPJ Bupati Kabupaten Serang 2016-2019. Meski tidak ada data mengenai persentase kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Serang pada tahun 2017-2018, namun diharapkan jika terdapat tren kenaikan pada kurun waktu tersebut.

Produksi nilai penangkapan ikan yang dihasilkan oleh Kabupaten Serang berasal dari perikanan laut dan perikanan tawar. Jenis ikan yang ditangkap dari laut lebih banyak daripada jenis ikan yang diproduksi selain di laut. Terdapat lebih dari 20 jenis ikan di laut yang ditangkap. Ikan teri merupakan ikan yang paling banyak ditangkap dengan total mencapai 1.279,2 kilogram pada tahun 2018 setelah penangkapan ikan jenis lainnya pada tahun yang sama. Selama tahun 2018, penangkapan ikan di laut mengalami kecenderungan meningkat. Total penangkapan ikan di laut mencapai 9.837,7 kilogram pada tahun 2018, meningkat dari tahun 2014-2016 yang masing- masing sebesar 7.553,1 kilogram (2014), 4.243,2 kilogram (2015), dan 3.342,8 kilogram (2016). Informasi tersebut terangkum dalam 2.58 sebagai berikut.

Tabel 2.58 Produksi dan Nilai Penangkapan Ikan di Laut menurut Jenis Ikan di Kabupaten Serang 2018

Produksi dan Nilai Penangkapan Ikan di Laut menurut Jenis Ikan	2018
Manyung	111,91
Ikan sebelah	25,46
Selar	397,01
Kuwe	175,16
Layang	193,54
Tetengkek	37,47
Bawal hitam	43,26

Produksi dan Nilai Penangkapan Ikan di Laut menurut Jenis Ikan	2018
Bentong	62,41
Kakap	167,14
Tembang	320,54
Lemuru	25,41
Teri	1.279,16
Peperek	185,84
Kurisi	415,93
Tongkol	115,73
Kembung	1.066,47
Tenggiri	61,26
Kerapu	52,66
Baronang	25,79
Pari burung	57,93
Ikan lainnya	5.017,64
Total (kg)	**9.837,71**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2018

Selain ikan di laut, Kabupaten Serang juga memproduksi ikan selain ikan di laut. Terdapat tiga jenis penangkapan ikan selain ikan di laut yang terangkum dalam Tabel 2.59: budidaya laut, tambak dan kolam. Budidaya ikan di tambak menyumbang paling besar bagi Kabupaten Serang, mencapai 26.014,32 kilogram pada tahun 2020, menurun dari tahun 2016 sebesar 47.429 kilogram. Angka produksi tersebut diikuti oleh budidaya laut sebesar 13.756,34 kilogram (2020) dan ikan kolam sebesar 1.471,37 kilogram (2020).

Tabel 2.59 Produksi dan Nilai Penangkapan Selain Ikan di Laut menurut Jenis Ikan di Kabupaten Serang, 2015-2018

Produksi dan Nilai Penangkapan Selain Ikan di Laut menurut Jenis Ikan	2016	2017	2018	2019	2020
Budidaya laut	21.217,00	21.235,032	21.277,96	17.350,80	13.756,34
Budidaya payau (Tambak)	47.429,07	47.544,29	48.084,33	-	26.014,32
Budidaya air tawar (Kolam)	1.688,34	1.701,72	1.734,88	1.767,51	1.471,37
Total (Kg)	**70.334,41**	**70.481,04**	**71.297,17**	**19.118,31**	**41.242,03**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2016-2020 (data Diolah)

Potensi perikanan budidaya menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Serang untuk mengembangkan sub sektor perikanannya. Kondisi makro perekonomian yang dapat dilihat dari sub sektor perikanan tidak hanya ditinjau dari aspek nilai produksi perikanan saja, namun juga perlu melihat tingkat konsumsi ikan dan nilai produksi perikanan yang ada di Kabupaten Serang. Total produksi perikanan di Kabupaten Serang mengalami penurunan pada kurun waktu tahun 2016-2019. Angka yang dicapai di tahun 2016 adalah 77.929,4 kilogram dan turun menjadi 63.490,8 kilogram pada tahun 2019.

Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang bisa menjadi alternatif selain daging. Organisasi Kesehatan Dunia *(World Health Organization)* menetapkan standar konsumsi ikan sebesar 36 kilogram per kapita per tahun. Meski konsumsi ikan di Kabupaten Serang lebih rendah dari standar yang ditetapkan oleh WHO, namun tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Serang mengalami peningkatan, dari 23,36 kilogram per kapita per tahun (2016) menjadi 33,02 kilogram per kapita per tahun (2019).

Peningkatan pun juga terjadi pada nilai produksi perikanan**,** di mana diperoleh 209,4 miliar rupiah pada tahun 2016 menjadi 384,2 miliar rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan jika kemampuan pemerintah Kabupaten Serang dalam menyediakan ikan sebagai salah satu sumber protein bagi konsumsi masyarakat pun meningkat. Hal tersebut tentu akan mendorong tingkat konsumsi ikan di masyarakat Kabupaten Serang yang diharapkan dapat sesuai, atau bahkan melebihi, standar yang telah ditetapkan oleh WHO.

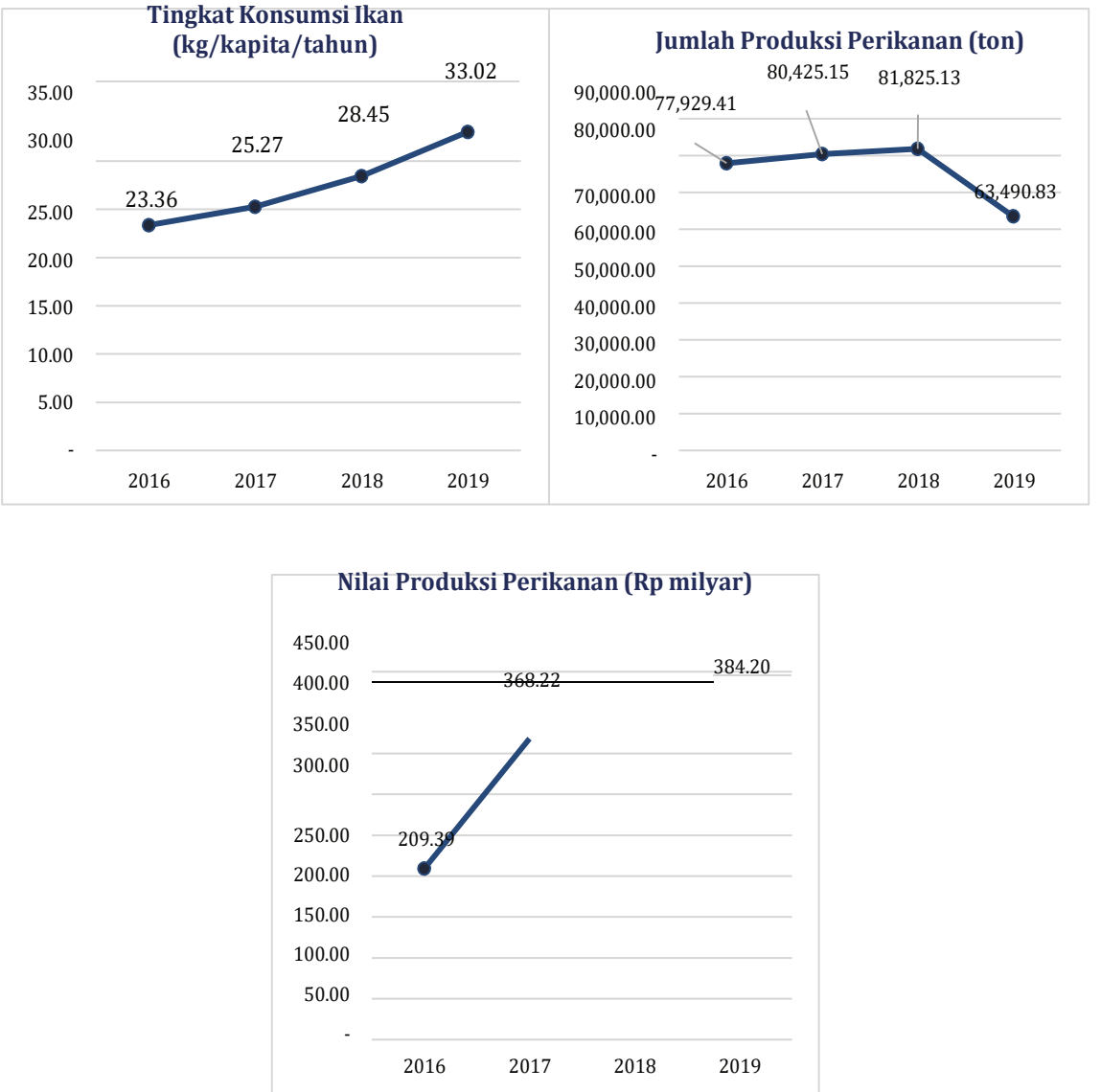

Gambar 2.61 Tingkat Konsumsi Ikan, Jumlah Produksi Perikanan, dan Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Serang, 2016-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2015-2019

2.3.3.2 Pariwisata

Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pariwisata di Kabupaten Serang diarahkan untuk mencapai tujuan pengembangan potensi dan ketahanan budaya dengan sasaran meningkatnya kontribusi sektor pariwisata. Pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Serang sendiri, seperti terdapat pada Tabel 2.60, terdiri dari jenis objek wisata alam dan objek wisata buatan. Terdapat 68 objek wisata alam pada tahun 2018. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi

wisata buatan, mengalami penurunan dalam kurun waktu 2016-2018, yaitu 43 buah (2016) menjadi 31 buah (2018). Hingga tahun 2018, total objek wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Serang sebanyak 99 buah.

Tabel 2.60 Jenis Objek Wisata di Kabupaten Serang, 2016-2018

Jenis objek wisata	2016	2017	2018
Alam	52	47	68
Buatan	43	10	31
Jumlah objek wisata	**95**	**57**	**99**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2016-2018

Secara keseluruhan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Serang cenderung mengalami penurunan, seperti terlihat dalam Tabel 2.61. Pada tahun 2016, terdapat 11.587.088 wisatawan di Kabupaten Serang, kemudian terus mengalami penurun hingga menjadi 658.160 wisatawan pada thun 2019. Namun, jumlah tersebut mengalami meningkat menjadi 1.374.043 pengunjung pada tahun 2020. Data ini menunjukkan bahwa meskipun dalam situasi pandemi, namun tidak menyurutkan wisatawan nusantara untuk berkunjung di Kabupaten Serang.

Tabel 2.61 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Serang, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah wisatawan nusantara	11.857.088	9.245.374	8.392.828	649.489	1.369.074
Jumlah wisatawan mancanegara	3.860	2.425	1.470	8.671	4.969
Jumlah wisatawan	11.860.948	9.247.799	8.394.298	658.160	1.374.043

Sumber : LKPJ Kabupaten Serang, 2016-2020, dan Kabupaten Serang Dalam Angka, 2021

Sedangkan jka dibandingkan dengan wisatawan mancanegara, jumlah wisatawan nusantara terlihat mendominasi setiap tahunnya dalam kurun waktu 2016-2020. Jumlah wisatawan nusantara, sebanding dengan jumlah wisatawan keseluruhan yang terus mengalami penurunan hingga tahun 2019, namun meningkat sebesar 719.585 wisatawan pada tahun 2020. Sedangkan jumlah wisatawan mancanegara, terus mengalami penurunan dari sebesar 3.860 wisatawan pada tahun 2016 menjadi 1.470

wisatawan pada tahun 2018. Namun pada tahun 2018 terjadi peningkatan yang cukup tajam mencapai empat kali lipat menjadi sebanyak 8.671 wisatawan. Akan tetapi, pada tahun 2020 dikarenakan kondisi pandemi sehingga kembali menurun hampir setengahnya menjadi 4.969 wisatawan.

2.3.3.3 Pertanian

Sebagai salah satu sektor penting, pertanian memiliki hubungan langsung dengan kehidupan manusia karena menyediakan kebutuhan dasar bagi manusia. Pertanian, dalam arti luas, tidak hanya mencakup kegiatan tanaman pangan, seperti jagung dan padi, tetapi juga mencakup perkebunan dan peternakan. Kegiatan pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi. Penyelenggaraan urusan pertanian bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang mencakup indikator kontribusi sub sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan terhadap PDRB serta tingkat pembangunan kawasan pertanian, perkebunan, dan peternakan di Kabupataen Serang. Penyelenggaraan urusan pertanian juga memuat indikator tentang ketersediaan energi dan protein serta pencapapian skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Luas lahan pertanian tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan kawasan pertanian dan perkebunan. Kegiatan tersebut tentu membutuhkan lahan agar pertanian dan perkebunan dapat optimal. Sebagai komoditas utama, padi memiliki luas lahan panen 79.459 hektar pada tahun 2018, diikuti dengan jagung (1.582 hektar), kacang tanah (842 hektar), kacang kedelai (665 hektar), ubi kayu (620 hektar), dan ubi jalar (192 hektar). Luas panen tersebut tampak mengalami penurunan dari tahun 2014 seperti tertera pada Tabel 2.17.

Dalam tabel yang sama, produksi pada juga mengalami penurunan dari tahun 2014-2018, yaitu 86.922 ton (2014) yang turun menjadi 419.228 ton (2018). Penurunan juga terjadi pada produksi ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang kedelai. Hal berbeda terjadi pada jagung, di mana produksi pada tahun 2014 sebanyak 2.279 ton meningkat menjadi 8.456 ton pada tahun 2018.

Dari data tersebut, dapat dihitung produktivitas komoditas padi dan palawija di Kabupaten Serang. Produktivitas padi selama kurun waktu 2014-2018 mengalami penurunan, meski tidak signifikan, dan berada pada angka 5,3. Penurunan produktivitas juga terjadi pada komoditas kacang tanah dan kacang kedelai. Namun, komoditas jagung, ubi kayu, dan ubi jalar mengalami kenaikan produktivitas pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2014.

Tabel 2.62 Luas Lahan, Produksi, dan Produktivitas Komoditas Utama Padi dan Palawija Padi Ladang di Kabupaten Serang, 2014-2018

Luas lahan, produksi, dan produktivitas komoditas utama padi dan palawija padi ladang		2014	2015	2016	2017	2018
Luas panen (ha)						
	Padi	86.922	88.611			79.459
	Jagung	724	287			1.582
	Ubi kayu	1.551	891			620
	Ubi jalar	516	293			192
	Kacang tanah	3.126	2.436			842
	Kacang kedelai	1.509	467			665
Produksi (ton)						
	Padi sawah	465.858	510.748			419.228
	Jagung	2.279	965			8.456
	Ubi kayu	23.707	15.901			16.038
	Ubi jalar	7.008	3.901			2.842
	Kacang tanah	4.123	3.413			987
	Kacang kedelai	2.010	693			601
Produktivitas (ton/ha)						
	Padi sawah	5,359	5,764			5,276
	Jagung	3,148	3,362			5,345
	Ubi kayu	15,285	17,846			25,868
	Ubi jalar	13,581	13,314			14,802
	Kacang tanah	1,319	1,401			1,172
	Kacang kedelai	1,332	1,484			0,904

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2015-2019

Pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan tentu saja memberikan sumbangsih terhadap PDRB. Adapun kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB di Kabupaten Serang selama periode 2016-2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 kontribusi dari sektor pertanian dan perkebunan mencapai 7,3 persen, kemudian naik cukup signifikan pada pada tahun 2017 menjadi 9,99 persen. Namun demikian, pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan berturut-turut. Sedangkan pada tahun 2020 kontribusi sektor pertanian dan perkebunan masih sama seperti tahun sebelumnya yaitu mencapai 9,50 persen. sama seperti pertanian dan perkebunan, kontribusi peternakan terhadap PDRB juga fluktuatif. Pada tahun 2016, kontribusi sektor peternakan mencapai 1,9 persen, kemudian dari tahun 2017 hingga 2020 besaran kontribusi sektor peternakan sama dengan pertanian dan perkebunan. Merujuk pada Tabel 2.63, tingkat pembangunan kawasan pertanian dan perkebunan selama periode 2016-2020 terus mengalami peningkatan, kecuali tahun 2019 tingkat pembangunan kawasan pertanian turun sebesar 27,36 persen, sedangakan tingkat pembangunan kawasan perkebunan justru turun pada tahun 2020 sebesar 7,62 persen. Tingkat pembangunan kawasan peternakan selama periode tersebut juga terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tingkat pembangunan kawasan pertanian, perkebunan, dan peternakan masing-masing mencapai 151 persen, 70,08 persen, dan 77,78 persen.

Masih dalam tabel yang sama, terlihat bahwa kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Serang selama periode 2016-2019 terus mengalami penurunan, dari semula sebesar 10,19 persen menjadi 9,50 persen pada tahun 2019, sedangkan mulai tahun 2020 kontribusi perikanan tidak lagi dihitung. Adapun tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Serang terus mengalami kenaikan sepanjang tahun 2016-2020, dari 23,36 kilogram per kapita per tahun (2016) menjadi 33,02 kilogram per kapita per tahun. Jumlah produksi perikanan pada tahun 2016-2018 terus mengalami peeningkatan, namun menurun dua tahun berturut-turut hingga pada tahun 2020 hanya mencapai 41.630,42 ton. Nilai produksi perikanan juga terus meningkat setiap tahunnya dari tahun 2016-2019, namun turun cukup signifikan pada tahun 2020 menjadi 188,23 miliar rupiah.

Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa Kabupaten Serang mampu menyediakan energi sebanyak 2.316 kilo kalori per kapita per hari bagi setiap penduduknya pada tahun 2019, meningkat dari 2.273 kilo kalori per kapita per hari pada tahun 2016. Demikian pula dengan ketersediaan protein yang mengalami peningkatan pada tahun 2019 yang mencapai angka 115,2 gram per kapita per hari dari tahun 2016 sebesar 59,66 gram per kapita per hari. Atas dasar nilai tersebut diperoleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Serang yaitu sebesar 88,6 persen, naik sekitar 3 persen dari tahun 2016 yang mencapai 85,80 persen. Sedangkan pada tahun 2020 skor PPH Kabupaten Serang kembali meningkat menjadi 88,9 persen.

Tabel 2.63 Kontribusi Sub Sektor Pertanian dan Perikanan, Peternakan, Perikanan terhadap PDRB, serta Ketahanan Pangan di Kabupaten Serang, 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian dan perkebunan						
Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB	%	7,3	9,99	9,87	9,50	9,50
Tingkat pembangunan kawasan pertanian	%	15	30	114,41	87,05	151
Tingkat pembangunan kawasan perkebunan	%	15	30	74,1	77,70	70,08
Peternakan						
Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	%	1,9	9,99	9,87	9,50	9,50
Tingkat pembangunan kawasan peternakan	%	15	33,33	44,44	55,56	77,78
Perikanan						
Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	%	10,19	9,99	9,87	9,50	-
Tingkat Konsumsi Ikan	kg/kapita/ tahun	23,36	25,27	28,45	33,02	33,02
Jumlah Produksi Perikanan	Ton	77.929,41	80.425,15	81.825,13	63.490, 83	41.630, 42
Nilai Produksi Perikanan	Rp milyar	209,39	368,22	383,57	384,20	188,23
Ketahanan pangan						
Ketersediaan energi	kkal/kap/ hari	2273	2571	2400	2316	-
Ketersediaan protein	gr/kap/hari	59,66	76	63	115,2	-
Skor PPH	%	85,80	86,90	87,60	88,6	88,9

Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Periode 2016-2020

Tabel 2.59 merangkum informasi mengenai jumlah produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan di Kabupaten Serang pada tahun 2016-2020. Jumlah produksi pertanian dan perkebunan, menurut tabel tersebut, relatif mengalami peningkatan pada tahun 2019 sampai 2020. Adapun untuk produksi daging juga mengalami peningkatan pada tahun tersebut.

Tabel 2.64 Jumlah Produksi Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan di Kabupaten Serang, 2016-2020

	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
- Padi	Ton	513.105	520.077	524.228	496.064	558.974
- Jagung	Ton	1,255	6.031	6.395	7.836	6.208
- Kedelai	Ton	714	409	719	466	123
- Cabai Merah	Ton	2.091	2.798	1.942	3.117	1.351
- Bawang Merah	Ton	669	742	1.937	1.107	1.162
- Durian	Ton	15.038	20.915	86.335	19.042	19.033
- Sedap Malam	Tangkai	53.915	70.000	102.650	117.480	312.867
- Kelapa	Ton	8.623	7.198	8.798	8.727	8.744
- Kakao	Ton	352	439	469	401	370
- Cengkeh	Ton	279	410	491	293	302
- Lada	Ton	124	54	94	144	129
Peningkatan Produksi Daging						
- Daging Itik	Kg	774.987	791.136	809.344	829.495	854.574
- Daging Kerbau	Kg	878.414	898.281	914.695	936.197	906.150

Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Periode 2016-2020

Tabel 2.65 menunjukkan luas panen dan produksi tanaman sayuran pada tahun 2020. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa luas panen dan produksi tertinggi diperoleh dari tanaman jamur yaitu mencapai 27.200 ha, dan memproduksi sebanyak 155.875 kuintal jamur. Luas panen dan produksi terbesar setelah jamur yaitu kangkung dan ketimun. Sedangkan tanaman sayur dengan luas panen dan produksi terendah diperoleh dari daun bawang dengan luas panen sebesar 5 ha, dan produksi sebesar 503 kuintal.

Tabel 2.65 Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Serang, 2020

Jenis Tanaman	Luas Panen (ha)	Produksi (kuintal)
Bawang Daun	5	503
Bawang Merah	192	8.909
Bayam	292	19.934
Cabe Besar	222	15.268
Cabe Rawit	222	10.031
Jamur	27.200	155.875
Kacang Panjang	289	21.273
Kangkung	371	39.686
Ketimun	363	32.966
Melon	12	1.330
Sawi	326	27.295
Semangka	49	10.200
Terong	146	10.925
Tomat	50	4.900

Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Tahun 2020

2.3.3.4 Kehutanan

Hutan merupakan kawasan yang berperan strategis bagi keadaan tanah dan sekitarnya. Pemanfaatan sektor hutan pun perlu memperhatikan aspek lingkungan agar tidak terjadi penebangan liar, kebakaran hutan, maupun kejadian lainnya yang dapat merusak ekosistem hutan. Kabupaten Serang, pada tahun 2019, memiliki lahan kritis di luar kawasan hutang lindung seluas 23.819,95 hektar, seperti terlihat pada Tabel 2.66 Hal tersebut dapat diasumsikan jika Kabupaten Serang tidak memiliki lahan hutan potensial, namun terdapat lahan yang kurang dimanfaatkan sehingga dikategorikan sebagai lahan kritis, seperti misalnya pekarangan. Terkait hal tersebut, masyarakat di Kabupaten Serang sebagian memanfaatkan lahan yang mereka miliki (yang berbentuk hutan) untuk menanam aneka sayuran dan cabai, terutama pada masa pandemi Covid-19 saat ini. Pemanfaatan pekaran yang dimiliki masyarakat tersebut tentu membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, yaitu pangan.

Tabel 2.66 Luas Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Serang, 2019

	2019
Luas lahan kritis di luar kawasan hutan lindung (ha)	23.819,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2019

Selain pekarangan yang dimiliki oleh masyarakat, Kabupaten Serang memiliki beberapa jenis kawasan hutan yang datanya terpotret pada tahun 2019 seperti dalam Tabel 2.67. Terdapat jenis kawasan hutang lindung, hutan produksi, dan konservasi yang ada di Kabupaten Serang. Kawasan hutang lindung di Kabupaten Serang pada tahun 2019 seluas 726,64 hektar, sedangkan kawasan hutan produksi seluas 4.154,14 hektar dan kawasan konservasi seluas 6.310,35 hektar. Adapun kawasan hutan produksi terbagi menjadi hutan produksi terbatas (2.827,97 hektar) dan hutan produksi (1.326,17 hektar), sedangkan kawasan hutan konservasi terbagi menjadi hutan suaka alam (5.062,20 hektar) dan hutan taman wisata (1.248,15 hektar). Dengan demikian, maka luas kawasan hutan menurut fungsi yang ada di Kabupaten Serang pada tahun 2019 adalah seluas 11.191,13 hektar.

Tabel 2.67 Kawasan Hutan yang Ada di Kabupaten Serang, 2019

			2019
Kawasan hutan lindung			**726,64**
	Hutan lindung		726,64
Kawasan hutan produksi			**4.154,14**
	Hutan produksi terbatas		2.827,97
	Hutan produksi		1.326,17
Kawasan konservasi			**6.310,35**
	Hutan suaka alam		5.062,20
		Cagar alam rawa danau	3.542,70
		Cagar alam Gunung Tukung Gede	1.519,50
	Hutan Taman Wisata		1.248,15
		Taman wisata alam Pulau Sangiang	528,15
		Taman Wisata laut Pulau Sangiang	720,00
Luas kawasan hutan menurut fungsi (ha)			**11.191,13**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2019

Dari kawasan hutan yang dimiliki oleh Kabupaten Serang pada tahun 2019, terdapat luas lahan sebesar 24.194,59 hektar yang berstatus luas lahan kritis. Seluas 18.313,21 hektar lahan berstatus agak kritis pada tahun 2019. Adapun lahan kritis adalah seluas 4.031,83 hektar. Lahan yang berstatus sangat kritis di Kabupaten Serang pada tahun tersebut seluas 1.849,55 hektar.

Tabel 2.68 Status Kritis Hutan yang Ada di Kabupaten Serang, 2019

	2019
Agak kritis (ha)	18.313,21
Kritis (ha)	4.031,83
Sangat kritis (ha)	1.849,55
Luas lahan kritis (ha)	**24.194,59**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2019

2.3.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, energi dan sumber daya mineral harus dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin. Hal ini dikarenakan pemulihan keberadaan sumber daya tersebut membutuhkan waktu yang sangat panjang.

Pemanfaatan tersebut berkaitan dengan kebutuhan kehidupan manusia, seperti keberadaan listrik yang menjadi sumber energi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan energi dan sumber daya mineral terdiri dari sub urusan geologi, sub urusan mineral dan batubara, sub urusan energi baru dan terbarukan, dan sub urusan ketenagalistrikan.

Tabel 2.69 menunjukkan jumlah pelanggan listrik PLN yang ada di Kabupaten Serang dalam kurun waktu 2014-2017. Terlihat jika pelanggan rumah tangga merupakan pengguna pelanggan terbanyak listrik PLN yang jumlahnya meningkat setiap tahun, dari 249.052 pelanggan (2-14) menjadi 305.021 pelanggan (2017). Pelanggan yang lain berasal dari golongan tariff sosial, usaha, industry, pemerintah, dan jalan umum. Berdasarkan data, maka jumlah keseluruhan pelanggan PLN pada tahun 2017 adalah sebanyak 321.175 pelanggan, meningkat dari tahun 2014 yang berjumlah 260.443 pelanggan.

Tabel 2.69 Jumlah Pelanggan Listrik PLN di Kabupaten Serang, 2014-2017

Golongan tarif	2014	2015	2016	2017
Sosial	6.772	7.452	7.833	8.403
Rumah tangga	249.052	276.624	289.530	305.021
Usaha	3.736	4.156	5.162	6.821
Industri	263	176	182	191
Pemerintah	214	229	238	256
Jalan umum	406	442	457	483
Jumlah pelanggan listrik PLN	**260.443**	**289.079**	**303.402**	**321.175**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2015-2018

Berdasarkan Tabel 2.69, jumlah daya listrik terpasang PLN di Kabupaten Serang didominasi oleh rumah tangga, sebesar 164.439.600 volt ampere (VA) pada tahun 2014. Jumlah tersebut naik menjadi 211.592.350 VA pada tahun 2017. Selain rumah tangga, terdapat juga golongan tariff sosial, usaha, industri, pemerintah, dan jalan umum yang memasang daya listrik PLN. Total daya listrik terpasang PLN adalah sebanyak 283.996.000 VA pada tahun 2017. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun 2014 yang sebesar 311.718.300 VA. Hal tersebut dikarenakan terdapat penurunan daya listrik terpasang di industri, dari 95.152.000 VA (2014) menjadi 20.093.800 VA (2017). Adapun daya listrik terpasang PLN di sosial, usaha, pemerintah, dan jalan umum secara konsisten mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Tabel 2.70 Jumlah Daya Listrik Terpasang PLN di Kabupaten Serang, 2014-2017

Golongan tarif	2014	2015	2016	2017
Sosial	6.237.500	7443550	8.251.250	9.149.000
Rumah tangga	164.439.600	132.348.400	195.835.500	211.592.350
Usaha	43.083.600	32.952.600	35.701.100	39.950.200
Industri	95.152.000	18.661.000	18779400	20.093.800
Pemerintah	821.400	814.700	861.000	863.450
Jalan umum	1.984.200	2.183.300	2.226.600	2.347.200
Jumlah daya listrik terpasang	**311.718.300**	**186.960.000**	**261.654.850**	**283.996.000**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2015-2018

Adapun jumlah pemakaian listrik di Kabupaten Serang pada tahun 2014-2017 secara keseluruhan mengalami penurunan sedikit, dari 568.751.446 kilowatt jam (KwH) pada tahun 2014 menjadi 551.964.443 KwH pada tahun 2017. Penurunan paling drastis terjadi pada tahun 2015 di mana jumlah pemakaian listrik di Kabupaten Serang mencapai 510.514.360 KwH. Namun, pada tahun 2016, jumlah pemakaian listrik mengalami peningkatan menjadi 535.136.067 KwH dan kembali naik pada tahun 2017 meskipun tidak sama dengan tahun 2014. Dominasi pemakaian listrik di Kabupaten Serang berasal dari rumah tangga yang mencapai 442.193.679 KwH pada tahun 2017. Selanjutnya, diikuti oleh usaha (61.359.252 KwH), industri (25.105.885 KWH), sosial (15.553.038 KwH), jalan umum (6.414.308 KwH), dan pemerintah (1.338.281) pada tahun yang sama.

Tabel 2.71 Jumlah Pemakaian Listrik di Kabupaten Serang, 2014-2017

Golongan tarif	2014	2015	2016	2017
Sosial	10.163.930	11.818.202	13.739.050	15.553.038
Rumah tangga	366.783.267	402.730.235	433.682.659	442.193.679
Usaha	69.859.189	57.649.860	56.274.026	61.359.252
Industri	116.007.488	42.765.618	23.938.301	25.105.885
Pemerintah	1.034.163	1.095.927	1.222.384	1.338.281
Jalan umum	4.903.409	6.272.720	6.279.647	6.414.308
Jumlah pemakaian listrik	**568.751.446**	**510.514.360**	**535.136.067**	**551.964.443**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2015-2018

Di Kabupaten Serang, terdapat bahan galian yang ditambang oleh perusahaan. Bahan galian yang diproduksi antara lain pasir, andesit, tanah urug, dan pasir laut. Bahan galian tersebut ditambang oleh perusahaan pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Bupati Kabupaten Serang. Berdasarkan Tabel 2.72, produksi pasir laut menjadi

produksi bahan galian terbanyak di Kabupaten Serang pada tahun 2014 yang volumenya mencapai 6.584.348 meter kubik. Selanjutnya, diikuti oleh produksi andesit (2.009.867 meter kubik), pasir (98.857 meter kubik), dan tanah urug (41.130 meter kubik). Berdasarkan data tersebut, maka jumlah produksi bahan galian pada perusahaan pemegang SIPD pada tahun 2014 adalah sebanyak 8.734.202 meter kubik.

Tabel 2.72 Jumlah Produksi Bahan Galian pada Perusahaan di Kabupaten Serang, 2014

	2014
Pasir	98.857
Andesit	2.009.867
Tanah urug	41.130
Pasir laut	6.584.348
Jumlah produksi bahan galian pada perusahaan pemegang SIPD Bupati Serang (m^3)	**8.734.202**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2015

2.3.3.6 Perdagangan

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan ha katas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Pengertian perdagangan tersebut merupakan pengertian yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Adapun sub urusan perdagangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi, serta perlindungan konsumen.

Apabila suatu daerah memproduksi barang dan/atau jasa melebihi dari kebutuhan domestik, maka daerah tersebut dapat tertarik untuk memperluas pasar ke luar daerah, bahkan ke luar negeri. Hal tersebut juga dilakukan oleh Kabupaten Serang. Informasi yang terdapat pada Tabel 2.73 menunjukkan kegiatan ekspor yang dilakukan oleh Kabupaten Serang pada tahun 2014-2015 untuk barang non migas berdasarkan negara tujuannya. Adapun negara tujuan kegiatan ekspor tersebut tersebar di hampir

seluruh benua, seperti Asia, Timur Tengah, Australia, Eropa, Afrika, dan Amerika. Kegiatan ekspor yang dilakukan oleh Kabupaten Serang berhasil menembus 95 negara yang tersebar di benua tersebut. Sebanyak 262.998,90 ton barang non migas berhasil diekspor pada tahun 2014 dan 510.703,11 ton barang non migas berhasil diekspor pada tahun 2015.

Tabel 2.73 Jumlah Ekspor Barang Non Migas menurut Negara Tujuan di Kabupaten Serang, 2014-2015

Negara Tujuan	2014	2015
Eropa		
Austria	539,49	
Belgia	1.721,82	5.360,54
Bulgaria	666,41	599,75
Republik Ceko	65,21	43,00
Jerman	4.460,12	1.915,71
Estonia	17,42	21,97
Spanyol	1.808,43	2.507,74
Finlandia	61,05	41,90
Perancis	3.090,90	1.650,79
Britania Raya	2.774,63	4.227,66
Yunani	743,39	1.231,28
Kroasia	846,64	1.111,31
Irlandia	37,85	130,89
Italia	1.126,57	786,15
Lituania	877,18	269,78
Latvia	78,06	212,12
Malta	17,68	
Belanda	6.644,12	5.753,43
Norwegia	224,61	
Polandia	124,63	648,31
Portugal	460,52	367,08
Rumania	449,29	486,38
Rusia	6.440,76	38.989,51
Swedia	114,18	14,08
Slovenia	253,65	307,86
Slovakia	27,91	1,36
Albania	157,67	158,80
Montenegro	77,48	
Serbia	8,74	84,15
Ukraina	787,38	590,59

Negara Tujuan	2014	2015
Belarusia		12,11
Denmark		58,41
Hungaria		52,57
Swiss		236,02
Amerika		
Kanada	1.495,40	1.817,18
Amerika Serikat	26.906,38	
Argentina	1.045,11	3.187,08
Bolivia	43,20	54,72
Brazil	9.557,71	3.787,94
Chili	13.676,58	175,18
Guyana	22,68	
Haiti	27,36	13,20
Meksiko	75,64	56.767,96
Panama	21,34	
Peru	88,41	36,39
Uruguay	628,32	492,37
Aruba		28,98
Jamaika		2.479,52
Timur Tengah		
Siprus	87,47	175,31
Turki	8.859,91	4.362,26
Uni Emirat Arab	2.371,26	12.686,31
Mesir	1.348,99	163,11
Israel	23,03	93,78
Iraq	116,94	
Iran	382,00	19,29
Yordania	1.167,62	918,00
Kuwait	1.554,37	1.815,84
Oman	22,84	309,98
Qatar	1.021,73	4.806,34
Arab Saudi	3.046,46	
Syria	70,34	
Yaman	1.933,10	181,27
Bahrain		21,47
Libanon		37,84
Asia		
Armenia	16,42	
Bangladesh	1.809,53	2.533,53
Georgia	733,78	230,14
Hong Kong	1.286,07	771,36

Negara Tujuan	2014	2015
Sri Lanka	139,78	101,16
Taiwan	2.543,43	15.085,36
Brunei Darussalam	9,52	
Kamboja	1.364,36	593,40
Myanmar	1.384,25	223,43
Malaysia	40.708,63	96.614,18
Filipina	8.630,33	10.103,40
Singapura	953,22	32.096,46
Thailand	23.868,98	27.860,68
Korea Selatan	7.781,45	33.600,41
China	8.829,57	
Jepang	8.553,18	26.121,99
India	39.314,70	28.721,44
Pakistan	1.695,39	2.320,52
Laos		18,,13104
Vietnam		44.751,53
Afrika		
Kongo	137,50	
Madagaskar	14,48	
Tunisia	34,79	203,80
Afrika Selatan	765,49	11.343,40
Aljazair		474,78
Ethiopia		50,30
Kenya		12,30
Mauritius		1.490,59
Maroko		11.121,00
Australia		
Australia	1.892,62	1.577,51
Selandia Baru	233,43	397,87
Jumlah (volume) ekspor barang non migas menurut negara tujuan (ton)	**262.998,90**	**510.703,11**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2015-2016

Selain menurut negara tujuan, kegiatan ekspor barang non migas yang dilakukan oleh Kabupaten Serang juga dicatat berdasarkan pelabuhan muat. Terdapat delapan pelabuhan muat yang digunakan Kabupaten Serang untuk mengekspor barang dan/atau jasa ke luar negeri, yaitu: Tanjung Priok, Soekarno-Hatta, Merak, Ciwandan, Anyer Kidul, Tanjung Leneng, Tanjung Sekong, dan Cigading. Pada tahun 2014, Kabupaten Serang berhasil mengekspor 268.652,70 ton melalui pelabuhan muat dan meningkat drastis

menjadi 2.438.769,72 ton pada tahun 2015. Dari kedelapan pelabuhan muat tersebut, terlihat pada Tabel 2.62.68 jika Tanjung Priok menjadi pelabuhan muat yang paling banyak melakukan ekspor dari Kabupaten Serang, yaitu sebanyak 216.635,54 ton pada tahun 2014 dan 2.229.072,51 ton pada tahun 2015.

Tabel 2.74 Jumlah Ekspor Barang Non Migas menurut Pelabuhan Muat di Kabupaten Serang, 2014-2015

Pelabuhan Muat	2014	2015
Tanjung Priok	216.635,54	2.229.072,51
Soekarno-Hatta	338,52	16,75
Merak	26.096,52	47.246,97
Ciwandan		71,49
Anyer Kidul	10.905,53	47.878,81
Tanjung Leneng	10.963,24	113.549,94
Tanjung Sekong	1.828,22	933,26
Cigading	1.885,12	
Jumlah (volume) ekspor barang non migas menurut pelabuhan muat (ton)	**268.652,70**	**2.438.769,72**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2015-2016

Kinerja pemerintahan urusan perdagangan memiliki beberapa indikator, yaitu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, rasio jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi terhadap total jumlah pasar rakyat, jumlah pasar rakyat yang dibangun, dan tingkat pembangunan resi gudang. Berdasarkan Tabel 2.75, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Serang cenderung stabil pada kurun waktu 2016-2020, meskipun turun cukup signifikan pada tahun 2017. Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Serang adalah sebesar 9,28 persen pada tahun 2016, turun pada tahun 2017 menjadi 6,7 persen pada tahun 2017, kemudian meningkat tiga taahun berturut-turut hingga tahun 2020 mencapai 9,3 persen. Adapun rasio jumlah pasar rakyat (yang merupakan pasar tradisional milik pemda) yang direvitalisasi terhadap total jumlah pasar rakyat berturut-turut sebesar 67 persen selama tahun 2016-2017. Angka tersebut mengalami kenaikan menjadi 75 persen pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 dan 2019 rasio jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi mencapai 87 persen. Artinya, jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi mengalami pertambahan. Jumlah pasar rakyat yang dibangun selama tahun 2016-2019 adalah masing-masing satu setiap tahun, kecuali tahun 2017 dan 2020 yang mana tidak ada

pasar rakyat yang dibangun pada tahun tersebut. Adapun tingkat pembangunan resi gudang yang diinformasikan dalam tabel tersebut berturut-turut adalah nol persen pada tahun 2016, 2018, 2019, dan 2020. Hanya saja, di tahun 2017, tingkat pembangunan resi gudang mencapai 20 persen.

Tabel 2.75 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pelayanan Pilihan Perdagangan di Kabupaten Serang, 2016-2020

Indikat	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	9,28	6,7	8,98	9,10	9,3
Rasio jumlah pasar rakyat (tradisional milik pemda) yang direvitalisasi terhadap total jumlah pasar rakyat (tradisional milik pemda)	%	67,00	67,00	75,00	87,00	87,00
Jumlah pasar rakyat (tradisional milik pemda) yang dibangun	Pasar	1	0	1	1	0
Tingkat pembangunan resi gudang	%	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Periode 2016-2020

2.3.3.7 Perindustrian

Industri besar merupakan industri yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Kabupaten Serang, diikuti oleh industri kecil/rumah tangga dan industri sedang. Pada tahun 2018, tercatat ada 119 perusahaan besar dengan tenaga kerja terserap sebanyak 50.522 jiwa. Pada tahun yang sama, terdapat 124 industri sedang dengan 5.683 tenaga kerja. Adapun pada tahun 2016, terdapat 114.209 industri kecil/rumah tangga dengan 209.656 tenaga kerja. Informasi tersebut terangkum dalam Tabel 2.71 sebagai berikut.

Tabel 2.76 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja di Kabupaten Serang, 2014-2018

Jumlah Perusahaan dan Tenaga		2014	2015	2016	2017	2018
Industri besar						
	Perusahaan	92	84			119
	Tenaga kerja	82.144	89.514			50.522
Industri sedang						
	Perusahaan	86	74			124

Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja		2014	2015	2016	2017	2018
	Tenaga kerja	4.053	4.964			5.683
Industri kecil/rumah tangga						
	Perusahaan	7.579		114.209		
	Tenaga kerja	18.453		209.656		

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2015-2019

Indikator kinerja pembangunan daerah urusan pelayanan pilihan terkait perindustrian di Kabupaten Serang terdiri dari kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB, tingkat pembangunan kawasan sentra industri kecil menengah (IKM), dan tingkat pengembangan kawasan sentra IKM lama. Berdasarkan informasi dari 2.76, terlihat jika kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB di Kabupaten Serang cenderung fluktuatif pada rentang waktu 2016-2020. Kontribusi sebesar 50,35 persen ditunjukkan pada tahun 2016, namun sayangnya, angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 48,37 persen. Kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 49,47, namun turun menjadi 47,24 persen pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 kontribusi sektor perindustrian naik hingga mencapai 49,42 persen. Adapun tingkat pembangunan kawasan sentra IKM baru di Kabupaten Serang adalah sebesar 15 persen pada tahun 2016. Persentase tersebut naik 100 persen menjadi 30 persen pada tahun 2017. Namun, angka tersebut turun cukup tajam pada tahun 2018 menjadi 4,59 persen. Walaupun demikian, Kembali mengalami peningkatan dua tahun berturut-turut hingga pada tahun 2020 mencapai 45 persen. Tingkat pengembangan kawasan sentra IKM lama juga cenderung fluktuatif pada periode tersebut. Pada tahun 2016, tingkat pengembangan kawasan sentra IKM adalah sebesar 85 persen pada tahun 2016 dan bertahan hingga tahun 2017, namun turun sangat tajam hingga menjadi 4,76 persen pada tahun 2018. Akan tetapi, pada tahun 2019-2020 angka tersebut menjadi 100 persen.

Tabel 2.77 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pelayanan Pilihan Perindustrian di Kabupaten Serang, 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	50.35	48.37	49.47	47.24	49.42
Tingkat pembangunan kawasan sentra IKM baru	%	15	30	4.59	15	45
Tingkat pengembangan kawasan sentra IKM lama	%	85	85	4.76	100	100

Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Periode 2016-2020

2.3.4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Urusan pemerintahan fungsi penunjang, menurut Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, adalah urusan yang dimiliki oleh satuan kerja perangkat daerah yang memberikan pelayanan bagi organisasi maupun perangkat daerah lain. Adapun yang termasuk dalam urusan pemerintahan fungsi penunjang adalah:

1. Fungsi penunjang administrasi pemerintahan,
2. Fungsi penunjang perencanaan pembangunan,
3. Fungsi penunjang penelitian dan pengembangan,
4. Fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan,
5. Fungsi penunjang keuangan, dan
6. Fungsi penunjang pengawasan.

Setiap fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam satu satuan kerja perangkat daerah. Hal itu ditujukan agar fungsi penunjang tersebut dapat terselenggara secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.

2.3.4.1 Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Indikator kinerja pembangunan daerah urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan di Kabupaten Serang memiliki beberapa indikator terkait untuk menunjang pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Adapun indikator tersebut adalah indikator yang terkait dengan kapasitas kelembagaan daerah dan kualitas pelayanan informasi. Informasi mengenai indikator tersebut terangkum dalam Tabel 2.7 di bawah.

Adapun indikator yang terkait dengan kapasitas kelembagaan daerah terdiri dari tiga indikator: tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur, dan tingkat penataan kelembagaan pemerintah daerah. Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran di Kabupaten

Serang mengalami penurunan dari tahun 2016-2019, kemudian mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Pada tahun 2016-2017, tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran mencapai 100 persen. Namun, angka tersebut turun menjadi 50 persen pada tahun 2018. Meski tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 66,67 persen, angka tersebut belum mencapai prestasi seperti pada tahun 2016-2017. Pada tahun 2020, tingkat pemenuhan layanan perkantoran menjadi 100 persen. Sama seperti dengan tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur mencapai angka 100 persen pada tahun 2016-2017 yang kemudian turun menjadi 50 persen pada tahun 2018. Angka tersebut mengalami sedikit kenaikan menjadi 66,67 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020, tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur mencapai angka 100 persen. Fluktuasi angka kinerja juga ditunjukkan pada indikator tingkat penataan kelembagaan pemerintah daerah di mana pada tahun 2016-2017 berhasil mencapai 100 persen. Namun, penurunan juga terjadi pada tahun 2018 menjadi 50 persen. Meski begitu, pada tahun 2019, tingkat penataan kelembagaan pemerintah daerah berhasil kembali meraih angka 100 persen dan mengalami stagnasi sampai dengan tahun 2020.

Indikator terkait kualitas pelayanan informasi terdiri dari dua indikator, yaitu terbangun dan teraksesnya media pelayanan informasi daerah serta cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan. Seperti dilihat dalam Tabel 2.78, pemerintah Kabupaten Serang berhasil mencapai angka 100 persen pada tahun 2016 untuk indikator terbangun dan teraksesnya media pelayanan informasi daerah. Sayangnya, nilai tersebut turun menjadi 60 persen pada tahun 2017. Namun, angka tersebut kembali naik menjadi 100 persen pada tahun 2018 dan berhasil dipertahankan hingga tahun 2020.

Adapun cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM menunjukkan data yang fluktuatif selama kurun waktu 2016-2019. Data menunjukkan jika pada tahun 2016, pencapaian indikator tersebut hanya sebesar 25 persen saja. Namun, angka tersebut naik pada tahun 2017 dan mencapai angka 50 persen. Perolehan tersebut dapat ditingkatkan hingga tahun 2018 yang mecapai angka 75 persen. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM tersebut berhasil mencapai angka 100 persen.

Tabel 2.78 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Serang, 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Kapasitas kelembagaan daerah						
Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	50,00	66,67	100
Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100,00	100,00	50,00	66,67	100
Tingkat penataan kelembagaan pemerintahan daerah	%/th	100,00	100,00	50,00	100,00	100
Kualitas Pelayanan Informasi						
Terbangun dan teraksesnya media pelayanan informasi daerah	%	100,00	60,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan	%	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00

Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Periode 2016-2019, Lampiran Capaian Kinerja 2016-2020 LKPJ AMJ Final

2.3.4.2 Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan

Fungsi penunjang perencanaan pembangunan merupakan fungsi penunjang yang berperan untuk memastikan ketersediaan dan kualitas data dan informasi yang mendukung penyusunan dokumen rencana pembangunan. Selain itu, fungsi ini perlu untuk menyinkronkan dokumen rencana pembangunan di berbagai tingkat administratif, yaitu pusat, provinsi, dan kota/kabupaten, beserta realisasinya. Untuk melihat kinerja pemerintah daerah, beberapa sasaran dan indikator perencanaan pembangunan disusun. Sasaran dari urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan di Kabupaten Serang yang terkait adalah kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD, kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Serang, pembangunan yang sesuai dengan perencanaan, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah, serta keselarasan perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.79 menunjukkan jika sasaran pemerintah daerah terhadap kualitas perencanaan, pengendaliann dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD yang menggunakan indikator tingkat pemenuhan ketersediaan dokumen rencana lima tahunan maupun tahunan, pelaporan kinerja, dan pelaporan keuangan SKPD berturut-turut mencapai 100% pada tahun 2016-2020.

Untuk mencapai sasaran peningkatan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah Kabupaten Serang perlu memastikan ketersediaan dokumen-dokumen yang mendukung sasasran tersebut. Pemerintah Kabupaten Serang berhasil menyediakan data/informasi pembangunan daerah setiap tahunnya, terbukti dengan pencapaian 100 persen setiap tahun dalam kurun waktu 2016-2019 seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 2.73. Terlihat pula pada tabel yang sama jika pemerintah Kabupaten Serang setiap tahunnya dalam kurun waktu 2016-2020 mampu menghasilkan dokumen yang berisikan: PDRB Kabupaten Serang, IPM Kabupaten Serang, perencanaan pembangunan daerah, RPJMD, RKPD, RKPD perubahan, KUA PPAS, KUA PPAS perubahan, evaluasi pembangunan daerah serta LKPJ.

Sasaran peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga mengalami kenaikan. Terlihat jika nilai kerja pemerintah daerah berhasil mencapai peringkat B pada tahun 2016. Peringkat tersebut naik menjadi BB pada tahun 2017 dan bertahan hingga tahun 2018. Adapun data terakhir menunjukkan jika peringkat tersebut kembali naik menjadi A pada tahun 2019.

Untuk mendukung pencapaian sasaran keselarasan perencanaan pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan indikator-indikator yang menunjang urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan pembangunan terkait. Adapun Kabupaten Serang berhasil mencapai angka 100 persen pada tahun 2018 untuk kesesuaian program renstra dengan RPJMD. Pencapaian yang sama di tahun yang sama juga berhasil dicapai indikator kesesuaian kegiatan renja dengan RKPD. Tidak hanya itu, kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD juga berhasil mencapai angka 100 persen atau seluruhnya sangat sesuai pada tahun 2018.

Tabel 2.79 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Serang, 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD						
Tingkat pemenuhan ketersediaan dokumen rencana lima tahunan dan tahunan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan SKPD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat ketersediaan dokumen rencana Pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase perangkat daerah (PD) yang target penilaian kinerjanya tercapai minimal 80%	%	100,00	89,00	70,00	93,00	64,00
Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah						

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB Kabupaten Serang	Dokumen	1	1	1	1	1
IPM Kabupaten Serang	Dokumen	1	1	1	1	1
Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
RPJMD	Dokumen	1	-	-	-	-
RKPD	Dokumen	1	1	1	1	1
RKPD Perubahan	Dokumen	1	1	1	1	1
KUA PPAS	Dokumen	1	1	1	1	1
KUA PPAS Perubahan	Dokumen	1	1	1	1	1
Tingkat ketersediaan dokumen evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
LKPj	Dokumen	1	1	1	1	1
Penyelenggaraan pemerintahan daerah						
Nilai kinerja pemerintah daerah	Peringkat (A, BB, B, CC, C, D)	B	BB	BB	A	BB
Keselarasan perencanaan pembangunan daerah						
Persentase program renstra yang sesuai dengan RPJMD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase kegiatan renja yang sesuai dengan RKPD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Serang Tahun 2016-2019

Selain dokumen-dokumen yang telah disebutkan pada tabel sebelumnya, terdapat pula dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Serang. Tabel 2.80 menunjukkan jika setiap tahun pada kurun waktu 2016-2020, pemerintah Kabupaten Serang sudah memiliki dokumen perencanaan RPJPD tahun 2006-2026 yang ditetapkan dengan Perda. Selain itu, tersedia pula dokumen perencanaan RPJMD tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Perda. Pada kurun waktu yang sama, tersedia pula dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada dan dokumen RTRW yang ditetapkan dengan perda.

Tabel 2.80 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Serang, 2016-2020

Perencanaan Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	-	-	-	-	-
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	-	-	-	-
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	-	-	-	-	Ada

Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Periode 2016-2020

2.3.4.3 Fungsi Penunjang Penelitian dan Pembangunan

Adanya penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang penelitian dan pembangunan tak lepas dari penyelenggaraan pemerintah daerah. Fungsi tersebut berkaitan dengan penyusunan kebijakan pemerintah daerah dan evaluasi atas kebijakan yang disusun dan diimplementasikan sebelumnya. Terkait urusan pemerintahan fungsi penunjang penelitian dan pembangunan, data yang berhasil diperoleh adalah data LKPJ Bupati Serang pada tahun 2020. Tabel 2.81 menunjukkan jika pada tahun 2020 tersebut, sebanyak 100 persen hasil penelitian yang dimanfaatkan di Kabupaten Serang.

Tabel 2.81 Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Serang, 2020

Indikator	Satuan	2020
Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan	%	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Serang Tahun 2020

2.3.4.4 Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Kesesuaian antara Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki dengan deskripsi pekerjaan yang dilaksanakan menjadi salah satu hal penting dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat yang optimal. Keberadaan SDM yang berkualitas pun juga pada akhirnya akan mendorong pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Tabel 2.82 menunjukkan jika kinerja pembangunan daerah urusan pemerintahan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan di Kabupaten Serang memiliki beberapa sasaran, yakni peningkatan kualitas SDM aparatur, peningkatan jumlah ASN yang tidak melanggar disiplin, dan pencapaian pejabat struktural yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) di Kabupaten Serang.

Tabel tersebut menginformasikan jika untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur, maka pemerintah daerah Kabupaten Serang mengikutsertakan (baik menyelenggarakan maupun mengikutkan) SDM (yang merupakan Aparatur Sipil Jabatan (ASN) yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)) untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklat PIM) tingkat II, III, dan IV, serta pelaksanaan kegiatan prajabatan bagi para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Adapun Diklat PIM II diikuti sebanyak dua orang pada tahun 2016, masing-masing lima orang pada tahun 2017, empat orang pada tahun 2018, dan dua orang pada tahun 2019. Pada tahun 2020 tidak ada yang mengikuti Diklat PIM II. Diklat PIM III diikuti oleh masing-masing lima orang, 20 orang, dan 10 orang pada kurun waktu 2016-2018. Adapun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 tidak ada anggota PNS yang mengikuti Diklat PIM III. Diklat PIM IV sendiri diikuti oleh sebanyak 80 orang pada tahun 2016, masing-masing 140 orang pada tahun 2017, sebanyak 55 orang tahun 2018, dan 40 orang pada tahun 2019. Pada tahun 2020 tidak ada yang mengikuti diklat PIM IV. Untuk kegiatan prajabatan bagi CPNS, terdapat 15 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut pada tahun 2016 dan 389 peserta pada tahun 2019. Tahun 2020 belum ada catatan mengenai prajabatan bagi

CPNS. Selama kurun waktu 2016-2020, ditemukan 16 kasus indisipliner PNS (2016), 18 kasus (2017-2018), dan 16 kasus (2019 dan 2020).

Pada tahun 2020, terdapat beberapa indikator terkait fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan di Kabupaten Serang. Indeks kepuasan terhadap pelayanan kepegawaian mencapai angka 95,10 pada tahun tersebut. Adapun persentase ASN yang tidak terkena sanksi disiplin sedang berat mencapai 100 persen. Pada tahun yang sama, pejabat structural yang memenuhi SKJ sebesar 94,01.

Tabel 2.82 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan di Kabupaten Serang, 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Kualitas SDM aparatur						
Tingkat pemenuhan pendidikan dan pelatihan PNS :		8.75	25.34	32.17	37.05	37.05
Diklat PIM II	PNS	2	5	4	2	0
Diklat PIM III	PNS	5	20	10	0	0
Diklat PIM IV	PNS	80	140	55	40	0
Prajabatan	CPNS	15	0	266	389	0
Tingkat indispliner PNS	Kasus	16	18	18	7	9
Kepuasan terhadap pelayanan kepegawaian						
Index kepuasan terhadap pelayanan kepegawaian				90,35	94,70	95,10
ASN yang tidak melanggar disiplin						
Persentase ASN yang tidak terkena sanksi displin sedang dan berat	%			99,95	100	100
Pejabat struktural yang memenuhi SKJ						
Persentase pejabat struktural yang memenuhi SKJ	%			80,25	88,11	94,01

Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Tahun 2020

2.3.4.5 Fungsi Penunjang Keuangan

Urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan pelaksanaan kegiatan keuangan di pemerintahan daerah, seperti peningkatan pendapatan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun pemerintah Kabupaten Serang secara konsisten menerbitkan dokumen pelaksanaan keuangan daerah, seperti peraturan daerah dan peraturan bupati mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tertib. Kegiatan pelaksanaan keuangan daerah pun juga diterbitkan dokumen pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang akan diaudit oleh BPK.

Tabel 2.83 menunjukkan jika jumlah pendapatan daerah yang diterima oleh Kabupaten Serang meningkat setiap tahunnya pada kurun waktu 2016-2019, namun menurun pada tahun 2020. Pada tahun 2016, pemerintah daerah Kabupaten Serang mampu membekukan 2.468,08 miliar rupiah dan mengalami sedikit kenaikan menjadi 2.810,70 miliar rupiah. Kenaikan tipis kembali terjadi pada tahun 2018 di mana pemerintah daerah Kabupaten Serang mencapai 2.918,63 miliar rupiah. Kenaikan drastis dialami oleh Kabupaten Serang di mana pada tahun 2019 pendapatan daerah yang dihasilkan mencapai 3.024,15 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 pendapatan daerah mencapai angka 2.965,62 miliar, menurun dari tahun sebelumnya. Dari keseluruhan pendapatan daerah tersebut, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Serang berhasil menyumbang sebesar 590,87 miliar rupiah (2016), 815,40 miliar rupiah (2017), 697,09 miliar rupiah (2018), 705,28 miliar rupiah (2019) dan 760,92 miliar rupiah (2020). Peningkatan drastis PAD yang diperoleh Kabupaten Serang pada tahun 2019 tersebut sebanding dengan peningkatan jumlah pendapatan daerah Kabupaten Serang pada tahun yang sama. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 untuk pendapatan daerah pendapatan asli daerah justru naik. Dari informasi tersebut, maka dapat dihitung jika rasio PAD terhadap pendapatan daerah adalah stabil pada angka sekitar 24 persen selama kurun waktu 2016-2020, kecuali pada tahun 2017 di mana rasio tersebut naik menjadi 29,01 persen.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan, pemerintah wajib menerbitkan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya. Laporan tersebut akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melihat kewajaran penggunaan anggaran di daerah. Selama empat tahun berturut-turut pada

2016-2019, Kabupaten Serang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD yang dilakukan oleh BPK dan pada tahun 2020 masih dalam progres. Artinya, tidak ditemukan ketidakwajaran penggunaan anggaran dalam laporan keuangan di Kabupaten Serang.

Tabel 2.83 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan di Kabupaten Serang, 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah						
Jumlah pendapatan daerah	Rp milyar	2.468,08	2.810,70	2.918,63	3,024.15	2,965.62
Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp milyar	590,87	815,40	697,09	705.28	760.92
Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	%	23,94	29,01	23,88	23.32	25.66
Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/WDP/TMP	WTP	WTP	WTP	WTP	Progres

Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Tahun 2020

2.3.4.6 Fungsi Penunjang Pengawasan

Pada urusan pemerintahan fungsi penunjang pengawasan, pemerintah Kabupaten Serang telah melaksanakan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan sepanjang tahun 2016-2020. Fungsi pengawasan juga berfokus pada pelaksanaan monitoring tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan. Tabel 2.84 menunjukkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) meningkat dari level 2 pada tahun 2016 menjadi level 3 pada tahun 2017. Pemerintah Kabupaten Serang berhasil mempertahankan kapabilitas APIP pada level 3 hingga tahun 2020.

Selanjutnya, tingkat maturitas Standar Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Serang berada pada level 3,11 selama dua tahun, yaitu tahun 2016-2017. Level tersebut naik menjadi 3,51 pada tahun 2018 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 3,80. Pada tahun 2020, level tersebut genap pada angka 4,0. Adapun tingkat kuantitas APIP di Kabupaten Serang pada tahun 2016 mencapai 52,86 persen dan pada tahun 2017 mencapai 66,67 persen. Tingkat pencapaian tersebut terus meningkat menjadi 79,16 persen pada tahun 2018, menjadi 83,87 persen pada tahun 2019, dan terakhir meningkat menjadi 8548 pada tahun 2020. Tingkat temuan Inspektorat Kabupaten Serang yang ditindaklanjuti adalah sebesar 90,21 persen pada tahun 2020 dan tingkat temuan BPK RI yang ditindaklanjuti adalah sebesar 84,00 persen pada tahun yang sama.

Tabel 2.84 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan di Kabupaten Serang, 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah						
Tingkat kapabilitas APIP	Level	2	3	3	3	3
Tingkat maturitas SPIP	Level	3.11	3.11	3.51	3.8	4
Tingkat kuantitas APIP	%	52.86	66.67	79.16	83.87	85.48
Persentase temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	78,57	87,61	80,41	88,25	90,21
Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	%	100	69,45	83,61	82,52	84,00

Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Tahun 2020

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah masing-masing. Daya saing suatu daerah merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Adapun yang termasuk dalam aspek daya saing daerah adalah: fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Untuk melihat tingkat konsumsi rumah tangga, informasi tentang pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita diperlukan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat menunjukkan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga di suatu daerah. Apabila angka/nilai konsumsi rumah tangga semakin tinggi, maka semakin atraktif pula peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Untuk mendapatkan angka pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, perlu dihitung rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebelumnya. Angka tersebut didasarkan pada pengeluaran penduduk, baik untuk makanan maupun untuk non-makanan, per jumlah penduduk.

Seperti disajikan dalam Tabel 2.85, diketahui jika rata-rata konsumsi per kapita per hari di Kabupaten Serang pada tahun 2015 sebesar 1.946,36 kilo kalori per hari. Angka rata-rata konsumsi per kapita per hari tersebut adalah sama sampai tahun 2017. Namun, terdapat kenaikan angka pada tahun 2018. Informasi dalam tabel menunjukkan jika rata-rata konsumsi per kapita sehari pada tahun 2018 mencapai angka 2.232,86 kilo kalori per hari di Kabupaten Serang. Sedangkan pada tahun 2019, rata-rata konsumsi per kapita di Kabupaten Serang menurun menjadi 2.189,11 kilo kalori. Rerata pertumbuhan konsumsi untuk Kabupaten Serang per hari dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 2,98 persen per tahun.

Tabel 2.85 Rata-rata Konsumsi per Kapita Sehari di Kabupaten Serang, 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Rata-rata konsumsi per kapita sehari (kkal/hari)	1.946,36	1.946,36	1.946,36	2.232,86	2.189,11

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2016-2020

Selain untuk melihat kemampuan ekonomi daerah, pola pengeluaran dapat juga digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk. Hubungan antara pengeluaran untuk makanan dan total pengeluaran adalah berbanding terbalik. Apabila persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran semakin rendah, maka akan semakin tinggi tingkat perekonomian penduduknya.

Tabel. 2.86 menunjukkan rata-rata pengeluaran makanan per kapita sebulan menurut golongan pengeluaran yang ada di Kabupaten Serang selama kurun waktu 2015-2017. Terlihat jika rata-rata pengeluaran makanan per kapita sebulan paling banyak berasal dari penduduk dengan pengeluaran makanan sebulan sebesar Rp 1.500.000,00 dan lebih, di mana pada tahun 2015 mencapai pengeluaran Rp 936.159,00 dan sebesar Rp 997.287,00 pada tahun 2017. Total pengeluaran makanan per kapita sebulan adalah sebesar Rp 2.965.937,00 pada tahun 2015. Angka tersebut meningkat menjadi Rp 3.290.196,00 pada tahun 2017.

Tabel 2.86 Rata-rata Pengeluaran Makanan per Kapita Sebulan menurut Golongan Pengeluaran di Kabupaten Serang, 2015-2017

Pengeluaran Makanan Sebulan (Rupiah)	2015	2016	2017
<150.000	-		-
150.000-199.999	129.657		120.673
200.000-299.999	164.959		187.229
300.000-499.999	256.992		280.592
500.000-749.999	388.017		403.525
750.000-999.999	479.913		563.603
1.000.000-1.499.999	610.240		737.287
1.500.000 dan lebih	936.159		997.287
Total	**2.965.937**		**3.290.196**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2016-2018

Selain pengeluaran makanan per kapita, terdapat pula pengeluaran non-makanan per kapita. Menurut Tabel 2.87, pengeluaran non-makanan per kapita tertinggi di Kabupaten Serang pada tahun 2015-2018 berasal dari penduduk golongan pengeluaran Rp.1.500.000,00 atau lebih dalam sebulan. Adapun pengeluaran non-makanan per kapita yang dikeluarkan oleh penduduk golongan tersebut adalah sebesar Rp 1.775.748,00 per bulan pada tahun 2015, Rp 1.068.447,00 per bulan pada tahun 2017, dan Rp 1.060.043,00 per bulan pada tahun 2018. Total pengeluaran non-makanan dalam sebulan pada penduduk Kabupaten Serang adalah sebesar Rp 3.266.058,00 pada tahun 2015, Rp.2.344.207,00 pada tahun 2017, dan Rp 2.329.891,00 pada tahun 2018. Melihat hal tersebut, maka dapat dikatakan jika rata-rata pengeluaran non-makanan per kapita sebulan di Kabupaten Serang mengalami tren penurunan selama kurun waktu 2015-2018.

Tabel 2.87 Rata-rata Pengeluaran Non-Makanan per Kapita Sebulan menurut Golongan Pengeluaran

Pengeluaran Non-Makanan Sebulan (Rupiah)	2015	2016	2017	2018
<150.000	-		-	-
150.000-199.999	59.153		66.667	34.991

Pengeluaran Non-Makanan Sebulan (Rupiah)	2015	2016	2017	2018
200.000-299.999	97.032		80.494	97.479
300.000-499.999	143.583		140.299	135.912
500.000-749.999	228.385		220.535	205.461
750.000-999.999	384.253		310.900	311.625
1.000.000-1.499.999	577.904		456.865	484.380
1.500.000 dan lebih	1.775.748		1.068.447	1.060.043
Total	**3.266.058**		**2.344.207**	**2.329.891**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2016-2019

Melihat Tabel 2.88, konsumsi kalori per kapita sehari oleh penduduk di Kabupaten Serang pada tahun 2015-2018 cenderung mengalami kenaikan meski tidak signifikan. Secara keseluruhan, rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari di Kabupaten Serang pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.926,23 sehari pada tahun 2015, Rp 2.104,24 pada tahun 2017, dan Rp 1.935,39 sehari pada tahun 2018. Konsumsi kalori per kapita tertinggi berasal dari golongan penduduk berpenghasilan Rp 1.500.000,00 dan lebih. Adapun pengeluaran konsumsi kalori per kapita sehari pada golongan penduduk tersebut adalah sebesar Rp 2.696,46 pada tahun 2015, Rp 2.841,13 pada tahun 2017, dan Rp 2.537,81 pada tahun 2018.

Tabel 2.88 Konsumsi Kalori per Kapita Sehari menurut Golongan Pengeluaran

Konsumsi Kalori per Kapita Sehari menurut Golongan Pengeluaran (kkal)	2015	2016	2017	2018
<150.000	-		-	-
150.000-199.999	1.200,98		1.620,38	1.023,93
200.000-299.999	1.423,38		1.560,96	1.197,63
300.000-499.999	1.664,18		1.833,52	1.677,74
500.000-749.999	1.974,99		2.091,46	1.973,31
750.000-999.999	2.112,19		2.273,30	2.347,99
1.000.000-1.499.999	2.411,42		2.508,94	2.537,81
1.500.000 dan lebih	2.696,46		2.841,13	2.789,29
Rata-rata	**1.926,23**		**2.104,24**	**1.935,39**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2016-2019

2.4.1.2 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan

Rerata pengeluaran perkapita sebulan untuk konsumsi rumah tangga adalah total biaya sebulan secara umum dari konsumsi setiap rumah tangga, dibagi banyaknya rumah tangga, dengan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran ini dapat dijadikan ukuran dalam menilai kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka makin membaik tingkat kesejahteraan. Perubahan terhadap pengeluaran perkapita juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan seseorang atau kepala rumah tangga. Hal tersebut mengakibatkan pergeseran sehingga semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin tinggi pengeluaran bukan makanan.

Kemiskinan terpengaruh dengan perubahan persentase pengeluaran makananan dan non makanan. Berdasarkan teori Hukum Engel yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi pengeluaran non makanan maka semakin meningkat kesejahteraan masyarakat, dan sebaliknya. Kesejateraan masyarakat merupakan cerminan dari kondisi kemiskinan. Kemiskinan terjadi akibat tingkat pendapatan masih dibawah garis kemiskinan, yang apabila kebutuhan pokok (makanan) belum terpenuhi maka pengeluaran non makanan tidak dapat terjadi atau tidak ada peningkatan. Berikut merupakan persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan non makanan.

Tabel 2.89 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan

No	Jenis Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Pertumbuhan (% per tahun)
1	Makanan		53,58	57,66	52,34	57,65	2,47
2	Non Makanan		46,42	42,34	47,66	42,35	-3,01
3	Jumlah (Rp) Pengeluaran Sebulan		1.682.976	1.093.900	1.154.442	1.064.620	-14,16

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2017-2021

Tabel 2.89 menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi pengeluaran baik untuk jenis makanan dan non makanan di Kabupaten Serang pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi penurunan pengeluaran, kemudian meningkat pada tahun 2018 dan tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan untuk pengeluaran per kapita, hal ini tentu ada kaitan dengan pandemi Covid-19 yang menyebabkan setiap rumah tangga harus berhemat dalam menggunakkan uang bulanan. Jenis pengeluaran untuk makanan masih mendominasi daripada pengeluaran non makanan. Rerata persentase untuk jenis pengeluaran makanan adalah sebesar 55,31 persen sedangkan untuk non makanan adalah sebesar 44,69 persen. Rerata total pengeluaran sebulan per kapita adalah sebesar Rp. 1.248.985,00. Rerata pertumbuhan per tahun untuk pengeluaran makanan meningkat, sedangkan untuk pengeluaran non makanan dan pengeluaran total mengalami penurunan (lihat tabel 2.89).

2.4.1.3 Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani merupakan indikator untuk mengukur kesejahteraan petani. NTP diukur dari rasio harga yang diterima oleh petani (HT) terhadap harga yang dibayar petani (HB). Jika NTP lebih dari 100, petani mengalami surplus yang berarti harga produksi lebih besar dari kenaikan harga konsumsi, pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Begitupun sebaliknya, jika NTP kurang dari 100, petani mendapatkan harga produksi lebih kecil dari kenaikan harga konsumsi, pendapatan petani lebih kecil daripada pengeluaran. Angka NTP berguna untuk menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain, sehingga spesialisasi maupun peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan. Berikut merupakan Nilai Tukar Petani Provinsi Banten periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2.90 Nilai Tukar Petani Provinsi Banten Tahun 2016-2020

No	Jenis Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Pertumbuhan (% per tahun)
1	Indeks yang diterima (It)	123,95	131,67	137,70	143,96	108,31	-3,32
2	Indeks yang dibayar (Ib)	123,58	129,99	136,62	140,39	107,43	-3,44
3	Indeks Konsumsi	125,84	132,79	139,85	143,57	107,21	-3,93

	Rumah Tangga						
4	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,30	101,29	100,79	102,54	100,82	0,13

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2017-2021

Indeks harga yang diterima petani (It) menggambarkan fluktuasi harga komoditas pertanian yang dihasilkan. Indeks harga yang dibayar petani (Ib) terdiri dari konsumsi rumah tangga (KRT) serta biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM). Melalui indeks harga yang dibayar petani dilihat fluktuasi mengenai harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat perdesaan, serta fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian.

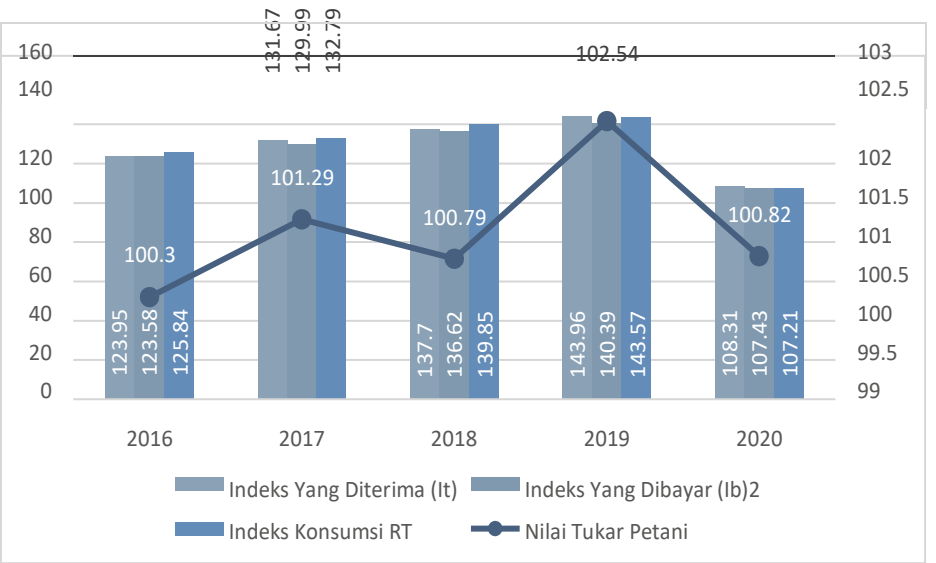

Gambar 2.62 Nilai Tukar Petani Provinsi Banten Tahun 2016-2020

Sumber: Hasil Olahan 2021

Gambar 2.62 Menunjukkan bahwa adanya fluktuasi mengenai Nilai Tukar Petani dan juga indeks yang diterima (It) serta indeks yang dibayar (Ib). Rerata pertumbuhan untuk indeks yang diterima petani dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar -3,32 persen per tahun, yang artinya terjadi penurunan. Sama halnya dengan indeks yang dibayar petani, terjadi rerata penurunan pertumbuhan sebesar -3,44 persen per tahun. Meskipun terjadi penurunan pada indeks yang diterima dan dibayar petani, namun untuk nilai tukar mengalami pertumbuhan meskipun tidak signifikan,

yaitu sebesar 0,13 persen per tahun. Indeks konsumsi rumah tangga (IKRT) menunjukkan inflasi atau deflasi di perdesaan. Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, terjadi penurunan untuk rerata pertumbuhan indeks konsumsi rumah tangga yaitu sebesar -3,93 persen per tahun.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

Infrastruktur menjadi salah satu indikator penting yang dibutuhkan untuk melihat pencapaian dan peningkatan daya saing suatu daerah. Daerah yang memiliki infrastruktur yang baik tentu akan memiliki tingkat kemudahan akses dan konektivitas yang baik pula. Hal tersebut berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, dapat dikatakan jika kemajuan ekonomi bergantung pada salah satunya adalah infrastruktur yang baik sebagai faktor penunjangnya.

2.4.2.1 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Ketersediaan jalan sebagai salah satu upaya peningkatan infrastruktur di suatu daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah tersebut. Hal ini dikarenakan jalan dapat mempermudah akses dan konektivitas antarwilayah maupun antardaerah. Tentu saja hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih maju. Selain mendorong kemajuan ekonomi, jalan sebagai salah satu indikator infrastruktur dapat pula mendorong kemajuan sosial suatu daerah.

Tabel 2.91 menunjukkan jenis-jenis permukaan jalan yang ada di Kabupaten Serang, terdiri dari: aspal, kerikil, tanah, beton, dan tidak dirinci. Jenis dan panjang jalan yang dimiliki suatu daerah penting untuk menghitung rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Rasio tersebut dapat digunakan untuk melihat seberapa besar beban suatu jalan yang dilalui oleh kendaraan. Artinya, semakin tinggi nilai rasio, maka akan semakin besar pula beban suatu jalan tersebut. Berbekal logika itulah maka dapat dihitung panjang jalan yang ada di Kabupaten Serang yang mencapai 601,13 km pada tahun 2015. Panjang jalan tersebut tidak mengalami perubahan signifikan sampai pada tahun 2017. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan panjang jalan menjadi 610,33 km. Sementara itu,

pada tahun 2018-2019 meskipun jumlah panjang jalan tidak berubah namun panjang jalan menurut jenis permukaan mengalami perubahan. Pada tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi perubahan jenis permukaan jalan antara aspal yang turun dan beralih pada jenis perkerasan beton (lihat Tabel 2.91). Berdasarkan data tersebut, dapat dianalisis bahwa sebagian besar jalan diubah ke jenis permukaan beton dengan meningkatnya jumlah panjang jalan dengan permukaan beton menjadi 363,90 km dari sebelumnya sebanyak 220,40 km pada tahun 2018 dan pada tahun 2020 menjadi 466,41 km. Selanjutnya, terdapat perubahan jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Serang. Terlihat jika jumlah kendaraan di Kabupaten Serang pada tahun 2015-2018 mengalami sedikit penurunan, dari sejumlah 9.482 unit pada tahun 2015 menjadi 8.169 unit pada 2018. Dengan demikian, maka rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Serang pada kurun waktu 2015-2018 berkisar antara 0,06 hingga 0,07. Artinya, setiap kendaraan di Kabupaten Serang akan memakan ruang jalan sebesar 0,06-0,07 kilometer.

Tabel 2.91 Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Serang, 2016-2020

Jenis Permukaan (km)	2016	2017	2018	2019	2020
Diaspal	406,58	353,88	360,63	219,38	94,57
Kerikil	51,82	49,81	17,60	14,15	47,19
Tanah	16,35	16,35	11,70	12,90	2,16
Beton	n.a	181,08	220,40	363,90	466,41
Tidak dirinci	126,38	-	-	-	-
Jumlah panjang jalan (km)	601,13	601,12	610,33	610,33	610,33
Jumlah kendaraan wajib uji (unit)	8.345	8.345	8.169	n.a	n.a
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,072	0,072	0,075	n.a	n.a

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2017-2021

Grafik 2.63 Menunjukkan bahwa terjadi penurunan mengenai jumlah kendaraan dan jumlah panjang jalan yang bertambah namun tidak cukup signifikan. Akibat dari jumlah panjang jalan yang terus bertambah dan penurunan jumlah kendaraan, maka rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 cenderung mengalami kenaikan. Berikut merupakan penjabaran mengenai data pada tabel 2.91 Di atas.

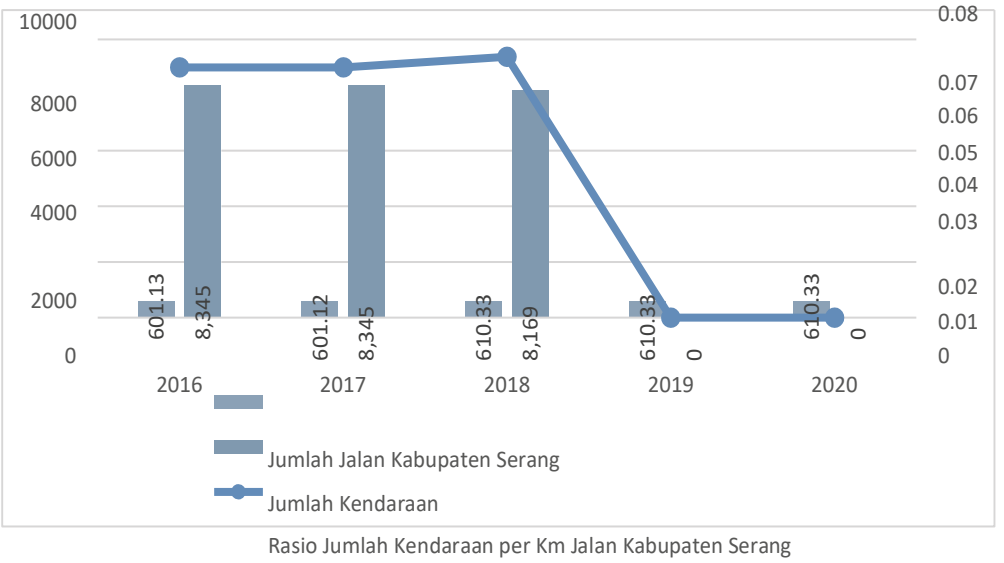

Gambar 2.63 Rasio Jumlah Kendaraan per Km Jalan Kabupaten Serang 2016-2020

Sumber: Hasil Olahan 2021

Kabupaten Serang melalui dokumen LKPJ Bupati tahun 2016-2019 juga melaporkan hasil pencapaian kinerja pembangunan daerah fokus infrastruktur yang terkait dengan rasio panjang jalan dan jumlah kendaraan. Sasaran yang dicapai oleh Kabupaten Serang antara lain adalah peningkatan kualitas jaringan jalan dan jembatan dan peningkatan kualitas pelayanan perhubungan. Informasi mengenai pencapaian pemerintah daerah terkait urusan tersebut disajikan dalam Tabel 2.92.

Di dalam tabel tersebut, ditunjukkan jika persentase tingkat kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang mengalami peningkatan pada kurun waktu 2016-2020. Persentase tersebut berturut-turut mencapai 74,13 persen (2016), 76,90 persen (2017), 83,00 persen (2018), 88,90 persen (2019), dan 92,05 persen (2020). Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun persentase yang berhasil dicapai berturut-turut adalah 60,00 persen (2016), 69,10 persen (2017), 78,06 persen (2018), 87,02 persen (2019), dan 95,97 persen (2020). Pencapaian tingkat kondisi drainase kabupaten dalam kondisi baik dan sedang ditunjukkan dengan persentase yang juga selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu 66,60 persen (2016), 68,75 persen (2017), 71,72 persen (2018), dan 74,50 persen (2019 dan 2020). Sama halnya dengan indikator-indikator yang telah disebutkan sebelumnya yang selalu mengalami

kenaikan, indikator tingkat kondisi jembatan kabupaten dalam kondisi baik juga mengalami peningkatan sebelumnya. Adapun persentase pencapaian indikator tersebut adalah 65,12 persen (2016), 66,86 persen (2017), 77,79 persen (2018), 92,12 persen (2019), dan 93,30 persen (2020).

Untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas pelayanan perhubungan, terdapat beberapa indikator yang telah ditetapkan pemerintah daerah untuk dicapai. Pada tahun 2016-2017, terdapat tiga unit terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Jumlah angkutan penumpang tersebut bertambah satu unit pada tahun 2018 sehingga total terdapat empat unit. Adapun indikator ketersediaan pelabuhan penyeberangan pada kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran memiliki nilai persentase yang stabil dari tahun 2016-2020, yaitu sebesar 75 persen.

Tabel 2.92 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Infrastruktur terkait Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan di Kabupaten Serang, 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Peningkatan kualitas jaringan jalan dan jembatan						
Peningkatan kualitas pelayanan perhubungan						
Presentase tingkat kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	%	74,13	76,90	83,00	88,90	92,05
Persentase kondisi jalan mantap (perkerasan beton)				60,95		
Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten	%	60,00	69,10	78,06	87,02	95,97
Presentase tingkat kondisi drainase	%	66,60	68,75	71,72	74,50	74,50

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
kabupaten dalam kondisi baik dan sedang						
Presentase tingkat kondisi jembatan kabupaten dalam kondisi baik	%	65,12	66,86	77,79	92,12	93,30
Peningkatan kualitas pelayanan perhubungan						
Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat	%	14.19	14.32	12.41	12.36	12.73
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	%	46.67	47.09	22.13	22.54	22.54
Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Unit	3	3	4	4	4
Tersediany a pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran	%	75	75	75	75	75

Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Tahun 2020

2.4.2.2 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Untuk mendukung kegiatan ekonomi, mobilitas manusia dalam berkegiatan dapat didukung oleh ketersediaan angkutan umum. Tabel 2.93 menunjukkan jika rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat adalah sebesar 14,19 persen (2016), 14,32 persen (2017), 12,36 persen (2019), dan 12,73 persen (2020). Artinya, terdapat penurunan jumlah angkutan darat yang melayani penumpang atau terdapat kenaikan jumlah penumpang angkutan darat yang menggunakan angkutan darat dalam melakukan mobilitas. Adapun ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten mencapai 46,67 persen (2016), 47,09 persen (2017), dan 22,54 persen (2019 dan 2020).

Tabel 2.93 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Infrastruktur terkait Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Serang, 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Peningkatan kualitas pelayanan perhubungan						
Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat	%	14.19	14.32	12.41	12.36	12.73
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	%	46.67	47.09	22.13	22.54	22.54

Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Tahun 2020

2.4.2.3 Luas Wilayah Bencana dan Kebanjiran

Salah satu permasalahan yang dihadapi daerah terkait infrastruktur adalah adanya bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Tabel 2.94 menunjukkan indikator yang digunakan pemerintah daerah Kabupaten Serang untuk meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan kebakaran, penurunan daerah rawan bencana, dan peningkatan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana.

Adapun pencapaian pemerintah daerah Kabupaten Serang melalui indikator cakupan pencegahan bencana, cakupan penanggulangan korban bencana, dan cakupan pelayanan bencana kebakaran yang menyasar pada peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan kebakaran adalah masing-masing sebesar 100 persen

selama kurun waktu 2016-2020. Indikator cakupan penanganan daerah rawan bencana yang menyasar pada penurunan daerah rawan bencana juga mencapai 100 persen selama kurun waktu 2016-2020. Sasaran peningkatan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana menggunakan indikator cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana, di mana pencapaian pemerintah daerah Kabupaten Serang sebesar 90 persen pada tahun 2017 dan meningkat 10 persen pada 2019 sehingga mencapai 100 persen. Pada tahun 2020, cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana mengalami penurunan menjadi sebesar 96,12 persen.

Tabel 2.94 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Infrastruktur terkait Luas Wilayah Kebanjiran di Kabupaten Serang, 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan kebakaran						
Cakupan pencegahan bencana	%	100	100	100	100	100
Cakupan penanggulangan korban bencana	%	100	100	100	100	100
Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	100	100	100	100	100
Penurunan daerah rawan bencana						
Cakupan penanganan daerah rawan bencana	%	100	100	100	100	100
Peningkatan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana						
Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana	%	0	90	100	100	96.12

Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Tahun 2020

2.4.2.4 Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Salah satu infrastruktur yang mendukung daya saing suatu daerah adalah keberadaan restoran. Melalui Tabel 2.95, terlihat jika pada tahun 2015 dan 2020 terdapat 44 buah dan 16 restoran dan rumah makan yang ada di Kabupaten Serang. Tentu hal tersebut kurang bisa menggambarkan jenis, kelas, dan jumlah restoran yang dimiliki oleh Kabupaten Serang saat ini sehingga masih memerlukan data pembanding.

Tabel 2.95 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Infrastruktur terkait Jumlah Restoran di Kabupaten Serang, 2016-2020

	2015	2020
Jumlah restoran dan rumah makan (buah)	44	16

Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang tahun 2020

2.4.2.5 Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Selain keberadaan restoran dan rumah makan, daya saing suatu daerah juga ditunjang dengan keberadaan penginapan atau hotel. Tabel 2.96 menginformasikan jika jumlah hotel yang dimiliki oleh Kabupaten Serang secara keseluruhan adalah sebanyak 89 buah pada tahun 2015, 99 buah pada tahun 2016, dan 69 buah pada tahun 2018. Dari keseluruhan hotel tersebut, jenis hotel yang paling banyak dimiliki oleh Kabupaten Serang adalah jenis hotel melati. Jenis hotel melati tersebut berjumlah 67 buah (2015), 77 buah (2016), dan 48 buah (2018). Secara keseluruhan, jumlah hotel di Kabupaten Serang mengalami penurunan pada tahun 2018 meski sempat mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2016.

Tabel 2.96 Jumlah Perusahaan Akomodasi menurut Kelas Hotel di Kabupaten Serang, 2015-2018

Jumlah dan Kelas Hotel	2015	2016	2017	2018
Hotel melati	67	77		48
Hotel bintang 1	7	5		10
Hotel bintang 2	1	4		0
Hotel bintang 3	9	8		8
Hotel bintang 4	2	4		1
Hotel bintang 5	3	1		2
Jumlah hotel	**89**	**99**		**69**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2016-2019

2.4.2.6 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu hal dasar dalam kehidupan manusia. Keberadaannya menunjang berbagai aspek kehidupan manusia, seperti aspek kesehatan, sosial, hingga ekonomi. Tingkat konsumsi air bersih di suatu daerah juga dapat menunjukkan seberapa

tinggi tingkat daya saing suatu daerah. Tabel 2.97 menunjukkan jumlah pelanggan PDAM berdasarkan kategori konsumen yang terdiri dari: sosial khusus, sosial umum, rumah tangga, pelanggan khusus, niaga kecil, niaga besar, industri kecil, industri besar, dan kran umum.

Dari data yang disajikan dalam tabel tersebut, diketahui jika jumlah pelanggan PDAM di Kabupaten Serang adalah sebanyak 26.007 orang/instansi pada tahun 2015 yang meningkat menjadi 26.856 orang/instansi pada tahun 2016. Namun, jumlah tersebut menurun menjadi 25.681 orang/instansi pada tahun 2017. Informasi dalam tabel yang sama juga menunjukkan jika jumlah pelanggan rumah tangga pada tahun 2015 adalah sebanyak 24.956 rumah (2015), 25.651 rumah (2016), dam 24.662 rumah (2017). Dengan demikian, maka persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih dapat dihitung. Adapun persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih pada tahun 2015-2017 stabil sebesar 96 persen.

Tabel 2.97 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Serang, 2015-2017

Jumlah Pelanggan PDAM	2015	2016	2017
Sosial khusus	29	-	3
Sosial umum	304	427	323
Rumah tangga	24.956	25.651	24.662
Pelanggan khusus	-	-	-
Niaga kecil	581	655	683
Niaga besar	9	-	-
Industri kecil	12	17	-
Industri besar	4	-	-
Kran umum	112	106	10
Jumlah	26.007	26.856	25.681
Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	96%	96%	96%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2016-2018

Dengan kategorisasi pelanggan yang sama dengan informasi pada tabel sebelumnya, dapat dilihat jumlah air yang disalurkan PDAM Serang ke masing-masing kategori pelanggan tersebut. PDAM Serang berhasil menyalurkan 5.411.894 meter kubik air pada tahun 2015. Angka tersebut menurun drastis pada tahun 2016 di mana PDAM Serang menyalurkan 482.217 meter kubik air dan sedikit meningkat pada tahun 2017 di

mana PDAM Serang menyalurkan 482.665 meter kubik air. Adapun pelanggan terbanyak yang mendapatkan saluran air dari PDAM Serang berasal dari kategori rumah tangga yang jumlahnya mencapai 4.934.697 meter kubik pada tahun 2015. Namun, jumlah air yang disalurkan ke kategori rumah tangga tersebut menurun signifikan pada tahun 2016 menjadi 442.167 meter kubik dan 447.206 meter kubik pada tahun 2017.

Tabel 2.98 Jumlah Air yang Disalurkan PDAM Serang, 2015-2017

Jumlah Air yang Disalurkan (m^3)	2015	2016	2017
Sosial khusus	25.185	-	-
Sosial umum	83.812	9.605	10.982
Rumah tangga	4.934.697	442.167	447.206
Pelanggan khusus	-	-	-
Niaga kecil	300.846	25.723	20.663
Niaga besar	12.310	38	-
Industri kecil	9.596	918	1.592
Industri besar	9.769	200	-
Kran umum	35.679	3.566	2.222
Jumlah	**5.411.894**	**482.217**	**482.665**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2016-2018

2.4.2.7 Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan yang keberadaannya sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Hal tersebut lantaran listrik menjadi hal yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas masyarakat, baik aktivitas konsumsi maupun aktivitas produksi. Ketersediaan listrik dianggap sebagai dorongan bagi kegiatan sehari-hari maupun kegiatan produksi yang dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan Tabel 2.99, jumlah daya listrik PLN terpasang di Kabupaten Serang pada tahun 2015 adalah sebanyak 243.207.250 volt ampere (VA). Jumlah tersebut naik menjadi 261.654.850 VA pada tahun 2016 dan kembali naik menjadi 284.050.000 VA pada tahun 2017. Adapun jumlah pemakaian listrik di Kabupaten Serang pada tahun 2015 sebesar 522.332.562 kilowatt jam (KwH). Jumlah pemakaian tersebut secara konsisten mengalami kenaikan hingga tahun 2017 yang mana pemakaian pada tahun 2016 mencapai 535.136.067 KwH dan pada tahun 2017 mencapai 551.964.443 KwH.

Tabel 2.99 Jumlah Daya Listrik PLN Terpasang dan Jumlah Pemakaian Listrik Di Kabupaten Serang, 2015-2017

Jumlah Daya dan Pemakaian Listrik	2015	2016	2017
Jumlah daya listrik PLN terpasang (VA)	243.207.250	261.654.850	284.050.000
Jumlah pemakaian listrik (KwH)	522.332.562	535.136.067	551.964.443

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2016-2018

2.4.2.8 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Rumah tangga merupakan kategori pelanggan listrik yang jumlahnya paling besar di Kabupaten Serang. Tabel 2.100 menunjukkan jika jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik melalui sumber Anyer adalah sebanyak 75.933 buah. Jumlah tersebut turun menjadi 74.172 buah pada tahun 2016 namun kembali meningkat menjadi 76.528 buah pada tahun 2017. Dibandingkan dengan Anyer, jumlah rumah tangga yang dipasok listrik oleh Cikande jauh lebih besar. Data menunjukkan jika Cikande menyalurkan listrik bagi 213.146 buah rumah tangga pada tahun 2015. Jumlah rumah tangga pada tahun 2016 pun meningkat menjadi 215.358 buah. Data terakhir pada tahun 2017 juga menunjukkan peningkatan menjadi 228.493 buah rumah tangga yang listriknya disuplai oleh Cikande.

Tabel 2.100 Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Serang, 2015-2017

	2015		2016		2017	
	Anyer	**Cikande**	**Anyer**	**Cikande**	**Anyer**	**Cikande**
Rumah tangga	75.933	213.146	74.172	215.358	76.528	228.493

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2016-2018

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Untuk menanamkan modal, investor tertarik pada daerah yang memiliki iklim investasi yang baik. Modal yang masuk ke suatu daerah tersebut menjadi penting bagi daerah

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Dengan demikian, maka kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Adapun beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat iklim berinvestasi adalah kriminalitas, demonstrasi, proses perizinan, pajak dan retribusi daerah, perda yang mendukung usaha, serta desa yang berstatus swasembada.

2.4.3.1 Angka Kriminalitas

Salah satu hal yang dapat mendukung terciptanya iklim berinvestasi yang baik adalah keamanan suatu daerah. Keamanan tersebut dapat diukur oleh salah satunya adalah kriminalitas. Apabila angka kriminalitas suatu daerah semakin rendah, maka daerah tersebut dianggap semakin aman sehingga menyebabkan kepercayaan investor meningkat untuk menanamkan modal di daerah tersebut. Tabel 2.101 menunjukkan jumlah tambahan narapidana yang dikelompokkan berdasarkan usia di Kabupaten Serang selama kurun waktu 2014-2016. Secara keseluruhan, terdapat 318 orang tambahan narapidana pada tahun 2014. Jumlah tambahan tersebut meningkat drastis menjadi 798 orang pada tahun 2015, di mana 762 di antaranya adalah dewasa, 26 orang adalah pemuda, dan 10 orang anak-anak. Jumlah tersebut kembali meningkat pada tahun 2016 menjadi 1.108 orang tambahan narapidana. Tambahan tersebut berasal dari 1.057 orang dewasa dan 51 anak-anak.

Tabel 2.101 Jumlah Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang menurut Kelompok Usia di Kabupaten Serang, 2014-2016

Tambahan narapidana berdasarkan putusan PN Serang menurut kelompok usia	2014	2015	2016
Dewasa		762	1.057
Pemuda		26	-
Anak-anak		10	51
Total	**318**	**798**	**1.108**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2015-2017

Dengan jumlah tambahan narapidana yang sama, disajikan pula jumlah tambahan narapidana yang dikelompokkan menurut lama hukumannya. Tabel 2.102 menunjukkan jika pada tahun 2015, terdapat 565 orang narapidana yang dihukum selama 1-5 tahun, 192 orang yang dihukum selama kurang dari satu tahun, 35 orang yang dihukum pidana

kurungan pengganti denda, dan enam orang yang mendapatkan hukuman percobaan sehingga total narapidana pada tahun tersebut adalah 798 orang. Adapun total tambahan narapidana pada tahun 2016 sebanyak 1.108 orang, di mana terdapat 367 orang yang mendapatkan hukuman 1-5 tahun dan 741 orang yang mendapatkan hukuman kurang dari satu tahun.

Tabel 2.102 Jumlah Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang menurut Lama Hukuman di Kabupaten Serang, 2014-2016

Tambahan narapidana berdasarkan putusan PN Serang menurut lama hukuman	2014	2015	2016
Seumur hidup		-	-
Lebih dari 5 tahun		-	-
1-5 tahun		565	367
Kurang dari 1 tahun		192	741
Pidana kurungan pengganti denda		35	-
Hukuman percobaan		6	-
Belum putus		-	-
Total	**-**	**798**	**1.108**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2015-2017

Pemerintah daerah Kabupaten Serang dalam mendukung terciptanya iklim berinvestasi yang baik telah menetapkan indikator yang terkait dengan angka kriminalitas. Tabel 2.103 merangkum indikator kinerja pemerintah daerah Kabupaten Serang pada tahun 2016-2020. Adapun rasio jumlah kasus keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat (kantrantibmas) dan tindak kriminal yang ditindaklanjuti terhadap total jumlah kasus kantrantibmas dan tindak kriminal yang terjadi mencapai 100 persen berturut-turut pada tahun 2016-2020. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah juga mencapai 100 persen pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2.103 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Iklim Berinvestasi terkait Angka Kriminalitas di Kabupaten Serang, 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio jumlah kasus kantrantibmas dan tindak kriminal yang ditindaklanjuti terhadap total jumlah kasus kantrantibmas dan tindak kriminal yang terjadi	%	100	100	100	100	100
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Tahun 2020

Selain angka kriminalitas, pendukung terciptanya iklim investasi yang baik juga dapat menggunakan indikator konflik SARA. Tabel 2.104 menunjukkan jika pemerintah daerah Kabupaten Serang berhasil menyelesaikan seluruh konflik SARA selama tahun 2016-2019. Tabel tersebut menunjukkan pencapaian yang baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Serang karena selama empat tahun berturut-turut tersebut menunjukkan tingkat penyelesaian konflik SARA yang mencapai 100 persen.

Tabel 2.104 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Iklim Berinvestasi terkait Demonstrasi di Kabupaten Serang, 2016-2019

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019
Tingkat penyelesaian konflik SARA	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Periode 2016-2019

2.4.3.2 Lama Proses Perizinan

Kemudahan tata cara memperoleh perizinan dan prosedur untuk berinvestasi merupakan salah satu faktor pendukung minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Serang. Selanjutnya, jumlah peraturan daerah yang mendukung iklim usaha menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan minat investor datang ke daerah. Indikator ini dugunakan untuk melihat berapa jumlah perda yang mendukung iklim usaha pada setiap tahun.

Tabel 2.105 Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Tahun 2020

	Satuan	Target	Realisasi
Persentase ijin yang dilaksanakan sesuai peruntukannya	%	100,00	100,00
Persentase ijin yang diselesaikan tepat waktu	%	100,00	100,00
Rata-rata waktu penyelesaian perijinan (berkas lengkap)	Hari	6,00	6,00
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Point	84,42	84,43

Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Periode 2020

Berdasarkan tabel di atas capaian program peningkatan kualitas pelayanan perizinan tahun 2020 untuk indikator persentase ijin yang dilaksanakan sesuai peruntukannya dan tepat waktu mencapai 100 persen. Sementara itu, rata-rata waktu penyelesaian perijinan realisasi pada tahun 2020 selama 6 hari, sementara target yang ingin dicapai selama 6 hari. Selanjutnya, nilai survey kepuasan masyarakat pada tahun 2020 sebesar 84,43 point. Dalam tahun-tahun berikutnya, pelayanan perizinan ini dapat terus disempunakan dan diperbaiki sehingga terjamin kepastian prosedur, waktu dan keamanan perizinan serta pada akhirnya akan memberi kenyamanan dan kemudahan investor untuk berinvestasi.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penting bagi kemajuan dan pembangunan suatu wilayah. SDM yang berkualitas memiliki andil besar dalam kemajuan dan pembangunan tersebut. Kualitas SDM dapat dilihat dari produktivitas

tenaga kerja yang usianya berada pada rentang 15-64 tahun yang dimiliki oleh suatu daerah dan dilihat pula dari tingkat pendidikannya. Apabila tingkat pendidikan SDM suatu daerah semakin tinggi, maka diharapkan jika SDM tersebut memiliki kualitas yang lebih baik.

2.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja mengacu pada seberapa tinggi kualitas SDM yang dimiliki suatu daerah.

Tabel 2.106 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja
≤ SD	266.144	11.721	277.865	95,782
SMP	141.785	29.077	170.862	82,982
SMA	173.546	41.671	215.217	80,638
Perguruan Tinggi	32.845	3.069	35.914	91,455

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dari seluruh angkatan kerja di Kabupaten Serang pada tahun 2020, sebanyak 266.144 jiwa merupakan pendududuk yang bekerja dengan pendidikan terakhir yang ditamatkan adalah sekolah dasar dan tidak lulus sekolah dasar atau sebesar 95,782 persen. Lulusan SMP sebanyak 141.785 jiwa atau sebanyak 82,982 persen dari total angkatan kerja. Lulusan SMA sebanyak 173.546 jiwa atau sebanyak 80.638 persen dari total angkatan kerja. Terakhir, lulusan perguruna tinggi sebanyak 32.845 jiwa atau sebanyak 91,455 persen dari total angkatan kerja.

2.4.4.2 Rasio Ketergantungan

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Adapun penduduk yang berusia produktif adalah penduduk yang berusia pada rentang 15-64 tahun sedangkan penduduk yang tidak produktif adalah penduduk

yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Oleh karena itu, dapat dihitung seberapa besar jumlah penduduk yang bergantung pada penduduk usia kerja pada suatu daerah.

Bila dicermati, jumlah penduduk yang berusia tidak produktif di Kabupaten Serang pada tahun 2014-2018 cenderung mengalami penurunan, dari 499.251 jiwa pada tahun 2014 menjadi 490.157 jiwa pada tahun 2019. Sementara itu, jumlah penduduk usia produktif mengalami peningkatan pada periode yang sama yaitu 963.843 jiwa pada tahun 2014 menjadi 981.563 jiwa pada tahun 2019. Berdasarkan perhitungan, apabila dicermati, maka rasio ketergantungan di Kabupaten Serang pada 2014-2018 cenderung mengalami penurunan yaitu sebesar 51,80 persen pada tahun 2014 menjadi 49,94 persen pada tahun 2019 Artinya, Pada tahun 2019 setiap 100 orang penduduk berusia kerja (usia produktif) memiliki tanggungan sebanyak 50 orang penduduk yang tidak produktif.

Tabel 2.107 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Serang, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah penduduk usia <15 tahun (jiwa)	448.459	448.550	448.347	447.839	429.887
Jumlah penduduk usia >64 tahun (jiwa)	50.792	52.825	55.053	57.516	60.270
Jumlah penduduk usia tidak produktif (jiwa)	499.251	501.375	503.400	505.355	490.157
Jumlah penduduk usia 15-64	963.843	972.926	981.102	988.236	981.563
Rasio ketergantungan	51,80	51,53	51,31	51,14	49,94

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2015-2020 (diolah)

2.4.5. Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Untuk meningkatkan pencapaian target pembangunan daerah dan dalam mempermudah serta mempercepat pelayanan Pemerintah daerah, Kabupaten Serang mulai Tahun 2018 melakukan kegiatan Laboratorium Inovasi. Laboratorium inovasi merupakan salah satu kegiatan untuk memfasilitasi dan mendorong pemerintah daerah dalam upaya untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi. Laboratorium inovasi merupakan sebuah program fasilitasi inovasi yang mengawali inovasi mulai dari hulu, yakni mulai dari sebelum inovasi dipikirkan sampai dapat diimplementasikan dan

diperlihatkan serta memberikan manfaat kepada masyarakat. Program dalam laboratorium inovasi ini lebih mengarah kepada menghasilkan ide atau gagasan inovasi yang diciptakan secara bersama (*co creating*) antara LAN dan Oganisasi Perangkat Daerah, dan unit kerja terkait. Ide atau gagasan inovasi tersebut kemudian diimplementasikan dan dimanfaatkan lebih lanjut sehingga lebih berkembang dan dapat dipergunakan sebagai model replikasi inovasi.

Beberapa inovasi telah lahir dari program laboratorium inovasi tersebut, inovasi yang telah lahir dan dipergunakan hingga saat ini adalah :

1. Sistem Informasi Pembinaan Peserta KB Aktif (SIPPKA), Melalui Sistem Informasi Pembinaan KB ini diharapkan Terjadi Peningkatan Kesertaan Ber KB melalui Peningkatan pengetahuan pasangan usia subur, Pemilihan metode kontrasepsi yang efektif dan efesien, Penurunan angka dropout
2. Sistem Survey Kepuasan Masyarakat (SI SUKMA), sistem yang dibuat untuk Pengisian Kuesioner Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat dari Manual secara Otomatis atas pelayanan pajak daerah
3. Aplikasi Online e-Set DPRD Kabupaten Serang, aplikasi yang menyajikan rangkaian kegiatan layanan dan fasilitasi pada setiap kegiatan DPRD Kab Serang yang terintegrasi dalam satu sistem aplikasi, guna memudahkan pihak sekretariat dalam melaksanakan tugas pelayanan dan fasilitasi
4. Sistem Aplikasi WEB e-Services, sarana informasi,publikasi dan dokumentasi bagi masyarakat terkait kinerja dan kegiatan DPRD selama ini.Juga sebagai sarana bagi masyarakat yang akan mengadukan masalah ke DPRD melalui kolom aspirasi .Dan dalam aplikasi ini disajikan juga informasi profile DPRD Kab Serang secara up to date
5. Sistem Informasi Manajemen Peserta Pelatihan (SIMANJA PAPIH), Manajemen Administrasi peserta pelatihan yang akan memudahkan baik kepada peserta maupun panitia. Peserta dapat membuka kembali materi pelatihan, mempelajari nya kembali. Dimana pun kapanpun. Mengingat kan kembali Rencana Kerja Tindak Lanjut dari pelatihan tersebut sehingga output pelatihan lebih berkesinambungan
6. Kolom Elektronik Pengaduan Orang Desa & Informasi Khalayak (KEPO De IH), Aplikasi berbasis Android yang memudahkan Masyarakat untuk turut berpartisipasi memantau penggunaan Dana Desa. Sebagai bahan evaluasi baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten

7. Online Badan Usama Milik Desa (O-BUMDes), Pengelolaan Bumdes yang terintegrasi, berbasis Android Online Sistem yang mudah diakses dimanapun kapanpun. Berupa Profil Bumdes Online, Manajemen BUMDes Online, Unit Usaha Online, dan Jual Beli Online
8. Sistem Manajemen Anti Suap (SIMANTAP), bertujuan untuk peningkatan pelayanan masyarakat sesuai dengan penerapan ISO 37001:2016 dalam pencapaian hasil audit yang kredibel dan anti suap
9. Sistem Manajemen Mutu (SIMANTU), Dalam peningkatan pelayanan masyarakat perlu penerapan ISO 9001:2015 dalam pencapaian hasil audit yang kredibel
10. SIPUTRI (Sistem Pelayanan Uji Laboratorium), Sistem Uji Laboratorium dan Teknis Bidang Lingkungan Hidup
11. ALPUKAT KITE (Aplikasi Perlindungan Masyarakat Kompeten, Inovatif, Terpadu, Efektif), Aplikasi ini dibangun untuk memudahkan Informasi, Dokumentasi dan Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di masing - masing desa se Kabupaten Serang antara lain database anggota satuan linmas, pembentukan struktur organisasi linmas, pembinaan terhadap anggota satuan linmas, Pelaporan rawan gangguan bencana dan gangguan trantibum dan turut serta dalam pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum
12. BUPATIKU WANITA (Budidaya Padat Tebar Intensif untuk Udang sebagai Kawasan Wisata), Budidaya Padat Tebar Intensif untuk Udang sebagai Kawasan Wisata (BUPATIKU WANITA)adalah budidaya udang dengan padat tebar tinggi pada lokasi yang terbatas di kawasan wisata
13. MANG TAGAR (Pengembangan Tambak Garam Rakyat), Pengembangan Tambak Garam Rakyat (MANG TAGAR) adalah upaya pemanfaatn lahan tambak “tidur” melalui pengembangan produksi garam dengan pengelolaan tertentu
14. MANG BUDI PUTRA RIA (Pengembangan Budidaya Rumput Laut Gracillaria), Pengembangan Budidaya Rumput Laut Gracillaria (MANG BUDI PUTRA RIA) adalah upaya penganekaragaman komoditas budidaya air payau berupa rumput laut gracillaria bersamaan dengan bandeng pada lahan yang sama
15. BUYA WALIKU (Budidaya Perikanan Air Payau Berwawasan Lingkungan), Budidaya Perikanan Air Payau Berwawasan Lingkungan (BUYA WALIKU) merupakan rangkaian kegiatan terpadu antara budidaya ikan yang baik dengan

kegiatan pemeliharaan, pengelolaan dan upaya pelestarian lingkungan budidaya melalui penanaman bibit bakau untuk memperbaiki lingkungan budidaya kawasan pesisir dan meningkatkan produktifitas kawasan budidaya air payau

16. MANG BUDI PUTRA TONI (Pengembangan Budidaya Rumput Laut cottoni), Pengembangan Budidaya Rumput Laut cottoni (MANG BUDI PUTRA TONI) adalah budidaya rumput laut jenis cottoni pada wilayah pantai system long line dengan menggunakan tiang pancang dan tali
17. Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM), Aplikasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit
18. HALO (Hospital Aplikasi Layanan Online), Aplikasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan di Rumah Sakit
19. SEPARATED ZONE (Pengelompokan Pasien Berdasarkan Kegawatdaruratan /Triase), Sistem ini bertujuan untuk mempermudah penanganan pasien sesuai dengan tingkat dan jenis penyakitnya
20. Bayi Lahir Pulang Bawa Akta Kelahiran, Sistem ini dibuat untuk memudahkan keluarga pasien untuk mengurus akta kelahiran
21. Penerbitan dan Surat Penolakan Penerbitan SP2D Online, Memberikan informasi secara elektronik bagi seluruh OPD terkait penerbitan dan surat penolakan penerbitan SP2D secara On Line
22. INLIS (Integrated Library System), Mempermudah pengunjung atau masyarakat dalam mencari informasi pengetahuan/umum/referensi buku. Efisiensi Waktu bagi pengunjung dalam pencarian buku
23. Sistem Informasi Kearsipan Kabupaten Serang secara Digital (SIKN), Meningkatkan pemahaman arsip dan lebih peduli terhadap arsip bagi penyelenggara kearsipan. Mengamankan,menyimpan arsip statis dan dinamis atau file file penting agar tidak rusak atau hilang
24. Integrasi aplikasi secara on line di Crisis Center, Untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana yang cepat, tepat dan terpadu diperlukan integrase aplikasi secara on line di Crisis Center BPBD Kab. Serang
25. Desa Tangguh Bencana (DESTANA), Untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana yang cepat, tepat dan terpadu diperlukan mengoptimalkan relawan yang berada di Desa tangguh bencana

26. POSDAMKAR, Untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana dan kebakaran yang cepat, tepat dan terpadu diperlukan pos-pos damkar sekaligus mengoptimalkan balakar di setiap kecamatan
27. Pembentukan TKTD (Tim Koordinasi Tanggap Darurat) zona industri, Untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana dan kebakaran yang cepat, tepat dan terpadu di kawasan zona industry diperlukan pembentukan TKTD di zona industri
28. Sistem Informasi Penilaian Pegawai Negeri Sipil (SIPKerja), Aplikasi yang menyampaikan aktifitas ASN di Kabupaten Serang dan pencapaian kinerja berdasarkan SKP
29. SIMPROMIN (Sistem Informasi Promosi Investasi), Simpromin merupakan suatu aplikasi yang menyajikan informasi peluang usaha di kabupaten serang
30. Sistem Informasi Rumah Kumuh dan Miskin (SIKUMIS), Sebagai basis data terpadu, data sasaran , penanganan kmiskinan di daerah khususnya penanganan rumah tidak layak huni (RTLH)
31. Aplikasi SIM PKB Android, Pengembangan SIM PKB yang terintegrasi antara Gedung Pemeriksaan Kendaraan dengan Kantor Pelayanan Administrasi (loket)
32. TRADE ZONE (Aplikasi Pemasaran Produk UM/IKM Secara E-commerce), Sistem ini untuk meningkatkan penjualan/pendapatan masyarakat UMKM/IKM
33. Sistem Informasi Pariwisata Berbasis Android Melalui Medsos (SIMPARTA BANSOS), Aplikasi yang memberikan fasilitasi untuk penyampaian informasi oleh pemerintah daerah kepada stakeholder bidang pariwisata
34. Gerakan Sadar Wisata di Kabupaten serang (GERSANG), Mensinergikan antar semua stakeholder kepariwisataan untuk meningkatkan kepedualian masyarakat terhadap destinasi didaerahnya
35. Aplikasi Sistem pendaftaran calon transmigran secara online (ASTRA), Merupakan aplikasi yang membantu dalam pendaftaran calon peserta transmigrasi di kabupaten Serang
36. Akte kelahiran online dan jemput bola pelayanan adminduk (AKONJEBOL), Pelayanan dilakukan melalui WEB Online yang dapat diakses melalui perangkat Komputer/laptop/smartphone yang terhubung dengan internet dan pelayanan adminsitrasi kependudukan dengan jemput bola
37. Jejaring efektif dengan menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi/teleconference (JENTIK), Aplikasi yang digunakan oleh dua belah

pihak atau lebih dilkoasi yang berbeda untuk berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan

38. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (ASIK), Informasi Kepegawaian tentang ususlan pemberkasandan dapat memberikan infromasi secara tertulis/report tentang Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
39. SIRA BERJASA (Aplikasi Layanan Regristrasi dan Verifikasi Berkas Penyedia Barang/Jasa) secara online, Adalah Aplikasi Layanan Registrasi & Verifikasi Berkas Penyedia Barang/Jasa yang memudahkan penyedia dalam menyampaikan berkas persyaratan untuk pendaftaran secara online
40. SERANG KERJA, Merupakan suatu penggabungan seluruh applikasi yang bersifat Mempermudah pekerjaan ASN dalam melakukan administrasi birokrasi
41. SERANG GAWE, Merupakan suatu penggabungan seluruh applikasi yang bersifat pelayanan publik agar dapat diakses secara sekaligus oleh masyarakat
42. Youtube Channel Pemerintah Kabupaten Serang, Penggunaan media sosial untuk mempermudah menjangkau masyarakat luas melalui akun facebook, instagram dan channel youtube dengan nama serangkab
43. Sistim Applikasi Layanan Satu Pintu (Sialip), applikasi ini dibuat untuk mempermudah masyarakat meminta informasi publik secara online melalui alamat website sialip.serangkab.go.id
44. Sistem Penetapan Angka Kredit Guru (Si PAK Guru), Sebuah aplikasi sederhana yang memuat database guru. System ini mengelola data guru yang akan naik pangkat sehingga apabila dikemudian hari guru tersebut sudah terpenuhi angka kreditnya untuk mengajukan kenaikan pangkat ke golongan selanjutnya maka tidak banyak data yang perlu dientri ulang karena data yang bersangkutan sudah tersimpan dalam database untuk kemudian dicetak Sknya
45. Aplikasi Sistem Informasi Kebudayaan (SIKAYA), SIKAYA adalah aplikasi atraktif yang memuat data dan informasi potensi seni budaya di Kabupaten Serang
46. Aksi Jalan dan Irigasi/Got Jadi Aman Nyaman dan Bersih (SI JAGOAN), Aksi ini merupakan gerakan yang melibatkan para pegawai di lingkungan dinas PUPR khususnya dan para pegawai di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Serang untuk turun langsung membantu masyarakat dan bergotong royong dengan masyarakat setempat dalam pemeliharaan jalan dengan mengoptimalkan tenaga yang ada dan dengan mengefisiensikan anggaran belanja perbaikan jalan

47. Sistem informasi manajemen kesehatan (SIMKES), SIMKES Online dibangun pada tahun 2016 dan mulai bridging dengan BPJS Kesehatan (P-Care) pada bulan Pebruari 2017. Bridging ini dilakukan karena adanya penginputan yang sama pada dua aplikasi yang berbeda yaitu aplikasi simkes dan aplikasi Pcare, sehingga setelah koordinasi hampir setahun dalam membangun sistem, terlaksananya proses bridging
48. Sistem Informasi Terpadu Aplikasi Laboratorium (SINTAL), SINTAL merupakan pemanfaatan teknologi berbasis aplikasi sederhana berbasis microsoft office exel untuk mengkoneksikan data pelanggan dari administrasi sampai ke masing masing laboratorium pengujian sampai bagian administrasi bisa melakukan pencetakan laporan pengujian untuk diserahkan kepada pelanggan. aplikasi ini memuat teknis penginputan data permintaan pengujian, pelaporan hasil uji laboratorium, verifikasi dan validasi data hasil uji serta terkain dengan penyimpanan rekaman dari sampel uji yang diterima laboratorium
49. Sistem Informasi Pembiayaan Asuransi Usaha Tani Padi (SIAP AUTP), Aplikasi yang bertujuan dalam pengelolaan data dan informasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
50. Sistem Informasi Kelitbangan (SISKA), Database publikasi terpadu bagi berbagai unit kajian yang melaksanakan fungsi dan menghasilkan produk kajian
51. Sistem Informasi dan Manajemen Serang Sehat (SIM SEHAT), Sistem yang dibuat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka percepatan peningkatan IPM di Kabupaten Serang khususnya Indeks Kesehatan.

2.5 Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Sampai dengan Tahun 2020

Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2020, yang ditampilkan ke dalam beberapa tabel berikut :

2.5.1. Hasil Evaluasi RPJMD Tahun 2020

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi RPJMD sampai dengan tahun 2020. Hasil evaluasi ditunjukkan dengan Evaluasi capaian indikator kinerja RPJMD pada tahun 2020 ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Serang yang dibagi kedalam lima misi yang dapat dilihat dari tabel 2.108 dibawah ini :

Tabel 2.108 Evaluasi RPJMD tahun 2020

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan		Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020 Target Akhir RPJMD		Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	64.49	67.27	67.99	66.38	66.70	66.70	68.72	akan tercapai
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6.21	6.56	6.65	5.08	-1.96	-1.96	6.74	belum tercapai
3	Nilai PDRB ADHK	Rp. Triliun	45.62	58.53	62.42	54.40	53.29	53.29	66.62	belum tercapai
4	Nilai PDRB ADHB	Rp. Triliun	54.84	83.37	92.54	76.94	76.60	76.60	102.73	belum tercapai
5	Nilai PDRB ADHB per Kapita	Rp. Juta per Jiwa	37.20	55.27	61.13	51.01	47.22	47.22	67.65	belum tercapai
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori (A/B/C/D)	B	B	B	B	B	B	A	tercapai
7	Tingkat Kemiskinan (Persentase Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Total Jumlah Penduduk)	%	20.75	17.33	16.42				15.53	Belum tersedia data
	Angka Kemiskinan Makro (BPS)	%				4.08	4.94	4.94		Data dari BPS
8	Indeks pendidikan	point	57.33	63.04	64.55	58.96	59,92	59,92	66.09	belum tercapai
9	Rata-rata lama sekolah (RLS)	tahun	6.89	7.85	8.10	7.33	7.50	7.5	8.36	akan tercapai
10	Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	12.36	13.28	13.52	12.43	12.57	12.57	14.81	akan tercapai
11	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	%	66.9	88.97	94.48	81.27	85.28	85.28	100.00	tercapai
12	Angka partisipasi kasar (APK) SD/Sederajat	%	103.43	104.48	104.74	112.11	116.78	116.78	105.00	tercapai
13	Angka partisipasi murni (APM) SD/Sederajat	%	99.97	99.99	100.00	100	100.00	100	100.00	tercapai
14	Angka partisipasi kasar (APK) SLTP/Sederajat	%	104.73	104.91	104.96	112.69	116.96	116.96	105.00	tercapai
15	Angka partisipasi murni (APM) SLTP/Sederajat	%	90.14	96.71	98.36	98.24	99.45	99.45	100.00	akan tercapai
16	Angka kelulusan (AL) SD/Sederajat	%	100	100.00	100.00	100	100.00	100	100.00	tercapai
17	Angka kelulusan (AL) SLTP/Sederajat	%	99.98	99.99	100.00	100	100.00	100	100.00	tercapai
18	Angka putus sekolah (APS) SD/Sederajat	%	0.02	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	tercapai
19	Angka putus sekolah (APS) SLTP/Sederajat	%	0.01	0.00	0.00	0.002	0.00	0	0.00	tercapai
20	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	%	99.55	99.85	99.93	100	100.00	100	100.00	tercapai
21	Angka Melanjutkan (AM)	%	89.41	96.47	98.24	100	100.00	100	100.00	tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan		Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020 Target Akhir RPJMD		Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020			
	SMP/MTs ke SMA/SMK/MA									
22	Indeks kesehatan (IK)	Poin	63.40	64.25	64.47	74.12	74.40	74.4	64.68	tercapai
23	Umur harapan hidup (UHH)	Tahun	66.77	68.08	68.41	64.47	64.64	64.64	68.74	akan tercapai
24	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 Kelahiran Hidup	221.00	217.00	216.00	221.00	204.00	204.00	215.00	tercapai
25	Angka Kematian Bayi (AKB) Yang Dilaporkan	per 1.000 Kelahiran Hidup	8.90	8.60	8.50	9.17	8.29	8.29	8.40	tercapai
26	Optimalisasi kunjungan rumah sakit (BOR)	%	78.00	80.00	80.00	66.00	54.80	54.80	80.00	tercapai
27	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	14.80	13.45	13.10	10.65	12.22	12.22	12.74	tercapai
28	Tingkat kesempatan kerja (TKK)	%	91.05	93.05	93.55	89.35	89.35	89.35	94.05	akan tercapai
29	Rata-rata cakupan SDM, organisasi, pelestarian, kajian, fasilitasi, gelar, misi dan tempat kesenian dan budaya	%	100.00	100.00	100.00	100	26.00	26.00	100.00	belum tercapai
30	Cakupan pembinaan organisasi kepemudaan	%	8.00	75.76	87.88	93.33	85.71	85.71	100.00	belum tercapai
31	Cakupan Atlet berprestasi	%	0.00	0.00	10.00	17.64	0.00	0.00	23.00	belum tercapai
32	Tingkat Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat (kecamatan)	%	0.00	10.00	10.00	4.00	0.00	0.00	10.00	belum tercapai
	Aspek Pelayanan Umum									
1	Proporsi jumlah SD/Sederajat dalam kondisi baik terhadap total jumlah SD/Sederajat	%	81.67	93.87	96.92	95.59	83.26	83.26	100.00	belum tercapai
2	Proporsi jumlah SLTP/Sederajat dalam kondisi baik terhadap total jumlah SLTP/Sederajat	%	83.24	94.40	97.19	82,61	84.82	84.82	100.00	belum tercapai
3	Rasio jumlah puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya dalam kondisi baik terhadap total jumlah puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya yang ada	%	47.42	80.00	90.00	80.00	80.00	80.00	100.00	belum tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan		Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020 Target Akhir RPJMD		Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020			
4	Tingkat daya tampung RSUD	%	69.00	87.00	95.00	70.00	88.89	88.89	95.00	belum tercapai
5	Tingkat kualitas sarana prasarana RSUD dalam kondisi baik	%	92.01	93.50	93.80	93.50	100.00	100.00	94.00	tercapai
6	Cakupan fungsi pelayanan jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap total areal irigasi	%	66.00	70.00	71.00	98.80	99.40	99.40	72.00	tercapai
7	Capaian Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat	%	66.83	69.00	70.00	70.00	71.00	71.00	72.00	akan tercapai
8	Cakupan pelayanan persampahan (Proporsi volume sampah yang tertangani (Rasio jumlah sampah yang ditangani terhadap jumlah produksi sampah))	%	4.80	8.00	9.00	8.42	8.07	8.07	10.00	akan tercapai
9	Tersedianya Akses Air Minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan bukan perpipaan, memenuhi kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	%	78.00	86.00	88.00	86.97	87.08	87.08	90.00	akan tercapai
10	Cakupan pelayanan air limbah rumah tangga	%	61.70	79.70	84.20	70.14	77.87	77.87	88.70	belum tercapai
11	Cakupan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH)	%	24.10	67.99	85.09	97.65	98.51	98.51	100.00	akan tercapai
12	Cakupan pencegahan bencana	%	100.00	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00	tercapai
13	Cakupan penanggulangan korban bencana	%	100.00	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00	tercapai
14	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	100.00	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00	tercapai
15	Cakupan penanganan daerah rawan bencana	%	100.00	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00	tercapai
16	Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana	%	40.00	50.00	50.00	100	96.12	96.12	50.00	tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan		Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020 Target Akhir RPJMD		Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020			
17	Rasio jumlah kasus kantrantibmas dan tindak kriminal yang ditindaklanjuti terhadap total jumlah kasus kantrantibmas dan tindak kriminal yang terjadi	%	100.00	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00	tercapai
18	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100.00	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00	tercapai
19	Cakupan pembinaan organisasi politik dan kemasyarakatan	%	100.00	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00	tercapai
20	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	(%)	55,808.00	25,893.00	25,893.00	96,944.00	93,338.00	93,338.00	155,397.00	belum tercapai
21	Penanganan PMKS (Rasio jumlah PMKS yang tertangani terhadap jumlah PMKS yang ada)	(%)	70.00	16.00	16.00	61.87	98.24	98.24	96.00	tercapai
22	Ketersediaan energi	kkal/kap / hari	2,112.00	2,150.00	2,150.00	2,316.00	-	0.00	2,150.00	Belum tersedia data
23	Ketersediaan protein	gr/kap/hari	81.20	72.00	76.00	115.2	0.00	0.00	76.00	Belum tersedia data
24	Skor PPH	%	84.30	89.40	90.50	88.6	88.90	88.90	90.50	akan tercapai
25	Indeks kualitas lingkungan hidup	point	54.00	62.00	64.00	67.17	67.44	67.44	66.00	tercapai
26	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah 3R	%	6.90	20.69	24.14	22.5	27.28	27.28	27.59	akan tercapai
27	Tingkat pengelolaan RTH	%	100.00	100.00	100.00	90	90.00	90.00	100.00	akan tercapai
28	Cakupan pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	tercapai
29	Cakupan pembinaan kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa	(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	tercapai
30	Cakupan pembinaan pemerintahan desa	(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	tercapai
31	Persentase jumlah peserta KB terhadap pasangan usia	(%)	66.16	68.16	68.66	75.63	76,17	76,17	69.16	tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan		Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020 Target Akhir RPJMD		Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020			
	subur (Prevalensi peserta KB aktif)									
32	Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat	%	14.30	12.50	12.00	12.36	12.73	12.73	11.50	tercapai
33	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	%	41.00	55.00	60.00	22.54	22.54	22.54	65.00	belum tercapai
34	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan	%	0.00	34.00	40.00	100	100.00	100.00	50.00	tercapai
35	Ratio ketersediaan hotspot internet di tingkat kecamatan	%	0.00	60.00	80.00	100	100.00	100.00	100.00	tercapai
36	Rasio Koperasi Aktif (Proporsi jumlah koperasi aktif terhadap total jumlah koperasi yang ada)	%	25.29	71.16	80.19	73.75	74.72	74.72	89.22	belum tercapai
37	Rasio usaha mikro dan kecil (Rasio jumlah usaha mikro dan kecil terhadap jumlah usaha kecil dan menengah)	%	97.55	90.00	90.00	99.24	99.28	99.28	90.00	tercapai
38	Tingkat pembangunan kawasan sentra IKM baru	%	0.00	70.00	90.00	15.00	45.00	45.00	100.00	belum tercapai
39	Tingkat pengembangan kawasan sentra IKM lama	%	80.00	90.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	tercapai
40	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Rasio jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah terhadap jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah)	(%)	0.00	60.00	63.00	100.00	100.00	100.00	68.00	tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan		Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020 Target Akhir RPJMD		Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020			
41	Rasio jumlah pengunjung perpustakaan daerah terhadap target jumlah kunjungan perpustakaan daerah	(%)	0.00	80.56	83.33	100.00	83.00	83.00	88.00	akan tercapai
42	Rasio jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku terhadap total jumlah SKPD yang ada	%	61.00	51.00	60.00	100	100.00	100.00	65.00	tercapai
43	Tingkat Konsumsi Ikan	kg/kapita / tahun	22.93	25.50	26.00	33.02	33.02	33.02	26.50	tercapai
44	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	79,023.91	88,630.68	91,289.60	63,490.83	41,630.42	41,630.42	526,262.26	belum tercapai
45	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	orang	2,107.00	2.56	2.69	8,671.00	4,969.00	4,969.00	15,048.00	belum tercapai
46	Laju pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	%	4.97	5.00	5.00	489.86	(43.00)	(43.00)	5.00	belum tercapai
47	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	orang	5,817,105	6,296,622	6,422,554	649,489	1,369,074	1,369,074	37,428,902	belum tercapai
48	Laju pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan nusantara	%	2.00	2.00	2.00	-92.26	111.00	111.00	2.00	tercapai
49	Tingkat pengembangan kawasan strategis pariwisata	%	29.00	75.81	88.71	66.67	66.67	66.67	100.00	akan tercapai
50	Tingkat pembangunan kawasan pertanian	%	0.00	70.00	90.00	87.05	151.00	151.00	100.00	tercapai
51	Tingkat pembangunan kawasan perkebunan	%	0.00	70.00	90.00	77.70	70.08	70.08	100.00	belum tercapai
52	Tingkat pembangunan kawasan peternakan	%	0.00	70.00	90.00	55.56	77.78	77.78	100.00	belum tercapai
53	Rasio jumlah Pasar Rakyat (Tradisional Milik Pemda) yang direvitalisasi terhadap total jumlah pasar Rakyat (Tradisional Milik Pemda)	%	58.33	83.00	83.00	87.00	87.00	87.00	92.00	akan tercapai
54	Jumlah Pasar Rakyat (Tradisional Milik Pemda) yang dibangun	pasar	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	Belum tersedia data

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan		Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020 Target Akhir RPJMD		Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020			
55	Tingkat pembangunan resi gudang	%	0.00	60.00	80.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Belum tersedia data
56	Kabupaten Serang Dalam Angka	Dokumen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	6.00	akan tercapai
57	PDRB Kabupaten Serang	Dokumen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	6.00	akan tercapai
58	IPM Kabupaten Serang	Dokumen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	6.00	akan tercapai
59	RPJMD	Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	akan tercapai
60	RKPD	Dokumen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	6.00	akan tercapai
61	RKPD Perubahan	Dokumen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	6.00	akan tercapai
62	KUA PPAS	Dokumen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	6.00	akan tercapai
63	KUA PPAS Perubahan	Dokumen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	6.00	akan tercapai
64	LKPj	Dokumen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	6.00	akan tercapai
65	LKPj AMJ	Dokumen	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	akan tercapai
66	LPPD	Dokumen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	6.00	akan tercapai
67	LAKIP	Dokumen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	6.00	akan tercapai
68	Tingkat pemenuhan pendidikan dan pelatihan PNS :	%	100.00	72.57	87.64	37.05	37.05	37.05	100.00	belum tercapai
69	Diklat PIM II	PNS	2.00	5.00	5.00	2.00	0.00	0.00	27.00	belum tercapai
70	Diklat PIM III	PNS	5.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	110.00	belum tercapai
71	Diklat PIM IV	PNS	20.00	125.00	110.00	40.00	0.00	0.00	735.00	belum tercapai
72	Prajabatan	CPNS	687.00	50.00	50.00	389.00	0.00	0.00	422.00	belum tercapai
73	Tingkat indispliner PNS	Kasus	8.00	12.00	12.00	7.00	9.00	9.00	68.00	belum tercapai
74	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	tercapai
75	Tingkat Muturitas SPIP	Level	2.00	3.80	4.00	3.80	4.00	4.00	4.00	tercapai
76	Tingkat Kuantitas APIP	%	40.00	75.71	88.57	83.87	85.48	85.48	100.00	belum tercapai
77	Nilai kinerja pemerintah daerah	Peringkat (A, BB, B, CC, C, D)	CC	CC	B	A	A	A	B	tercapai
78	Tingkat ketersediaan dokumen rencana	%	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	tercapai
79	Tingkat ketersediaan lahan siap bangun	%	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00	belum tercapai
80	Tingkat Pembangunan Infrastruktur Pendukung	%	0.00	30.00	30.00	65.00	65.00	65.00	30.00	tercapai
81	Tingkat Pembangunan Gedung Perkantoran	%	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	20.00	belum tercapai
82	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP/ WDP/ TMP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan		Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020 Target Akhir RPJMD		Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020			
	pemerintah daerah									
83	Raperda yang disetujui DPRD tahun berkenan (Proporsi jumlah Raperda yang disetujui DPRD menjadi Perda terhadap jumlah Raperda yang diusulkan)	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	tercapai
	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Daya Beli	Point	69.96	70.63	70.80	72.49	72.10	72.10	70.97	tercapai
2	Nilai Produksi Perikanan	Rp.Milyar	766.49	860.35	886.17	384.20	188.23	188.23	5,109.00	belum tercapai
3	Jumlah pendapatan daerah	Rp. Milyar	2,306.04	2,377.72	2,420.94	3,024.15	2,965.62	2,965.62	14,458.65	belum tercapai
4	Jmlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Milyar	580.81	624.10	652.64	705.28	760.92	760.92	3,697.11	belum tercapai
5	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	%	25.19	26.25	26.96	23.32	25.66	25.66	25.57	tercapai
6	Presentase tingkat kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten)	%	71.57	91.53	97.35	88.90	92.05	92.05	100.00	akan tercapai
7	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten	%	51.19	87.02	95.97	87.02	95.97	95.97	100.00	akan tercapai
8	Presentase tingkat kondisi drainase kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (Proporsi panjang draniase kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang drainase kabupaten)	%	50.00	85.00	93.75	74.50	74.50	74.50	100.00	belum tercapai
9	Presentase tingkat kondisi jembatan kabupaten dalam kondisi baik	%	70.99	91.21	96.29	92.12	93.30	93.30	100.00	akan tercapai

No	Aspek	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Tahunan		Realisasi Tahunan		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020 Target Akhir RPJMD		Status Ketercapaian
				Target 2019	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020			
	(Proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik terhadap total jumlah jembatan kabupaten)									
10	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Unit	3.00	6.00	6.00	4.00	4.00	4.00	6.00	akan tercapai
11	Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran	%	75.00	100.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00	akan tercapai
12	Nilai investasi PMA	Rp.Triliun	2.07	2.33	2.40	4.55	4.53	4.53	2.47	tercapai
13	Nilai investasi PMDN	Rp.Triliun	2.49	2.80	2.89	2.31	3.37	3.37	2.97	tercapai
14	Laju pertumbuhan investasi PMA	%	3.00	3.00	3.00	22.04	-0.39	-0.39	3.00	belum tercapai
15	Laju pertumbuhan investasi PMDN	%	3.00	3.00	3.00	-30.93	46.28	46.28	3.00	tercapai
16	Indeks pembangunan gender (IPG)	point	91.78	91.94	91.98	92.18	92.18	92.18	92.02	tercapai
17	Tingkat penyelesaian konflik SARA	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	tercapai

2.5.2 Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020

Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Serang dilaksanakan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Serang Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Serang. Dalam Perbup tersebut penerapan SPM untuk pelaksanaan pelayanan dasar yang terdiri dari SPM bidang pendidikan, SPM bidang kesehatan, SPM bidang pekerjaan umum, SPM bidang perumahan rakyat, SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta SPM bidang sosial.

2.5.2.1 SPM Bidang Urusan Pendidikan

SPM bidang urusan pendidikan terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar serta pendidikan kesetaraan, sedangkan untuk realisasi target SPM bidang pendidikan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.109 Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Serang Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Tercapai/Tdk Tercapai
1	Pendidikan Dasar	persentase jumlah anak usia 6-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SD/sederajat terhadap jumlah anak usia 6-12 tahun pada wilayah Kabupaten	89,81%	100%	Tercapai
		persentase jumlah anak usia 12-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SMP/sederajat terhadap jumlah anak usia 12-15 tahun pada wilayah Kabupaten	89,52%	99,45%	Tercapai
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase jumlah anak usia 7-18 tahun yang sudah tama atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan terhadap jumlah anak usia 7-18 tahun pada wilayah	96,43%	100%	Tercapai
3	Pendidikan anak usia dini	persentase jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini terhadap jumlah anak usia 5-6 tahun pada wilayah Kabupaten	91,16%	99,45%	Tercapai

2.5.2.2 Cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
4.	**Kehutanan**			
5.	**Energi dan Sumber Daya Mineral**			
6.	**Perdagangan**			
6.1	Indeks Daya Beli	>	➢ Sebagian besar pasar rakyat dalam kondisi kurang baik. ➢ Upaya pemeliharaan dan pengelolaan pasar tradisional belum memadai. ➢ Persentase alat yang tertera belum diketahui sehingga dapat merugikan konsumen. ➢ Keberadaan pasar rakyat terancam dengan kehadiran pasar modern. ➢ Sistem perdagangan daerah belum berjalan efektif dan efisien.	✓ Rehailitasi sarana dan prasarana pasar rakyat sehingga menarik pengunjung. ✓ Pembinaan kepada pedagang pasar untuk memerhatikan aspek kebersihan. ✓ Koordinasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting. ✓ Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang. ✓ Pengawasan dan penyuluhan metrologi legal.
6.2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	>		
6.3	Rasio jumlah Pasar Rakyat (Tradisional Milik Pemda) yang direvitalisasi terhadap total jumlah pasar Rakyat (Tradisional Milik Pemda)	>		
6.4	Jumlah Pasar Rakyat (Tradisional Milik Pemda) yang dibangun	>		
6.5	Tingkat pembangunan resi gudang	<		
7.	**Perindustrian**			
7.1	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	>	➢ Kualitas SDM pelaku industri kecil belum memadai. ➢ Manajemen pengelolaan usaha belum berjalan	✓ Pengembangan industri kecil berbasis potensi masing-masing

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
7.2	Tingkat pembangunan kawasan sentra IKM baru	<	efektif dan efisien. ➢ Akses permodalan pelaku industri kecil belum memadai. ➢ Penerapan teknologi pengolahan yang terkini belum sepenuhnya dijalankan sehingga kualitas produk belum baik. ➢ Sentra kawasan industri kecil belum direncanakan dengan baik sehingga belum tertata. ➢ Belum terintegrasinya pengembangan industri berbasis potensi sumber daya lokal seperti sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. ➢ Kualitas produk yang dihasilkan industri kecil belum mampu menembus pasar luar daerah. ➢ Terbatasnya akses pemasaran produk industri kecil.	kawasan. ✓ Fasilitasi peningkatan mutu produk industri kecil daerah. ✓ Fasilitasi pemasaran produk industri kecil daerah. ✓ Penyediaan informasi yang mencakup data industri daerah berbasis sektoral. ✓ Fasilitasi pembinaan pengelolaan usaha pelaku industri kecil.
7.3	Tingkat pengembangan kawasan sentra IKM lama	>		
8.	**Transmigrasi**			
8.1	Terlaksananya monitoring, pengawasan dan evaluasi untuk memberikan motivasi kepada warga transmigran	n.a	➢ Minat pelaksanaan transmigrasi mengalami penurunan. ➢ Perpindahan penduduk cenderung berlangsung berdasarkan inisiatif pribadi untuk perbaikan standar hidup. ➢ Promosi pelaksanaan transmigrasi mengalami kemunduran. ➢ Fasilitasi dan pembinaan kepada calon trasmigran belum optimal.	✓ Peningkatan promosi program transmigrasi bagi masyarakat. ✓ Peningkatan kecepatan pelaksanaan program transmigrasi. ✓ Pemberian insentif bagi masyarakat yang melakukan program transmigrasi.

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				
1.	**Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**			
1.1	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	=	➢ Tindak lanjut evaluasi kebijakan strategis daerah masih belum optimal. ➢ Nilai dan budaya kerja yang profesional, jujur, dan bersih perlu direvitalisasi di setiap jenjang birokrasi (pembentukan kelompok budaya kerja sebagai wadah diskusi untuk memecahkan permasalahan pekerjaan). ➢ Belum lancarnya pelaksanaan sistem informasi manajemen pemerintah daerah. ➢ Belum maksimalnya penerapan SOP pelayanan kepada masyarakat. ➢ Masih adanya permasalahan pada kelembagaan seperti tumpeng tindih kewenangan yang mengakibatkan kinerja menjadi kurang maksimal. ➢ Belum adanya dukungan ketersediaan data kebutuhan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. ➢ Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah. ➢ Belum dimulainya penerapan pelaporan kegiatan	✓ Fasilitasi pelaksanaan sistem informasi manajemen pemerintah secara elektronik. ✓ Evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis daerah untuk perbaikan pelaksanaan ke depan. ✓ Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan kebijakan strategis daerah. ✓ Peningkatan diseminasi produk hukum daerah strategis kepada masayarakat. ✓ Evaluasi penerapan SOP pelayanan kepada masyarakat. ✓ Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD. ➢ Peningkatan kapasitas SDM pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaan pengaadaan barang dan jasa dapat dilakukan
1.2	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	=		
1.3	Tingkat penataan kelembagaan pemerintahan daerah	>		
1.4	Tingkat ketersediaan dokumen evaluasi pembangunan daerah	>		
1.5	LKPj	=		
1.6	LKPj AMJ	=		
1.7	LPPD	=		
1.8	LAKIP	=		
1.9	Nilai kinerja pemerintah daerah	>		
1.10	Tingkat ketersediaan dokumen rencana kawasan pusat pemerintahan kabupaten	=		

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1.11	Tingkat ketersediaan lahan siap bangun di kawasan pusat pemerintahan kabupaten	<	LPUK berbasis online menggunakan sistem aplikasi. ➢ Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar-unit kerja serta antar-instansi. ➢ Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan selama ini belum sepenuhnya melibatkan *civil society.* ➢ Kurangnya pembinaan tenaga pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah agar menjadi tenaga profesional sehingga pelaksanaan pengadaan dapat berjalan sesuai dengan prinsip pengadaan yaitu efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif dan akuntabel. ➢ Belum optimalnya ketersediaan data yang akurat dan komprehensif untuk penentuan kebijakan strategis daerah. ➢ Belum optimalnya kinerja TPID dalam mengendalikan inflasi daerah. ➢ Pembentukan peraturan daerah terkendala dengan terbatasnya kapasitas aparatur. Penyusunan program kerja DPRD membutuhkan waktu yang lama karena pandangan yang berbeda dari anggota dewan. ➢ Penyerapan dan penghimpunan aspirasi	secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif dan akuntabel. ✓ Penyediaan data informasi untuk mendukung penetapan kebijakan strategis daerah. ✓ Penataan organisasi kelembagaan agar tepat fungsi dan tidak tumpeng tindih. ✓ Penyediaan data kebutuhan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. ✓ Peningkatan kapasitas aparatur dalam mendukung fungsi DPRD. ✓ Penyediaan tim ahli dalam mendukung tugas DPRD. ✓ Penyediaan sistem penyerapan aspirasi masyarakat dan diseminasi kinerja DPRD berbasis elektronik. ✓ Fasilitasi kerja anggota DPRD dalam menjalankan fungsi. ✓ Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. ✓ Percepatan pelimpahan kewenangan kepada kecamatan.
1.12	Tingkat Pembangunan Infrastruktur Pendukung kawasan pusat pemerintahan kabupaten	>		
1.13	Tingkat Pembangunan Gedung Perkantoran di kawasan pusat pemerintahan kabupaten	<		
1.14	Raperda yang disetujui DPRD tahun berkenan (Proporsi jumlah Raperda yang disetujui DPRD menjadi Perda terhadap jumlah Raperda yang diusulkan)	=		

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
			masyarakat masih tradisional dan belum menjadi sebuah sistem. ➢ Informasi penyampaian kinerja DPRD belum optimal. ➢ Pendelegasian kewenangan ke kecamatan berjalan lambat. ➢ Fungsi kecamatan dalam pelayanan publik belum optimal karena sarana dan prasarana yang belum memadai. ➢ Fungsi kecamatan dalam pembinaan desa terkendala dengan keterbatasan kapasitas aparatur. ➢ Belum terealisasinya rencana pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang (Puspemkab) .	✓ Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan. ✓ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbang di kecamatan dan kelurahan. ✓ Peningkatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. ✓ Fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. ✓ Fasilitasi sinkroniasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa. ✓ Percepatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan kabupaten untuk kemudahan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
2.	**Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan**			
2.1	Tingkat pemenuhan ketersediaan dokumen rencana lima tahunan dan tahunan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan SKPD	>	➢ Belum terciptanya satu sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan integratif antar wilayah serta sektor perekonomian daerah. ➢ Belum optimalnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan baik pada tingkat daerah maupun OPD.	✓ Identifikasi permasalahan pembangunan daerah. ✓ Pengitegrasian data untuk perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi. ✓ Tindak lanjut dari pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
2.2	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah :	=		
2.3	RPJMD	=		

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
2.4	RKPD	=	➢ Belum optimalnya kordinasi antar pelaku pembangunan daerah, baik pada tataran horizontal dengan OPD-OPD, maupun dengan pemerintah Pusat dan Provinsi. ➢ Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas. ➢ Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. ➢ Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya perencanaan di daerah. ➢ Masih belum optimalnya pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. ➢ Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah belum optimal.	pembangunan daerah. ✓ Monitoring capaian target pembangunan secara berkala. ✓ Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penganggaran daerah. ✓ Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah tahunan, 5 tahunan, dan jangka panjang. ✓ Peningkatan kualitas sumber daya perencana di daerah. ✓ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanan pembangunan tahunan, 5 tahunan, dan jangka panjang. ✓ Penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan proses perencanaan pembangunan daerah yang integratif.
2.5	RKPD Perubahan	=		
2.6	KUA PPAS	=		
2.7	KUA PPAS Perubahan	=		
3.	**Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan**		➢ Belum optimalnya inovasi pembangunan daerah untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat. ➢ Terbatasnya sumber daya aparatur dalam bidang penelitian dan pengembangan daerah. ➢ Belum dimanfaatkannya hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah.	✓ Pengelolaan data penelitian dan pengembangan. ✓ Perumusan rekomendasi atas rencana penetapan kebijakan strategis daerah. ✓ Pengembangan inovasi dan teknologi pada aspek pelayanan publik.

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
4.	**Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan**			
4.1	Tingkat pemenuhan pendidikan dan pelatihan PNS :	<	➢ Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. ➢ Masih rendahnya profesionalisme birokrasi. ➢ Belum berkembangnya sistem *reward* dan *punishment* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. ➢ Masih kurangnya kesesuaian penempatan dan promosi dalam jabatan dengan kompetensi dan prestasi kerja. ➢ Pengembangan pegawai belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan kompetensi. ➢ Data kepegawaian masih belum terintegrasi dengan baik. ➢ Pembinaan kepegawaian di perangkat daerah belum optimal. ➢ Spesialisasi kelahlian PNS belum optimal.	✓ Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi aparatur. ✓ Penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri bagi aparatur. ✓ Pembinaan, pengordinasioan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi aparatur. ✓ Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan satu pintu yang dikelola oleh OPD terkait.
4.2	Diklat PIM II	<		
4.3	Diklat PIM III	<		
4.4	Diklat PIM IV	<		
4.5	Prajabatan	>		
4.6	Tingkat indispliner PNS	>		
5.	**Fungsi Penunjang Keuangan**			
5.1	Jumlah pendapatan daerah	>	➢ Belum optimalnya laporan mengenai keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran. ➢ Tingkat kedisiplinan pemangku kepentingan guna	✓ Penyusunan APBD dan APBD perubahan tepat waktu. ✓ Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan anggaran pendapatan
5.2	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	>		
5.3	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	<		

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
5.4	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	=	penyusun APBD tepat waktu dan berkualitas masih belum baik. ➢ Belum optimalnya implementasi Analisis Standar Belanja dalam perencaanaan pagu kegiatan. ➢ Belum tersedianya sistem pengendalian internal terkait pengelolaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disertai peningkatan dan pengembangan penglolaan pemanfaatan BMD. ➢ Belum optimalnya pengelolaan aset daerah. ➢ Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah yang ditandai dengan belum optimalnya kontribusi PAD terhadap pembiayaan pembangunan daerah. ➢ Masih rendahnya kontribusi unit usaha BUMD dalam pengelolaan potensi unggulan daerah terhadap PAD. ➢ Belum akuratnya database pajak dan retribusi daerah. ➢ Belum optimalnya penggalian potensi dan pemetaan potensi pendapatan daerah ➢ Masih banyak wajib pajak daerah yang memiliki kesadaran rendah untuk membayar pajak. ➢ Koordinasi antar perangkat daerah dalam mendukung peningkatan PAD masih belum optimal.	dan belanja. ✓ Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembiayaan. ✓ Koordinasi pengelolaan dana perimbangan dan dana trasfer lainnya. ✓ Optimalisasi sistem informasi data pengelolaan keuangan daerah. ✓ Peningkatan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. ✓ Peningkatan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah. ✓ Koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah. ✓ Inventarisasi berkala barang milik daerah. ✓ Koordinasi, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, atau penghapusan barang milik daerah. ✓ Inventarisasi potensi PAD yang

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
				berasal dari pajak dan retribusi daerah pada masing-masing OPD. ✓ Penyediaan sistem informasi penerimaan pajak dan retribusi daerah secara elektronik. ✓ Penyusunan dan evaluasi kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak dan retribusi daerah.
6.	**Fungsi Penunjang Pengawasan**			
6.1	Tingkat Kapabilitas APIP	=	➢ Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran organisasi perangkat daerah. ➢ Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh organisasi perangkat daerah. ➢ Masih kurangnya kapasitas aparatur pengawasan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. ➢ Belum optimalnya sistem pelayanan pengaduan masyarakat atas layanan publik. ➢ Kurangnya pemahaman objek pemeriksa terhadap ketentuan aturan yang berlaku dalam menindaklanjuti LHP>	✓ Peningkatan pembinaan pada OPD yang belum menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). ✓ Peningkatan pemantauan kinerja dan keuangan OPD. ✓ Evaluasi kinerja dan keuangan OPD secara intensif. ✓ Peningkatan asistensi dan pendampingan kepada OPD secara intensif. ✓ Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan. ✓ Penyediaan sistem pelayanan pengaduan masyarakat secara elektronik.
6.2	Tingkat Muturitas SPIP	=		
6.3	Tingkat Kuantitas APIP	<		

4.3 Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan menentukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Identifikasi isu-isu strategis yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan arah prioritas pembangunan daerah yang menjadi tujuan dan sasaran yang dapat dioperasionalkan serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, isu-isu strategis juga merupakan salah satu sumber masukan dalam melakukan analisis lingkungan eksternal dan internal terhadap proses perencanaan. Jika analisis lingkungan eksternal dan internal diidentifikasi dengan baik dan tepat, maka pemerintahan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan akan dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah yang tidak menyesuaikan atau memperhatikan isu strategisnya kemungkinan akan menghadapi hambatan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau tidak berhasil dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Secara teknis Isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam dalam berbagai bidang pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat memberi warna serta mempengaruhi pelaksanaan agenda pembangunan dalam lima tahun ke depan, baik dalam lingkup regional, nasional dan global.

4.3.1 Isu Strategis Global/Internasional

Pada tahun 2014, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membentuk agenda pembangunan global baru yang bernama Tujuan Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan-tujuan yang tertuang dalam SDGs merupakan penyempurnaan tujuan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs). Melalui mandat SDGs, PBB berupaya untuk mewujudkan sumberdaya manusia global yang berkualitas, meningkatkan perekonomian global yang tidak mengesampingka kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta indikator-indikatornya untuk 2016-2030 meliputi:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;

2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs sudah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, Indikator TPB/SDGs yang dapat diukur menjadi bagian dari rencana kerja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Serang baik dalam bentuk rumusan, program, kegiatan dan indikator. Selain itu, upaya pencapaian target TPB/SDGs juga menjadi prioritas dalam pembangunan, hal ini terlihat dari sinkronisi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Kabupaten Serang sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 4.3 Sinkronisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development Goals/SDGs)

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
TUJUAN 1 : TANPA KEMISKINAN	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase Penduduk Miskin (Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin)	
		Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.		
	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Operasional Pelayanan JKN	

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.		
		Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Tersedianya akses air minum yang aman melalui system penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan non perpipaan	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat.		

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
TUJUAN 2 : TANPA KELAPARAN	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi Ketidakcukupan (underweight) pada anak balita.		
		Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Proporsi Balita Gizi Buruk	Renstra
		Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.		
TUJUAN 3 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu	
	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Bayi	
		Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Bayi	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	Angka kematian bayi	
		Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Cakupan Desa / Kelurahan UCI	Renstra
	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Kejadian TB per 1000 orang.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	Renstra
		Kejadian Malaria per 1000 orang.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	Renstra
	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.		

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
	pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan		
		Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		
		Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		
		Median Kawin Pertama.		
		Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).		
		Total Fertility Rate (TFR).		
	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Unmet need pelayanan kesehatan.	*Jumlah Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas*	
		Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk.	Rasio Puskesmas dan Rumah Sakit	
TUJUAN 4 : PENDIDIKAN BERKUALITAS	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.		

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	
	mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.			
	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki- laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.		
	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/ MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.		
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.		
		Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.		

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.		
TUJUAN : 5 KESETARAAN GENDER	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	
	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	
		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 1564 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 1564 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selai pasangan dalam 12 bulan terakhir.	
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	
	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	
		Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	
	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	
TUJUAN 6 : AIR BERSIH	Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	1. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		
		2. Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)		
DAN SANITASI LAYAK		3. Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan system terpusat skala kota, kawasan dan komunal		
		4. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat		

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.		
	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumput tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)		
		2. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja		
	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.		
		Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.		

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah dan tingkat pengelolaan RTH	
TUJUAN 7 : ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	Rasio Elektrifikasi		
		Konsumsi listrik per kapita	Energi dan Sumber Daya Mineral	
TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHA N EKONOMI	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Pertumbuhan Ekonomi	
		PDB per kapita	PDRB Per Kapita	
	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	Persentase tenaga kerja formal.		
		Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.		

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki- laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Kualitas Tenaga Kerja	
	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan	Jumlah wisatawan mancanegara.	Pariwisata	
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Pariwisata	
	lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.			
TUJUAN 9 : INDUSTRI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	Lingkungan Hidup	

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
TUJUAN 10 BERKURANG KESENJANGAN	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata- rata nasional Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	Koefisien Gini Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Indeks Gini	
TUJUAN 13 : PERUBAHAN IKLIM	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).		
TUJUAN 15 : EKOSISTEM DARATAN	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.	Lingkungan Hidup	
TUJUAN 16 : PERDAMAIAN, KEADILAN DAN	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).		

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).		
		Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).		
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Persentase PAD terhadap Pendapatan	
		Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.		
	Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Perdagangan	
	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)		

4.3.2 Isu Strategis Nasional

4.3.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Penelaahan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN merupakan salah satu identifikasi faktor-faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan pemerintah terpenting, yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau, sebaliknya, ancaman bagi daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu;

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Selanjutnya terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, di antaranya sebagai berikut: **Pilar Pertama** Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; **Pilar Kedua**

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; **Pilar Ketiga** Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan **Pilar Keempat** Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.

   Peningkatan dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

   1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
   2) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

   Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

   1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
   2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
   3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
   4) Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
   5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

   Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu

sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, melalui:

1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6) Pengentasan kemiskinan; dan
7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa.

   Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

   1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
   2) Memajukan kebudayaan;
   3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
   4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan
   5) Meningkatkan budaya literasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

   Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

   1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
   2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;

3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
5) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

   Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan

   diarahkan melalui kebijakan:

   1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
   2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan
   3) Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

   Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

   1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
   2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
   3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
   4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
   5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri.

4.3.2.2 Penanganan Pandemi COVID-19

Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO *China Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China yang kemudian diidentifikasi sebagai jenis baru coronavirus (*novel coronavirus*). Pada awal tahun 2020 virus jenis ini mulai menjadi penyebab pendemi global dan menjadi masalah kesehatan di beberapa negara di luar China. WHO menetapkan

COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Kemudian pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan *Coronavirus Disease* (COVID-19). COVID-19 disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding COVID-19 (saat ini kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS.

Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Sebelum itu, pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melalui Keppres No. 9/2020 tentang Perubahan atas Keppres No. 7/2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, serta pertahanan dan keamanan.

Dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, pemerintah perlu mengambil respon kebijakan secara cepat dan benar. Belajar dari langkah-langkah yang diambil oleh berbagai negara, respon kebijakan untuk memitigasi dampak COVID-19 dapat dibagi menjadi empat tahap: **pertama** adalah menguatkan sektor kesehatan, **kedua** melindungi masyarakat dan dunia usaha, **ketiga** mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, dan **keempat** adalah program pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pascapandemi

COVID-19. Sedangkan beberapa program yang telah dan akan dijalankan oleh Pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19 antara lain;

1. *Pertama*, program rakyat aman dari virus corona. Pemerintah akan memperluas tes polymerase chain reaction (PCR), pelacakan, dan karantina terhadap masyarakat yang positif terkena virus corona.
2. *Kedua*, program Indonesia sehat. Pemerintah mendorong kemandirian pelayanan kesehatan di rumah sakit dan penyediaan obat-obatan. Di dalamnya ada transformasi sistem kesehatan termasuk BPJS Kesehatan yang berkualitas.
3. *Ketiga*, program Indonesia berdaya. Pemerintah akan terus mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) demi mendongkrak daya beli masyarakat domestik. "Kemudian program lainnya seperti program kartu prakerja, subsidi gaji, kredit modal kerja, dan subsidi listrik
4. *Keempat*, pemerintah menyiapkan program Indonesia tumbuh. Beberapa poin yang masuk dalam program tersebut, antara lain peningkatan ekspor transformasi perpajakan, dan mendorong ekonomi di level mikro.
5. *Kelima*, pemerintah juga menyiapkan program jangka panjang (*multiyears*) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca dihantam pandemi corona."

Terkait dengan perencanaan pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan maka penanganan COVID-19 dapat dijadikan sebagai isu strategis di setiap urusan kewenangan Pemerintah daerah. Dalam merumuskan permasalahan pembangunan di setiap urusan kewenangan pemerintah daerah maka perlu dianalisa sejauhmana pengaruh COVID-19 terhadap pelaksanaan urusan kewenangan. Selanjutnya juga harus dirumuskan arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh dalam mengatasi kendala dan hambatan yang disebabkan oleh COVID-19. Identifikasi seberapa jauh pengaruh COVID-19 terhadap pelaksanaan masing-masing urusan kewenangan pemerintah daerah serta arahan kebijakan dan strategi yang ditempuh akan memandu daerah dalam menentukan pilihan prioritas program, kegiatan dan sub-kegiatan penanganan COVID-19 secara efisien, efektif dan tepat guna.

4.3.3 Isu Strategis Provinsi Banten

Analisis isu-isu strategis yang dituangkan dalam dokumen RPJMD Bantem 2017-2022 yaitu :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infratruktur.
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas.
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan.
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Beberapa isu strategis yang dikemukakan dalam RPJMD Banten Tahun 2017-2022 tersebut juga sangat relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Serang. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang mengembangkan sinergisitas pembangunan yang produktif dengan Pemerintah Daerah Provinsi Banten terutama dalam menangani berbagai isu straegis tersebut melalui program dan kegiatan bersama antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Serang.
Penelaahan mengenai isu strategis yang ada di Provinsi Banten dan terkait dengan isu strategis di kabupaten/kota Provinsi Banten adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4 Perbandingan Isu Strategis di Provinsi Banten dan Kabupaten/kota

No	Isu Strategis		
	Provinsi Banten	Kabupaten Serang	Kabupaten lain
1.	a. Kesenjangan wilayah Kesenjangan wilayah yang menjadi isu strategis adalah mengenai aksesibilitas 86endidikan dan Kesehatan, dimana rata-rata lama sekolah masih dibawah dan jangkauan ketersediaan rumah sakit minim. Selain itu mengenai kurangnya infrastruktur ekonomi masyarakat dan potensi ekonomi wilayah	1. Kualitas pelayanan 86endidikan bagi masyarakat belum merata 2. Masih adanya kasus-kasus AKI dan AKB serta Stunting yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta belum meratanya akses dan layanan 86endidika yang berkualitas 3. Belum tuntasnya pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang	Kota Tangerang memiliki isu strategis mengenai : 1. Peningkatan Kualitas Pendidikan; 2. Peningkatan Kualitas pelayanan Kesehatan; Kabupaten Lebak untuk isu strategis meliputi : Aksesibilitas dan kualitas layanan 86endidikan dan 86endidika; Kabupaten Pandeglang mengenai : Sarana dan prasarana dasar belum memadai, permasalahan ini

No	Isu Strategis		
	Provinsi Banten	Kabupaten Serang	Kabupaten lain
			terkait dengan kurang optimalnya sarana dan prasarana 87endid khususnya sarana dan prasarana 87endidikan, 87endidika, dan jalan serta sarana dan prasarana penunjang perekonomian; Kota Tangerang Selatan adalah mengenai : Pengembangan dan penataan Transportasi di Kota Tangerang Selatan;
	b. Daya saing daerah Terjadinya ketimpangan investasi dan pemanfaatan sumber daya alam disebabkan oleh adanya kurang daya dukung infrastruktur	4. Masih tingginya angka ketergantungan 87endid daerah pada Pemerintah dan Provinsi Banten dalam hal pendanaan pembangunan	Kabupaten Pandeglang : Belum optimalnya pemanfaatan potensi unggulan daerah, permasalahan ini terkait dengan masih dilakukannya aktivitas perekonomian barang mentah pada 87endid unggulan, belum dilakukannya aktivitas perekonomian pada 87endid unggulan dengan meningkatkan nilai tambah dan nilai rantainya; Kabupaten Lebak : Iklim investasi dan daya saing daerah; Kota Serang : Peningkatan iklim investasi yang kondusif bagi berkembangnya 87endid 87endidik, perdagangan dan jasa berbasis pemanfaatan sumber daya setempat dalam rangka memperluas kesempatan

No	Isu Strategis		
	Provinsi Banten	Kabupaten Serang	Kabupaten lain
			kerja; Kota Tangerang Selatan : Mengoptimalkan produksi tanaman hortikultura khususnya komoditas Anggrek dan Phylodendron;
	c. Kemiskinan dan Pengangguran Masih tingginya desa tertinggal, migrasi yang masuk juga menjadikan salah satu alas an tingginya angka pengangguran di daerah perkotaan Provinsi Banten	5. Masih tingginya angka kemiskinan ditengah-tengah masyarakat, terutama terkait dengan tingginya angka pengangguran 6. Kegiatan perekonomian masyarakat belum berkembang secara optimal terutama pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sumber daya ekonomi 88endi.	Kota Tangerang: Perluasan Kesempatan kerja dan peningkatan daya saing tenaga kerja;dan Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Ekonomi Lokal; Kota Serang: 1. Peningkatan iklim investasi yang kondusif bagi berkembangnya 88endid 88endidik, perdagangan dan jasa berbasis pemanfaatan sumber daya setempat dalam rangka memperluas kesempatan kerja; 2. Peningkatan daya saing daerah melalui pembinaan prestasi olahraga, seni dan budaya daerah, serta kewirausahaan di kalangan pemuda. Kabupaten Lebak : Kemiskinan dan ketenagakerjaan; Kabupaten Pandeglang : a.Kualias sumber daya manusia masih rendah, permasalahan ini terkait dengan masih rendahnya tingkat 88endidikan masyarakat

No	Isu Strategis		
	Provinsi Banten	Kabupaten Serang	Kabupaten lain
			dan kurang berdayanya masyarakat khususnya di perdesaan; b. Pertumbuhan ekonomi daerah belum menunjukkan tingkat perkembangan yang signifikan, permasalahan ini khususnya terkait dengan belum optimalnya iklim investasi yang prospektif dan kondusif, serta belum berkembangnya jiwa kewirausahaan;
2.	1. Tata Kelola Pemerintahan Perlunya perbaikan pada capaian kinerja mengingat hasil evaluasi akuntabilitas kerja masih dalam tahap CC	1. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Serang terutama pada Organisasi Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitasnya	Kota Serang : 1. Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; 2. Aparatur yang berintegritas, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera; 3. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel 4. Pelayanan publik yang berkualitas; Kabupaten Pandeglang : Tata kelola dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah masih lemah, permasalahan ini terkait dengan masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur pemerintahan daerah.

Sumber: RPJMD Provinsi Banten 2017-2023

4.3.4 Penelaahan RPJPD Kabupaten Serang 2005-2025

RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD periode ke-4 dari RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2006-2026. RPJMD ke-4 ditujukan untuk Mewujudkan Kabupaten Serang yang semakin maju, sejahtera, berkeadilan dan agamis melalui pembangunan yang merata dengan memperhatikan aspek kewilayahan dan sosial-ekonomi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yang didukung oleh masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya.

Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Serang pada periode akhir RPJMD ini meliputi:

1. Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan secara meyeluruh dan berkesinambungan.
2. Meningkatkan prasarana dan sarana publik untuk mendukung pengembangan sektor unggulan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Menyelenggarakan pembangunan berwawasan lingkungan.
6. Menghayati dan mengembangkan nilai-nilai religius Islam.
7. Meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui pendayagunaan sumber daya ekonomi lokal.
8. Meningkatkan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

4.3.5 Penelaahan KLHS RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026

KLHS RPJMD merupakan instrumen kebijakan yang telah melalui berbagai macam penelaahan secara terukur dan berjangka dalam hal analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif. Tujuan dari adanya KLHS adalah sebagai upaya pemerintah dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta mengintegrasikan hasil capaian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Pergeseran orientasi kebijakan pengelolaan lingkungan yang sekarang telah memiliki cakupan focus pada tingkat makro akhirnya menjadi bagian dari tujuan penyelesaian permasalahan lingkungan yang

semakin kompleks. Indicator yang telah disusun untuk pencapaian TPB yaitu sebanyak 319 indikator, yang terdiri dari 241 indikator mengacu pada TPB yang ditetapkan PBB mencakup kondisi umum daerah, yaitu daya dukung, daya tamping, geografis, demografis dan keuangan daerah, capaian indicator TPB yang relevan dengan pembagian urusan, kewenangan, karakteristik daerah, dan pembagian peran antara pemerintah daerah, maka berikut penelaahan KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Serang.

1. Isu strategis Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Serang yang wajib diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah :
   a. Kemiskinan, pengangguran dan penyerapan tenaga kerja
   b. Pelayanan kesehatan pada daerah terpencil dan perbatasan, tenaga kesehatan, serta penanggulangan gizi buruk
   c. Jangkauan dan fasilitas pendidikan
   d. Jangkauan dan pelayanan terhadap perumahan yang layak dan terjangkau
   e. Pengembangan infrastruktur kabupaten berbasis lingkungan,
   f. Pengelolaan lingkungan hidup berkaitan dengan pangan, pencemaran, dan revitalisasi sumber daya air
   g. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur transportasi
   h. Pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik menggunakkan system informasi
   i. Penanganan serta manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana alam
2. Kesimpulan bagi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Serang, meliputi:
   a. Penguatan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
      - Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
      - Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan
      - Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi
      - Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sector riil, dan industrialisasi
      - Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

- Pengendalian pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan
- Percepatan cakupan administrasi kependudukan, yang mencakup: perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk pencatatan sipil bagi seluruh penduduk Kabupaten Serang, peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, serta percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus
- Integrasi sistem administrasi kependudukan
- Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dengan cara penguatan sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, penguatan kapabilitas kelembagaan kabupaten dalam bidang pengendalian penduduk; dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta sinergitas pendataan keluarga.
- Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial seperti penguatan pelaksanaan jaminan sosial dalam pengembangan program SJSN yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk pengembangan jaminan pekerjaan, keberlanjutan pendanaan dan penguatan tata Kelola SJSn, peningkatan efektivitas JKN didukung pemerataan penyediaan pelayanan Kesehatan, serta penguatan kelembagaan SJSN termasuk perbaikan tata Kelola hubungan antarlembaga dan harmonisasi peraturan perundangan yang terkait
- Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan social dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran
- Perlindungan sosial adaptif dengan cara pengembangan perlindungan social yang terintegrasi dengan risiko ekonomi dan social terhadap perubahan iklim dan bencana alam, penguatan system kelembagaan perlindungan social yang responsive
- Peningkatan kesejahteraan social dengan penguatan implementasi standar pelayanan minimal bidang social untuk memenuhi kebutuhan

dasar penduduk, pembangunan masyarakat, lingkungan, dan sarana prasarana ramah anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

- Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu seperti penataan manajemen pengelolaan sumber daya manusia terutama aspek kesejahteraan social, peningkatan peran dan kapasitas pendamping masyarakat, juga mengenai peningkatan pengetahuan, pemahaman mengenai Pendidikan anak, Kesehatan gizi serta pengelolaan keuangan bagi keluarga
- Peningkatan pelayanan terpadu Kesehatan melalui peningkatan Kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan.kesehatan reporduksi, percepatan perbaikan gizi masyarakat, dan peningkatan pengendalian penyakit,
- Penguatan system Kesehatan dan pengawasan obat dan makanan melalui penguatan pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan, pemenuhan dna peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan, serta pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat Kesehatan.
- Meningkatkan pemerataan layanan pendiidkan berkualitas melalui peningkatan pemerataan akses layanan Pendidikan di selama jenjang dan percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, peningkatan tata Kelola pembangunan pendiidkan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran Pendidikan
- Pengentasan kemiskinan melalui akselarasi penguatan ekonomi keluarga, serta keperantaraan usaha dan dampak social

c. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
    - Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
    - Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman
    - Infrastruktur ketahanan bencana, meliputi pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur Tangguh bencana di Kawasan prioritas rawan bencana, penilaian dan peningkatan keamanan

infrastruktur vital terhadap bencana, penetapan standar bangunan Tangguh bencana, serta pengembangan infrastruktur hijau

d. Pembangunan Lingkungan Hidup, untuk Peningkatan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
   - Peningkatan kualitas lingkungan hidup meliputi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
   - Peningkatan ketahanan bencana dan iklim seperti pennaggulangan bencana (data, informasi, dan literasi bencana, system, regulasi, dan tata Kelola, peningkatan sarana prasarana mitigasi, integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana, penguatan penanggulangan darurat bencana) dan peningkatan ketahanan iklim
   - Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

4.3.6 Penentuan Isu Strategis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditentukan tata cara merumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Penentuan Isu Strategis

   Dokumen RPJMD memiliki jangka menengah 5 (lima) tahun, maka akan dirumuskan isu strategis yang berpotensi muncul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan meliputi isu internasional, nasional, dan daerah. Isu internasional yang berpengaruh terhadap isu strategis daerah adalah pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, selanjutnya isu strategis nasional berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2020-2024 dan penanganan pandemi COVID-19, sedangkan isu daerah berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026, dan KLHS RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026. Berdasarkan penjabaran pada sub bab sebelumnya, maka ringkasan menurut tingkatan isu ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Identifikasi Isu Strategis Daerah Kabupaten Serang

Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah
Internasional (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya; 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan; 3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia; 4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua; 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan; 6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan; 7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua; 8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua; 9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi; 10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;

Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah
	11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan; 12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan; 13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya; 14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan; 15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati; 16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
Nasional (RPJMN 2020-2024)	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Peningkatan dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan

Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah
	b) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital. 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah; b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang; c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif; d) Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata. 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, melalui: a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;

Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah
	b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; f) Pengentasan kemiskinan; dan g) Peningkatan produktivitas dan daya saing. 4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui: a) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa; b) Memajukan kebudayaan; c) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama; d) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan e) Meningkatkan budaya literasi. 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah
	a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah; b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan; c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK; d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan e) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur. 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan: a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan c) Pembangunan Rendah Karbon. 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; b) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;

Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah
	c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan e) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri.
Nasional (Penananganan COVID-19)	1. *Pertama*, program rakyat aman dari virus corona. Pemerintah akan memperluas tes polymerase chain reaction (PCR), pelacakan, dan karantina terhadap masyarakat yang positif terkena virus corona. 2. *Kedua*, program Indonesia sehat. Di sini pemerintah mendorong kemandirian pelayanan kesehatan di rumah sakit dan penyediaan obat-obatan. Di dalamnya ada transformasi sistem kesehatan termasuk BPJS Kesehatan yang berkualitas. 3. *Ketiga*, program Indonesia berdaya. Pemerintah akan terus mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) demi mendongkrak daya beli masyarakat domestik. "Kemudian program lainnya seperti program kartu prakerja, subsidi gaji, kredit modal kerja, dan subsidi listrik 4. *Keempat*, pemerintah menyiapkan program Indonesia tumbuh. Beberapa poin yang masuk dalam program tersebut, antara lain peningkatan ekspor transformasi perpajakan, dan mendorong ekonomi di level mikro. 5. *Kelima*, pemerintah juga menyiapkan program jangka panjang (*multiyears*) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca dihantam pandemi corona."
Daerah (RPJMD Provinsi Banten 2017-2022)	1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. 2. Membangun dan meningkatkan kualitas infratruktur 3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas

Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah
	4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan 5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
Daerah (RPJPD Kabupaten Serang 2006-2026	1. Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan secara meyeluruh dan berkesinambungan. 2. Meningkatkan prasarana dan sarana publik untuk mendukung pengembangan sektor unggulan. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 5. Menyelenggarakan pembangunan berwawasan lingkungan. 6. Menghayati dan mengembangkan nilai-nilai religius Islam. 7. Meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui pendayagunaan sumber daya ekonomi lokal. 8. Meningkatkan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
Daerah (KLHS RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026)	1. Penguatan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. 2. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. 3. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. 4. Pembangunan Lingkungan Hidup, untuk Peningkatan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

2. Pembobotan

Setiap isu strategis yang telah ditentukan, akan dilakukan pembobotan untuk menentukan isu strategis yang paling prioritas dan akan menjadi dasar penyusunan visi dan misi. Kriteria dalam penentuan isu strategis didasarkan

pada 6 kriteria dengan bobot yang berbeda. Kriteria beserta bobotnya tersebut sebagai berikut: (1) memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional (bobot: 20 poin), (2) merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah (bobot: 10 poin), (3) dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat (bobot: 20 poin), (4) memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah (bobot: 10 poin), (5) kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani (bobot: 15 poin), dan (6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan (bobot: 25 poin). Berdasarkan kriteria beserta bobotnya tersebut, didapatkan hasil pembobotan isu strategis Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis Kabupaten Serang Tahun 2021-2026

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Jml
		1	2	3	4	5	6	
1	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat	20	10	20	10	15	25	100
2.	Masih adanya kasus- kasus AKI dan AKB serta Stunting yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta belum meratanya akses dan layanan kesehatan yang berkualitas	20	10	20	10	15	25	100
3.	Belum tuntasnya pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang	20	10	20	10	15	25	100
4.	Masih tingginya angka kemiskinan ditengah-tengah masyarakat, terutama terkait dengan tingginya angka pengangguran	20	10	20	10	10	25	95
5.	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Serang terutama pada Organisasi Pemerintah daerah belum seluruhnya mencapai tingkatan pada standar yang baik	20	10	20	7	10	25	92

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Jml
		1	2	3	4	5	6	
6.	Kegiatan perekonomian masyarakat belum berkembang secara optimal terutama pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sumber daya ekonomi lokal	20	10	20	10	5	25	90
7.	Tingkat kesadaran masyarakat yang belum mencerminkan ketentraman, keamanan dan ketertiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	20	10	15	10	10	20	85
8.	Belum meratanya pembangunan antar wilayah (kecamatan)	20	10	15	10	5	10	70
9.	Masih banyak ditemukan tatakelola lingkungan hidup baik yang berada di wilayah industri, permukiman dan perumahan belum sesuai dengan standar lingkungan hidup, terutama terkait dengan persoalan penanganan pencemaran lingkungan dan limbah	20	4	10	4	5	15	58
10.	Masih tingginya angka ketergantungan fiscal daerah pada Pemerintah dan Provinsi Banten dalam hal pendanaan pembangunan	10	10	10	10	5	10	55
11.	Masih banyak ditemukan kondisi kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang belum memenuhi persyaratan hidup layak, terutama terkait dengan rumah tidak layak huni, kualitas sanitasi lingkungan dan persampahan	10	7	10	4	5	15	51
12	Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai	10	10	10	10	5	10	55

Tabel 4.7 Rata-rata Skor Isu Strategis

No	Isu Strategis	Jumlah	Rata-rata Skor
1.	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat	100	17
2.	Masih adanya kasus- kasus AKI dan AKB serta Stunting yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta belum meratanya akses dan layanan kesehatan yang berkualitas	100	17
3.	Belum tuntasnya pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang	100	17
4.	Masih tingginya angka kemiskinan ditengah-tengah masyarakat, terutama terkait dengan tingginya angka pengangguran	95	16
5.	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Serang terutama pada Organisasi Pemerintah daerah belum seluruhnya mencapai tingkatan pada standar yang baik	92	15
6.	Kegiatan perekonomian masyarakat belum berkembang secara optimal terutama pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sumber daya ekonomi lokal	90	15
7.	Tingkat kesadaran masyarakat yang belum mencerminkan ketentraman, keamanan dan ketertiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	85	14
8.	Belum meratanya pembangunan antar wilayah (kecamatan)	70	12
9.	Masih banyak ditemukan tatakelola lingkungan hidup baik yang berada di wilayah industri, permukiman dan perumahan belum sesuai dengan standar lingkungan hidup, terutama terkait dengan persoalan penanganan pencemaran lingkungan dan limbah	58	10
10	Masih tingginya angka ketergantungan fiscal daerah pada Pemerintah dan Provinsi Banten dalam hal pendanaan pembangunan	55	9
11.	Masih banyak ditemukan kondisi kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang belum memenuhi persyaratan hidup layak, terutama terkait dengan rumah tidak layak huni, kualitas sanitasi lingkungan dan persampahan	51	9
12	Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai	55	9

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Serang dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Kabupaten Serang. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten Serang sesuai dengan urutan pembobotannya yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat belum merata
2. Masih adanya kasus- kasus AKI dan AKB serta Stunting yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta belum meratanya akses dan layanan kesehatan yang berkualitas
3. Belum tuntasnya pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang
4. Masih tingginya angka kemiskinan ditengah-tengah masyarakat, terutama terkait dengan tingginya angka pengangguran
5. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Serang terutama pada Organisasi Pemerintah daerah belum seluruhnya mencapai tingkatan pada standar yang baik
6. Kegiatan perekonomian masyarakat belum berkembang secara optimal terutama pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sumber daya ekonomi lokal.
7. Tingkat kesadaran masyarakat yang belum mencerminkan ketentraman, keamanan dan ketertiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
8. Belum meratanya pembangunan antar wilayah (kecamatan)

9. Masih banyak ditemukan tatakelola lingkungan hidup baik yang berada di wilayah industri, permukiman dan perumahan belum sesuai dengan standar lingkungan hidup, terutama terkait dengan persoalan penanganan pencemaran lingkungan dan limbah
10. Masih banyak ditemukan kondisi kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang belum memenuhi persyaratan hidup layak, terutama terkait dengan rumah tidak layak huni, kualitas sanitasi lingkungan dan persampahan.
11. Masih tingginya angka ketergantungan fiscal daerah pada Pemerintah dan Provinsi Banten dalam hal pendanaan pembangunan
12. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. VISI

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Serang, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis"

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Serang yaitu:

MAJU

Pembangunan dilakukan di segala sektor untuk meningkatkan pelayanan dasar dan perekonomian masyarakat yang didukung dengan pembenahan infrastruktur pada diseluruh wilayah Kabupaten Serang.

SEJAHTERA

Perwujudan terpenuhinya kebutuhan lahiriah (pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan) dan kebutuhan batiniah (agama dan budaya) masyarakat Kabupaten Serang. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kabupaten Serang untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik.

BERKEADILAN

Pembangunan di Kabupaten Serang dilakukan secara merata dengan memperhatikan aspek kewilayahan dan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

AGAMIS

Perwujudan implementasi norma agama dan nilai budaya sebagai landasan moral dan spiritual dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Serang yang memiliki keutamaan untuk selalu melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran sehingga terbentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya.

5.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2016, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional

3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas.
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional
6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.

Selanjutnya Prioritas pembangunan Daerah yang disusun dalam kerangka RPJMD Kabupaten Serang tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi yang kemudian dituangkan ke dalam 12 prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
3. Pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang yang sesuai dengan kapasitas anggaran daerah
4. Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program yang salah satunya melakukan penurunan angka pengangguran
5. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis potensi lokal yang lebih mengutamakan sektor Pariwisata, Pertanian dan UMKM serta potensi - potensi yang berhubungan dengan pengembangan industri kreatif yang berada ditengah - tengah masyarakat
7. Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat
8. Pemerataan pembangunan antar wilayah (kecamatan)
9. Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih difocuskan kepada Penanganan pencemaran lingkungan dan limbah

10. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang lebih difokuskan kepada pembangunan rumah tidak layak huni, sanitasi lingkungan dan pengelolaan persampahan secara menyeluruh
11. Peningkatan kemampuan fiskal daerah untuk pendanaan pembangunan
12. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Selanjutnya dari sasaran dimaksud dijadikan indikator Visi dan misi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran, sebagai berikut :

5.3.1 Misi 1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat

Tabel 5.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Misi 1

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata serta Pelestarian tradisi seni budaya lokal	1. Rata-Rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah	Meningkatnya akses, kualitas dan management pelayanan bidang pendidikan	Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan
	Tingkat Warisan Budaya yang Dilestarikan	Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal	Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional

a. Tujuan :

Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata serta Pelestarian tradisi seni budaya lokal, dengan indikator tujuan yaitu Rata-rata lama sekolah, Harapan lama sekolah dan Tingkat warisan budaya yang dilestarikan

b. Sasaran:

1) Meningkatnya akses, kualitas dan management pelayanan bidang pendidikan. Dengan indikator yaitu Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan.
2) Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal. Dengan indikator yaitu Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat Dengan mudah dipahami melalui gambar sebagai berikut:

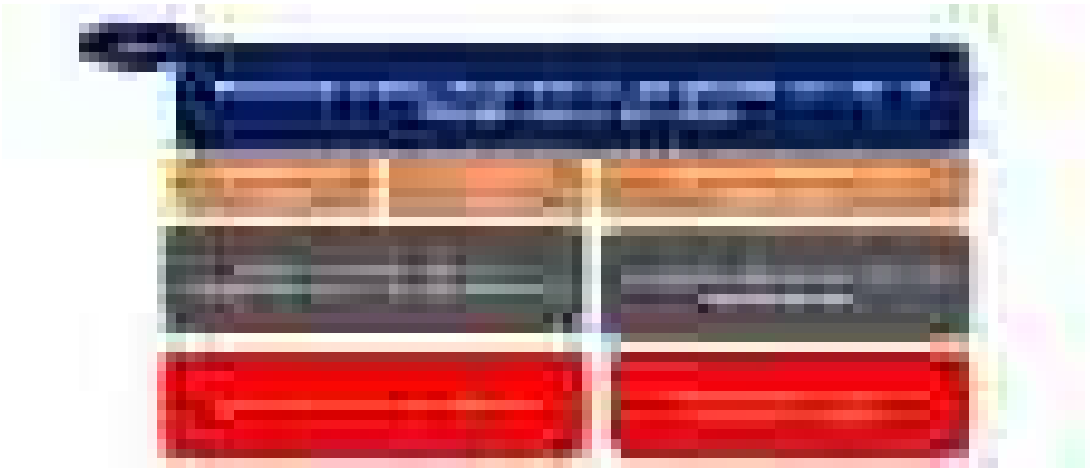

Gambar 5.1 : Pemahaman Misi, Tujuan dan Sasaran Misi-1

Selanjutnya untuk mencapai target misi 1 yaitu "Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat" diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi mulai dari penentuan isu stragis, misi, tujuan indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dengan OPD yang menganpu implementasi dari misi dimaksud, yang dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 5.2 : Pemetaan Kinerja terhadap pencapaian Isue strategis dalam Misi–1

5.3.2 Misi 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang professional.

Tabel 5.2. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Misi 2

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas dan Layanan kesehatan yang bermutu merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat	Angka kematian ibu
			Angka kematian bayi
			Angka Prevalensi stunting
			Persentase fasyankes yg terstandar dan terakreditasi
			Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit

a. Tujuan

Meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat, dengan indikator tujuan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH).

b. Sasaran

1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas dan Layanan kesehatan yang bermutu merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat. Dengan indikator yaitu Angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka prevalensi stunting, Persentase fasyankes yg terstandar dan terakreditasi dan Persentase Pemenuhan Standar Akreditas Rumah Sakit

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat Dengan mudah dipahami melalui gambar sebagai berikut:

Gambar 5.3 : Pemahaman Misi, Tujuan dan Sasaran Misi-2

Selanjutnya Untuk mencapai target misi 2 yaitu "Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang professional" diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi mulai dari penentuan isu stragis, misi, tujuan indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dengan OPD yang menganpu implementasi dari misi dimaksud, yang dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 5.4 : Pemetaan Kinerja terhadap pencapaian Isue strategis dalam Misi–2

5.3.3 Misi 3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas.

Tabel 5.3. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Misi 3

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan pemerataan pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah yang berwawasan lingkungan	Indeks Kepuasaan Layanan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah	Cakupan aksesibilitas antar wilayah
			Persentase Desa yang telah mendapatkan pelayanan air minum
			Persentase Desa yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik
			Persentase jumlah bangunan gedung daerah dengan kondisi baik
			Persentase kawasan kumuh
			Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi
			Persentase Drainase Kota dengan kondisi baik
			Proporsi Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik
			Tingkat Pemanfaatan Informasi Tata Ruang dalam pembangunan
			Indeks Kinerja Sistem Irigasi
			Cakupan ketersediaan air baku
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam	Indeks kualitas Air
			Indeks Kualitas udara
			Indeks tutupan Vegetasi
			Persentase Penanganan Sampah
			Persentase Rumah Layak Huni

a. Tujuan

Meningkatkan pemerataan pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah yang berwawasan lingkungan, dengan indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasaan Layanan Infrastruktur.

b. Sasaran

1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah, dengan indikator yaitu Cakupan aksesibilitas antar wilayah, Persentase Desa yang telah mendapatkan pelayanan air minum, Persentase Desa yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik, Persentase jumlah bangunan gedung daerah dengan kondisi baik, Persentase kawasan kumuh, Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi, Persentase Drainase Kota dengan kondisi baik, Proporsi Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik, Tingkat Pemanfaatan Informasi Tata Ruang dalam pembangunan, Indeks Kinerja Sistem Irigasi, Cakupan ketersediaan air baku
2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam, dengan indikator: Indeks kualitas Air, Indeks Kualitas udara, Indeks tutupan Vegetasi, Persentase Penanganan Sampah, Persentase Rumah Layak Huni

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat Dengan mudah dipahami melalui gambar sebagai berikut:

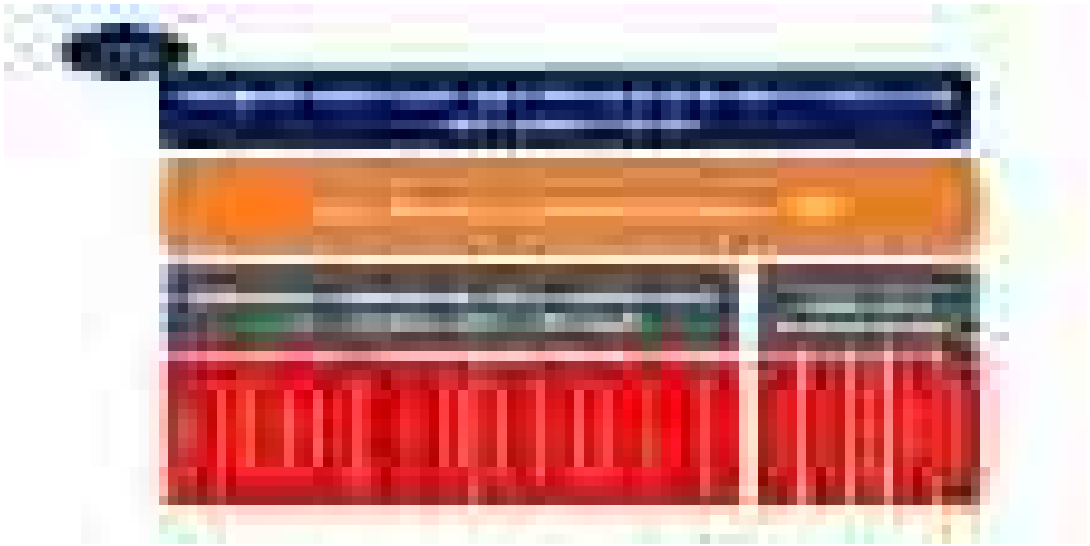

Gambar 5.5 : Pemahaman Misi, Tujuan dan Sasaran Misi-3

5.3.4 Misi 4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Tabel 5.4. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Misi 4

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2. Inflasi 3. Tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian
			Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan
		Meningkatnya kapasitas KUMKM yang sinergi dengan dunia usaha perdagangan dan industri	Proporsi peningkatan SHU koperasi
			Pertumbuhan Wirausaha Baru
			Pertumbuhan PDRB sektor industri
			Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan
		Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi daerah
		Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah	Kontribusi PAD Pariwisata
		Meningkatnya dayasaing dan produktivitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan
		Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Prosentase Desa Maju dan Mandiri didasarkan dari IDM

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Persentase Tingkat Kemiskinan 2. Indeks Gini Rasio	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan
		Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial serta pengendalian penduduk	Prosentase PMKS yang mendapatkan program layanan sosial
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)
			Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking
			Total Fertility Rate

a. Tujuan

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa, dengan indikator tujuan yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Tingkat pengangguran Terbuka.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan Indikator tujuan yaitu Persentase Tingkat Kemiskinan dan Indeks Gini Rasio.

b. Sasaran

1) Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas. Dengan indikator yaitu Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan.
2) Meningkatnya kapasitas KUMKM yang sinergi dengan dunia usaha perdagangan dan industri. Dengan indikator yaitu Proporsi peningkatan SHU koperasi, Pertumbuhan Wirausaha Baru, Pertumbuhan PDRB sektor industri, Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan.

5.3.5 Misi 5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional

Tabel 5.5. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Misi 5

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan public	Indeks reformasi Birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK
			Nilai LPPD
			Nilai SAKIP
			Jumlah opd pelayanan melaksanakan Zona integritas (ZI) WBBM WBK
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Maturitas SPIP
		Meningkatnya Pendapatan asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD
		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi	Nilai konsistensi perencanaan pembangunan daerah
			Nilai capaian kinerja kegiatan perangkat daerah
			Indek Inovasi Daerah
			Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan
		Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori Baik
			Cakupan standar kompetensi pegawai
		Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)
			Indeks Kematangan Penerapan SPBE
			Indeks Keamanan informasi (Indeks KAMI)
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
			Persentase Masyarakat yang Melakukan Kunjungan Perpustakaan
			Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara digital
			Cakupan kepemilikan dokumen adminduk
			Indeks Risiko Bencana
			Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda

a. Tujuan

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan indikator tujuan yaitu Indeks reformasi birokrasi

b. Sasaran

1) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator: Opini BPK, Nilai LPPD, Nilai SAKIP, Jumlah opd pelayanan melaksanakan Zona inteegritas (ZI) WBBM WBK.
2) Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator yaitu Tingkat Maturitas SPIP
3) Meningkatnya Pendapatan asli Daerah, dengan indikator yaitu Tingkat Pertumbuhan PAD.
4) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi, dengan indikator: nilai konsistensi perencanaan pembangunan daerah, Nilai capaian kinerja prioritas perangkat daerah, Indeks Inovasi Daerah, Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan.
5) Meningkatnya kualitas SDM aparatur, dengan indikator: Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori Baik dan Cakupan standar kompetensi pegawai.
6) Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI, dengan indikator: Indeks keterbukaan informasi publik (PPID), Indeks Kematangan penerapan SPBE, Indeks Keamanan informasi (Indeks KAMI).
7) Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI, dengan indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Persentase Masyarakat yang Melakukan Kunjungan Perpustakaan, Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara digital, Cakupan kepemilikan dokumen adminduk, Indeks Risiko Bencana, Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat Dengan mudah dipahami malalui gambar sebagai berikut:

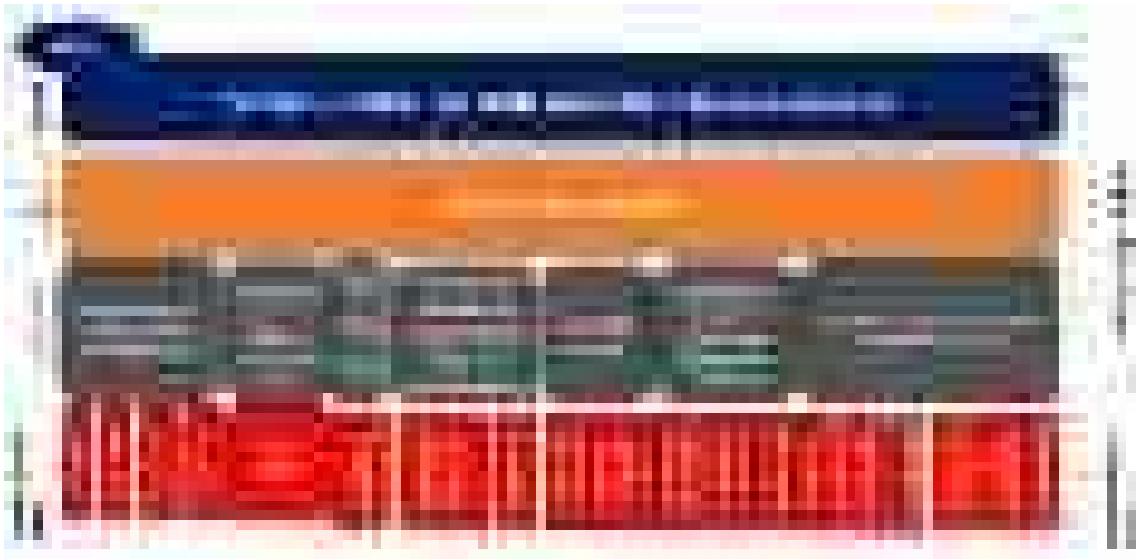

Gambar 5.9 : Pemahaman Misi, Tujuan dan Sasaran Misi-5

Selanjutnya Untuk mencapai target misi 5 yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional" diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi mulai dari penentuan isu stragis, misi, tujuan indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dengan OPD yang menganpu implementasi dari misi dimaksud, yang dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 5.10 : Pemetaan Kinerja terhadap pencapaian Isue strategis dalam Misi–5

5.3.6 Misi 6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara

Tabel 5.6. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Misi 6

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama ditengah-tengah masyarakat	Indeks Kerukunan Umat beragama	Meningkatnya toleransi kehidupan umat beragama	Tingkat kejadian SARA ditengah-tengah masyarakat

a. Tujuan

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama ditengah-tengah masyarakat, dengan indikator tujuan yaitu Indeks Kerukunan Umat beragama

b. Sasaran

Meningkatnya toleransi kehidupan umat beragama, dengan indikator: Tingkat kejadian SARA ditengah-tengah masyarakat.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat Dengan mudah dipahami melalui gambar sebagai berikut:

Gambar 5.11 : Pemahaman Misi, Tujuan dan Sasaran Misi-6

Selanjutnya Untuk mencapai target misi-6 yaitu "Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara" diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi mulai dari penentuan isu stragis, misi, tujuan indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dengan OPD yang menganpu implementasi dari misi dimaksud, yang dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 5.12 : Pemetaan Kinerja terhadap pencapaian Isue strategis dalam Misi–6

Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.7. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, beserta Indikator dan Target Kabupaten Serang Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian awal perencanaan tahun 2020	Target					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat	Meningkatkan Layanan Bidang Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat serta Pelestarian tradisi seni budaya lokal yang didukung peran generasi muda untuk pembangunan daerah	Angka Rata Rata Lama Sekolah			7,5	7,64	7,79	7,93	8,07	8,22	8,36
		Angka Rata Rata Harapan Bersekolah			12,57	12,75	12,94	13,12	13,30	13,48	13,67
			Meningkatnya akses, kualitas dan management pelayanan bidang pendidikan	Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan	47,52	48,10	48,72	49,31	49,91	50,51	51,11
		Tingkat Warisan Budaya yang Dilestarikan			0	41.38 %	48.28 %	58.62 %	79.31 %	93.10 %	100%
			Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal serta daya dukung generasi muda bagi daerah	Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional	0	41.38 %	48.28 %	58.62 %	79.31 %	93.10 %	100%

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian awal perencanaan tahun 2020	Target					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang professional	Meningkatnya derajat kesehatan bagi masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)			64,64	64,85	65,06	65,26	65,47	65,68	65,89
			Meningkatkan akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas dan Layanan kesehatan yang bermutu merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat	Angka kematian ibu	204	202	200	194	183	182	180
				Angka kematian bayi	8,29	8,27	8,25	8.23	8.21	8.19	8.17
				Angka Prevelensi Stunting	18.40%	21,1%	18,4 %	16%	14%	13,5%	13%
				Persentase fasyankes yg terstandar dan terakreditasi	25%	25	30	35	40	45	50
				Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas	Meningkatkan pemerataan pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah yang berwawasan lingkungan	Indeks Kepuasaan Layanan Infrastruktur			48%	50%	52,5 %	55%	57,5 %	60%	62,5 %
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	96,10%	96,1%	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Desa yang telah mendapatkan pelayanan air minum	85,89	87,12	87,73	88,34	88,96	89,57	90,18

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian awal perencanaan tahun 2020	Target					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Persentase Desa yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	70,25	71,47	72,09	72,70	73,31	73,93	74,54
				Persentase jumlah bangunan gedung daerah dengan kondisi baik	50	55	60	65	70	75	80
				Persentase kawasan kumuh	0.20	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10
				Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi	35	35	41.66	48,33	55	61.66	68,33
				Persentase Drainase Kota dengan kondisi baik	50	51,85 %	52,5 %	55,56 %	58,08 %	60,96 %	63,89 %
				Proporsi Panjang jaringan jalan	84	96	62.5	64.9	67.3	69.7	72.1

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian awal perencanaan tahun 2020	Target					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				kabupaten dalam kondisi baik							
				Tingkat Pemanfaatan Informasi Tata Ruang dalam pembangunan	100	100	100	100	100	100	100
				Indeks Kinerja Sistem Irigasi	5	5	10	20	25	40	100
				Cakupan ketersediaan air baku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam	Indeks kualitas Air	49.25	49.75	50.25	50.75	51.25	51.75	52.25
				Indeks Kualitas udara	82.25	82.50	82.75	83.00	83.25	83.50	83.75
				Indeks tutupan Vegetasi	69,98	69.985	69.990	69.995	70.000	70.005	70.010
				Persentase Penanganan Sampah	14,53	15.03	17.44	19.85	22.27	24.68	27.09
				Persentase Rumah Layak Huni	89,26%	89.26 %	89.88 %	90.49 %	91.10 %	91.72 %	92.33 %

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian awal perencanaan tahun 2020	Target					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)			-1.96	3,41	2,97	2,42	1,78	2,72	2,56
		Inflasi			1,23	1,5	1.23	1.5	1.59	1.65	1.93
		Tingkat Pengangguran Terbuka			12.22	12	11.89	11.55	11.22	11	10.88
			Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	4,02	3.07	2.82	2.84	3.19	2.98	2.96
				Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	-2.16	2.80	1.99	1.48	1.61	1.97	1.76
			Meningkatnya kapasitas KUMKM yang sinergi dengan dunia usaha perdagangan dan industri	Proporsi peningkatan SHU koperasi	29%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
				Pertumbuhan Wirausaha Baru	9,64	5	10	10	10	10	10
				Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	-1.56	2.06	1.43	0.70	0.06	1.03	0.77
				Pertumbuhan sektor industri dalam PDRB	-4.28	3.99	3.58	3.22	2.28	3.27	3.09

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian awal perencanaan tahun 2020	Target					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi daerah PMA PMDN	-0,39% 46,28%	3% 3%	3% 3%	3% 3%	3% 3%	3% 3%	3% 3%
			Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah	Kontribusi PAD Pariwisata	16.059.553.821	17.000.000.000	20.000.000.000	22.000.000.000	24.000.000.000	25.000.000.000	25.500.000.000
			Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Prosentase Desa Maju dan Mandiri didasarkan dari IDM	15.03	15.03	15.95	16.87	17.79	18.71	19.63
			Meningkatnya dayasaing dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	13,38	15	20	25	30	35	40

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian awal perencanaan tahun 2020	Target					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Persentase Tingkat Kemiskinan			4.94	4.50	4.22	4.18	4.10	4.08	4.04
		Indeks Gini Rasio			0.303	0.286	0.281	0.276	0.271	0.266	0.261
			Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77.07%	77.10 %	77.15 %	77.20 %	77.30 %	77.40 %	77.50 %
			Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial serta pengendalian penduduk	Prosentase PMKS yang mendapatkan program pelayanan sosial	17.38%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,14	92,02	92,06	92,10	92,14	92,18	92,22
				Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking	56,17	58	60	65	70	75	80
				Total Fertility Rate	2.1	2,29	2,26	2,24	2,21	2,19	2,1

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian awal perencanaan tahun 2020	Target					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Biksierintegritas , Kompeten Dan Profesional	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi			CC	B	B	B	BB	BB	BB
			Meningkatnya kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Nilai LPPD	3.80	4.00	4.10	4.20	4.30	4.40	4.50
				Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
				Jumlah OPD pelayanan melaksanakan Zona integritas (ZI) WBBM WBK	0	1	1	1	1	1	1
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Maturitas SPIP	3	3,11	3,50	3,60	3,70	3,80	4,00
			Meningkatnya Pendapatan asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	1.36%	4.07%	1.12 %	3.28 %	3.33 %	3.39%	3.44 %
			Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Nilai konsistensi perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	100
				Nilai capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian awal perencanaan tahun 2020	Target					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
			daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi	Indek Inovasi Daerah	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif	Inovatif
				Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan	50,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
			Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori baik	94%	94%	95%	93%	96%	97%	97%
				Cakupan standar kompetensi pegawai	90%	94.10%	94.50%	95.00%	95.50%	96.00%	96.00%
			Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%
				Indeks Kematangan Penerapan SPBE	2,98	2.98	2.98	2.98	2.99	3.00	3.01
				Indeks Keamanan informasi (Indeks KAMI)	100	100	120	140	160	170	175
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	B	B	B	B	B
				Persentase Masyarakat yang Melakukan	58.00%	42.00%	60.00%	70.00%	80.00%	90.00%	100%

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian awal perencanaan tahun 2020	Target					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Kunjungan Perpustakaan							
				Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara digital	35.71%	44.64 %	53.57 %	62.50 %	71.43 %	80.36 %	100%
				Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	79,12%	83,23	84,8	87,4	89,8	92,2	94,6
				Indeks Risiko Bencana	203,20	203,10	203,05	203,00	202,80	202,50	200,00
				Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda	7.4%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama ditengah-tengah masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama			86.45	86.90	87.40	87.95	88.50	89.00	89.50
			Meningkatnya toleransi kehidupan umat beragama	Tingkat kejadian SARA ditengah-tengah masyarakat	0	0	0	0	0	0	0

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

"Bab ini akan menjelaskan tentang strategi yang akan diterapkan, serangkaian arah kebijakan (rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi) serta program pembangunan dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah."

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG YANG SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN AGAMIS			
Misi 1: Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata serta Pelestarian tradisi seni budaya lokal	Meningkatnya akses, kualitas dan management pelayanan bidang pendidikan	Peningkatan standarisasi dan inovasi layanan pendidikan	Pengembangan layanan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang merata di seluruh unit Pendidikan
			Penyediaan sarana dan prasarana Pendikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
			Pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan, pendidikan karakter, dan kearifan lokal di tingkat pendidikan
			Penguatan kapasitas sumberdaya dan manajemen Pendidikan
			Pemberian beasiswa dan bantuan Pendidikan
			Inovasi layanan pendidikan berbasis teknologi informatika

	Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal	Penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal, seni budaya, dan nilai tradisi berbasis masyarakat	Penguatan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan seni budaya, kearifan lokal dan nilai budaya tradisi di masyarakat sebagai potensi daerah
			Sinergitas seni budaya di kurikulum pendidikan dalam rangka keberlanjutan daya dukung potensi daerah
			Faslitasi kegiatan seni budaya dan nilai tradisi masyarakat sampai dengan tingkat desa
			Peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan berbasis seni budaya dan tradisi local
			Pembangunan sarana event seni budaya di tiap kecamatan
			Penyelenggaraan event seni budaya berskala nasional dan internasional
			Promosi potensi seni budaya lokal berbasis masyarakat

Misi 2: Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang professional			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat	Meningkatnya akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas dan Layanan kesehatan yang bermutu merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat	Peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan serta pemeliharaan kesehatan lingkungan	Meningkatkan pembinaan pola hidup sehat masyarakat
			Memperbaiki status gizi masyarakat
			Mengendalikan penyakit menular langsung dan penyakit bersumber binatang serta penyehatan lingkungan
			Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kepesertaan jaminan kesehatan
			Penerapan pola hidup sehat bagi keluarga
			Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi
		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan serta pengawasan obat dan makanan

			Memperluas cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin
			Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
			Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan lansia
			Meningkatkan manajemen dan SDM kesehatan
			Mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas serta terjangkau
			Meningkatkan kompetensi dan ketersediaaan SDM bidang kesehatan
			Penataan Manajemen RSUD
			Peningkatan promosi kesehatan dalam menghadapi kondisi pandemi.
			Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan sampai dengan desa
			Penambahan layanan Jamkesda

Misi 3: Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Meningkatkan pemerataan pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah	Memantapkan penyediaaan infrastuktur konektivitas antar wilayah guna menunjang produktivitas antar wilayah	Pembangunan dan pemeliharaan serta peningkatan daya dukung dan kualitas Jalan dan Jembatan yang menghubungkan kawasan strategis, sentra produksi dan pemasaran
			Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas serta sarana irigasi, pengairan dan sarana produksi lainnya di wilayah wilayah sentra produksi pertanian
			Pengembangan dan pemeliharaan sumber daya air baku dan air bersih untuk mendukung kebutuhan masyarakat
			Penguatan sistem sanitasi lingkungan wilayah
			Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman
			Penataan kawasan guna mendukung harmonisasi dan keberlanjuan wilayah

			Pengembangan peta digital ruang wilayah dalam mendukung kebijakan SATU DATA
			Penyusunan rencana, menyediakan lahan serta membangun prasarana dan sarana Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang
		Meningkatkan Penataan perumahan dan kawasan Pemukiman yang sehat dan berkelanjutan	Pembangunan Rumah Layak Huni
			Penataan kawasan perumahan dan pemukiman
			Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan pemukiman
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan peumahan dan pemukiman
			Penataan kawasan kumuh perkotaan
		Memantapkan sistem transporasi antar wilayah guna peningkatan mobiitas orang dan barang antar wilayah	Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan
			Penguatan implementasi Rencana Induk Jaringan LLAJ
			Peningkatan sarana dan prasarana pendukung LLAJ

			Peningkatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermoto
			Peningkatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
			Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas perhubungan serta ketersediaan, kualitas, manajemen angkutan umum
			Meningkatkan ketersediaan, kualitas, manajemen angkutan Laut
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam	Peningkatan tatakelola lingkungan hidup berbasis masyarakat	Pengembangan aplikasi pemantauan kondisi area pembuangan sampah dan limbah (kerjasama dengan kominfo)
			Pengawasan lingkungan sampai dengan tingkat kecamatan

			Peningkatan pemanfaatan ruang-ruang hijau di gedung pemerintahan dan sekolah
			Pengembangan kelompok atau komunitas berbasis desa atau kecamatan
			Peningkatan hasil olahan limbah bernilai ekonomi kerjasama dengan ekonomi kreatif
			Memelihara, Merehabilitasi dan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Fasiltas Persampahan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan persampahan di perkotaan
			Meningkatkan perlindungan, konservasi, rehabitasi dan pemulihan SDA LH
			Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi SDA LH dan sarana pengelolaan lingkungan hidup
			Meningkatkan penataan dan kulitas pemeliharaan ruang terbuka hijau

Misi 4: Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa	Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas	Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertanian	Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan
			Pengembangan kawasan pertanian organic
			Optimalisasi lahan pertanian marginal dan pekarangan
			Pengembangan komoditas unggulan pertanian
			Pengembangan komoditas unggulan peternakan
			Penguatan gerakan pertanian organik, sertifikasi produk, dan kerjasama pemasaran Organik
			Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha pertanian (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, teknologi dan sarana produksi, pemasaran hasil pertanian)
		Peningkatan produksi dan nilai tambah produk perikanan	Peningkatan produksi perikanan tangkap
			Pengembangan produksi dan nilai tambah perikanan budidaya
			Pengembangan olahan dan pemasaran produk perikanan

			Peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
			Peingkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha perikanan (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, teknologi dan sarana produksi, pemasaran hasil perikanan)
	Meningkatnya kapasitas KUMKM yang sinergi dengan dunia usaha perdagangan dan industri	Peningkatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menegah dan Koperasi	Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi UKM dan Koperasi
			Pembinaan dan pengembangan usaha bagi wirusahawan baru
			Peningkatan Akses pasar UMKM dan koperasi ke daerah daerah yang potensial
			Fasilitasi Penerapan teknologi tepat guna
			Fasilitasi Kemitraan Usaha dengan perusahaan besar dan stakeholder potensial lainnya
		Meningkatnya kelancaran distribusi arus barang dan jasa	Pengembangan sarana dan prasarana serta fasilitas perdagangan yang semakin tersebar dan merata
			Peningkatan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di di seluruh wilayah

		secara aman dan terkendali	Pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar
			Peningkatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
			Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
			Peningkatan fasilitasi kerjasama perdagangan dan perlindungan konsumen
		Menumbuhkan sektor industri kecil dan menengah berbasis komoditas unggulan daerah	Roadmap pengembangan potensi sektor Industri
			Fasiltasi Kemitraan Usaha Industri Kecil dengan berbagai pihak potensial lainnya
			Pembinaan dan Pelatihan bagi pelaku industri kecil berbasis komoditas masyarakat
			Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha IKM (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, teknologi dan sarana produksi, pemasaran hasil UKM)
	Meningkatnya investasi daerah	Penciptaan iklim investasi yang kondusif	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Bidang Penanaman Modal
			Memperbaharui dan mensosialisasikan kebijakan penanaman modal dan perijinan-perijinan serta meningkatkan

			promosi, kerjasama dan pelayanan investasi/penanaman modal
			Pengembangan Peta Digital Potensi Investasi
			Penigkatan Promosi Potensi Penanaman Modal
			Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan yang terintegrasi dengan SATU DATA Provinsi dan Nasional
			Pengembangan sinergitas BUMD dengan mitra strategis dalam upaya peningkatan PAD
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah	Peningkatan pariwisata lokal berbasis desa dan kawasan	Identifikasi obyek wisata di kawasan pariwisata budaya/religi, kawasan pariwisata alam dan kawasan-kawasan lain yang memiliki keunggulan karakter lokal belum dan sedang berkembang
			Pengembangan Desa Wisata dan Roadmap Pemulihan Destinasi Wisata
			Perbaikan sarana pendukung aksesibilitas interkonekvitias antar obyek wisata yang bisa ditempuh dalam trip sehari

			Pengembangan Desa Wisata pintar berbasis karakter lokal didukung promosi e-commerce
			Peningkatan pembinaan dan fasilitasi usaha pariwisata (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, produk, pemasaran pariwisata)
	Meningkatnya dayasaing dan produktivitas tenaga kerja	Mencetak tenaga kerja unggul siap pakai	Peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal yang unggul
			Fasilitasi pelatihan kerja sesuaidengan kebutuhan pasar dan mendukung ekonomi daerah
			Fasilitasi pemasaran dan bursa tenaga kerja
			Perlindungan ketenagakerjaan
			Fasilitasi sertifikasi tenaga kerja
			Penyediaan job training
			Standarisasi sarana prasarana balai latihan kerja
			Fasilitasi pendampingan dan konsultasi ketenagakerjaan
			Peningkatan lapangan dan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja
			Peningkatan Kerjasama Pengembangan, pengerahan dan fasilitasi penempatan pada wilayah Transmigrasi
	Meningkatnya kemandirian	Penguatan peran dan partisipasi	Optimalisasi peran lembaga desa dalam pembangunan

	masyarakat dan desa	masyarakat dan desa dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi lokal	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi desa
			Penguatan kapasitas pemerintahan desa
			Pengembangan BUMDes sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa
			Fasilitasi penyediaan sarana prasarana, akses, dan aktivitas daya dukung perekonomian desa
			Sinergitas program pemerintah dengan desa
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan diversifikasi dan pengolahan pangan	Pengembangan lumbung pangan desa
			Peningkatan distribusi pangan
			Peningkatan ketersediaan pangan
			Pengembangan olahan pangan berbasis sumberdaya lokal
			Peningkatan keamanan pangan
	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial serta pengendalian penduduk	Pengurangan beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan	Mengembangkan keanekaragaman produk pangan
		Melakukan Pemberdayaan dalam Rangka Produktifitas Kelompok Miskin dan Rentan	Pengembangan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan
			Memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil
		Penanganan dan Penguatan serta Pemberdayaan	Pemberian bantuan bagi masyarakat miskin dan rentan serta terdampak krisis (contoh pandemi)

		Ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS)	Pemberdayaan keluarga miskin melalui pelatihan life skill dan economic skill
			Pengembangan program usaha bersama berbasis keluarga
			Penguatan Penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial
			Penguatan Penanganan Korban Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana
		Pengarusutamaan gender dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak	Pemberdayaan perempuan di setiap kegiatan pembangunan
			Pelindungan perempuan dan anak dari kasus kekerasan
			Penyediaan pusat pendampingan dan konsultasi bagi perembuan dan anak
		Penguatan Program Keluarga Berencana dan pengendalian penduduk	Penguatan dan Penyebarluasan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana
			Fasilitasi pendampingan tenaga penyuluh KB di desa
			Faslitasi alat dan obat kontrasepsi Keluarga Berencana (KB)
			Penyediaan layanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan konseling
			Peningkatan pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB

Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Percepatan penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Evaluasi terhadap peta jalan reformasi birokrasi
			Perumusan kebijakan percepatan reformasi birokrasi
			Peningkatan koordinasi kelembagaan antar eksekutif dan legislative
			Penguatan tugas-tugas kewilayahan
			Pendelegasian kewenangan untuk mencapai birokrasi yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan
			Penataan dan penguatan organisasi
			Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta kelembagaan pemerintahan daerah
		Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan	Penetapan IKU Pemerintah Daerah berdasarkan target-target RPJMD
			Penetapan IKU OPD berdasarkan target-target Renstra

		Indikator Kinerja Utama	Pelaksanaan program kegiatan berdasarkan rencana kegiatan tahunan
			Pengendalian pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kegiatan tahunan
			Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kegiatan tahunan
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam Lingkup Pemerintah Daerah	Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja dan keuangan
			Menata kelembagaan dan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
			peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengawas internal pemerintah
			Penyusunan kebijakan operasional dan teknis pengawasan tahunan
	Meningkatnya Pendapatan asli daerah	Optimalisasi pendapatan daerah dan penguatan	Peningkatan Pendapatan dan Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel

		pengelolaan keuangan daerah	
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi	Penguatan system perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan penelitian pengembangan daerah	Penguatan system Perencanaan Pembangunan Daerah yang komprehensif dan integratif, didukung oleh kapasitas perencana yang handal serta data dan informasi yang tepat dan terarah
			Optimalisasi kegiatan koordinasi dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
			Peningkatan kreasi dan inovasi daerah
	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Penguatan manajemen pengelolaan kepegawaian	Pemberian reward and punishment di jajaran birokrasi
			Peningkatan kualitas SDM, disiplin kerja dan kesejahteraan aparatur
	Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI	Digitalisasi Informasi Publik	Penyiapan roadmap dan masterplan digitalisasi informasi public
			Pengembangan, pengintegrasian, dan pemanfaatan interoperabilitas sistem informasi dalam satu big data
			Penyediaan infrastruktur pendukung layanan teknologi informatika

			Penguatan jejaring komunikasi informasi dan persandian daerah
			Penguatan intensitas komunikasi melalui media komunikasi publik yang efektif
			Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Informasi dan Kerjasama Pelayanan Informasi dengan Media Massa
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI	Digitalisasi Pelayanan Publik	Penyiapan roadmap dan masterplan digitalisasi layanan publik
			Pengembangan e-government
			Penrapan Tata Naskah Dinas Elektronik
			Pengembangan ekonomi digital (e-commerce)
			Penyediaan infrastruktur pendukung layanan teknologi informatika
			Pengembangan aplikasi pendukung layanan publik, informasi, promosi potensi daerah, pariwisata, dan aktivitas penunjang masyarakat lainnya
			Peningkatan kualitas dan kuantitas inovasi pelayanan public

			Inovasi pelayanan publik jemput bola
			Penguatan jejaring komunikasi informasi dan persandian daerah
			Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Berbasis Digital
			Peningkatan tertib administrasi arsip dan pelayanan publik
			Peningkatan Kapasitas Sistem, SDM Aparatur dan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Peningkatan Kapasitas Sistem dan Penataan Management Layanan Perizinan
			Peningkatan Kapasitas Sistem dan Penataan Management Pelayanan Dasar bagi Pemerintah Daerah
			Peningkatan Kapasitas Sistem dan Penataan Management Layanan Pajak dan Retribusi Daerah
			Peningkatan Kapasitas Sistem dan Penataan Management Layanan Ketenagakerjaan

Misi 6: Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama ditengah-tengah masyarakat	Meningkatnya toleransi kehidupan umat beragama	Penguatan dan kampanye nilai agama ditengah-tengah masyarakat	Penerapan nilai-nilai agama yang sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut
			Penguatan peran serta tokoh agama dalam menjalankan kehidupan beragama di masyarakat

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Adapun Program Prioritas Daerah yang disusun dalam kerangka RPJMD Kabupaten Serang tahun 2021-2026 sebagai jawaban terhadap isu permasalahan strategis, juga menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Melalui program pembangunan daerah inilah dapat dilihat seperti apa nantinya visi dan misi daerah akan dijabarkan dalam program beserta pendanaannya secara berkelanjutan di tiap tahunnya. Adapun program prioritas dimaksud sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
3. Pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang yang sesuai dengan kapasitas anggaran daerah
4. Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program yang salah satunya melakukan penurunan angka pengangguran
5. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis potensi lokal yang lebih mengutamakan sektor Pariwisata, Pertanian dan UMKM serta potensi - potensi yang berhubungan dengan pengembangan industri kreatif yang berada ditengah - tengah masyarakat
7. Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat
8. Pemerataan pembangunan antar wilayah (kecamatan)
9. Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih difocuskan kepada Penanganan pencemaran lingkungan dan limbah

10. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang lebih difokuskan kepada pembangunan rumah tidak layak huni, sanitasi lingkungan dan pengelolaan persampahan secara menyeluruh
11. Peningkatan kemampuan fiskal daerah untuk pendanaan pembangunan
12. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai

Selanjutnya selain Program prioritas pembangunan daerah yang telah dipaparkan diatas maka terdapat pula program - program yang menjadi kebutuhan dan penunjang dalam penyelenggaran pemerintahan daerah sebagai penjabaran dari urusan – urusan yang menjadi kewenangan daerah dapat diampaikan sebagai berikut:

Tabel 6.2. Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Serang Tahun 2021-2026

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Misi 1 : **Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat**																
				Tujuan 1.1 :	**Angka Rata-Rata Lama Sekolah**	**7,5**	**7,64**		**7,79**		**7,93**		**8,07**		**8,22**		**8,36**		**8,36**		
				Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata serta Pelestarian tradisi seni budaya lokal	**Angka Rata-Rata Harapan Sekolah**	**12,57**	**12,75**		**12,94**		**13,12**		**13,30**		**13,48**		**13,67**		**13,67**		

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
				Sasaran 1.1.1 :																	
				Meningkatnya akses, kualitas dan management pelayanan bidang pendidikan	**Angka Pendidikan Dasar yang Ditamatkan**	**47,52**	**48,10**		**48,72**		**49,31**		**49,91**		**50,51**		**51,11**		**51,11**		DISDIKBUD
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD	100,00	100,00	21.608.877.380	100	21.608.877.380	100	22.041.054.928	100	22.481.876.026	100	22.931.513.547	100	23.390.143.818	100	134.062.343.079	DISDIKBUD
					APM SMP	99,45	100,00	20.836.970.800	100	20.836.970.800	100	21.253.710.216	100	21.678.784.420	100	22.112.360.109	100	22.554.607.311	100	129.273.403.656	DISDIKBUD
					APK PAUD	85,28	100,00	22.282.090.000	87	22.282.090.000	88,5	22.727.731.800	90	23.182.286.436	91,5	23.645.932.165	93	24.118.850.808	93	138.238.981.209	DISDIKBUD
					Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/ esetaraan	100 ,00	100,00	42.066.759.900	100	42.066.759.900	100	42.066.759.900	100	42.066.759.900	100	42.908.095.098	100	42.908.095.098	100	254.083.229.796	DISDIKBUD
					Capaian SPM Bidang Pendidikan	83,05	83,10		83,15		83,20		83,25		83,30		83,35		83,35	-	DISDIKBUD
1	01	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase penerapan muatan lokal di sekolah	100	100	100.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	1.850.000.000	DISDIKBUD
1	01	04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan terhadap rombel	78,21	78,21	30.039.815.000	81,21	30.039.815.000	84,21	31.541.805.750	87,21	33.118.896.038	90,21	34.774.840.839	93,21	36.513.582.881	93,21	196.028.755.508	DISDIKBUD

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	01	05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase izin pendidikan dasar. PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat	100	100	-	100	112.000.000	100	112.000.000	100	112.000.000	100	112.000.000	100	112.000.000	100	560.000.000	DISDIKBUD
					Tingkat Warisan Budaya yang Dilestarikan	0	41.38 %		48.28 %		68.62 %		79.31 %		93.10 %		100%		100%		
				Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal serta daya dukung generasi muda bagi daerah	**Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional**	0	41.38 %		48.28 %		68.62 %		79.31 %		93.10 %		100%		100%		DISDIKBUD
2	22	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan kelompok budaya yang dibina	30,00	30,00	671.415.950	35,00	1.000.000.000	42,50	1.530.000.000	57,50	1.680.000.000	67,50	1.680.000.000	72,50	1.680.000.000	72,50	8.241.415.950	DISDIKBUD
2	22	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan kelompok kesenian yangdibina	30,00	30,00	157.574.000	35,00	1.000.000.000	42,50	1.530.000.000	57,50	1.680.000.000	67,50	1.680.000.000	72,50	1.680.000.000	72,50	7.727.574.000	DISDIKBUD
2	22	04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah di dunia pendidikan. event. dan organisasi kemasyarakatan	0,00	0,00		9,36	150.000.000	12,49	150.000.000	18,73	150.000.000	28,09	150.000.000	31,32	150.000.000	31,32	750.000.000	DISDIKBUD

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
2	22	05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	25,64	25,64	171.010.000	38,46	300.000.000	51,28	350.000.000	64,10	400.000.000	84,62	450.000.000	100,00	500.000.000	100,00	2.171.010.000	DISDIKBUD
				Misi 2 : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional																
				Tujuan 2.1 : Meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat	**Angka Harapan Hidup**	**64,64**	**64,85**		**65,06**		**65,26**		**65,47**		**65,68**		**65,89**		**65,89**		
				Sasaran 2.1.1: Meningkatnya akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas dan Layanan kesehatan yang bermutu merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat	**Angka kematian ibu**	**204 Per 100.000 KH**	**202**		**200**		**194**		**183**		**182**		**180**		**183**		**Dinkes**
					Angka kematian bayi	**8,29 Per 1.000 KH**	**8,27**		**8,25**		**8,23**		**8,21**		**8,19**		**8,17**		**8**		**Dinkes**

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
					Angka Prevalensi stunting	**18,40%**	**21,2**		**18,4**		**16**		**14**		**13,5**		**13**		**14**		**Dinkes**
					Persentase fasyankes yang terstandar dan terakreditasi	**25%**	**25%**		**30%**		**35%**		**40%**		**45%**		**50%**		**50%**		Dinkes
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase Pemenuhan 12 indikator SPM Kesehatan	100%	100	69.031.599.895	100	41.662.838.500	100	44.967.444.000	100	38.791.953.200	100	59.104.507.325	100	62.518.847.155	100	316.077.190.075	Dinkes
					Prosentase kepesertaan jaminan kesehatan	74%	74	21.696.086.920	85	22.725.000.000	90	21.696.086.920	90	22.725.000.000	95	22.725.000.000	98	22.725.000.000	98	134.292.173.840	Dinkes
					Prosentase Desa Stop BABS	15 %	15	13.020.000	20	400.000.000	25	500.000.000	35	500.000.000	40	661.000.000	50	760.000.000	50	2.834.020.000	Dinkes
1	02	04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Prosentase PKM dengan ketersediaan obat esensial, vaksin, alkes	100%	100%	89.370.999	100	36.000.000	100	39.000.000	100	42.000.000	100	45.000.000	100	48.000.000	100	299.370.999	Dinkes
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu aktif	55 %	55	7.623.783.500	55	7.420.830.000	60	8.627.921.500	65	8.113.783.500	70	9.108.171.500	75	8.980.209.001	75	49.874.699.001	Dinkes
					Prosentase Kecamatan menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	0 %	60	30.000.000	60	700.000.000	70	900.000.000	80	960.000.000	90	1.190.250.000	100	1.368.437.000	100	5.148.687.000	Dinkes

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 %	100	1.054.350.000	100	1.213.370.000	100	1.344.009.000	100	1.489.571.000	100	1.585.618.800	100	1.834.510.000	100	8.521.428.800	Dinkes
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Penerimaan Pendapatan Puskesmas	100	100	64.166.201.482	100	65.770.356.519	100	67.374.511.556	100	68.978.666.593	100	70.582.821.630	100	72.186.976.667	10%	409.059.534.447	Dinkes
					Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit	**80%**	**80%**		**80%**		**80%**		**80%**		**80%**		**80%**			**-**	RS.DR DJATP RAWI RANE GRA
	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	80,07%	90%	19.995.000	90%	150.000.000	90%	150.000.000	90%	150.000.000	90%	150.000.000	90%	150.000.000	90%	769.995.000	RS.DR DJATP RAWI RANE GRA
					Tingkat sarana prasarana RS dalam dalam kondisi baik	66%	66%	655.649.952	72%	2.889.000.000	76%	3.000.000.000	83%	3.200.000.000	86%	3.300.000.000	90%	3.300.000.000	90%	16.344.649.952	RS.DR DJATP RAWI RANE GRA
1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase SDM yang mengikuti Diklat sesuai standar kompetensi	20%	25%	-	25%	150.000.000	25%	250.000.000	25%	250.000.000	25%	250.000.000	25%	250.000.000	100%	1.150.000.000	RS.DR DJATP RAWI RANE GRA
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Tingkat Penerimaan Pendapatan RS	100%	100%	172.010.571.597	100%	176.372.551.137	100%	180.781.864.915	100%	185.301.411.538	100%	189.933.946.827	100%	194.682.295.497	100%	1.099.082.641.511	RS.DR DJATP RAWI

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
				DAERAH KABUPATEN/KOTA																	RANEGRA
				Misi 3 : Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah. Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas																	
				Tujuan 3.1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah yang berwawasan lingkungan	**Indeks Kepuasaan Layanan Infrastruktur**	**48%**	**50%**		**52,5%**		**55%**		**57,5%**		**60%**		**62,5%**		**62,5%**			
				Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah	**Cakupan Aksesibilitas Antar Wilayah**	**96,10%**	**100,00 %**		**100,00 %**		**100,00 %**		**100,00 %**		**100,00 %**		**100,00 %**		**100,00 %**		**DISHUB**
2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	13%	13%	30.272.932.511	13%	33.115.001.066	13%	33.115.001.066	14%	32.115.001.066	14%	38.326.924.672	14%	38.326.924.672	14%	205.271.785.053	**DISHUB**

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
2	15	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Angkutan Laut	0	0%	1.181.018.750	25%	2.156.525.000	25%	2.156.525.000	25%	3.000.000.000	25%	3.100.000.000	25%	3.200.000.000	0,25	14.794.068.750	DISHUB
2	15	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang memiliki izin	0	0,00%	0	20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	110.000.000	20%	110.000.000	20%	100.000.000	0,2	520.000.000	DISHUB
2	15	05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Prasarana Perkeretaapian Umum yang memiliki izin	0%	0%	0	50%	600.000.000	50%	600.000.000	50%	600.000.000	50%	600.000.000	50%	600.000.000	50%	3.000.000.000	DISHUB
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				17.124.999.910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKPTB
					Persentase Desa yang telah mendapatkan pelayanan air minum	**85,89**	**87,12**		**87,73**		**88,34**		**88,96**		**89,57**		**90,18**		**90,18**		DPKPTB
1	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga mendapatkan akses air melalui SPAM	88,58	89,01	19.140.782.661	89,53	22.000.000.000	89,95	22.000.000.000	90,35	22.000.000.000	90,73	22.000.000.000	91,08	30.840.000.000	91,08	137.980.782.661	DPKPTB

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
					Persentase Desa yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	**70,25**	**71,47**		**72,09**		**72,7**		**73,31**	**90,73**	**73,93**		**74,54**		**74,54**		**DPKP TB**
1	03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga mendapatkan akses pengelolaan air limbah domestik	65,92	67,01	8.958.787.230	68,62	6.516.298.152	69,9	10.097.557.782	71,07	10.097.557.782	72,18	15.190.243.207	73,27	17.240.931.848	73,27	68.101.376.001	**DPKP TB**
					Persentase jumlah bangunan gedung daerah dengan kondisi baik	**50**	**55**		**60**		**65**		**70**		**75**		**80**		**80**		**DPKP TB**
1	**03**	**07**		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Prasarana Permukiman pada kawasan strategis yang tertangani			7.194.045.900	20	2.000.000.000	30	2.000.000.000	40	2.000.000.000	50	2.000.000.000	60	2.000.000.000	60	10.000.000.000	**DPKP TB**
1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang memiliki IMB	15	17	32.932.617.625	19	47.000.000.000	21	50.000.000.000	23	50.000.000.000	25	50.000.000.000	27	50.000.000.000	27	279.932.617.625	**DPKP TB**
1	03	09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang teratur	15	17	12.035.387.475	19	25.790.000.000	21	25.790.000.000	23	20.790.000.000	25	30.950.868.750	27	34.164.412.188	27	149.520.668.413	**DPKP TB**

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
					Persentase kawasan kumuh	**0,2**	**0,2**		**0,18**		**0,16**		**0,14**		**0,12**		**0,1**		**0,1**		**DPKPTB**
1	04	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh	10	10	408.392.200	10	300.000.000	15	300.000.000	20	300.000.000	25	300.000.000	30	300.000.000	30	1.800.000.000	**DPKPTB**
1	04	04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan perbaikan rumah di kawasan kumuh	6,5	6,82	15.830.460.799	18,18	19.500.000.000	22,22	19.500.000.000	28,57	11.000.000.000	40	11.000.000.000	66,67	7.500.000.000	66,67	82.330.460.799	**DPKPTB**
					Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi	**35**	**35**		**41,66**		**48,33**		**55**		**61,66**		**68,33**		**68,33**		**DPUPR**
1	03	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase jumlah tenaga terampil konstruksi yang telah bersertifikat (SKT) di Kabupaten Serang	16,7	16,7	1.552.965.040	25	2.116.405.040	33,33	2.116.405.040	41,7	2.116.405.040	50	2.116.405.040	58,3	2.116.405.040	58,3	12.134.990.240	**DPUPR**
					Persentase Drainase Kota dengan kondisi baik	**50**	**51,85**		**52,5**		**55,56**		**58,08**		**60,96**		**63,89**		**63,89**		**DPUPR**
1	03	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan infrastruktur drainase desa kewenangan kabupaten		20,24	6.908.832.250	29,12	6.931.082.250	36,11	6.931.082.250	51,53	6.931.082.250	56,13	6.931.082.250	65,64	8.000.000.000	9,43	42.633.161.250	DPUPR

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
					Proporsi Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	**84**	**96**		**62,5**		**64,9**		**67,3**		**69,7**		**72,1**		**72,1**		**DPUPR**
1	03	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Cakupan infrastruktur jalan kabupaten	100	100	336.486.752.315	100	156.274.492.650	100	163.487.299.697	100	158.339.822.493	100	165.940.641.557	100	168.471.612.648	100	1.149.000.621.360	**DPUPR**
					Tingkat Pemanfaatan Informasi Tata Ruang dalam pembangunan	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**DPUPR**
1	03	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tingkat ketaatan tata ruang dengan rencana tata ruang wilayah	83	85	3.662.779.770	87,5	7.666.620.469	90	7.666.620.469	92,5	8.166.620.469	93	13.716.620.469	94	7.266.620.469	94	48.145.882.115	**DPUPR**
2	10	02		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	100	100	0	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	1.000.000.000	DPUPR
2	10	05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Prosentase Penyelesaian ganti kerugian tanah	100	100	0	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.500.000.000	DPUPR
2	10	10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Prosentase Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Garapan	100	100	100.000.000	100	1.596.620.469	100	1.596.620.469	100	2.096.620.469	100	2.096.620.469	100	2.296.620.469	100	9.783.102.345	DPUPR

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
					Indikator Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	**5**	**5**		**10**		**20**		**25**		**40**		**100**		**100**		**DPUPR**
					Persentase jaringan irigasi dalam keadaan baik	99.99%	99.99 %	13.840.788.500	13.80 %	20.624.867.350	18.18 %	20.897.354.085	23.30 %	23.472.089.494	28.43 %	25.314.298.443	34.83 %	27.340.728.287	100%		**DPUPR**
					Cakupan ketersediaan air baku	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**DPUPR**
1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Infrastruktur Air Baku dalam Kondisi Baik	39	39	27.317.680.048	10,2	27.317.680.048	18,75	27.317.680.048	30,11	27.392.938.335	41,47	29.235.147.284	55	31.261.577.128	55	169.842.702.891	**DPUPR**
				Sasaran 3.1.2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam	**Indeks Kualitas Air**	**49.25**	**49,75**		**50,25**		**50,75**		**51,25**		**51,75**		**52,25**		**52,25**		**DLH**
					Indeks Kualitas udara	**82.25**	**82,5**		**82,75**		**83**		**83,25**		**83,5**		**83,75**		**83,75**		**DLH**
2	11	02		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tingkat ketersedian dokumen lingkungan hidup yang dibuat dan diproses	3 Dok	3 dok	62.920.000	3 dok	600.000.000	3 dok	600.000.000	3 dok	600.000.000	3 dok	1.000.000.000	3 dok	1.000.000.000		3.862.920.000	DLH

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
2	11	03		Program Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup	Tingkat ketersediaan informasi untuk penghitungan IKA. IKU. dan ITV/L	250 Sampel	250 Sampel	719.988.300	300 Sampel	1.750.807.200	300 Sampel	1.750.807.200	300 Sampel	1.750.807.200	300 Sampel	2.000.000.000	300 Sampel	2.000.000.000		9.972.409.900	DLH
2	11	05		Program Pengendalian bahan Berbahaya (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Prosentase penaatan pengelolaan B3 dan limbah B3 pada kegiatan/usaha	100%	100%	89.878.000	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	500.000.000	100%	600.000.000		2.339.878.000	DLH
2	11	06		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Prosentase penaatan pengelolaan lingkungan kegiatan/usaha	100%	100%	252.396.100	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000		4.002.396.100	DLH
2	11	08		Program Peningkatan Pendidikan pelatihan dan penyuluhan Lingkungaan Hidup untuk masyarakat	Tingkat peran serta lembaga kemasyarakatan / pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	189.136.000	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	300.000.000	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	350.000.000	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	375.000.000	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	400.000.000	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	500.000.000		2.114.136.000	DLH
2	11	09		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	tingkat kepedulian masyakarat atau kelompok/lembaga masyarakat/ lembaga pendidikan/	4 Kelompok	4 Kelompok	39.545.000	5 Kelompok	500.000.000	6 Kelompok	500.000.000	7 Kelompok	500.000.000	8 Kelompok	500.000.000	9 Kelompok	500.000.000		2.537.625.000	DLH

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
					dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup																
2	11	10		Program Penanganan pengaduan Lingkungsan Hidup	Prosentase pengaduan lingkungan hidup kewenangan kabupaten yang tertangani	100%	100%	189.009.800	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.659.009.800	DLH
					Indeks tutupan Vegetasi	**69,98**	**69,985**		**69.99**		**69.995**		**70**		**70.005**		**70.01**		**70.01**		**DLH**
2	11	04		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Tingkat ketersediaan informasi untuk penghitungan ITV/L	2 Ha	2 Ha	255.034.700	2 Ha	600.000.000	2 Ha	600.000.000	2 Ha	600.000.000	2 Ha	750.000.000	2 Ha	1.000.000.000	10 ha	3.805.034.700	DLH
					Persentase Penanganan Sampah	**14,53**	**15,03**		**17,44**		**19,85**		**22,27**		**24,68**		**27,09**		**27,09**		**DLH**
2	11	11		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah terangkut	11,53%	11,99 %	10.349.978.150	14,39 %	15.820.000.000	16,78 %	15.820.000.000	19,18 %	10.820.000.000	21,58 %	20.820.000.000	23,98 %	20.820.000.000	23,98 %	94.249.978.150	DLH
					Persentase sampah terkurangi	3%	3,02%		3,04%		3,05%		3,07%		3,08%		3,10%		3,10%		DLH
					Persentase Rumah Layak Huni	**89,26%**	**89,26 %**		**89,88 %**		**90,49 %**		**91,10 %**		**91,72 %**		**92,33 %**		**92,33 %**		**DPKP TB**
1	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi	100	100		100	10.200.000.000	100	10.200.000.000	100	9.200.000.000	100	10.200.000.000	100	12.613.670.000	0	59.607.715.900	**DPKP TB**

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
					rumah layak huni bagi korban bencana dan Relokasi Program Kabupaten/ Kota																
					Persentase Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang memiliki izin		100		100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	5.000.000.000	DPKP TB
1	04	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	10	10	1.041.243.699	10	4.100.000.000	15	4.100.000.000	20	4.100.000.000	25	6.100.000.000	30	8.829.303.750	30	28.270.547.449	DPKP TB
1	04	06		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI. KUALIFIKASI. KLASIFIKASI. DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah dan PSU Tingkat Kemampuan Kecil yang memiliki sertifikasi dan registrasi	10%	10%	0	10	300.000.000	15	450.000.000	20	600.000.000	25	750.000.000	30	900.000.000	30%	3.000.000.000	DPKP TB
				Misi 4 : Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat. untuk optimalisasi penyerapan																

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
				tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan																	
				Tujuan 4.1 :	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**-1,96**	**3,41**		**2,97**		**2,42**		**1,78**		**2,72**		**2,56**		**2,56**		
				Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa	**Inflasi**	**1,23**	**1,5**		**1,23**		**1,5**		**1,59**		**1,65**		**1,93**		**1,93**		
					Tingkat penganggur an Terbuka	**12,22**	**12**		**11,89**		**11,55**		**11,22**		**11**		**10,88**				
				Sasaran 4.1.1 : **Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas**	**Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian**	**4,02**	**3,07**		**2,82**		**2,84**		**3,19**		**2,98**		**2,96**		**2,96**		**DISPERTAN**
3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian	50	55	562.324.500	60	1.000.000.000	65	1.000.000.000	70	1.000.000.000	75	1.000.000.000	80	1.000.000.000	80	5.562.324.500	DISPERTAN
					Pertumbuhan Sumber Daya Genetik (SDG)	0,08	0,13	0	0,16	500.000.000	0,18	500.000.000	0,19	500.000.000	0,21	500.000.000	0,23	500.000.000	0,23	2.500.000.000	DISPERTAN
					Prosentase Benih / Bibit bersertifikat	5	6	0	7	1.000.000.000	9	1.000.000.000	11	1.000.000.000	12	1.000.000.000	14	1.000.000.000	14	5.000.000.000	DISPERTAN
3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Prosentase Prasarana pertanian dengan	50	55	16.282.374.000	60	10.000.000.000	65	7.500.000.000	67	7.500.000.000	70	10.000.000.000	75	11.000.000.000	75	62.282.374.000	DISPERTAN

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
				PRASARANA PERTANIAN	kondisi baik (JUT. embung. RPH. dll)																
3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINERT	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	10	13	124.732.504	15	500.000.000	17	500.000.000	20	500.000.000	23	750.000.000	25	750.000.000	25	3.124.732.504	DISPERTAN
3	27	05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian	35	40	193.030.700	45	1.000.000.000	47	1.000.000.000	50	1.000.000.000	55	1.000.000.000	60	1.000.000.000	60	5.193.030.700	DISPERTAN
3	27	06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase perizinan usaha pertanian	14	15	0	17	200.000.000	20	300.000.000	23	300.000.000	25	300.000.000	27	350.000.000	27	1.450.000.000	DISPERTAN
					Prosentase perizinan usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan. Fasilitas Pemeliharaan Hewan. Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan. Rumah Potong Hewan	15	17	0	19	350.000.000	20	450.000.000	22	450.000.000	24	450.000.000	25	500.000.000	25	2.200.000.000	DISPERTAN
3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok tani	45	50	2.330.663.500	53	2.200.000.000	55	2.200.000.000	57	2.200.000.000	60	2.500.000.000	63	2.700.000.000	63	14.130.663.500	DISPERTAN

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
					Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	**-2,16**	**2,80**		**1,99**		**1,48**		**1,61**		**1,97**		**1,76**		**1,76**		**DKPP**
3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Capaian produksi perikanan tangkap	79,15	81,02	22.395.400	82,4	130.000.000	83,6	136.500.000	84,1	136.500.000	84,7	150.492.000	85,8	158.000.000	85,8	733.887.400	**DKPP**
					Cakupan bantuan sarana penangkapan ikan	7,51%	7,51%	562.720.000	7,51%	540.800.000	7,51%	567.840.000	7,51%	567.840.000	7,51%	626.044.000	7,51%	657.346.000	7,51%	3.522.590.000	**DKPP**
					Cakupan bina kelompok nelayan	3,95	3,95	27.780.000	15,81	1.715.000.000	17,79	1.715.000.000	19,76	1.715.000.000	21,74	1.985.330.000	23,72	208.500.000	23,72	7.366.610.000	**DKPP**
					Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	76,92	76,92	303.495.000	76,92	1.834.025.000	76,92	1.834.025.000	76,92	1.834.025.000	76,92	2.123.114.000	76,92	2.229.200.000	76,92	10.157.884.000	**DKPP**
					Persentase tanda daftar kapal perikanan < 10 GT	6,57	6,57	19.824.400	6,57	50.000.000	6,57	52.500.000	6,57	55.125.000	6,57	57.882.000	6,57	60.775.000	6,57	296.106.400	**DKPP**
3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase izin usaha perikanan budidaya	100%	100	0	100	60.000.000	100	63.000.000	100	66.150.000	100	69.458.000	100	72.930.000	100	331.538.000	**DKPP**
					Cakupan pembinaan kelompok pembudidaya ikan kecil	5,71	5,71	13.380.000	7,14	598.300.000	7,14	628.215.000	7,14	628.215.000	7,14	692.607.000	7,14	727.238.000	7,14	3.287.955.000	**DKPP**
					Persentase tanda daftar pembudidaya ikan kecil	9,46%	18,91	12.300.000	28,37	125.000.000	37,83	131.250.000	47,28	137.813.000	56,74	144.704.000	66,19	151.940.000	56,74	703.007.000	**DKPP**
					Cakupan bantuan sarana	1,71%	4,57	520.250.000	7,71	3.800.000.000	10,57	3.800.000.000	13,43	3.800.000.000	16,29	3.800.000.000	19,14	3.800.000.000	19,14	19.520.250.000	**DKPP**

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
					perikanan budidaya																
					Capaian produksi perikanan budidaya	56,35	75,22	44.320.000	80,2	747.000.000	85,7	747.000.000	88,1	747.000.000	90,2	864.745.000	91	907.984.000	91	4.058.049.000	DKPP
					Capaian produksi garam	-	8,20%	0	22,2	900.000.000	36,2	900.000.000	50,2	900.000.000	64,2	900.000.000	78,2	1.093.950.000	78,2	4.693.950.000	DKPP
					Capaian produksi benih ikan	58,57	58,57	448.200.000	61,5	522.960.000	64,43	549.108.000	67,36	549.108.000	70,29	605.392.000	73,21	635.662.000	73,21	3.310.430.000	DKPP
					Cakupan Survailen hama dan penyakit ikan	100%	100%	215.126.700	100%	168.000.000	100%	176.400.000	100%	176.400.000	100%	194.481.000	100%	204.205.050	100%	1.134.612.750	DKPP
3	25	05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya di perairan umum daratan	-	80%	0	80%	98.790.000	80%	103.730.000	80%	103.730.000	80%	114.362.000	80%	120.080.000	80%	540.692.000	DKPP
3	25	06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase tanda daftar usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Skala Mikro dan Kecil	-	16	0	16	50.000.000	16	52.500.000	16	55.125.000	16	57.882.000	16	60.776.000	16	276.283.000	DKPP
					Cakupan pembinaan kelompok pengolahan dan pemasaran	-	20	0	20	100.526.000	20	105.553.000	20	105.553.000	20	116.372.000	20	122.190.000	20	550.194.000	DKPP

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
					hasil perikanan Skala Mikro dan Kecil																
					Capaian produksi pengolahan hasil usaha perikanan	-	94,59	0	94,59	25.635.000	94,59	26.917.000	94,59	26.917.000	94,59	29.676.000	94,59	31.160.000	94,59	140.305.000	**DKPP**
					Capaian angka Konsumsi Ikan daerah	37,21 kg/kapita/tahun	37,46	0	37,71	67.035.000	37,96	70.387.000	38,21	70.387.000	38,46	77.600.000	38,71	81.482.000	38,71	366.891.000	**DKPP**
					Cakupan bantuan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	-	0	0	0	617.680.000	16	617.680.000	16	617.680.000	16	715.000.000	16	750.800.000	16	3.318.840.000	**DKPP**
				Sasaran 4.1.2 : Meningkatnya kapasitas KUMKM yang sinergi dengan dunia usaha perdagangan dan industri	**Proporsi peningkatan SHU koperasi**	**29,00%**	**2%**		**2%**		**2%**		**2%**		**2%**		**2%**		**41%**		**DISKOPERINDAG**
2	17	02		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi yang dilayani	100%	100%	40.000.000	100%	145.000.000	100%	145.000.000	100%	145.000.000	100%	145.000.000	100%	145.000.000	100%	765.000.000	DISKOPERINDAG
2	17	03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Tingkat pengawasan Koperasi. Koperasi Simpan	0	0	0	6,11	47.930.000	6,11	47.930.000	6,11	47.930.000	6,11	47.930.000	6,11	47.930.000	30,55	239.650.000	DISKOPERINDAG

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
					Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi																
2	17	04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang sehat	16,67%	22,15 %	45.000.000	25,68 %	205.150.000	28,90 %	227.745.000	31,86 %	227.745.000	34,57 %	242.110.000	37,08 %	247.110.000	37,08 %	1.194.860.000	DISKOPERINDAG
2	17	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi terlatih	100	100	234.182.400	100	610.414.800	100	610.414.800	100	610.414.800	100	610.414.800	100	610.414.800	100	3.286.256.400	DISKOPERINDAG
2	17	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Partisipasi Koperasi Aktif	74,72%	75,33	0	76,18	1.055.405.000	76,97	1.055.405.000	77,72	1.055.405.000	78,42	1.055.405.000	79,07	1.055.405.000	79,07	5.277.025.000	DISKOPERINDAG
					Pertumbuhan Wirausaha Baru	**9,64**	**5**		**10**		**10**		**10**		**10**		**10**		**55**		DISKOPERINDAG
2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Partisipasi Usaha Mikro	3,31%	4	156.121.600	4	1.500.000.000	5	1.500.000.000	6	1.500.000.000	7	1.500.000.000	9	1.500.000.000	9	7.656.121.600	DISKOPERINDAG
2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang berkembang menjadi Usaha Kecil	15,16	0,01	530.000.000	0,01	3.150.000.000	0,01	3.150.000.000	0,01	3.150.000.000	0,01	3.150.000.000	0,01	3.150.000.000	0,05	16.280.000.000	DISKOPERINDAG
					Pertumbuhan PDRB sektor industri	**-4,28**	**3,99**		**3,58**		**3,22**		**2,28**		**3,27**		**3,09**		**3,09**		DISKOPERINDAG

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan industri baru	0,29%	1	73.113.426	1	445.000.000	1	350.000.000	1	305.000.000	1	310.000.000	1	315.000.000	5	1.798.113.426	DISKOPERINDAG
3	31	03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Prosentase perizinan usaha industri	100	100	21.750.000	100	43.500.000	100	56.000.000	100	56.000.000	100	56.000.000	100	56.000.000	100	289.250.000	DISKOPERINDAG
3	31	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan layanan sistem informasi industri nasional	98,82	98,82	0	98,83	120.000.000	98,84	120.000.000	98,85	120.000.000	98,86	120.000.000	98,87	120.000.000	98,87	600.000.000	DISKOPERINDAG
					Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	**-1,56**	**2,06**		**1,43**		**0,70**		**0,06**		**1,03**		**0,77**		**0,77**		DISKOPERINDAG
3	30	02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahan yang diterbitkan	95,14%	95	0	95	29.500.000	95	29.500.000	95	29.500.000	95	29.500.000	95	29.500.000	95	147.500.000	DISKOPERINDAG
3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Omzet Pedagang	2	2	968.136.730	2	1.739.000.000	2	1.739.000.000	2	1.754.000.000	2	2.000.000.000	2	2.100.000.000	10	10.300.136.730	DISKOPERINDAG
3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100	100	29.125.000	100	210.000.000	100	320.000.000	100	320.000.000	100	280.000.000	100	345.000.000	100	1.504.125.000	DISKOPERINDAG

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
3	30	05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor (U$ dalam juta dollar)	1000	500	60.000.000	600	1.000.000.000	700	850.000.000	800	850.000.000	900	850.000.000	1000	850.000.000	1000	4.460.000.000	DISKOPERINDAG
3	30	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Uji Metrologi Legal	0,9	0,9	190.000.000	1	800.000.000	1,5	850.000.000	2	400.000.000	2,5	450.000.000	3	450.000.000	3	3.140.000.000	DISKOPERINDAG
3	30	07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Kegiatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	0	0	0	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	4	600.000.000	DISKOPERINDAG
				Sasaran 4.1.3 :	**Pertumbuhan Nilai Investasi daerah**																DPMPTSP
				Meningkatnya investasi daerah	**PMA**	**-0,39%**	**3%**		**3%**		**3%**		**3%**		**3%**		**3%**		**3%**		
					PMDN	**46,28%**	**3%**		**3%**		**3%**		**3%**		**3%**		**3%**		**3%**		
2	18	02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	NIlai investasi	7.90 Trilyun	5.44 Trilyun	12.000.000	5.60 Trilyun	450.000.000	5.77 Trilyun	550.000.000	5.95 Trilyun	260.000.000	6.12 Trilyun	400.000.000	6.30 Trilyun	350.000.000	6.49 Trilyun	2.022.000.000	DPMPTSP
2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	100%	100%	97.360.000	100%	200.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	300.000.000	100%	1.547.360.000	DPMPTSP
2	18	05		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	100%	100%	76.050.000	100%	325.000.000	100%	350.000.000	100%	375.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	1.926.050.000	DPMPTSP

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
2	18	06		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	372.462.000	100%	350.000.000	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.372.462.000	DPMPTSP
2	18	04		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi	100%	100%	510.220.000	100%	500.000.000	100%	450.000.000	100%	500.000.000	100%	525.000.000	100%	600.000.000	100%	3.085.220.000	DPMPTSP
				Sasaran 4.1.4 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah	**Kontribusi PAD Pariwisata**	**16.059.553.821**	**17.000.000.000**		**17.010.000.000**		**17.020.000.000**		**17.030.000.000**		**17.040.000.000**		**17.050.000.000**		**17.050.000.000**		**DISPORAPAR**
3	26	02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya tarik destinasi pariwisata Kabupaten	0%	0%	0	75,76%	50.000.000	81,82%	70.000.000	87,88%	150.000.000	93,94%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	720.000.000	DISPORAPAR
					Persentase Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten	0%	0%	0	20%	200.000.000	40%	350.000.000	60%	120.000.000	80%	500.000.000	100%	600.000.000	100%	1.770.000.000	DISPORAPAR
					Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten	0%	0%	204.664.000	20%	300.000.000	40%	340.000.000	60%	390.000.000	80%	510.000.000	100%	520.000.000	100%	2.264.664.000	DISPORAPAR
					Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha	0%	0%	0	16,67%	150.000.000	33,33%	150.000.000	52,78%	120.000.000	75%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	720.000.000	DISPORAPAR

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
					Pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)																
3	26	03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Pemasaran Pariwisata Kabupaten	0%	2,03%	1.114.376.000	21,62%	1.093.000.000	41,22%	1.298.600.000	60,81%	1.535.320.000	80,41%	1.816.384.000	100%	2.171.660.800	100%	9.029.340.800	DISPORAPAR
					Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten	1.374.043	6.553.829	104.548.500	2.003.000	72.000.000	2.403.200	86.400.000	2.903.600	103.680.000	3.504.000	124.416.000	4.304.600	149.299.200	5.105.200	640.343.700	DISPORAPAR
3	26	04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk dan atau Karya Ekraf terdaftar HAKI	0%	0%	0	0%	180.430.000	25%	250.000.000	50%	250.000.000	75%	500.000.000	100%	450.000.000	100%	1.630.430.000	DISPORAPAR
3	26	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkompetensi dasar	0%	0%	195.016.500	8,86%	95.000.000	36,71%	295.000.000	54,43%	195.000.000	82,28%	295.000.000	100%	195.000.000	100%	1.270.016.500	DISPORAPAR
				Sasaran 4.1.5 : Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan**	**13,38%**	**15%**		**20%**		**25%**		**30%**		**35%**		**40%**		**40%**		**DISNAKERTRANS**
2	07	02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan perencanaan	n/a	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.500.000.000	DISNAKERTRANS

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
					ketenagakerjaan																
2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	100%	100%	544.300.000	100%	3.078.228.191	100%	3.175.800.000	100%	3.175.800.000	100%	4.375.800.000	100%	4.375.800.000	100%	18.725.728.191	DISNAKERTRANS
2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase layanan penempatan tenaga kerja lokal	13,38%	15%	373.963.600	20%	938.370.000	25%	1.210.000.000	30%	1.210.000.000	35%	1.510.000.000	40%	1.510.000.000	40%	6.752.333.600	DISNAKERTRANS
2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentasi Perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial	71,56%	72,56	447.200.000	74,56	1.024.400.000	75,56	1.241.600.000	76,56	1.416.600.000	78,56	1.862.300.000	79,56	2.324.800.000	80	8.316.900.000	DISNAKERTRANS
3	32	03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	n/a	10KK	254.674.000	15KK	320.000.000	18KK	345.000.000	25KK	345.000.000	30KK	345.000.000	35KK	345.000.000	133KK	1.954.674.000	DISNAKERTRANS
				Sasaran 4.1.6 : Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	**Prosentase Desa Maju dan Mandiri didasarkan dari IDM**	**15.03**	**15,03**		**15,95**		**16,87**		**17,79**		**18,71**		**19,63**		**19,63**		**DPMD**
2	13	02		PROGRAM PENATAAN DESA	Tingkat tertib penyelenggaraa penataan desa	90%	100%	26.020.000.000	100%	13.120.000.000	100%	13.120.000.000	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	53.260.000.000	DPMD
2	13	03		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Kerjasama antar Desa yang terfasilitasi	50%	100%	20.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	1.270.000.000	DPMD

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
2	13	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Tingkat tertib administrasi pemerintahan desa	90,00%	100,00 %	427.284.067.600	100%	410.396.022.600	100%	436.995.008.752	100%	435.264.285.367	100%	438.598.947.514	100,00 %	442.000.302.905	100,00 %	2.590.538.634.738	DPMD
2	13	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	90%	100%	1.199.811.000	100%	1.599.811.000	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	3.000.000.000	100%	13.299.622.000	DPMD
				Tujuan 4.2 :	**Persentase Tingkat Kemiskinan**	**4,94**	**4,5**		**4,22**		**4,18**		**4,1**		**4,08**		**4,04**		**4,04**		
				Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	**Indeks Gini Rasio**	**0.303**	**0.286**		**0.281**		**0.276**		**0.271**		**0.266**		**0.261**		**0.261**		
				Sasaran 4.2.1 : **Meningkatnya Ketahanan Pangan**	**Indeks Ketahanan Pangan**	**77,07%**	**77,10 %**		**77,15 %**		**77,20 %**		**77,30 %**		**77,40 %**		**77,50 %**		**77,50 %**		**DKPP**
2	09	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	35,00	40,00	500.000.000	80,00	1.745.000.000	85,00	1.745.000.000	90,00	1.745.000.000	95,00	1.800.000.000	100,00	2.121.000.000	100	9.656.000.000	**DKPP**
2	09	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	95	95,25	100.070.104	95,35	1.000.000.000	95,4	1.000.000.000	95,45	1.000.000.000	95,5	1.500.000.000	95,55	3.609.465.000	100	8.209.535.104	**DKPP**
					Capaian skor Pola Pangan Harapan	88,9	77,5	609.999.900	78	864.000.000	78,5	864.000.000	79	864.000.000	79,5	1.500.000.000	80	2.000.000.000	80	6.701.999.900	**DKPP**

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
					(PPH) Konsumsi																
2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan jumlah desa rentan rawan pangan	5,52%	3,68	20.000.000	3,07	415.750.000	2,45	436.538.000	1,84	458.365.000	1,23	481.290.000	0,61	505.347.000	0,61	2.317.290.000	DKPP
2	09	05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman pangan	85	90%	70.000.000	92%	326.650.000	94%	342.983.000	95%	360.132.000	95%	378.140.000	95%	397.046.000	95%	1.874.951.000	DKPP
				Sasaran 4.2.2 : Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial serta pengendalian penduduk	**Prosentase PMKS yang mendapatkan program layanan sosial**	**17.38**	**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		**DINSOS**
1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Fasilitasi Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial	80%	80%	3.356.582.630	80%	1.369.694.900	80%	1.383.648.122	80%	1.424.020.150	80%	1.626.820.160	80%	1.626.820.160	80%	10.673.386.122	DINSOS
1	06	03		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	100%	6.228.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	56.228.000	DINSOS
1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan rehabilitasi sosial	35,46%	16%	689.984.500	7,23%	1.730.890.000	7,23%	1.458.344.850	7,23%	1.671.344.850	7,23%	1.733.344.840	7,23%	1.833.344.840	36,15%	9.117.253.880	DINSOS

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	06	05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial	5,57%	5%	1.623.135.620	0,08%	1.842.343.028	0,08%	1.742.343.028	0,08%	1.683.997.000	0,08%	1.589.197.000	0,08%	1.589.197.000	0,40%	10.070.212.676	DINSOS
1	06	06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	441.141.280	100%	1.325.768.000	100%	1.209.864.000	100%	1.088.838.000	100%	1.088.838.000	100%	1.118.838.000	100%	6.273.287.280	DINSOS
1	06	07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan kondisi baik	100%	100%	46.385.880	100%	217.998.972	100%	220.600.000	100%	220.600.000	100%	220.600.000	100%	220.600.000	100%	1.146.784.852	DINSOS
					Indeks Pembangunan Gender (IPG)	**92,14**	**92,02**		**92,06**		**92,10**		**92,14**		**92,18**		**92,22**		**92,22**		**DKBP3A**
2	08	02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	presentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	100	100	166.499.850	100	850.000.000	100	947.800.000	100	980.080.000	100	1.130.588.000	100	1.095.146.800	100	5.360.114.650	DKBP3A
2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	cakupan home industry perempuan aktif di lokasi P2WKSS	44,59%	45	48.439.700	46	248.000.000	46,5	278.300.000	47	306.130.000	47,5	336.743.000	48	370.417.300	48	1.588.030.000	DKBP3A
2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	cakupan OPD yang memiliki Data Pilah Gender dan anak	100	100	0	100	27.500.000	100	30.250.000	100	33.275.000	100	36.602.500	100	40.262.750	100	192.890.250	DKBP3A

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
					Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking	**56,17%**	**50%**		**55%**		**60%**		**65%**		**70%**		**75%**		**75%**		**DKBP 3A**
2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	cakupan kasus kekerasan dan TPPO terhadap perempuan yang tertangani sampai selesai	31.07	30	79.533.700	30	212.500.000	30	353.750.000	30	409.125.000	30	449.037.500	30	503.941.250	30	2.007.887.450	DKBP 3A
2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase kecamatan dan desa layak anak yang aktif	0	0	48.093.000	10	300.000.000	20	350.000.000	30	400.000.000	40	400.000.000	50	500.000.000	50	1.998.093.000	DKBP 3A
2	08	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	cakupan kasus kekerasan dan TPPO terhadap anak yang tertangani sampai dengan selesai	26.55	20	568.505.000	25	808.563.500	30	908.563.500	35	908.563.500	40	908.563.500	45	1.149.828.179	45	5.252.587.179	DKBP 3A
					Total Fertility Rate	**2,1**	**2,29**		**2,26**		**2,24**		**2,21**		**2,19**		**2,1**		**2,1**		**DKBP 3A**
2	14	03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Angka prevalensi kontrasepsi Modern (Modern Contraseptive Prevalensi Rate/m CPR)	76,16	69,16	8.835.963.725	69,66	8.935.963.725	70,16	8.935.963.725	70,66	8.935.963.725	71,16	9.235.963.725	71,66	9.535.963.725	71,66	54.415.782.350	DKBP 3A

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
2	14	02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	prosentase kecamatan yang menyediakan data mikro keluarga	100	100	1.011.506.000	100	531.506.000	100	430.706.000	100	372.626.000	100	308.738.000	100	238.461.200	100	2.703.543.200	DKBP3A
2	14	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Prosentase anggota Poktan tribina . UPPKA dan PPKS aktif ber KB	80	80	1.532.056.000	80	1.604.559.400	80	1.650.153.400	80	1.700.153.400	80	1.802.218.561	80	1.852.440.418	80	10.141.305.059	DKBP3A
				Misi 5 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas. Kompeten Dan Profesional																
				Tujuan 5.1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	**Indeks reformasi Birokrasi**	**CC**	**B**		**B**		**B**		**BB**		**BB**		**BB**		**BB**		
				Sasaran 5.1.1 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	**Opini BPK**	**WTP**	**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	9.947.283.417	100%	11.500.000.000	100%	11.500.000.000	100%	11.500.000.000	100%	11.500.000.000	100%	12.800.000.000	100%	68.747.283.417	BPKAD
5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.	Persentase laporan Pengelolaan Aset Daerah.	8	8	1.057.908.000	8	1.800.000.000	8	2.000.000.000	8	2.000.000.000	8	2.000.000.000	8	2.000.000.000	40	10.857.908.000	BPKAD
				Nilai LPPD	**3,80**	**4.00**		**4.10**		**4.20**		**4.30 `**		**4.40**		**4.50**		**4.50**		**SETDA**
				Nilai SAKIP	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		
4	02	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat Layanan dan fasilitasi Fungsi DPRD	100	100	47.357.695.400	100	47.357.695.400	100	47.357.695.400	100	47.357.695.400	100	47.357.695.400	100	47.357.695.400	100	284.146.172.400	SETDPRD
1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan penganggaran pelayanan administrasi keuangan. barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah		100		100		100		100		100		100		100		SELURUH OPD
				DISDIKBUD			100	676.579.057.387	100	676.779.057.387	100	676.779.057.387	100	676.779.057.387	100	677.379.057.387	100	677.249.057.387	100	4.061.574.344.322	DISDIKBUD
				Dinkes			100	101.804.969.296	100	104.171.170.778	100	104.171.170.778	100	104.171.170.778	100	105.171.170.778	100	105.571.170.778	100	625.060.823.186	DINKES
				Rumah Sakit dr.Dradjat Prawiranegara			100	62.181.400.631	100	71.341.190.131	100	71.341.190.131	100	71.341.190.131	100	71.641.190.131	100	72.141.190.131	100	419.987.351.286	RS.DRDJATPRAWIRANEGARA

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			100	31.934.364.061	100	34.134.364.061	100	35.334.364.061	100	35.534.364.061	100	35.734.364.061	100	35.934.364.061	100	208.606.184.366	DPUPR
				Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan			100	11.929.309.590	100	14.129.309.590	100	14.329.309.590	100	14.529.309.590	100	14.729.309.590	100	14.929.309.590	100	84.575.857.540	DPKPTB
				Satuan Polisi Pamong Praja			100	11.822.307.475	100	13.022.307.475	100	13.222.307.475	100	13.222.307.475	100	13.622.307.475	100	13.822.307.475	100	78.733.844.850	SATPOL PP
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah			100	9.828.120.479	100	10.628.120.479	100	10.828.120.479	100	10.828.120.479	100	11.228.120.479	100	11.228.120.479	100	64.568.722.874	BPBD
				Dinas Sosial			100	7.773.349.105	100	8.273.349.105	100	8.273.349.105	100	8.373.349.105	100	8.573.349.105	100	8.773.349.105	100	50.040.094.630	DINAS SOSIAL
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			100	8.264.951.355	100	9.807.552.364	100	9.221.150.555	100	9.056.150.555	100	9.735.581.555	100	9.716.781.915	100	55.802.168.299	DISNAKERTRANS
				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan			100	9.445.589.360	100	9.845.589.360	100	9.845.589.360	100	10.045.589.360	100	10.245.589.360	100	10.445.589.360	100	59.873.536.160	DKPP
				Dinas Lingkungan Hidup			100%	13.456.076.370	100%	13.856.076.370	100%	13.856.076.370	100	14.056.076.370	100%	14.256.076.370	100%	14.456.076.370	100%	83.936.458.220	DLH
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			100	19.478.696.212	100	19.678.696.212	100	19.878.696.212	100	20.078.696.212	100	20.278.696.212	100	20.478.696.212		119.872.177.272	DISDUKCAPIL
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			100	7.770.957.135	100	8.170.957.135	100	8.570.957.135	100	8.670.957.135	100	8.670.957.135	100	8.670.957.135		50.525.742.810	DPMD

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
				Dinas Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			100	10.042.028.225	100	10.775.018.225	100	10.822.818.225	100	10.980.898.225	100	10.990.285.225	100	11.216.620.925		64.827.709.050	DKBP3A
				Dinas Perhubungan			100	18.042.550.451	100	18.242.550.451	100	18.442.550.451	100	18.642.550.451	100	18.842.550.451	100	19.042.550.451		111.255.302.706	DISHUB
				Dinas Komunikasi. Informatika. persandian dan Statistik			100%	6.188.031.699	100%	6.388.031.699	100%	6.588.031.699	100%	6.788.031.699	100%	6.988.031.699	100%	7.188.031.699	100%	40.128.190.194	DISKOMINFOSATIK
				Dinas Koperasi. Perindustrian dan Perdagangan			100	10.423.524.408	100	10.623.524.408	10	10.823.524.408	100	11.023.524.408	100	11.223.524.408	100	11.423.524.408		65.541.146.448	DISKOPERINDAG
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			**100%**	11.023.471.283	**100%**	12.968.471.283	**100%**	13.093.471.283	**100%**	13.518.471.283	**100%**	13.348.471.283	**100%**	13.573.471.283	**100%**	77.525.827.698	DPMPTSP
				Dinas Pemuda. Olahraga. dan Pariwisata			100	6.043.654.995	100	6.971.714.995	100	7.286.054.995	100	7.894.934.995	100	8.255.190.995	100	8.707.498.195	100	45.159.052.670	DISPORAPAR
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah			100	5.372.149.307	100	5.572.149.307	100	5.772.149.307	100	5.972.149.307	100	6.172.149.307	100	6.372.149.307		35.232.895.842	DPKD
				Dinas Pertanian			100	19.641.615.570	100	19.841.615.570	100	20.041.615.570	100	20.241.615.570	100	20.441.615.570	100	20.641.615.570		120.849.693.420	DISPERTAN
				Sekretariat Daerah			100	29.559.414.233	100	34.371.718.761	100	43.392.320.018	100	43.786.652.197	100	44.262.335.056	100	44.516.123.738	100	239.888.564.003	SETDA
				Sekretariat DPRD			100	58.806.467.575	100	59.006.467.575	100	59.206.467.575	100	59.406.467.575	100	59.606.467.575	100	59.806.467.575		355.838.805.450	SETDPRD

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
				Badan perencanaan Pembangunan Daerah			100	9.940.331.477	100	12.140.331.477	100	12.383.138.107	100	12.630.800.869	100	12.883.416.886	100	13.141.085.224		73.119.104.039	BAPPEDA
				Badan Pendapatan Daerah			100	39.516.082.724	100	39.716.082.724	100	39.916.082.724	100	40.116.082.724	100	40.316.082.724	100	40.516.082.724		240.096.496.344	BAPENDA
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			100	11.874.420.589	100	12.074.420.589	100	12.274.420.589	100	12.474.420.589	100	12.674.420.589	100	12.874.420.589		74.246.523.534	BPKAD
				Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia			100	19.405.283.067	100	19.605.283.067	100	19.805.283.067	100	20.005.283.067	100	20.205.283.067	100	20.405.283.067	100	119.431.698.402	BKPSDM
				Inspektorat daerah			100	18.583.365.395	100	20.933.620.662	100	21.133.620.662	100	21.333.620.662	100	21.533.620.662	100	21.733.620.662	100	125.251.468.703	INSPEKTORAT
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			100	799.339.900	100	7.700.000.000	100	7.700.000.000	100	8.100.000.000	100	8.300.000.000	100	8.500.000.000	100	40.300.000.000	KESBANGPOL
				29 KECAMATAN			100	83.072.745.685	100	84.056.196.052	100	84.056.196.052	100	84.056.196.052	100	84.056.196.052	100	84.056.196.052	100	536.607.554.945	KECAMATAN
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	100	100	7.000.000.000	100	18.300.000.000	100	18.300.000.000	100	18.300.000.000	100	18.300.000.000	100	18.300.000.000	100	170.010.803.000	KECAMATAN
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/ kelurahan	100	100	3.081.722.700	100	3.081.722.700	100	3.081.722.700	100	3.081.722.700	100	3.081.722.700	100	3.081.722.700	100	18.490.336.200	KECAMATAN

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	100	100	16.993.811.500	100	23.844.577.300	100	23.844.577.300	100	23.844.577.300	100	23.844.577.300	100	23.844.577.300	100	31.452.066.000	KECAMATAN
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan	100	100	2.473.700.000	100	2.473.700.000	100	2.473.700.000	100	2.473.700.000	100	2.473.700.000	100	2.473.700.000	100	14.842.200.000	KECAMATAN
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa dibina	100	100	6.450.765.800	100	6.450.765.800	100	6.450.765.800	100	6.450.765.800	100	6.450.765.800	100	6.450.765.800	100	38.704.594.800	KECAMATAN
2	19	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	96,67%	96,67 %	375.000.000	97,50 %	375.000.000	97,52 %	375.000.000	98,35 %	375.000.000	98,36 %	375.000.000	99,18 %	375.000.000	99,18 %	2.250.000.000	DISPORAPAR
					Persentase Wirausaha Muda	31,38%	32,71 %	56.873.000	34,04 %	70.350.000	35,37 %	90.000.000	36,70 %	175.000.000	38,03 %	200.000.000	39,36 %	225.000.000	39,36 %	817.223.000	DISPORAPAR
					Jumlah Pemuda yang Dibina	137 Orang	855 Orang	1.184.313.000	1.730 Orang	1.274.035.000	2.605 Orang	1.375.000.000	3.480 Orang	1.506.800.000	4355 Orang	1.566.000.000	5.230 Orang	1.630.000.000	5.230 Orang	8.536.148.000	DISPORAPAR
2	19	04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Pembinaan peserta didik Pramuka	99,79%	99,79 %	375.000.000	99,83 %	375.000.000	99,88 %	375.000.000	99,92 %	375.000.000	99,96 %	375.000.000	100%	375.000.000	100%	2.250.000.000	DISPORAPAR
2	19	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet muda yang dibina	246 Atlet	224 Atlet	599.265.500	704 Atlet	900.000.000	1.494 Atlet	1.425.000.000	1.974 Atlet	1.575.000.000	2.764 Atlet	1.425.000.000	3.244 Atlet	1.575.000.000	3.244 Atlet	7.499.265.500	DISPORAPAR

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
					Cakupan pembinaan olahraga	90,57%	90,57 %	3.262.370.000	92,45 %	3.150.000.000	94,34 %	3.405.000.000	96,23 %	3.450.000.000	98,11 %	3.475.000.000	100%	3.500.000.000	100%	20.242.370.000	DISPORAPAR
					Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	1,64%	-	0	12,05 %	100.000.000	16,88 %	115.000.000	21,70 %	200.000.000	26,52 %	250.000.000	31,34 %	300.000.000	31,34 %	965.000.000	DISPORAPAR
8	01	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang difasilitasi	100%	100%	2.263.572.500	100%	4.620.000.000	100%	4.515.000.000	100%	72,612,442,218	100%	4.330.000.000	100%	4.720.000.000	100%	125.158.572.500	KESBANGPOL
8	01	02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan kelompok yang dibina tentang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	199.520.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	850.000.000	100%	3.749.520.000	KESBANGPOL
					Jumlah OPD pelayanan melaksanakan Zona integritas (ZI) WBBM WBK	**0**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**6**		
4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tingkat fasilitasi dukungan penyelenggaraan program	100	100	14.514.816.400	100	15.323.573.347	100	19.367.845.000	100	19.363.504.594	100	19.391.278.135	100	19.502.462.664	600	107.463.480.139	SETDA

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
					pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang menjadi tugas Sekretariat Daerah																
4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat fasilitasi dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi tugas Sekretariat Daerah	100	100	42.339.454.446	100	41.949.594.278	100	29.064.560.000	100	29.211.522.121	100	29.253.420.911	100	29.421.152.395	600	201.239.704.151	SETDA
4	01	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat terfasilitasinya dukungan penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan yang menjadi tugas Sekretariat Daerah	100	100	4.482.054.996	100	4.147.870.562	100	4.852.850.854	100	4.860.060.598	100	4.867.031.500	100	4.894.937.789	600	28.104.806.299	SETDA
				Sasaran 5.1.2 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	**Tingkat Maturitas SPIP**	**3**	**3,11**		**3,5**		**3,6**		**3,7**		**3,8**		**4**		**4**		**INSPEKTORAT**
6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN.	Persentase perangkat daerah yang	100	100	1.372.864	100	3.729.054	100	3.965.870	100	4.147.430	100	4.347.150	100	4.566.840	100	22.129.213.743	INSPEKTORAT

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
				PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	didampingi dalam pelaksanaan program kegiatan			6.600		1.857		1.346		2.953		0.722		0.267			
6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat pelaksanaan pengawasan perangkat daerah	100	100	1.866.304.000	100	5.296.504.867	100	5.618.442.307	100	5.865.261.011	100	6.150.255.267	100	6.350.255.267	100	31.147.022.717	INSPEKTORAT
				Sasaran 5.1.3 : Meningkatnya Pendapatan asli Daerah	**Tingkat Pertumbuhan PAD**	**1,36%**	**4,07%**		**1,12%**		**3,28%**		**3,33%**		**3,39%**		**3,44%**		**3,44%**		BAPENDA
5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat ketercapaian target pendapatan asli daerah	92,13%	100%	4.566.127.800	100%	7.075.636.700	100%	7.269.856.300	100%	7.596.175.900	100%	7.768.765.500	100%	7.889.860.100	100%	42.166.422.300	BAPENDA
				Sasaran 5.1.4 : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi	**Nilai konsistensi perencanaan pembangunan daerah**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**BAPPEDA**
					Nilai capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
5	01	02		PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase terpenuhinya keselarasan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan laporan	100	100	2.720.485.367	100	2.597.178.000	100	2.750.000.000	100	3.000.000.000	100	3.200.000.000	100	3.140.949.000	100	17.508.612.367	BAPPEDA

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
					pelaksanaan pembangunan daerah yang disampaikan tepat waktu																
5	01	03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase tercapainya kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan Pelaksanaan Kegiatan pada perangkat daerah	100	100	3.860.462.150	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	4.200.000.000	100	24.060.462.150	BAPPEDA
					Indek Inovasi Daerah	**inovatif**	**inovatif**		**inovatif**		**inovatif**		**inovatif**		**inovatif**		**inovatif**		**inovatif**		BAPPEDA
5	05	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Prosentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang telah didiseminasikan	100	100	821.347.000	100	903.481.700	100	993.829.870	100	1.093.212.857	100	1.202.534.143	100	1.322.787.557	100	6.337.193.127	BAPPEDA
					Prosentase dukungan inovasi daerah	100	100	425.946.000	100	530.000.000	100	600.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	900.000.000	100	4.155.946.000	BAPPEDA
					Cakupan data statistic sektoral yang dipublikasikan	**50,00%**	**50,00 %**		**60,00 %**		**70,00 %**		**80,00 %**		**90,00 %**		**100,00 %**		**100,00 %**		**DISKOMINFOSATIK**

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
2	20	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tingkat ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah	14%	14%	718.527.272	17%	701.000.000	31%	966.750.000	45%	1.075.087.500	55%	1.135.091.875	70%	1.192.346.469	70%	5.788.803.116	DISKOMINFOSATIK
				Sasaran 5.1.5 : Meningkatnya kualitas SDM aparatur	**Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori Baik**	**94%**	**94%**		**95%**		**93%**		**96%**		**97%**		**97%**		**97%**	**0**	**BKPSDM**
5	03	02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tercapainya kepuasan terhadap pelayanan kepegawaian	94,90%	95,00 %	3.288.399.500	95,5%	3.161.144.000	96,00 %	3.743.984.000	96,50 %	3.554.400.000	97,00 %	3.850.952.000	97,50 %	3.865.320.000	97,50 %	21.464.199.500	BKPSDM
					Cakupan standar kompetensi pegawai	**90%**	**94,10 %**		**94,50 %**		**95,00 %**		**95,50 %**		**96,00 %**		**96,00 %**		**96,00 %**		**BKPSDM**
5	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya sesuai standar	5%	7%	1.470.761.000	10%	3.507.000.000	20%	4.382.316.000	20%	5.446.900.000	20%	5.677.848.000	20%	5.663.480.000	97%	26.148.305.000	**BKPSDM**
				Sasaran 5.1.6 : Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI	**Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)**	**65,00%**	**65,00 %**		**70,00 %**		**75,00 %**		**80,00 %**		**85,00 %**		**90,00 %**		**90,00 %**		**DISKOMINFOSATIK**
2	16	02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah melalui	100%	100%	3.575.218.015	100%	3.600.000.000	100%	3.600.000.000	100%	3.759.000.000	100%	3.869.000.000	100%	3.900.000.000	100	22.303.218.015	DISKOMINFOSATIK

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
					Media Informasi																
					Indeks Kematangan Penerapan SPBE	**2.97 (Baik)**	**2.97 (Baik)**		**2.97 (Baik)**		**2.98 (Baik)**		**2.99 (Baik)**		**3.00 (Baik)**		**3.01 (Baik)**		**3.01 (Baik)**		**DISKOMINFOSATIK**
2	16	03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	40%	40%	1.058.039.800	50%	1.200.000.000	70%	1.200.000.000	80%	1.200.000.000	90%	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100%	7.058.039.800	DISKOMINFOSATIK
					Persentase Penerapan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah	40%	40%		50%		60%		70%		80%		90%		90%		DISKOMINFOSATIK
					Indeks Keamanan informasi (Indeks KAMI)	**100**	**100**		**120**		**140**		**160**		**170**		**175**		**175**		**DISKOMINFOSATIK**
2	21	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	41%	41%	505.323.000	48%	499.000.000	51%	523.950.000	58%	550.147.500	65%	577.654.875	68%	606.537.619	68%	3.262.612.994	DISKOMINFOSATIK

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
				Sasaran 5.1.7 : **Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**B**	**B**		**B**		**B**		**B**		**B**		**B**		**B**		
					Persentase Masyarakat yang Melakukan Kunjungan Perpustakaan	**58%**	**42.00 %**		**60.00 %**		**70.00 %**		**80.00 %**		**90.00 %**		**100%**		**100%**		
2	23	02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase kegiatan Gemar Membaca tingkat daerah yang dilaksanakan	92,06%	100	78.000.000	100	30.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	85.000.000	100	130.000.000	100	438.000.000	DPKD
					Persentase pembinaan perpustakaan Desa	100%	54%	30.000.000	65%	20.000.000	77%	30.000.000	88%	30.000.000	88%	25.000.000	100%	40.000.000	100%	175.000.000	DPKD
					Persentase pelayanan Perpustakaan Daerah	58%	67	652.524.000	67	185.000.000	100	137.000.000	100	217.000.000	100	242.800.000	100	257.800.000	100	1.692.124.000	DPKD
					Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara digital	35.71%	44.64 %		53.57 %		62.50 %		71.43 %		80.36 %		100%		100%		
2	24	02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat tertib pengelolaan arsip perangkat daerah	69,64%	73%	131.847.600	77%	70.000.000	80%	113.000.000	84%	113.000.000	91%	147.200.000	100%	187.200.000	100%	762.247.600	DPKD

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
2	24	03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Prosentase arsip bersejarah yang berhasil ditelusuri	2,56%	7,69%	28.152.400	12,82 %	10.000.000	17,95 %	35.000.000	23,08 %	20.000.000	28,21 %	25.000.000	33,33 %	25.000.000	33%	143.152.400	DPKD
					Cakupan kepemilikan dokumen adminduk	**79,12%**	**83,23**		**84,8**		**87,4**		**89,8**		**92,2**		**94,6**		**94,6**		**DISDUKCAPIL**
2	12	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Prosentase meningkatnya Kualitas Pelayanaan Penerbitan Dokumen Kependudukan	100	100	119.591.500	100	985.240.000	100	1.000.000.000	100	1.100.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	5.604.831.500	DISDUKCAPIL
2	12	03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prosentase meningkatnya Kualitas Pelayanaan Pencatatan Sipil	100	100	11330000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	1.663.300.000	DISDUKCAPIL
2	12	04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prosentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	100	100	580.682.900	100	815.320.000	100	896.852.000	100	986.537.200	100	1.085.190.920	100	1.193.710.012	100	5.558.293.032	**DISDUKCAPIL**
2	12	05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Terkelola dan tersajinya data kependudukan Buku Profil Perkembangan Kab. Serang	100	100	16.030.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	616.030.000	**DISDUKCAPIL**
					Indeks Risiko Bencana	**203,20**	**203,10**		**203,05**		**203,00**		**202,80**		**202,50**		**200,00**		**200,00**		**BPBD**
1	05	04		PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN. PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat pelayanan pencegahan penanggulangan. penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	100%	100%	1.731.810.000	100%	2.400.000.000	100%	2.600.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.100.000.000	100%	15.831.810.000	BPBD

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tingkat pelayanan pencegahan, penanggulangan bencana serta penanganan pasca bencana	100%	100%	2.532.880.000	100%	2.750.000.000	100%	2.750.000.000	100%	2.750.000.000	100%	2.750.000.000	100%	2.900.000.000	100%	16.432.880.000	**BPBD**
					Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda	**7,4%**	**5%**		**5%**		**5%**		**5%**		**5%**		**5%**		**5%**		**SATPOL PP**
7	01	04		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum yang ditangani	60%	60%	3.019.274.450	65%	5.533.916.000	70%	5.897.257.600	75%	6.286.983.360	75%	6.586.983.360	75%	6.586.983.360	75%	33.911.398.130	SATPOL PP
					Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		SATPOL PP
				Misi 6 : Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu. Bermasyarakat Dan Bernegara																

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
				Tujuan 6.1 : **Meningkatkan kualitas kehidupan beragama ditengah-tengah masyarakat**	**Indeks Kerukunan Umat Beragama**	**86,45**	**86,9**		**87,4**		**87,95**		**88,5**		**89**		**89,5**		**89,5**		
				Sasaran 6.1.1 : **Meningkatnya toleransi kehidupan umat beragama**	**Tingkat kejadian SARA ditengah-tengah masyarakat**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**KESBANGPOL**
8	01	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pembinaan organisasi kemasyarakatan	100%	100%	263.770.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	750.000.000	100%	850.000.000	100%	3.813.770.000	KESBANGPOL
8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial terselesaikan	100%	100%	529.599.900	100%	941.751.834	100%	970.664.914	100%	1.200.000.000	100%	1.232.836.897	100%	1.300.000.000	100%	6.174.853.545	KESBANGPOL
8	01	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI. SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba. kerukunan umat beragama dan kepercayaan	100%	100%	687.090.000	100%	1.140.000.000	100%	1.140.000.000	100%	1.140.000.000	100%	1.240.000.000	100%	1.301.125.126	100%	6.648.215.126	KESBANGPOL
Jumlah								3.056.711.791.009		2.992.773.509.182		3.058.029.106.468		3.134.864.782.084		3.144.331.809.572		3.194.184.843.403		18.427.537.289.555	

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

"Bab memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan."

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dan diimplementasikan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Selanjutnya guna memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan atau program, maka dalam proses penyusunan RPJMD telah dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dan Indikasi Program Prioritas Yang Disertai Dengan Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Serang disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah
1	**KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH**	**3,061,285,487,661**	**3,006,026,122,913**	**3,052,281,720,198**	**3,130,235,395,815**	**3,138,084,423,303**	**3,187,737,456,134**
	Pendapatan Daerah	**2,901,230,182,348**	**2,872,518,453,079**	**2,927,324,114,378**	**2,975,208,285,956**	**3,022,468,121,091**	**3,071,963,672,198**
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	160,055,305,313	133,507,669,834	124,957,605,820	155,027,109,859	115,616,302,212	115,773,783,936
2	**BELANJA DAERAH**	**3,058,285,487,661**	**2,984,026,122,913**	**3,049,281,720,198**	**3,127,235,395,815**	**3,135,084,423,303**	**3,184,737,456,134**
2.01	Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	1,646,309,723,824	1,587,722,802,363	1,596,309,723,825	1,665,040,881,067	1,664,811,714,985	1,659,272,872,186
	· Gaji dan Tunjangan	633,458,796,151	646,127,972,074	659,050,531,516	662,231,542,146	685,676,172,989	699,389,696,449
	· Belanja Modal dan Pos Belanja Operasi Lainnya	1,012,850,927,673	941,594,830,289	937,259,192,309	1,002,809,338,921	979,135,541,996	959,883,175,737
2.02	**Belanja Program Bidang Urusan Terkait dengan Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah**	**957,523,276,176**	**968,354,225,550**	**998,908,451,277**	**1,007,149,698,750**	**1,014,226,996,000**	**1,068,397,957,384**
2.03	Belanja Transfer	**449,451,522,600**	**422,949,095,000**	**449,063,545,096**	**450,044,815,998**	**451,045,712,318**	**452,066,626,564**
2.04	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
	Sisa Kapasitas Riil	**3,000,000,000**	**22,000,000,000**	**3,000,000,000**	**3,000,000,000**	**3,000,000,000**	**3,000,000,000**
3	**Pengeluaran Pembiayaan**						
	Penyertaan Modal Daerah	3,000,000,000	22,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

Tabel 7.2. Indikasi Program Prioritas Yang Disertai Dengan Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Serang

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
				PENDIDIKAN																
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD	100,00	100,00	21,608,877,380	100	21,608,877,380	100	22,041,054,928	100	22,481,876,026	100	22,931,513,547	100	23,390,143,818	100	134,062,343,079
					APM SMP	99,45	100,00	20,836,970,800	100	20,836,970,800	100	21,253,710,216	100	21,678,784,420	100	22,112,360,109	100	22,554,607,311	100	129,273,403,656
					APK PAUD	85,28	100,00	22,282,090,000	87	22,282,090,000	88,5	22,727,731,800	90	23,182,286,436	91,5	23,645,932,165	93	24,118,850,808	93	138,238,981,209
					Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/setaraan	100 ,00	100,00	42,066,759,900	100	42,066,759,900	100	42,066,759,900	100	42,066,759,900	100	42,908,095,098	100	42,908,095,098	100	254,083,229,796
					Capaian SPM Bidang Pendidikan	83,05	83.10		83.15		83.20		83.25		83.30		83.35		83.35	-
1	01	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase penerapan muatan lokal di sekolah	100	100	100,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	1,850,000,000
1	01	04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap rombel	78,21	78,21	30,039,815,000	81,21	30,039,815,000	84,21	31,541,805,750	87,21	33,118,896,038	90,21	34,774,840,839	93,21	36,513,582,881	93,21	196,028,755,508

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	01	05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase izin pendidikan dasar. PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat	100	100	-	100	112,000,000	100	112,000,000	100	112,000,000	100	112,000,000	100	112,000,000	100	560,000,000
				KESEHATAN																
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase Pemenuhan 12 indikator SPM Kesehatan	100%	100	69,031,599,895	100	41,662,838,500	100	44,967,444,000	100	38,791,953,200	100	59,104,507,325	100	62,518,847,155	100	316,077,190,075
					Prosentase kepesertaan jaminan kesehatan	74%	74	21,696,086,920	85	22,725,000,000	90	21,696,086,920	90	22,725,000,000	95	22,725,000,000	98	22,725,000,000	98	134,292,173,840
					Prosentase Desa Stop BABS	15 %	15	13,020,000	20	400,000,000	25	500,000,000	35	500,000,000	40	661,000,000	50	760,000,000	50	2,834,020,000
1	02	04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Prosentase PKM dengan ketersediaan obat esensial, vaksin, alkes	100%	100%	89,370,999	100	36,000,000	100	39,000,000	100	42,000,000	100	45,000,000	100	48,000,000	100	299,370,999
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu aktif	55 %	55	7,623,783,500	55	7,420,830,000	60	8,627,921,500	65	8,113,783,500	70	9,108,171,500	75	8,980,209,001	75	49,874,699,001

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
					Prosentase Kecamatan menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	0 %	60	30,000,000	60	700,000,000	70	900,000,000	80	960,000,000	90	1,190,250,000	100	1,368,437,000	100	5,148,687,000
1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 %	100	1,054,350,000	100	1,213,370,000	100	1,344,009,000	100	1,489,571,000	100	1,585,618,800	100	1,834,510,000	100	8,521,428,800
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Penerimaan Pendapatan Puskesmas	100	100	64,166,201,482	100	65,770,356,519	100	67,374,511,556	100	68,978,666,593	100	70,582,821,630	100	72,186,976,667	10%	409,059,534,447
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	80.07%	90%	19,995,000	90%	150,000,000	90%	150,000,000	90%	150,000,000	90%	150,000,000	90%	150,000,000	90%	769,995,000
					Tingkat sarana prasarana RS dalam dalam kondisi baik	66%	66%	655,649,952	72%	2,889,000,000	76%	3,000,000,000	83%	3,200,000,000	86%	3,300,000,000	90%	3,300,000,000	90%	16,344,649,952
1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase SDM yang mengikuti Diklat sesuai standar kompetensi	20%	25%	-	25%	150,000,000	25%	250,000,000	25%	250,000,000	25%	250,000,000	25%	250,000,000	100%	1,150,000,000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Penerimaan Pendapatan RS	100%	100%	172,010,571,597	100%	176,372,551,137	100%	180,781,864,915	100%	185,301,411,538	100%	189,933,946,827	100%	194,682,295,497	100%	1,099,082,641,511
				PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
1	03	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase jumlah tenaga terampil konstruksi yang telah bersertifikat (SKT) di Kabupaten Serang	16.7	16.7	1,552,965,040	25	2,116,405,040	33.33	2,116,405,040	41.7	2,116,405,040	50	2,116,405,040	58.3	2,116,405,040	58.3	12,134,990,240
1	03	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan infrastruktur drainase desa kewenangan kabupaten		20.24	6,908,832,250	29.12	6,931,082,250	36.11	6,931,082,250	51.53	6,931,082,250	56.13	6,931,082,250	65.64	8,000,000,000	9.43	42,633,161,250
1	03	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Cakupan infrastruktur jalan kabupaten	100	100	336,486,752,315	100	156,274,492,650	100	163,487,299,697	100	158,339,822,493	100	165,940,641,557	100	168,471,612,648	100	1,149,000,621,360
1	03	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tingkat ketaatan tata ruang dengan rencana tata ruang wilayah	83	85	3,662,779,770	87.5	7,666,620,469	90	7,666,620,469	92.5	8,166,620,469	93	13,716,620,469	94	7,266,620,469	94	48,145,882,115
					Indikator Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	**5**	**5**	**13,840,788,500**	**10**	**20,624,867,350**	**20**	**20,897,354,085**	**25**	**23,472,089,494**	**40**	**25,314,298,443**	**100**	**27,340,728,287**	**100**	

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Infrastruktur Air Baku dalam Kondisi Baik	39	39	27,317,680,048	10.2	27,317,680,048	18.75	27,317,680,048	30.11	27,392,938,335	41.47	29,235,147,284	55	31,261,577,128	55	169,842,702,891
				PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				17,124,999,910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga mendapatkan akses air melalui SPAM	88.58	89.01	19,140,782,661	89.53	22,000,000,000	89.95	22,000,000,000	90.35	22,000,000,000	90.73	22,000,000,000	91.08	30,840,000,000	91.08	137,980,782,661
1	03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga mendapatkan akses pengelolaan air limbah domestik	65.92	67.01	8,958,787,230	68.62	6,516,298,152	69.9	10,097,557,782	71.07	10,097,557,782	72.18	15,190,243,207	73.27	17,240,931,848	73.27	68,101,376,001
1	**03**	**07**		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Prasarana Permukiman pada kawasan strategis yang tertangani			7,194,045,900	20	2,000,000,000	30	2,000,000,000	40	2,000,000,000	50	2,000,000,000	60	2,000,000,000	60	10,000,000,000
1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang memiliki IMB	15	17	32,932,617,625	19	47,000,000,000	21	50,000,000,000	23	50,000,000,000	25	50,000,000,000	27	50,000,000,000	27	279,932,617,625

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	03	09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang teratur	15	17	12,035,387,475	19	25,790,000,000	21	25,790,000,000	23	20,790,000,000	25	30,950,868,750	27	34,164,412,188	27	149,520,668,413
1	04	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh	10	10	408,392,200	10	300,000,000	15	300,000,000	20	300,000,000	25	300,000,000	30	300,000,000	30	1,800,000,000
1	04	04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan perbaikan rumah di kawasan kumuh	6.5	6.82	15,830,460,799	18.18	19,500,000,000	22.22	19,500,000,000	28.57	11,000,000,000	40	11,000,000,000	66.67	7,500,000,000	66.67	82,330,460,799
1	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan Relokasi Program Kabupaten/ Kota	100	100		100	10,200,000,000	100	10,200,000,000	100	9,200,000,000	100	10,200,000,000	100	12,613,670,000	0	59,607,715,900
					Persentase Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang memiliki izin		100		100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	5,000,000,000
1	04	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	10	10	1,041,243,699	10	4,100,000,000	15	4,100,000,000	20	4,100,000,000	25	6,100,000,000	30	8,829,303,750	30	28,270,547,449

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	04	06		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI. KUALIFIKASI. KLASIFIKASI. DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah dan PSU Tingkat Kemampuan Kecil yang memiliki sertifikasi dan registrasi	10%	10%	0	10	300,000,000	15	450,000,000	20	600,000,000	25	750,000,000	30	900,000,000	30%	3,000,000,000
				PERHUBUNGAN																
2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	13%	13%	30,272,932,511	13%	33,115,001,066	13%	33,115,001,066	14%	32,115,001,066	14%	38,326,924,672	14%	38,326,924,672	14%	205,271,785,053
2	15	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Angkutan Laut	0	0%	1,181,018,750	25%	2,156,525,000	25%	2,156,525,000	25%	3,000,000,000	25%	3,100,000,000	25%	3,200,000,000	0.25	14,794,068,750
2	15	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang memiliki izin	0	0.00 %	0	20%	100,000,000	20%	100,000,000	20%	110,000,000	20%	110,000,000	20%	100,000,000	0.2	520,000,000
2	15	05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Prasarana Perkeretaapian Umum yang memiliki izin	0%	0%	0	50%	600,000,000	50%	600,000,000	50%	600,000,000	50%	600,000,000	50%	600,000,000	50%	3,000,000,000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
				KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
7	01	04		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum yang ditangani	60%	60%	3,019,274,450	65%	5,533,916,000	70%	5,897,257,600	75%	6,286,983,360	75%	6,586,983,360	75%	6,586,983,360	75%	33,911,398,130
					Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1	05	04		PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN. PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat pelayanan pencegahan penanggulangan. penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	100%	100%	1,731,810,000	100%	2,400,000,000	100%	2,600,000,000	100%	3,000,000,000	100%	3,000,000,000	100%	3,100,000,000	100%	15,831,810,000
1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tingkat pelayanan pencegahan, penanggulangan bencana serta penanganan pasca bencana	100%	100%	2,532,880,000	100%	2,750,000,000	100%	2,750,000,000	100%	2,750,000,000	100%	2,750,000,000	100%	2,900,000,000	100%	16,432,880,000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
8	01	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang difasilitasi	100%	100%	2,263,572,500	100%	4,620,000,000	100%	4,515,000,000	100%	72,612,442,218	100%	4,330,000,000	100%	4,720,000,000	100%	125,158,572,500
8	01	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pembinaan organisasi kemasyarakatan	100%	100%	263,770,000	100%	650,000,000	100%	650,000,000	100%	650,000,000	100%	750,000,000	100%	850,000,000	100%	3,813,770,000
8	01	02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan kelompok yang dibina tentang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	199,520,000	100%	650,000,000	100%	650,000,000	100%	700,000,000	100%	700,000,000	100%	850,000,000	100%	3,749,520,000
8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial terselesaikan	100%	100%	529,599,900	100%	941,751,834	100%	970,664,914	100%	1,200,000,000	100%	1,232,836,897	100%	1,300,000,000	100%	6,174,853,545

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
8	01	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI. SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba. kerukunan umat beragama dan kepercayaan	100%	100%	687,090,000	100%	1,140,000,000	100%	1,140,000,000	100%	1,140,000,000	100%	1,240,000,000	100%	1,301,125,126	100%	6,648,215,126
				SOSIAL																
1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Fasilitasi Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial	80%	80%	3,356,582,630	80%	1,369,694,900	80%	1,383,648,122	80%	1,424,020,150	80%	1,626,820,160	80%	1,626,820,160	80%	10,673,386,122
1	06	03		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	100%	6,228,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	56,228,000
1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan rehabilitasi sosial	35,46%	16%	689,984,500	7.23%	1,730,890,000	7.23%	1,458,344,850	7.23%	1,671,344,850	7.23%	1,733,344,840	7.23%	1,833,344,840	36.15%	9,117,253,880
1	06	05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial	5,57%	5%	1,623,135,620	0.08%	1,842,343,028	0.08%	1,742,343,028	0.08%	1,683,997,000	0.08%	1,589,197,000	0.08%	1,589,197,000	0.40%	10,070,212,676

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	06	06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	441,141,280	100%	1,325,768,000	100%	1,209,864,000	100%	1,088,838,000	100%	1,088,838,000	100%	1,118,838,000	100%	6,273,287,280
1	06	07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan kondisi baik	100%	100%	46,385,880	100%	217,998,972	100%	220,600,000	100%	220,600,000	100%	220,600,000	100%	220,600,000	100%	1,146,784,852
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
				KETENAGAKERJAAN																
2	07	02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan perencanaan ketenagakerjaan	n/a	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	1,500,000,000
2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	100%	100%	544,300,000	100%	3,078,228,191	100%	3,175,800,000	100%	3,175,800,000	100%	4,375,800,000	100%	4,375,800,000	100%	18,725,728,191

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase layanan penempatan tenaga kerja lokal	13.38%	15%	373,963,600	20%	938,370,000	25%	1,210,000,000	30%	1,210,000,000	35%	1,510,000,000	40%	1,510,000,000	40%	6,752,333,600
2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentasi Perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial	71.56%	72.56	447,200,000	74.56	1,024,400,000	75.56	1,241,600,000	76.56	1,416,600,000	78.56	1,862,300,000	79.56	2,324,800,000	80	8,316,900,000
3	32	03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	n/a	10KK	254,674,000	15KK	320,000,000	18KK	345,000,000	25KK	345,000,000	30KK	345,000,000	35KK	345,000,000	133KK	1,954,674,000
				PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
2	08	02		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	presentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	100	100	166,499,850	100	850,000,000	100	947,800,000	100	980,080,000	100	1,130,588,000	100	1,095,146,800	100	5,360,114,650
2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	cakupan home industry perempuan aktif di lokasi P2WKSS	44.59%	45	48,439,700	46	248,000,000	46.5	278,300,000	47	306,130,000	47.5	336,743,000	48	370,417,300	48	1,588,030,000
2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	cakupan OPD yang memiliki Data Pilah Gender dan anak	100	100	0	100	27,500,000	100	30,250,000	100	33,275,000	100	36,602,500	100	40,262,750	100	192,890,250

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	cakupan kasus kekerasan dan TPPO terhadap perempuan yang tertangani sampai selesai	31.07	30	79,533,700	30	212,500,000	30	353,750,000	30	409,125,000	30	449,037,500	30	503,941,250	30	2,007,887,450
2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase kecamatan dan desa layak anak yang aktif	0	0	48,093,000	10	300,000,000	20	350,000,000	30	400,000,000	40	400,000,000	50	500,000,000	50	1,998,093,000
2	08	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	cakupan kasus kekerasan dan TPPO terhadap anak yang tertangani sampai dengan selesai	26.55	20	568,505,000	25	808,563,500	30	908,563,500	35	908,563,500	40	908,563,500	45	1,149,828,179	45	5,252,587,179
				PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
2	14	03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Angka prevalensi kontrasepsi Modern (Modern Contraseptive Prevalensi Rate/m CPR)	76.16	69.16	8,835,963,725	69.66	8,935,963,725	70.16	8,935,963,725	70.66	8,935,963,725	71.16	9,235,963,725	71.66	9,535,963,725	71.66	54,415,782,350

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
2	14	02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	prosentase kecamatan yang menyediakan data mikro keluarga	100	100	1,011,506,000	100	531,506,000	100	430,706,000	100	372,626,000	100	308,738,000	100	238,461,200	100	2,703,543,200
2	14	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Prosentase anggota Poktan tribina . UPPKA dan PPKS aktif ber KB	80	80	1,532,056,000	80	1,604,559,400	80	1,650,015,340	80	1,700,015,340	80	1,802,218,561	80	1,852,440,418	80	10,141,305,059
				PANGAN																
2	09	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	35.00	40.00	500,000,000	80.00	1,745,000,000	85.00	1,745,000,000	90.00	1,745,000,000	95.00	1,800,000,000	100.00	2,121,000,000	100	9,656,000,000
2	09	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	95	95.25	100,070,104	95.35	1,000,000,000	95.4	1,000,000,000	95.45	1,000,000,000	95.5	1,500,000,000	95.55	3,609,465,000	100	8,209,535,104
					Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	88.9	77.5	609,999,900	78	864,000,000	78.5	864,000,000	79	864,000,000	79.5	1,500,000,000	80	2,000,000,000	80	6,701,999,900

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan jumlah desa rentan rawan pangan	5.52%	3.68	20,000,000	3.07	415,750,000	2.45	436,538,000	1.84	458,365,000	1.23	481,290,000	0.61	505,347,000	0.61	2,317,290,000
2	09	05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman pangan	85	90%	70,000,000	92%	326,650,000	94%	342,983,000	95%	360,132,000	95%	378,140,000	95%	397,046,000	95%	1,874,951,000
				PERTANAHAN																
2	10	02		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	100	100	0	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	1,000,000,000
2	10	05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Prosentase Penyelesaian ganti kerugian tanah	100	100	0	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	2,500,000,000
2	10	10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Prosentase Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Garapan	100	100	100,000,000	100	1,596,620,469	100	1,596,620,469	100	2,096,620,469	100	2,096,620,469	100	2,296,620,469	100	9,783,102,345
				LINGKUNGAN HIDUP																
2	11	02		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tingkat ketersedian dokumen lingkungan hidup yang dibuat dan diproses	3 Dok	3 dok	62,920,000	3 dok	600,000,000	3 dok	600,000,000	3 dok	600,000,000	3 dok	1,000,000,000	3 dok	1,000,000,000		3,862,920,000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
2	11	03		Program Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup	Tingkat ketersediaan informasi untuk penghitungan IKA. IKU. dan ITV/L	250 Sampel	250 Sampel	719,988,300	300 Sampel	1,750,807,200	300 Sampel	1,750,807,200	300 Sampel	1,750,807,200	300 Sampel	2,000,000,000	300 Sampel	2,000,000,000		9,972,409,900
2	11	05		Program Pengendalian bahan Berbahaya (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Prosentase penaatan pengelolaan B3 dan limbah B3 pada kegiatan/ usaha	100%	100%	89,878,000	100%	350,000,000	100%	400,000,000	100%	400,000,000	100%	500,000,000	100%	600,000,000		2,339,878,000
2	11	06		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Prosentase penaatan pengelolaan lingkungan kegiatan/usaha	100%	100%	252,396,100	100%	750,000,000	100%	750,000,000	100%	750,000,000	100%	750,000,000	100%	750,000,000		4,002,396,100
2	11	08		Program Peningkatan Pendidikan pelatihan dan penyuluhan Lingkungaan Hidup untuk masyarakat	Tingkat peran serta lembaga kemasyarakatan / pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	189,136,000	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	300,000,000	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	350,000,000	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	375,000,000	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	400,000,000	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	500,000,000		2,114,136,000
2	11	09		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	tingkat kepedulian masyakarat atau kelompok/lembaga masyarakat/	4 Kelompok	4 Kelompok	39,545,000	5 Kelompok	500,000,000	6 Kelompok	500,000,000	7 Kelompok	500,000,000	8 Kelompok	500,000,000	9 Kelompok	500,000,000		2,537,625,000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
					lembaga pendidikan/ dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup															
2	11	10		Program Penanganan pengaduan Lingkungsan Hidup	Prosentase pengaduan lingkungan hidup kewenangan kabupaten yang tertangani	100%	100%	189,009,800	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	2,659,009,800
2	11	04		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Tingkat ketersediaan informasi untuk penghitungan ITV/L	2 Ha	2 Ha	255,034,700	2 Ha	600,000,000	2 Ha	600,000,000	2 Ha	600,000,000	2 Ha	750,000,000	2 Ha	1,000,000,000	10 ha	3,805,034,700
2	11	11		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah terangkut	11.53%	11.99%	10,349,978,150	14.39%	15,820,000,000	16.78%	15,820,000,000	19.18%	10,820,000,000	21.58%	20,820,000,000	23.98%	20,820,000,000	23.98%	94,249,978,150
					Persentase sampah terkurangi	3%	3.02%		3.04%		3.05%		3.07%		3.08%		3.10%		3.10%	
				ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL																
2	12	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Prosentase meningkatnya Kualitas Pelayanaan Penerbitan Dokumen Kependudukan	100	100	119,591,500	100	985,240,000	100	1,000,000,000	100	1,100,000,000	100	1,200,000,000	100	1,200,000,000	100	5,604,831,500

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
2	12	03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prosentase meningkatnya Kualitas Pelayanaan Pencatatan Sipil	100	100	113300000	100	250,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	1,663,300,000
2	12	04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prosentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	100	100	580,682,900	100	815,320,000	100	896,852,000	100	986,537,200	100	1,085,190,920	100	1,193,710,012	100	5,558,293,032
2	12	05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Terkelola dan tersaji nya data kependudukan Buku Profil Perkembangan Kab. Serang	100	100	16,030,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	616,030,000
				PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
2	13	02		PROGRAM PENATAAN DESA	Tingkat tertib penyelenggaraa penataan desa	90%	100%	26,020,000,000	100%	13,120,000,000	100%	13,120,000,000	100%	300,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	53,260,000,000
2	13	03		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Kerjasama antar Desa yang terfasilitasi	50%	100%	20,000,000	100%	150,000,000	100%	200,000,000	100%	250,000,000	100%	300,000,000	100%	350,000,000	100%	1,270,000,000
2	13	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Tingkat tertib administrasi pemerintahan desa	90.00%	100.00%	427,284,067,600	100%	410,396,022,600	100%	436,995,008,752	100%	435,264,285,367	100%	438,598,947,514	100.00%	442,000,302,905	100.00%	2,590,538,634,738
2	13	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	90%	100%	1,199,811,000	100%	1,599,811,000	100%	2,500,000,000	100%	2,500,000,000	100%	2,500,000,000	100%	3,000,000,000	100%	13,299,622,000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
				KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
					Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	**65%**	**65%**		**70%**		**75%**		**80%**		**85%**		**90%**		**90%**	
2	16	02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah melalui Media Informasi	100%	100%	3,575,218,015	100%	3,600,000,000	100%	3,600,000,000	100%	3,759,000,000	100%	3,869,000,000	100%	3,900,000,000	100	22,303,218,015
2	16	03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	40%	40%	1,058,039,800	50%	1,200,000,000	70%	1,200,000,000	80%	1,200,000,000	90%	1,200,000,000	100	1,200,000,000	100%	7,058,039,800
					Persentase Penerapan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah	40%	40%		50%		60%		70%		80%		90%		90%	
				KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH																
2	17	02		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi yang dilayani	100%	100%	40,000,000	100%	145,000,000	100%	145,000,000	100%	145,000,000	100%	145,000,000	100%	145,000,000	100%	765,000,000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
2	17	03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Tingkat pengawasanKoperasi. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	0	0	0	6.11	47,930,000	6.11	47,930,000	6.11	47,930,000	6.11	47,930,000	6.11	47,930,000	30.55	239,650,000
2	17	04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang sehat	16.67%	22.15%	45,000,000	25.68%	205,150,000	28.90%	227,745,000	31.86%	227,745,000	34.57%	242,110,000	37.08%	247,110,000	37.08%	1,194,860,000
2	17	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi terlatih	100	100	234,182,400	100	610,414,800	100	610,414,800	100	610,414,800	100	610,414,800	100	610,414,800	100	3,286,256,400
2	17	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Partisipasi Koperasi Aktif	74.72%	75.33	0	76.18	1,055,405,000	76.97	1,055,405,000	77.72	1,055,405,000	78.42	1,055,405,000	79.07	1,055,405,000	79.07	5,277,025,000
2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Partisipasi Usaha Mikro	3.31%	4	156,121,600	4	1,500,000,000	5	1,500,000,000	6	1,500,000,000	7	1,500,000,000	9	1,500,000,000	9	7,656,121,600
2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang berkembang menjadi Usaha Kecil	15,16	0.01	530,000,000	0.01	3,150,000,000	0.01	3,150,000,000	0.01	3,150,000,000	0.01	3,150,000,000	0.01	3,150,000,000	0.05	16,280,000,000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
				PENANAMAN MODAL																
2	18	02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	NIlai investasi	7.90 Trilyun	5.44 Trilyun	12,000,000	5.60 Trilyun	450,000,000	5.77 Trilyun	550,000,000	5.95 Trilyun	260,000,000	6.12 Trilyun	400,000,000	6.30 Trilyun	350,000,000	6.49 Trilyun	2,022,000,000
2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	100%	100%	97,360,000	100%	200,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	350,000,000	100%	300,000,000	100%	1,547,360,000
2	18	05		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	100%	100%	76,050,000	100%	325,000,000	100%	350,000,000	100%	375,000,000	100%	400,000,000	100%	400,000,000	100%	1,926,050,000
2	18	06		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	372,462,000	100%	350,000,000	100%	300,000,000	100%	350,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	2,372,462,000
2	18	04		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi	100%	100%	510,220,000	100%	500,000,000	100%	450,000,000	100%	500,000,000	100%	525,000,000	100%	600,000,000	100%	3,085,220,000
				KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
2	19	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	96.67%	96.67%	375,000,000	97.50%	375,000,000	97.52%	375,000,000	98.35%	375,000,000	98.36%	375,000,000	99.18%	375,000,000	99.18%	2,250,000,000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
					Persentase Wirausaha Muda	31.38%	32.71%	56,873,000	34.04%	70,350,000	35.37%	90,000,000	36.70%	175,000,000	38.03%	200,000,000	39.36%	225,000,000	39.36%	817,223,000
					Jumlah Pemuda yang Dibina	137 Orang	855 Orang	1,184,313,000	1.730 Orang	1,274,035,000	2.605 Orang	1,375,000,000	3.480 Orang	1,506,800,000	4355 Orang	1,566,000,000	5.230 Orang	1,630,000,000	5.230 Orang	8,536,148,000
2	19	04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Pembinaan peserta didik Pramuka	99.79%	99.79%	375,000,000	99.83%	375,000,000	99.88%	375,000,000	99.92%	375,000,000	99.96%	375,000,000	100%	375,000,000	100%	2,250,000,000
2	19	03		PROGRAM PENG. KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet muda yang dibina	246 Atlet	224 Atlet	599,265,500	704 Atlet	900,000,000	1.494 Atlet	1,425,000,000	1.974 Atlet	1,575,000,000	2.764 Atlet	1,425,000,000	3.244 Atlet	1,575,000,000	3.244 Atlet	7,499,265,500
					Cakupan pembinaan olahraga	90.57%	90.57%	3,262,370,000	92.45%	3,150,000,000	94.34%	3,405,000,000	96.23%	3,450,000,000	98.11%	3,475,000,000	100%	3,500,000,000	100%	20,242,370,000
					Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	1.64%	-	0	12.05%	100,000,000	16.88%	115,000,000	21.70%	200,000,000	26.52%	250,000,000	31.34%	300,000,000	31.34%	965,000,000
				STATISTIK																
2	20	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tingkat ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah	14%	14%	718,527,272	17%	701,000,000	31%	966,750,000	45%	1,075,087,500	55%	1,135,091,875	70%	1,192,346,469	70%	5,788,803,116
				PERSANDIAN																
2	21	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	41%	41%	505,323,000	48%	499,000,000	51%	523,950,000	58%	550,147,500	65%	577,654,875	68%	606,537,619	68%	3.262.612.994

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
				KEBUDAYAAN																
2	22	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan kelompok budaya yang dibina	30,00	30,00	671,415,950	35,00	1,000,000,000	42,50	1,530,000,000	57,50	1,680,000,000	67,50	1,680,000,000	72,50	1,680,000,000	72,50	8,241,415,950
2	22	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan kelompok kesenian yangdibina	30,00	30,00	157,574,000	35,00	1,000,000,000	42,50	1,530,000,000	57,50	1,680,000,000	67,50	1,680,000,000	72,50	1,680,000,000	72,50	7,727,574,000
2	22	04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah di dunia pendidikan. event. dan organisasi kemasyarakatan	0,00	0,00		9,36	150,000,000	12,49	150,000,000	18,73	150,000,000	28,09	150,000,000	31,32	150,000,000	31,32	750,000,000
2	22	05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	25,64	25,64	171,010,000	38,46	300,000,000	51,28	350,000,000	64,10	400,000,000	84,62	450,000,000	100,00	500,000,000	100,00	2,171,010,000
				PERPUSTAKAAN																
2	23	02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase kegiatan Gemar Membaca tingkat daerah yang dilaksanakan	92.06%	100	78,000,000	100	30,000,000	100	55,000,000	100	60,000,000	100	85,000,000	100	130,000,000	100	438,000,000
					Persentase pembinaan perpustakaan Desa	100%	54%	30,000,000	65%	20,000,000	77%	30,000,000	88%	30,000,000	88%	25,000,000	100%	40,000,000	100%	175,000,000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
					Persentase pelayanan Perpustakaan Daerah	58%	67	652,524,000	67	185,000,000	100	137,000,000	100	217,000,000	100	242,800,000	100	257,800,000	100	1,692,124,000
				KEARSIPAN																
2	24	02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat tertib pengelolaan arsip perangkat daerah	69.64%	73%	131,847,600	77%	70,000,000	80%	113,000,000	84%	113,000,000	91%	147,200,000	100%	187,200,000	100%	762,247,600
2	24	03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Prosentase arsip bersejarah yang berhasil ditelusuri	2.56%	7.69%	28,152,400	12.82%	10,000,000	17.95%	35,000,000	23.08%	20,000,000	28.21%	25,000,000	33.33%	25,000,000	33%	143,152,400
				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
				KELAUTAN DAN PERIKANAN																
3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Capaian produksi perikanan tangkap	79.15	81.02	22,395,400	82.4	130,000,000	83.6	136,500,000	84.1	136,500,000	84.7	150,492,000	85.8	158,000,000	85.8	733,887,400
					Cakupan bantuan sarana penangkapan ikan	7.51%	7.51%	562,720,000	7.51%	540,800,000	7.51%	567,840,000	7.51%	567,840,000	7.51%	626,044,000	7.51%	657,346,000	7.51%	3,522,590,000
					Cakupan bina kelompok nelayan	3.95	3.95	27,780,000	15.81	1,715,000,000	17.79	1,715,000,000	19.76	1,715,000,000	21.74	1,985,330,000	23.72	208,500,000	23.72	7,366,610,000
					Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	76.92	76.92	303,495,000	76.92	1,834,025,000	76.92	1,834,025,000	76.92	1,834,025,000	76.92	2,123,114,000	76.92	2,229,200,000	76.92	10,157,884,000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
					Persentase tanda daftar kapal perikanan < 10 GT	6.57	6.57	19,824,400	6.57	50,000,000	6.57	52,500,000	6.57	55,125,000	6.57	57,882,000	6.57	60,775,000	6.57	296,106,400
3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase izin usaha perikanan budidaya	100%	100	0	100	60,000,000	100	63,000,000	100	66,150,000	100	69,458,000	100	72,930,000	100	331,538,000
					Cakupan pembinaan kelompok pembudidaya ikan kecil	5.71	5.71	13,380,000	7.14	598,300,000	7.14	628,215,000	7.14	628,215,000	7.14	692,607,000	7.14	727,238,000	7.14	3,287,955,000
					Persentase tanda daftar pembudidaya ikan kecil	9.46%	18.91	12,300,000	28.37	125,000,000	37.83	131,250,000	47.28	137,813,000	56.74	144,704,000	66.19	151,940,000	56.74	703,007,000
					Cakupan bantuan sarana perikanan budidaya	1.71%	4.57	520,250,000	7.71	3,800,000,000	10.57	3,800,000,000	13.43	3,800,000,000	16.29	3,800,000,000	19.14	3,800,000,000	19.14	19,520,250,000
					Capaian produksi perikanan budidaya	56.35	75.22	44,320,000	80.2	747,000,000	85.7	747,000,000	88.1	747,000,000	90.2	864,745,000	91	907,984,000	91	4,058,049,000
					Capaian produksi garam	-	8.20%	0	22.2	900,000,000	36.2	900,000,000	50.2	900,000,000	64.2	900,000,000	78.2	1,093,950,000	78.2	4,693,950,000
					Capaian produksi benih ikan	58.57	58.57	448,200,000	61.5	522,960,000	64.43	549,108,000	67.36	549,108,000	70.29	605,392,000	73.21	635,662,000	73.21	3,310,430,000
					Cakupan Survailen hama dan penyakit ikan	100%	100%	215,126,700	100%	168,000,000	100%	176,400,000	100%	176,400,000	100%	194,481,000	100%	204,205,050	100%	1,134,612,750

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
3	25	05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya di perairan umum daratan	-	80%	0	80%	98,790,000	80%	103,730,000	80%	103,730,000	80%	114,362,000	80%	120,080,000	80%	540,692,000
3	25	06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase tanda daftar usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Skala Mikro dan Kecil	-	16	0	16	50,000,000	16	52,500,000	16	55,125,000	16	57,882,000	16	60,776,000	16	276,283,000
					Cakupan pembinaan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Skala Mikro dan Kecil	-	20	0	20	100,526,000	20	105,553,000	20	105,553,000	20	116,372,000	20	122,190,000	20	550,194,000
					Capaian produksi pengolahan hasil usaha perikanan	-	94.59	0	94.59	25,635,000	94.59	26,917,000	94.59	26,917,000	94.59	29,676,000	94.59	31,160,000	94.59	140,305,000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
					Capaian angka Konsumsi Ikan daerah	37,21 kg/kapita/ tahun	37.46	0	37.71	67,035,000	37.96	70,387,000	38.21	70,387,000	38.46	77,600,000	38.71	81,482,000	38.71	366,891,000
					Cakupan bantuan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	-	0	0	0	617,680,000	16	617,680,000	16	617,680,000	16	715,000,000	16	750,800,000	16	3,318,840,000
				PERTANIAN																
3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian	50	55	562,324,500	60	1,000,000,000	65	1,000,000,000	70	1,000,000,000	75	1,000,000,000	80	1,000,000,000	80	5,562,324,500
					Pertumbuhan Sumber Daya Genetik (SDG)	0.08	0.13	0	0.16	500,000,000	0.18	500,000,000	0.19	500,000,000	0.21	500,000,000	0.23	500,000,000	0.23	2,500,000,000
					Prosentase Benih / Bibit bersertifikat	5	6	0	7	1,000,000,000	9	1,000,000,000	11	1,000,000,000	12	1,000,000,000	14	1,000,000,000	14	5,000,000,000
3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik (JUT. embung. RPH. dll)	50	55	16,282,374,000	60	10,000,000,000	65	7,500,000,000	67	7,500,000,000	70	10,000,000,000	75	11,000,000,000	75	62,282,374,000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINERT	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	10	13	124,732,504	15	500,000,000	17	500,000,000	20	500,000,000	23	750,000,000	25	750,000,000	25	3,124,732,504
3	27	05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian	35	40	193,030,700	45	1,000,000,000	47	1,000,000,000	50	1,000,000,000	55	1,000,000,000	60	1,000,000,000	60	5,193,030,700
3	27	06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase perizinan usaha pertanian	14	15	0	17	200,000,000	20	300,000,000	23	300,000,000	25	300,000,000	27	350,000,000	27	1,450,000,000
					Prosentase perizinan usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan. Fasilitas Pemeliharaan Hewan. Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan. Rumah Potong Hewan	15	17	0	19	350,000,000	20	450,000,000	22	450,000,000	24	450,000,000	25	500,000,000	25	2,200,000,000
3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok tani	45	50	2,330,663,500	53	2,200,000,000	55	2,200,000,000	57	2,200,000,000	60	2,500,000,000	63	2,700,000,000	63	14,130,663,500

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
				PARIWISATA																
3	26	02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya tarik destinasi pariwisata Kabupaten	0%	0%	0	75.76%	50,000,000	81.82%	70,000,000	87.88%	150,000,000	93.94%	200,000,000	100%	250,000,000	100%	720,000,000
					Persentase Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten	0%	0%	0	20%	200,000,000	40%	350,000,000	60%	120,000,000	80%	500,000,000	100%	600,000,000	100%	1,770,000,000
					Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten	0%	0%	204,664,000	20%	300,000,000	40%	340,000,000	60%	390,000,000	80%	510,000,000	100%	520,000,000	100%	2,264,664,000
					Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	0%	0%	0	16.67%	150,000,000	33.33%	150,000,000	52.78%	120,000,000	75%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	720,000,000
3	26	03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Pemasaran Pariwisata Kabupaten	0%	2.03%	1,114,376,000	21.62%	1,093,000,000	41.22%	1,298,600,000	60.81%	1,535,320,000	80.41%	1,816,384,000	100%	2,171,660,800	100%	9,029,340,800
					Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten	1,374,043	6,553,829	104,548,500	2,003,000	72,000,000	2,403,200	86,400,000	2,903,600	103,680,000	3,504,000	124,416,000	4,304,600	149,299,200	5,105,200	640,343,700
3	26	04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI	Persentase Produk dan atau Karya Ekraf	0%	0%	0	0%	180,430,000	25%	250,000,000	50%	250,000,000	75%	500,000,000	100%	450,000,000	100%	1,630,430,000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
				PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	terdaftar HAKI															
3	26	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkompetensi dasar	0%	0%	195,016,500	8.86%	95,000,000	36.71%	295,000,000	54.43%	195,000,000	82.28%	295,000,000	100%	195,000,000	100%	1,270,016,500
				PERDAGANGAN																
3	30	02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahan yang diterbitkan	95.14%	95	0	95	29,500,000	95	29,500,000	95	29,500,000	95	29,500,000	95	29,500,000	95	147,500,000
3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Omzet Pedagang	2	2	968,136,730	2	1,739,000,000	2	1,739,000,000	2	1,754,000,000	2	2,000,000,000	2	2,100,000,000	10	10,300,136,730
3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100	100	29,125,000	100	210,000,000	100	320,000,000	100	320,000,000	100	280,000,000	100	345,000,000	100	1,504,125,000
3	30	05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor (U$ dalam juta dollar)	1000	500	60,000,000	600	1,000,000,000	700	850,000,000	800	850,000,000	900	850,000,000	1000	850,000,000	1000	4,460,000,000
3	30	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Uji Metrologi Legal	0.9	0.9	190,000,000	1	800,000,000	1.5	850,000,000	2	400,000,000	2.5	450,000,000	3	450,000,000	3	3,140,000,000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
3	30	07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Kegiatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	0	0	0	0	0	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	4	600,000,000
				PERINDUSTRIAN																
3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan industri baru	0.29%	1	73,113,426	1	445,000,000	1	350,000,000	1	305,000,000	1	310,000,000	1	315,000,000	5	1,798,113,426
3	31	03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Prosentase perizinan usaha industri	100	100	21,750,000	100	43,500,000	100	56,000,000	100	56,000,000	100	56,000,000	100	56,000,000	100	289,250,000
3	31	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan layanan sistem informasi industri nasional	98.82	98.82	0	98.83	120,000,000	98.84	120,000,000	98.85	120,000,000	98.86	120,000,000	98.87	120,000,000	98.87	600,000,000
				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
				SEKRETARIAT DAERAH																
4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tingkat fasilitasi dukungan penyelenggaraan program	100	100	14,514,816,400	100	15,323,573,347	100	19,367,845,000	100	19,363,504,594	100	19,391,278,135	100	19,502,462,664	600	107,463,480,139

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
					pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang menjadi tugas Sekretariat Daerah															
4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat fasilitasi dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi tugas Sekretariat Daerah	100	100	42,339,454,446	100	41,949,594,278	100	29,064,560,000	100	29,211,522,121	100	29,253,420,911	100	29,421,152,395	600	201,239,704,151
4	01	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat terfasilitasinya dukungan penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan yang menjadi tugas Sekretariat Daerah	100	100	4,482,054,996	100	4,147,870,562	100	4,852,850,854	100	4,860,060,598	100	4,867,031,500	100	4,894,937,789	600	28,104,806,299
				SEKRETARIAT DPRD																
4	02	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat Layanan dan fasilitasi Fungsi DPRD	100	100	47,357,695,400	100	47,357,695,400	100	47,357,695,400	100	47,357,695,400	100	47,357,695,400	100	47,357,695,400	100	284,146,172,400

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
				PERENCANAAN																
5	01	02		PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase terpenuhinya keselarasan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah yang disampaikan tepat waktu	100	100	2,720,485,367	100	2,597,178,000	100	2,750,000,000	100	3,000,000,000	100	3,200,000,000	100	3,140,949,000	100	17,508,612,367
5	01	03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase tercapainya kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan Pelaksanaan Kegiatan pada perangkat daerah	100	100	3,860,462,150	100	4,000,000,000	100	4,000,000,000	100	4,000,000,000	100	4,000,000,000	100	4,200,000,000	100	24,060,462,150
				KEUANGAN																
5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	9,947,283,417	100%	11,500,000,000	100%	11,500,000,000	100%	11,500,000,000	100%	11,500,000,000	100%	12,800,000,000	100%	68,747,283,417
5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.	Persentase laporan Pengelolaan Aset Daerah.	8	8	1,057,908,000	8	1,800,000,000	8	2,000,000,000	8	2,000,000,000	8	2,000,000,000	8	2,000,000,000	40	10,857,908,000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat ketercapaian target pendapatan asli daerah	92.13%	100%	4,566,127,800	100%	7,075,636,700	100%	7,269,856,300	100%	7,596,175,900	100%	7,768,765,500	100%	7,889,860,100	100%	42,166,422,300
				KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
5	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya sesuai standar	5%	7%	1,470,761,000	10%	3,507,000,000	20%	4,382,316,000	20%	5,446,900,000	20%	5,677,848,000	20%	5,663,480,000	97%	26,148,305,000
5	03	02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tercapainya kepuasan terhadap pelayanan kepegawaian	94,90%	95,00 %	3,288,399,500	95,5%	3,161,144,000	96,00%	3,743,984,000	96,50%	3,554,400,000	97.00%	3,850,952,000	97.50%	3,865,320,000	97,50%	21,464,199,500
				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
5	05	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Prosentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang telah didiseminasikan	100	100	821,347,000	100	903,481,700	100	993,829,870	100	1,093,212,857	100	1,202,534,143	100	1,322,787,557	100	6,337,193,127
					Prosentase dukungan inovasi daerah	100	100	425,946,000	100	530,000,000	100	600,000,000	100	850,000,000	100	850,000,000	100	900,000,000	100	4,155,946,000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
				UNSUR PENGAWASAN																
6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perangkat daerah yang didampingi dalam pelaksanaan program kegiatan	100	100	1,372,866,600	100	3,729,051,857	100	3,965,871,346	100	4,147,432,953	100	4,347,150,722	100	4,566,840,267	100	22,129,213,743
6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat pelaksanaan pengawasan perangkat daerah	100	100	1,866,304,000	100	5,296,504,867	100	5,618,442,307	100	5,865,261,011	100	6,150,255,267	100	6,350,255,267	100	31,147,022,717
				UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	100	100	7,000,000,000	100	18,300,000,000	100	18,300,000,000	100	18,300,000,000	100	18,300,000,000	100	18,300,000,000	100	170,010,803,000
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/ kelurahan	100	100	3,081,722,700	100	3,081,722,700	100	3,081,722,700	100	3,081,722,700	100	3,081,722,700	100	3,081,722,700	100	18,490,336,200
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	100	100	16,993,811,500	100	23,844,577,300	100	23,844,577,300	100	23,844,577,300	100	23,844,577,300	100	23,844,577,300	100	31,452,066,000

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan	100	100	2,473,700,000	100	2,473,700,000	100	2,473,700,000	100	2,473,700,000	100	2,473,700,000	100	2,473,700,000	100	14,842,200,000
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa dibina	100	100	6,450,765,800	100	6,450,765,800	100	6,450,765,800	100	6,450,765,800	100	6,450,765,800	100	6,450,765,800	100	38,704,594,800
				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan penganggaran pelayanan administrasi keuangan. barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah		100	1,330,603,625,039	100	1,381,475,706,592	100	1,395,039,849,169	100	1,400,308,804,111	100	1,408,016,176,987	100	1,413,782,477,267	100	8,328,457,339,263
TOTAL								**3,056,711,791,009**		**2,999,424,274,982**		**3,064,679,872,268**		**3,143,133,547,884**		**3,150,982,575,372**		**3,200,835,608,203**		**18,427,537,289,555**

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

"Bab memuat indikator kinerja pemerintahan daerah selama lima tahun ke depan."

Kerangka Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Serang disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Serang

No	Indikator Kinarja	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Indikator Makro						
1	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**3,41**	**2,97**	**2,42**	**1,78**	**2,72**	**2,56**
2	**Laju Inflasi**	**1,5**	**1,59**	**1,65**	**1,93**	**1,32**	**2,46**
3	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**67,00**	**67,29**	**67,57**	**67,83**	**68,08**	**68,31**
4	**Persentase tingkat Kemiskinan**	**4,50**	**4,22**	**4,18**	**4,10**	**4,08**	**4,04**
5	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**12,00**	**11,89**	**11,55**	**11,22**	**11,00**	**10,88**
	Indikator Tujuan dan Sasaran Daerah						
1	**Angka Rata Rata Lama Sekolah**	7,64	7,79	7,93	8,07	8,22	8,36
2	**Angka Rata Rata Harapan Bersekolah**	12,75	12,94	13,12	13,30	13,48	13,67
	Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan	48,10	48,72	49,31	49,91	50,51	51,11
2.	**Tingkat Warisan Budaya yang Dilestarikan**	41.38%	48.28%	58.62%	79.31%	93.10%	100%
	Cakupan seni budaya dan kearifan lokal skala kabupaten dan nasional	41.38%	48.28%	58.62%	79.31%	93.10%	100%
3.	**Angka Harapan Hidup (AHH)**	64,85	65,06	65,26	65,47	65,68	65,89
	Angka kematian ibu	202	200	194	183	182	180
	Angka kematian bayi	8,27	8,25	8.23	8.21	8.19	8.17
	Angka Prevelensi Stunting	21,1%	18,4%	16%	14%	13,5%	13%
	Persentase fasyankes yg terstandar dan terakreditasi	25	30	35	40	45	50
	Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit	80%	80%	80%	80%	80%	80%

No	Indikator Kinarja	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.	**Indeks Kepuasaan Layanan Infrastruktur**	50%	52,5%	55%	57,5%	60%	62,5%
	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	96,1%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Desa yang telah mendapatkan pelayanan air minum	87,12	87,73	88,34	88,96	89,57	90,18
	Persentase Desa yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestic	71,47	72,09	72,70	73,31	73,93	74,54
	Persentase jumlah bangunan gedung daerah dengan kondisi baik	55	60	65	70	75	80
	Persentase kawasan kumuh	0.2	0.18	0.16	0.14	0.12	0.1
	Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi	35	41.66	48,33	55	61.66	68,33
	Persentase Drainase Kota dengan kondisi baik	51,85%	52,5%	55,56%	58,08%	60,96%	63,89%
	Proporsi Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	96	62.5	64.9	67.3	69.7	72.1
	Tingkat Pemanfaatan Informasi Tata Ruang dalam pembangunan	100	100	100	100	100	100
	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	5	10	20	25	40	100
	Cakupan ketersediaan air baku	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks kualitas Air	49.75	50.25	50.75	51.25	51.75	52.25
	Indeks Kualitas udara	82.5	82.75	83	83.25	83.5	83.75
	Indeks tutupan Vegetasi	69.985	69.99	69.995	70	70.005	70.01
	Persentase Penanganan Sampah	15.03	17.44	19.85	22.27	24.68	27.09
	Persentase Rumah Layak Huni	89.26%	89.88%	90.49%	91.10%	91.72%	92.33%
5	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**	3,41	2,97	2,42	1,78	2,72	2,56
6.	**Inflasi**	1,5	1.23	1.5	1.59	1.65	1.93
7	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	12	11.89	11.55	11.22	11	10.88

No	Indikator Kinarja	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	3.07	2.82	2.84	3.19	2.98	2.96
	Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	2.8	1.99	1.48	1.61	1.97	1.76
	Proporsi peningkatan SHU koperasi	2%	2%	2%	2%	2%	2%
	Pertumbuhan Wirausaha	5	10	10	10	10	10
	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	2.06	1.43	0.70	0.06	1.03	0.77
	Pertumbuhan sektor industri dalam PDRB	3.99	3.58	3.22	2.28	3.27	3.09
	Pertumbuhan Nilai Investasi daerah PMA PMDN	 3% 3%	 3% 3%	 3% 3%	 3% 3%	 3% 3%	 3% 3%
	Kontribusi PAD Pariwisata	17.000.000.000	17.010.000.000	17.020.000.000	17.030.000.000	17.040.000.000	17.050.000.000
	Prosentase Desa Maju dan Mandiri didasarkan dari IDM	15.03	15.95	16.87	17.79	18.71	19.63
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	15	20	25	30	35	40
8	**Persentase Tingkat Kemiskinan**	4.5	4.22	4.18	4.1	4.08	4.04
9	**Indeks Gini Rasio**						
	Indeks Ketahanan Pangan	77.10%	77.15%	77.20%	77.30%	77.40%	77.50%
	Prosentase PMKS yang tertangani	17.38%	3%	3%	3%	3%	3%
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,02	92,06	92,10	92,14	92,18	92,22
	Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking	58	60	65	70	75	80
	Total Fertility Rate	2,29	2,26	2,24	2,21	2,19	2,1
10	**Indeks Reformasi Birokrasi**	B	B	B	BB	BB	BB
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai LPPD	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	A
	Jmlh opd pelayanan melaksanakan Zona inteegritas (ZI) WBBM WBK	1	1	1	1	1	1

No	Indikator Kinarja	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Tingkat Maturitas SPIP	3,11	3,50	3,60	3,70	3,80	4,00
	Tingkat Pertumbuhan PAD	4.07%	1.12%	3.28%	3.33%	3.39%	3.44%
	Nilai konsistensi perencanaan pembangunan daera	100	100	100	100	100	100
	Nilai capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	100	100	100	100	100	100
	Indek Inovasi Daerah	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif
	Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
	Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori baik	94%	95%	93%	96%	97%	97%
	Cakupan standar kompetensi pegawai	94.10%	94.50%	95.00%	95.50%	96.00%	96.00%
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	65%	70%	75%	80%	85%	90%
	Indeks Kematangan Penerapan SPBE	2.98	2.98	2.98	2.99	3	3.01
	Indeks Keamanan informasi (Indeks KAMI)	100	120	140	160	170	175
	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B	B	B	B
	Cakupan kepemilikan dokumen adminduk	83.23	84.8	87.4	89.8	92.2	94.6
	Persentase Masyarakat yang Melakukan Kunjungan Perpustakaan	42.00%	60.00%	70.00%	80.00%	90.00%	100%
	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara digital	44.64%	53.57%	62.50%	71.43%	80.36%	100%
	Cakupan kepemilikan dokumen adminduk	83,23	84,8	87,4	89,8	92,2	94,6
	Indeks Risiko Bencana	203,10	203,05	203,00	202,80	202,50	200,00
	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda	5%	5%	5%	5%	5%	5%
11	**Indeks Kerukunan Umat Beragama**	86.9	87.4	87.95	88.5	89	89.5
	Tingkat kejadian SARA ditengah-tengah masyarakat	0	0	0	0	0	0

Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

KODE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1	**KETAHANAN PANGAN**									
1.1	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	%	35.00	40.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100
1.2	Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	%	95	95.25	95.35	95.4	95.45	95.5	95.55	100
1.3	Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	88.9	77.5	78	78.5	79	79.5	80	80
1.4	Persentase penurunan jumlah desa rentan rawan pangan	%	5.52%	3.68	3.07	2.45	1.84	1.23	0.61	0.61
1.5	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman pangan	%	85	90%	92%	94%	95%	95%	95%	95%

KODE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
B.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
	Pelayanan Urusan Wajib									
	Terkait Pelayanan Dasar									
1.	**PENDIDIKAN**									
1.1	APM SD	%	100,00	100,00	100	100	100	100	100	100
1.2	APM SMP	%	99,45	100,00	100	100	100	100	100	100
1.3	APK PAUD	%	85,28	100,00	87	88,5	90	91,5	93	93
1.4	Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/esetaraan	%	100,00	100,00	100	100	100	100	100	100
1.5	Capaian SPM Bidang Pendidikan	%	83,05	83.10	83.15	83.20	83.25	83.30	83.35	83.35
1.6	Prosentase penerapan muatan lokal di sekolah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.7	Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap rombel	%	78,21	78,21	81,21	84,21	87,21	90,21	93,21	93,21
1.8	Prosentase izin pendidikan dasar.	%	100	100	100	100	100	100	100	100

KODE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat									
2.	**KESEHATAN**									
2.1	Prosentase Pemenuhan 12 indikator SPM Kesehatan	%	100%	100	100	100	100	100	100	100
2.2	Prosentase kepesertaan jaminan kesehatan	%	74%	74	85	90	90	95	98	98
2.3	Prosentase Desa Stop BABS	%	15 %	15	20	25	35	40	50	50
2.4	Prosentase PKM dengan ketersediaan obat esensial, vaksin, alkes	%	100%	100%	100	100	100	100	100	100
2.5	Prosentase Posyandu aktif	%	55 %	55	55	60	65	70	75	75
2.6	Prosentase Kecamatan menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	%	0 %	60	60	70	80	90	100	100
2.7	Prosentase Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	100 %	100	100	100	100	100	100	100

KODE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
2.8	Tingkat Penerimaan Pendapatan Puskesmas	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	%	80.07%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
2.10	Tingkat sarana prasarana RS dalam dalam kondisi baik	%	66%	66%	72%	76%	83%	86%	90%	90%
2.11	Prosentase SDM yang mengikuti Diklat sesuai standar kompetensi	%	20%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%
2.12	Tingkat Penerimaan Pendapatan RS	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									
3.1	Persentase jumlah tenaga terampil konstruksi yang telah bersertifikat (SKT) di Kabupaten Serang	%	16.7	16.7	25	33.33	41.7	50	58.3	58.3
3.2	Cakupan infrastruktur drainase desa kewenangan kabupaten	%		20.24	29.12	36.11	51.53	56.13	65.64	9.43

KODE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
3.3	Cakupan infrastruktur jalan kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.4	Tingkat ketaatan tata ruang dengan rencana tata ruang wilayah	%	83	85	87.5	90	92.5	93	94	94
3.5	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	%	**99.99**	**99.99**	**13.80**	**18.18**	**23.30**	**28.43**	**34.83**	**100**
3.6	Persentase Infrastruktur Air Baku dalam Kondisi Baik	%	39	39	10.2	18.75	30.11	41.47	55	55
4.	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									
4.1	Persentase Rumah Tangga mendapatkan akses air melalui SPAM	%	88.58	89.01	89.53	89.95	90.35	90.73	91.08	91.08
4.2	Persentase Rumah Tangga mendapatkan akses pengelolaan air limbah domestik	%	65.92	67.01	68.62	69.9	71.07	72.18	73.27	73.27
4.3	Persentase Prasarana Permukiman pada kawasan strategis yang tertangani	%			20	30	40	50	60	60

KODE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
4.4	Persentase bangunan gedung yang memiliki IMB	%	15	17	19	21	23	25	27	27
4.5	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang teratur	%	15	17	19	21	23	25	27	27
4.6	Persentase Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh	%	10	10	10	15	20	25	30	30
4.7	Cakupan perbaikan rumah di kawasan kumuh		6.5	6.82	18.18	22.22	28.57	40	66.67	66.67
4.8	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan Relokasi Program Kabupaten/ Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	0
4.9	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang memiliki izin	%		100	100	100	100	100	100	100
4.10	Persentase Peningkatan Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	%	10	10	10	15	20	25	30	30

KODE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
4.11	Persentase Rumah dan PSU Tingkat Kemampuan Kecil yang memiliki sertifikasi dan registrasi	%	10%	10%	10	15	20	25	30	30%
5.	**KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
5.1	Prosentase Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum yang ditangani	%	60%	60%	65%	70%	75%	75%	75%	75%
5.2	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Tingkat pelayanan pencegahan penanggulangan. penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KODE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
5.4	Tingkat pelayanan pencegahan, penanggulangan bencana serta penanganan pasca bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	**SOSIAL**									
6.1	Persentase Fasilitasi Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial	%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
6.2	Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.3	Cakupan rehabilitasi sosial	%	35,46%	16%	7.23%	7.23%	7.23%	7.23%	7.23%	36.15%
6.4	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial	%	5,57%	5%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.40%
6.5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KODE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
6.6	Persentase Taman Makam Pahlawan kondisi baik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.	**KETENAGAKERJAAN**									
1.1	Cakupan perencanaan ketenagakerjaan	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Persentase layanan penempatan tenaga kerja lokal	%	13.38%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	40%
1.4	Prosentasi Perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial	%	71.56%	72.56	74.56	75.56	76.56	78.56	79.56	80
1.5	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	KK	n/a	10KK	15KK	18KK	25KK	30KK	35KK	133KK

KODE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
2.	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
2.1	presentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.2	cakupan home industry perempuan aktif di lokasi P2WKSS	%	44.59%	45	46	46.5	47	47.5	48	48
2.3	cakupan OPD yang memiliki Data Pilah Gender dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.4	cakupan kasus kekerasan dan TPPO terhadap perempuan yang tertangani sampai selesai	%	31.07	30	30	30	30	30	30	30
2.5	Prosentase kecamatan dan desa layak anak yang aktif	%	0	0	10	20	30	40	50	50
2.6	cakupan kasus kekerasan dan TPPO terhadap anak yang tertangani sampai dengan selesai	%	26.55	20	25	30	35	40	45	45

KODE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
3.	**PANGAN**									
3.1	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	%	35.00	40.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100
3.2	Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	%	95	95.25	95.35	95.4	95.45	95.5	95.55	100
3.3	Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	88.9	77.5	78	78.5	79	79.5	80	80
3.4	Persentase penurunan jumlah desa rentan rawan pangan	%	5.52%	3.68	3.07	2.45	1.84	1.23	0.61	0.61
3.5	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman pangan	%	85	90%	92%	94%	95%	95%	95%	95%
4.	**PERTANAHAN**									
4.1	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.2	Prosentase Penyelesaian ganti kerugian tanah	%	100	100	100	100	100	100	100	100

KODE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
4.3	Prosentase Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Garapan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	**LINGKUNGAN HIDUP**									
5.1	Tingkat ketersedian dokumen lingkungan hidup yang dibuat dan diproses	Dok	3 Dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	18 dok
5.2	Tingkat ketersediaan informasi untuk penghitungan IKA. IKU. dan ITV/L	Sampel	250 Sampel	250 Sampel	300 Sampel	300 Sampel	300 Sampel	300 Sampel	300 Sampel	1.750 sampel
5.3	Prosentase penaatan pengelolaan B3 dan limbah B3 pada kegiatan/usaha	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.4	Prosentase penaatan pengelolaan lingkungan kegiatan/usaha	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.5	Tingkat peran serta lembaga kemasyarakatan / pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Lembaga Kemasyarakatan/ Pendidikan	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan

KODE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
5.6	tingkat kepedulian masyakarat atau kelompok/lembaga masyarakat/ lembaga pendidikan/ dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	Kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok	5 Kelompok	6 Kelompok	7 Kelompok	8 Kelompok	9 Kelompok	9 Kelompok
5.7	Prosentase pengaduan lingkungan hidup kewenangan kabupaten yang tertangani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.8	Tingkat ketersediaan informasi untuk penghitungan ITV/L	Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	10 Ha
5.9	Persentase sampah terangkut	%	11.53%	11.99%	14.39%	16.78%	19.18%	21.58%	23.98%	23.98%
	Persentase sampah terkurangi	%	3%	3.02%	3.04%	3.05%	3.07%	3.08%	3.10%	3.10%
6.	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**									
6.1	Prosentase meningkatnya Kualitas Pelayanaan Penerbitan Dokumen Kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

KODE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
6.2	Prosentase meningkatnya Kualitas Pelayanaan Pencatatan Sipil	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.3	Prosentase meningkatnya pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.4	Terkelola dan tersaji nya data kependudukan Buku Profil Perkembangan Kab. Serang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
7.1	Tingkat tertib penyelenggaraa penataan desa	%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.2	Persentase Kerjasama antar Desa yang terfasilitasi	%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.3	Tingkat tertib administrasi pemerintahan desa	%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

KODE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
7.4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									
8.1	Angka prevalensi kontrasepsi Modern (Modern Contraseptive Prevalensi Rate/m CPR)		76.16	69,16	69,66	70,16	70,66	71,16	71,66	71,66
8.2	prosentase kecamatan yang menyediakan data mikro keluarga	%	100	100	100	100	100	100	100	100
8.3	Prosentase anggota Poktan tribina . UPPKA dan PPKS aktif ber KB	%	80	80	80	80	80	80	80	80
9	**PERHUBUNGAN**									
9.1	Persentase layanan angkutan darat	%	13%	13%	13%	13%	14%	14%	14%	14%
9.2	Persentase Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Angkutan Laut	%	0	0%	25%	25%	25%	25%	25%	0.25

KODE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
9.3	Persentase Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang memiliki izin	%	0	0.00%	20%	20%	20%	20%	20%	0.2
9.4	Persentase Prasarana Perkeretaapian Umum yang memiliki izin	%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
10.	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
10.1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	%	65%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
10.2	Cakupan Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah melalui Media Informasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
10.3	Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	%	40%	40%	50%	70%	80%	90%	100	100%
10.4	Persentase Penerapan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah	%	40%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	90%

KODE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
11.	**KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**									
11.1	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi yang dilayani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.2	Tingkat pengawasanKoperasi. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi		0	0	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	#REF!
11.3	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang sehat	%	16.67%	22.15%	25.68%	28.90%	31.86%	34.57%	37.08%	34.57%
11.4	Persentase SDM Koperasi terlatih	%	100	100	100	100	100	100	100	100
11.5	Persentase Partisipasi Koperasi Aktif	%	74.72%	75.33	76.18	76.97	77.72	78.42	79.07	78.42
11.6	Persentase Partisipasi Usaha Mikro	%	3.31%	4	4	5	6	7	9	9
11.7	Persentase Usaha Mikro yang berkembang menjadi Usaha Kecil	%	15,16	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05

KODE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
12.	**PENANAMAN MODAL**									
12.1	NIlai investasi	Trilyun	7.90 Trilyun	5.44 Trilyun	5.60 Trilyun	5.77 Trilyun	5.95 Trilyun	6.12 Trilyun	6.30 Trilyun	6.49 Trilyun
12.2	Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.3	Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.4	Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.5	Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	96.67%	96.67%	97.50%	97.52%	98.35%	98.36%	99.18%	99.18%
13.2	Persentase Wirausaha Muda	%	31.38%	32.71%	34.04%	35.37%	36.70%	38.03%	39.36%	39.36%

KODE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
13.3	Jumlah Pemuda yang Dibina	Orang	137 Orang	855 Orang	1.730 Orang	2.605 Orang	3.480 Orang	4355 Orang	5.230 Orang	5.230 Orang
13.4	Cakupan Pembinaan peserta didik Pramuka	%	99.79%	99.79%	99.83%	99.88%	99.92%	99.96%	100%	100%
13.5	Jumlah atlet muda yang dibina	Atlet	246 Atlet	224 Atlet	704 Atlet	1.494 Atlet	1.974 Atlet	2.764 Atlet	3.244 Atlet	3.244 Atlet
13.6	Cakupan pembinaan olahraga	%	90.57%	90.57%	92.45%	94.34%	96.23%	98.11%	100%	100%
13.7	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	%	1.64%	-	12.05%	16.88%	21.70%	26.52%	31.34%	31.34%
14.	**STATISTIK**									
14.1	Tingkat ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah	%	14%	14%	17%	31%	45%	55%	70%	70%
15.	**PERSANDIAN**									
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	41%	41%	48%	51%	58%	65%	68%	68%

KODE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
16.	**KEBUDAYAAN**									
16.1	Cakupan kelompok budaya yang dibina		30,00	30,00	35,00	42,50	57,50	67,50	72,50	72,50
16.2	Cakupan kelompok kesenian yangdibina		30,00	30,00	35,00	42,50	57,50	67,50	72,50	72,50
16.3	Cakupan pembinaan sejarah di dunia pendidikan. event. dan organisasi kemasyarakatan		0,00	0	9,36	12,49	18,73	28,09	31,32	31,32
16.4	Persentase Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	25,64	25,65	38,46	51,28	64,10	84,62	100,00	100,00
17.	**PERPUSTAKAAN**									
17.1	Persentase kegiatan Gemar Membaca tingkat daerah yang dilaksanakan	%	92.06%	100	100	100	100	100	100	100
17.2	Persentase pembinaan perpustakaan Desa	%	100%	54%	65%	77%	88%	88%	100%	100%
17.3	Persentase pelayanan Perpustakaan Daerah	%	58%	67	67	100	100	100	100	100

KODE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
18.	**KEARSIPAN**									
18.1	Tingkat tertib pengelolaan arsip perangkat daerah	%	69.64%	73%	77%	80%	84%	91%	100%	100%
18.2	Prosentase arsip bersejarah yang berhasil ditelusuri	%	2.56%	7.69%	12.82%	17.95%	23.08%	28.21%	33.33%	33.33%
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
1.	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
1.1	Capaian produksi perikanan tangkap		79.15	81.02	82.4	83.6	84.1	84.7	85.8	85.8
1.2	Cakupan bantuan sarana penangkapan ikan	%	7.51%	7.51%	7.51%	7.51%	7.51%	7.51%	7.51%	7.51%
1.3	Cakupan bina kelompok nelayan		3.95	3.95	15.81	17.79	19.76	21.74	23.72	23.72
1.4	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	%	76.92	76.92	76.92	76.92	76.92	76.92	76.92	76.92
1.5	Persentase tanda daftar kapal perikanan < 10 GT	%	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57
1.6	Persentase izin usaha perikanan budidaya	%	100%	100	100	100	100	100	100	100

KODE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.7	Cakupan pembinaan kelompok pembudidaya ikan kecil		5.71	5.71	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14
1.8	Persentase tanda daftar pembudidaya ikan kecil	%	9.46%	18.91	28.37	37.83	47.28	56.74	66.19	56.74
1.9	Cakupan bantuan sarana perikanan budidaya	%	1.71%	4.57	7.71	10.57	13.43	16.29	19.14	19.14
1.10	Capaian produksi perikanan budidaya		56.35	75.22	80.2	85.7	88.1	90.2	91	91
1.11	Capaian produksi garam		-	8.20%	22.2	36.2	50.2	64.2	78.2	78.2
1.12	Capaian produksi benih ikan		58.57	58.57	61.5	64.43	67.36	70.29	73.21	73.21
1.13	Cakupan Survailen hama dan penyakit ikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.14	Cakupan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya di perairan umum daratan		-	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
1.15	Persentase tanda daftar usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Skala Mikro dan Kecil		-	16	16	16	16	16	16	16

KODE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.16	Cakupan pembinaan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Skala Mikro dan Kecil		-	20	20	20	20	20	20	20
1.17	Capaian produksi pengolahan hasil usaha perikanan		-	94.59	94.59	94.59	94.59	94.59	94.59	94.59
1.18	Capaian angka Konsumsi Ikan daerah	kg/kapita/tahun	37,21 kg/kapita/tahun	37.46	37.71	37.96	38.21	38.46	38.71	38.71
1.19	Cakupan bantuan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		-	0	0	16	16	16	16	16
2.	**PERTANIAN**									
2.1	Persentase kelompok tani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian	%	50	55	60	65	70	75	80	80
2.2	Pertumbuhan Sumber Daya Genetik (SDG)		0.08	0.13	0,16	0,18	0,19	0,21	0,23	0,23
2.3	Prosentase Benih / Bibit bersertifikat	%	5	6	7	9	11	12	14	14

KODE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
2.4	Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik (JUT. embung. RPH. dll)	%	50	55	60	65	67	70	75	75
2.5	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak		10	13	15	17	20	23	25	25
2.6	Cakupan pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian		35	40	45	47	50	55	60	60
2.7	Prosentase perizinan usaha pertanian	%	14	15	17	20	23	25	27	27
2.8	Prosentase perizinan usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan. Fasilitas Pemeliharaan Hewan. Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan. Rumah Potong Hewan	%	15	17	19	20	22	24	25	25
2.9	Cakupan bina kelompok tani		45	50	53	55	57	60	63	63
3.	**PERDAGANGAN**									
3.1	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahan yang diterbitkan	%	95.14%	95	95	95	95	95	95	95

KODE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
3.2	Persentase Peningkatan Omzet Pedagang	%	2	2	2	2	2	2	2	10
3.3	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.4	Nilai ekspor (U$ dalam juta dollar)	Dalam Juta Dollar	1000	500	600	700	800	900	1000	1000
3.5	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Uji Metrologi Legal	%	0.9	0.9	1	1.5	2	2.5	3	2.5
3.6	Persentase Kegiatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	%	0	0	0	1	1	1	1	4
4.	**PERINDUSTRIAN**									
4.1	Pertumbuhan industri baru	%	0.29%	1	1	1	1	1	1	5
4.2	Prosentase perizinan usaha industri	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.3	Cakupan layanan sistem informasi industri nasional		98.82	98,82	98,83	98,84	98,85	98,86	98,87	98,87

KODE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
5	**PARIWISATA**									
5.1	Persentase Daya tarik destinasi pariwisata Kabupaten	%	0%	0%	75.76%	81.82%	87.88%	93.94%	100%	100%
5.2	Persentase Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten	%	0%	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
5.3	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten	%	0%	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
5.4	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	%	0%	0%	16.67%	33.33%	52.78%	75%	100%	100%
5.5	Cakupan Pemasaran Pariwisata Kabupaten	%	0%	2.03%	21.62%	41.22%	60.81%	80.41%	100%	100%
5.6	Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten	Orang	1,374,043	6,553,829	2,003,000	2,403,200	2,903,600	3,504,000	4,304,600	5,105,200
5.7	Persentase Produk dan atau Karya Ekraf terdaftar HAKI	%	0%	0%	0%	25%	50%	75%	100%	100%
5.8	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkompetensi dasar	%	0%	0%	8.86%	36.71%	54.43%	82.28%	100%	100%

KODE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
1.	**SEKRETARIAT DAERAH**									
1.1	Tingkat fasilitasi dukungan penyelenggaraan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang menjadi tugas Sekretariat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Tingkat fasilitasi dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi tugas Sekretariat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.3	Tingkat terfasilitasinya dukungan penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan yang menjadi tugas Sekretariat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100

KODE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
2.	**SEKRETARIAT DPRD**									
2.1	Tingkat Layanan dan fasilitasi Fungsi DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
1.	**PERENCANAAN**									
1.1	Prosentase terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai jadwal perencanaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Prosentase tercapainya keselarasan antara penyusunan dokumen perencanaan daerah dengan Pelaksanaan Kegiatan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100

KODE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
2.	**KEUANGAN**									
2.1	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.2	Persentase laporan Pengelolaan Aset Daerah.	%	8	8	8	8	8	8	8	40
2.3	Tingkat ketercapaian target pendapatan asli daerah	%	92.13%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	**KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**									
3.1	Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya sesuai standar	%	5.00%	7.00%	10%	20%	20%	20%	20%	97%
3.2	Tercapainya kepuasan terhadap pelayanan kepegawaian	%	94,90%	95,00%	95,50%	96,00%	96,50%	97,00%	97,50%	97,50%
3.	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									
3.1	Prosentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang telah didiseminasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

KODE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
3.2	Prosentase dukungan inovasi daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	**UNSUR PENGAWASAN**									
4.1	Persentase perangkat daerah yang didampingi dalam pelaksanaan program kegiatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.2	Tingkat pelaksanaan pengawasan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
5.1	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5.2	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/ kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

KODE	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
5.3	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5.4	Cakupan penyelenggaraan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5.5	Persentase pemerintahan desa dibina	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
6.1	Persentase perencanaan dan penganggaran pelayanan administrasi keuangan. barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB IX PENUTUP

RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026 merupakan dokumen penerjemahan janji kampanye pasangan Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE., M.Ak. dan Drs. H. Pandji Tirtayasa, M.Si. Keduanya secara resmi telah ditetapkan dan dilantik sebagai Bupati Serang dan Wakil Bupati Serang terpilih sesuai hasil Pilkada serentak tahun 2020. Di dalam RPJMD ini berisi penjabaran visi "Terwujudnya Kabupaten Serang yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis", dan enam poin misi, serta program keduanya sebagai pemimpin sah Kabupaten Serang selama periode 2021-2026.

Dokumen RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026 akan menjadi panduan bagi berbagai stakeholders dalam proses pembangunan Kabupaten Serang selama periode lima tahun mendatang. Penyusunan RPJMD Kabupaten Serang ini berpedoman pada RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2006-2026, RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, dan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026.

RPJMD ini merupakan dokumen yang menjadi panduan bagi berbagai stakeholders dalam proses pembangunan Kabupaten Serang selama periode lima tahun (2021–2026) mendatang. Dokumen sembilan bab ini juga merupakan penjabaran tahapan keempat RPJPD Kabupaten Serang 2006–2026 yang pada periode terakhir ini diharapkan mencapai cita-cita 'Serang yang Islami, Maju, Adil, Sejahtera dan Harmonis'.

Pada akhirnya, implementasi RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 ini diharapkan didukung oleh semua komponen mulai dari lingkup pemerintah, anggota legislatif, dunia usaha, akademisi, dan terutama masyarakat Serang yang menjadi subjek sekaligus penerima kebijakan. Berbagai dukungan dari seluruh pihak berlandaskan semboyan 'Sepi Ing Pamrih Rame Ing Gawe' menjadi daya dorong untuk merealisasikan program dan target yang telah tertuang dalam RPJMD ini, dan diharapkan akan memberikan hasil terbaik demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Serang yang telah dirumuskan.